

MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT MADANI



EDISI GABUNGAN

FALSAFAH DASAR PERJUANGAN

DAN

**PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PK
SEJAHTERA**

Disusun oleh:
**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

CETAKAN KE 1 MARET 2008

KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS SYURO PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الحمد لله الحمد لله الذي جماعنا بالعقيدة الواحدة و فى الجماعة الواحدة و فى العوة الواحدة
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و الصلاة و
السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و من واله . عما بعد

Dalam memberikan pengantar bagi Dokumen *Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera* dan *Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT MADANI ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan kita semua pada apa yang telah saya sampaikan pada Sidang Majelis Syuro ke 6 pada tanggal 16 Maret 2007, bahwa untuk meraih kemenangan kita perlu menjaga 5 syarat kemenangan (*istihqaq an-najah*). Ada *khomsah syuruuth istihqaqin najah*, lima persyaratan bagi manusia secara individu, kelompok atau organisasi, termasuk juga kita sebagai Partai Dakwah untuk berhak mendapatkan kemenangan. Karena, kemenangan itu diberikan oleh Allah SWT, datangnya dari Allah SWT, *wa man nashru illaa min 'indillahil 'azizil hakim*. Syarat kemenangan itu adalah:

1. Kita harus memiliki *al-qiyam tastahiqqun najah*, yakni nilai-nilai yang membuat kita berhak meraih kemenangan atau disebut *winning value*.
2. Kedua harus memiliki *al-manhaju tastahiqqun najah*, atau *winning concept*.
3. Ketiga harus memiliki *an-nizham tastahiqqun najah*, atau *winning system*.

4. Keempat harus memiliki *al-jama'atu tastahiqqun najah*, atau *winning team*.
5. Kelima harus memiliki *al-ghoyatu tastahiqqun najah*, atau *winning goal*.

Kalau disingkat, maka syarat-syarat untuk memperoleh kemenangan itu adalah 5-W. Untuk berhak meraih kemenangan, yang datangnya dari Allah SWT, maka kita perlu nilai, konsep, sistem, tim, dan goal yang jelas. Tanpa adanya 5-W ini, atau tidak terpenuhinya syarat-syarat ini, maka ikhtiar kita bagi datangnya kemenangan sangat lemah.

Dalam konteks 5-W ini, maka akan menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera dalam gerakan jama'ah kita.

Ikhwatifillah, *Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan Indonesia. Dengan demikian, platform ini akan menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan akan menjadikan semua aset dakwah PK Sejahtera di semua sektor kehidupan, dapat diberdayakan dan didaya gunakan (*istighlallil amtsal* aset dakwah), bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik menjadi efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen partai, dan masyarakat.

Dengan demikian, platform merupakan titik singgung yang menghubungkan nilai, konsep dan goal sekaligus, artinya platform memuat 3 dari 5-W yang ada, yakni *winning value*, *winning concept* dan *winning goal*. Dengan demikian, dapat difahami kalau posisi platform menjadi sentral dalam 5-W ini.

Kemudian, ikhwatifillah, kalau dilihat posisi platform dalam 7 (tujuh) perkara yang merupakan ikatan dasar PK Sejahtera, yakni: *Wihdat al Aqidah* (kesatuan keyakinan dan keimanan), *Wihdat al Fikrah* (kesatuan ideologis dan pemikiran), *Wihdat al Harakah* (kesatuan pergerakan), *Wihdat al Manhaj* (kesatuan metodologi), *Wihdat al Ghayah* (kesatuan tujuan), *Wihdat al Jamaah* (kesatuan organisasi),

dan *Wihdat al Qiyadah* (kesatuan kepemimpinan), maka dokumen yang termuat dalam buku ini merupakan dokumen penting dan mengikat yang menjadi pedoman kita semua dalam berdakwah dalam konteks Indonesia secara “kedisinian” dan “kekinian”.

Di samping itu, saya seringkali mengingatkan ikhwah semua, bahwa kita harus terus-menerus meningkatkan *hajm tanzhimi* (kapasitas struktural) kita. Kalau kapasitas kita kecil, kontet, apalagi jelek, maka tidak akan dilihat orang. Alhamdulillah, dengan karunia Allah SWT struktur kita berkembang, tumbuh menjadi besar. Pertama-tama atas karunia Allah itu semua terwujud. Kedua karena kerja keras ikhwan dan akhwatifillah semuanya. Namun kapasitas struktur ini harus diikuti, bahkan diantisipasi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan bahkan mendahului kapasitas struktur kita. Ada lima aspek pertumbuhan kapasitas yang mesti mengikuti pertumbuhan struktur dakwah kita, yakni *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kapasitas idealita), *hajm ijtima'i* (kapasitas sosial-kemasyarakatan), *hajm ta'tsiri* (kekuatan pengaruh), *hajm siyasi* (kapasitas politik). Kalau kelima unsur itu kita miliki, maka kita memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan umat dan bangsa. Dengan ini, maka dakwah akan memberikan pengaruh terhadap regulasi-regulasi yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; pengaruh terhadap lahirnya undang-undang; lahirnya peraturan pemerintah baik pusat dan daerah yang mengarah bagi kehidupan bangsa yang adil, sejahtera dan bermatabat yang diridhai Allah SWT. Sebab *hajm tanzhimi* yang besar tanpa diikuti dengan 5 kapasitas ini, maka ia akan menjadi—*na'udzubillah*—tong kosong nyaring bunyinya. Itu pun kalau ada yang memukul. Kalau tidak ada yang memukul, maka ia bisu, senyap.

Karenanya, ikhwatifillah, kita harus berusaha, agar *hajm tanzhimi* terus membesar dan berbobot, karena diikuti dengan tumbuh dan berkembangnya 5 kapasitas di atas. Nah, dalam sudut pandang ini platform adalah wujud penting dari *hajm fikri* kita itu. Platform adalah cara pandang institusi dakwah terhadap negara, pengelolaan negara dan kehidupan bersama. Platform adalah derivasi sekaligus wahana (*vehicle*) dari ideologi partai. Platform secara internal merupakan kristalisasi pemahaman akan arah bagaimana negara dan pengelolaan negara ke depan seharusnya

dilakukan. Dengan demikian, platform tidak lain adalah sekumpulan nilai, harapan dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan platform, masing-masing kader sebagai da'i dapat memahami bagaimana gerak-langkah, sikap dan arah institusi dakwah.

Ikhwatifillah, dengan demikian sebenarnya platform adalah hasil terus tumbuhnya *hajm fikri* kita, dan buah dari upaya menghidupkan potensi pemikiran kita (*ihya thoqoh fikriyyah*). Melalui *iqro* dan interaksi dengan qur'an dan sunnah; dengan ayat-ayat kauniyyah; maupun mengamati pergulatan peradaban (*shira'at al hadariyyah*) yang terus -menerus antara kebudayaan berbasis kebenaran dan kebudayaan berbasis kebathilan; dari hasil pengamatan fenomena sosial-kemasyarakatan-kemanusiaan yang terhampar; dari hasil bacaan atas buku-buku pemikiran ulama yang shaleh, maka tumbuh dan berkembanglah *hajm fikri* kita. Karenanya, jika kita mampu membangun dan memperbaharui potensi pemikiran dan idealita kita ini, agar bukan hanya kokoh, tetapi juga berkembang, maka kita akan sanggup menghadapi tantangan, memberikan solusi, dan harapan. Bukan hanya harapan kepada jama'ah dan umat Islam, tetapi juga kepada bangsa-negara dan kemanusiaan. Maka Islam yang *rahmattan lil 'alamin* akan muncul menjadi payung yang menaungi kemanusiaan.

Itulah urgensi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera dalam konteks Partai Dakwah.

Ikhwatifillah rahimahullah, dalam kesempatan memberikan pengantar ini saya ingin mengutip isi dokumen platform, sebagai ilustrasi dan contoh agar terasakan oleh antum semua betapa pentingnya isi platform ini bagi gerakan dakwah kita.

Misalnya saja mengenai penjelasan tujuan didirikannya PK Sejahtera :

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam AD/ART, adalah "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia". PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa di dalamnya.

...Berdasarkan hal itu, karenanya pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, yang memisahkan agama dari negara secara murni, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia, sebagai bangsa Muslim. Pemikiran yang absurd ini menjadi tidak relevan, karena, Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat religius, bangsa dan negeri Muslim. Indonesia adalah NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Pengertian genuin dari Masyarakat Madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI.

Jadi sangat jelas posisi PK Sejahtera dalam wacana bentuk negara atau hubungan antara agama-negara. Bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistik-obyektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa. Dalam negara dijamin kebebasan pemeluknya untuk beriman secara tauhid, kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara subyektif PK Sejahtera memiliki *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kapasitas idealita), *hajm ijtima'i* (kapasitas sosial-kemasyarakatan), *hajm ta'tsiri* (kekuatan pengaruh), *hajm siyasi* (kapasitas politik), sehingga dakwah mampu secara struktural memberikan pengaruh terhadap regulasi-regulasi yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (melalui *public reason*)

yang mengarah bagi wujudnya kehidupan bangsa yang adil, sejahtera dan bermatabat yang diridhai Allah SWT.

Akhirul kalam, sebagaimana sudah saya tegaskan dalam Sidang Majelis Syuro ke 9 pada tanggal 1 Februari 2008 di Bali, para kader, pengurus, anggota legislatif, calon anggota legislatif dan seluruh unsur PK Sejahtera wajib membaca dan mendalami platform ini. Ini adalah bagian *ihya thoqoh fikriyyah*, agar antum semua dapat memahami bagaimana gerak-langkah, sikap dan arah institusi dakwah kita secara “disini” dan “kini”. *Wallahu ‘alam bishawab*.

Jakarta, Februari 2008/ Safar 1429 H

K.H. Hilmi Aminuddin
Ketua Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera

KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui segala rahasia kehidupan, Yang Maha Mengatur lakon kehidupan yang dipentaskan oleh hamba-hamba-Nya di Bumi yang dihamparkan-Nya, Yang Maha Mencerahkan kalbu manusia, sehingga mereka menjadi khalifah dan hamba-Nya yang saleh, Yang Memutar roda perputaran bumi dan zaman, kebangkitan dan kehancuran bangsa, serta mengantarkan kecemerlangan peradaban manusia atau menghancurkannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Baginda Rasulullah SAW, yang melalui ajarannya muncul manusia-manusia langka pilihan yang menjadi aktor pembangunan umat manusia.

Pada Pemilu 2009 yang akan datang PK Sejahtera telah menetapkan target dan sasaran utamanya yaitu : menjadi 3 besar, memperoleh 20 % kursi DPR dan mendapatkan suara pemilih 24 juta suara. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional tersebut PK Sejahtera harus mampu mendayagunakan (*istighlallil amtsal*) seluruh potensi aset dakwah yang dimilikinya secara modern, efektif dan efisien.

Kami bersyukur kepada Allah SWT karena Dokumen **Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera** (FDP PKS) dan **Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera** (PKP PKS), yang pembuatannya merupakan tugas MPP PK Sejahtera, akhirnya dapat dirampungkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul **MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT MADANI**. Sudah barang tentu ini semua atas pertolongan Allah SWT dan kerja keras Tim Perumus FDP PKS yang dipimpin oleh Ustadz Abu Ridho dan Tim Perumus PKP PKS yang dipimpin oleh Ir. Memed Sosiawan, DR Mulyanto, DR Warsito dan Spto Waluyo, MSc, DR. M. Shohibul Iman, Ir. Untung Wahono, MSi, Drs. Musoli, yang melibatkan unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syariah Pusat, Dewan Pimpinan Pusat, dan Dewan Pakar PK

Sejahtera, bahu-membahu memobilisasi kreativitas konseptual melalui serangkaian diskusi dan workshop. Berbagai seminar dirancang untuk mengayakan dan sekaligus mendalami materi substantif yang disusun.

Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera merupakan pemikiran mendasar (*Al-Fikru al-asasi*), berupa kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Konsep ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan (*road map*) menuju solusi bagi krisis multi dimensi yang sedang terjadi di Indonesia karena konsep ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam Konsep Konsolidasi politik (*Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*) di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan, pertanian, energi, pertambangan dan lain-lain. Format ideologi khas PK Sejahtera yang menjadi rujukan dalam membangun kepemimpinan opini publik (*Opinion Leader*).

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik. Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasi secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam konsep ini, maka tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa ideologi. Manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia, dorongan, pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya. Karenanya, ideologi menyediakan *elan vital*, *etos*, dan bahkan *militansi* perjuangan. Semangat rela berkorban adalah refleksi keyakinan ideologis.

Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara dimensi “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan api semangat rela berkorban. Itulah yang terjadi di awal-awal kemerdekaan atau masa jauh sebelum kemerdekaan di era para pendiri bangsa ini berjuang bahu-membahu merebut kemerdekaan.

Tanpa ideologi manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi dan spirit. Mereka akan teralienasi, kehilangan identitas yang sejati, mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Maka secara kolektif jadilah kita bangsa yang *adem-ayem*, miskin romantika—negara besar namun dipenuhi dengan manusia kerdil yang tidak punya utopi. Bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan mimpi, memokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan cita-cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak terbuang dalam gerak *chaotic* melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus. Artinya kita butuh kehangatan ideologi.

PK Sejahtera, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan *dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam* untuk mencapai *tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat*. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PK Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PK Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.

PK Sejahtera berusaha mewujudkan *masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat*, yang menjadi harapan masyarakat,

bangsa dan negara. Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang kita citakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai **tauhid** sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan **individu-individu** yang bebas dari sikap menzalimi diri sendiri. Berkumpul dalam **keluarga** yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Di antara kaum **laki-laki dan perempuan** terikat dalam relasi yang proporsional saling melengkapi dalam rangka merealisasikan “amanah” penciptaan manusia. Hak-hak **masyarakat** terdistribusi secara proporsional hingga terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani. Manusia Indonesia hidup dalam tatanan **kekuasaan** yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh. Di sana tegak persamaan hak di hadapan **hukum** bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan. Mereka berusaha dalam sistem **ekonomi** egaliter, sebagai cermin dari ekonomi yang berkeadilan, yang memungkinkan perilaku ekonomi yang adil dan memberikan akses yang sama pada seluruh rakyat sehingga kekayaan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang yang memicu jurang kesenjangan. Dimana pemanfaatan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi (**iptek**) secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia Indonesia dan kemandirian bangsa. Warna-warni kehidupan mencerminkan pluralitas **kebudayaan** sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan peradaban. Individu dan masyarakat mendapat **pendidikan** yang integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa.

Masyarakat madani, masyarakat yang religius, masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. Masyarakat yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil dan makmur, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang hidup berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya takwa. Indonesia yang kita citakan adalah kondisi masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Itulah dasar PK Sejahtera secara internal-subyektif dalam menghimpun kader-kadernya dalam barisan yang rapi untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional. Atas dasar itu pula dibangun elan vital, etos, dan bahkan militansi perjuangan para kader, termasuk semangat rela berkorban. Dengan keyakinan, bahwa aktivitas politik bukan sekedar kegiatan profan-duniawi, namun sarat dengan dimensi sakral-religi-usukhrawi yang bernilai ibadah, maka dipercaya, bahwa politik bukanlah alat untuk sekedar mengejar kemajuan material-kekuasaan, tetapi hampa dalam aspek emosional-spiritual, sehingga para kader teralienasi dan kehilangan identitas diri yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, sarana untuk peningkatan kapasitas diri, dan juga sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik, sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama yang sarat dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan. Darah pergerakan itu menjadi mungkin dengan menempatkan Islam secara internal-subyektif sebagai aqidah, asas, dan moralitas perjuangan PK Sejahtera. *Substansi moralitas perjuangan PK Sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan profesional.*

Kebangkitan Islam yang genuin, mendasar, dan menyeluruh adalah proses objektifikasi yang terus berkesinambungan hingga menghasilkan penjabaran yang lebih konkret dalam rumusan-rumusan *ideologi* yang bersumber dari akar ajaran Islam. Sejarah panjang umat Islam dalam berinteraksi dengan realitas, secara obyektif diwujudkan dalam bentuk *grand design*, *platform*, dan rencana aksi yang menyeluruh di berbagai bidang kehidupan. Ideologi-ideologi besar telah lahir dan mati, berbagai rezim politik pun jatuh-bangun, dan sistem sosial-ekonomi bagai terbit dan tenggelam, namun sebagai bangsa besar, Indonesia wajib

menetapkan jalan yang hendak ditempuh. Islam adalah berkah dan rahmat Ilahi di tengah fenomena kebangkrutan ideologi di Barat dan Timur. Inilah jalan keadilan menuju kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia, sekaligus jalan kebebasan bagi seluruh umat manusia di dunia.

Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera, merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan Indonesia. Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan akan menjadikan segenap aset Partai disemua sektor kehidupan, yaitu sektor ketiga, sektor publik dan sektor swasta bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera dalam berbagai bidang kehidupan yang strategis dipandang penting untuk dua sasaran. **Pertama**, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen sekaligus sebagai alat untuk meresonansikan persepsi tentang kehidupan bersama yang diperjuangkan. Sebab platform ini mencerminkan jati diri, isi hati dan kepala PK Sejahtera, sekaligus sebagai navigasi dalam mengelola negara dan komitmen yang akan dikerjakan. Dalam bingkai politik, maka platform adalah proposal yang ditawarkan Partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih untuk mendulang suara secara objektif dan bertanggung jawab. **Kedua**, sasaran yang bersifat internal ke dalam tubuh PK Sejahtera sebagai institusi Dakwah, platform adalah cara pandang institusi dakwah terhadap negara, pengelolaan negara dan kehidupan bersama dalam wilayah NKRI. Platform adalah derivasi sekaligus wahana (*vehicle*) dari ideologi partai. Ini merupakan subyektivitas dakwah, cara pandang dakwah terhadap dunia di sekelilingnya. Platform secara internal merupakan kristalisasi pemahaman akan arah bagaimana negara dan pengelolaan negara ke depan seharusnya dilakukan. Dengan demikian, platform tidak lain adalah sekumpulan nilai, harapan dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dengan itu menumbuhkan pemahaman konseptual

dalam tubuh institusi dakwah itu sendiri. Dengan platform, masing-masing kader sebagai da'i dapat memahami bagaimana gerak-langkah, sikap dan arah institusi dakwah bergulir menembus waktu di dalam ruang publik secara obyektif.

Platform politik ini juga ingin mengaskan kembali karakteristik PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah, yang bukan sekedar bekerja *struggle for power* secara struktural politik setiap 5 tahunan dalam bingkai Pemilu, tetapi juga sebagai sebuah partai yang menggulirkan kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban. Dalam konteks inilah dapat diungkapkan tekad PK Sejahtera sebagai sebuah institusi dakwah yang menggusung prinsip dan komitmen *bersih, peduli dan profesional*. Kami telah menunjukkan dan akan terus menjaga gerakan bersih dan peduli kami baik di lapangan kultural pelayanan masyarakat maupun di dalam aktivitas struktural parlementer. Di lapangan eksekutif di pusat dan daerah, kader-kader PK Sejahtera membuktikan dirinya bukan hanya bersih dan peduli, tetapi juga profesional berkhidmat kepada rakyat dalam rangka mensejahterakan mereka. Ke depan nilai profesionalitas ini akan terus kami tingkatkan bersama eksperimentasi dan pembelajaran di lapangan eksekutif dalam mengelola negara dan pemerintahan. Kami yakin dengan dukungan konstituen yang setia dan umat, PK Sejahtera dapat membuktikan diri dan komitmennya untuk menegakkan *keadilan, kesejahteraan, dan martabat* rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam Platform Kebijakan Pembangunan ini, kami ingin menegaskan karakter pembangunan yang kami yakini, untuk mengatasi kendala pembangunan nasional selama ini, yakni prinsip: *integral, universal dan partisipasi total*. (a) dengan *integral*, program pembangunan di satu sektor tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di sektor lain. Dalam pandangan ini tidak ada ruang bagi *arogansi sektoral* yang menyempitkan pembangunan pada satu sektor saja. Sekaligus ini mensyaratkan *koordinasi* yang harmonis antar sektor pembangunan. (b) Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila berbagai modal dasar yang ada dipandang hanya untuk satu generasi saja. Karenanya perlu dikembangkan pandangan *universal*, yaitu pandangan yang mencakup lintas generasi, lintas teritorial dan lintas kehidupan, yaitu keberadaan akhirat. Dengan pandangan lintas generasi berarti

pembangunan harus dijaga agar tetap dapat berlanjut (*sustainable*) untuk generasi berikutnya. Begitu pula dengan pandangan lintas teritorial (*universal*), maka pembangunan di suatu tempat atau pembangunan wilayah Indonesia tidak dilakukan semena-mena dengan mengabaikan pengaruhnya terhadap tempat dan wilayah lain. (c) PK Sejahtera menilai bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan politis maupun ekonomis akan mengantarkan rakyat dan pengusaha pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencari *win-win solution*. Dengan demikian PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan.

Setelah rampungnya dokumen Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini, maka tugas selanjutnya adalah mengkomunikasikan “cita-cita besar” PK Sejahtera dalam bahasa populer yang mudah dicerna masyarakat. Berbagai media untuk sosialisasi harus dikembangkan, agar pesan yang termuat dalam platform ini dapat difahami dan diserap publik konstituen, sehingga komunikasi sambung-rasa dapat terjalin dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi, kelak manakala Allah SWT mengijinkan, PK Sejahtera dengan komponen bangsa lainnya bersama-sama bahu membahu merealisasikan cita-cita itu dalam bentuk program dan kegiatan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam bingkai pemilu, maka para juru kampanye sebuah partai wajib menguasai betul pesan utama platform yang ingin diperjuangkannya, kemudian mengkomunikasikan semua pesan itu kepada masyarakat konstituen secara baik. Pilihan kata yang tepat, metoda penyampaian yang menarik, dan pemaparan bukti-bukti yang meyakinkan akan mengarahkan pilihan suara konstituen. Itulah cara rasional dan elegan dalam menjaring suara, bukan dengan sogokan politik uang atau intimidasi kekerasan fisik dan psikologis. Selain itu untuk meyakinkan publik perlu dimunculkan tokoh sebagai *ikon* dari masing-masing bidang platform ini.

Inilah kewajiban calon anggota legislatif dan juru kampanye PK Sejahtera di pusat maupun daerah, menyebar-luaskan platform

kebijakan pembangunan PK Sejahtera ke segenap pelosok Tanah Air hingga ke mancanegara. Sekali lagi, harapan kami gunakan “bahasa kaum”, bahasa yang mudah dan akrab di telinga masyarakat, namun tetap cerdas dan visioner. Jangan sampai ada lapisan masyarakat yang tidak mengenal atau memahami apa sesungguhnya yang diperjuangkan PK Sejahtera. Forum dialog warga, debat publik, atau wawancara di media massa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ide platform ini. Pada akhirnya nanti, di masa kampanye resmi menjelang Pemilihan Umum 2009, isi platform telah dipahami dan dijadikan wacana publik yang mencerahkan.

Sudah barang tentu, dokumen Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini masih jauh dari sempurna. Saran kritis dan konstruktif dari para kader, simpatisan serta pembaca sekalian sangat diperlukan dan kami harapkan untuk pengayaan substantif dokumen ini. Penyempurnaan dokumen ini secara berkala akan dilakukan berdasarkan evaluasi program di lapangan atau perkembangan situasi nasional dan internasional.

Akhirul kalam, selamat menyimak, mempelajari dan berjuang bersama rakyat untuk menyelamatkan bangsa ini. Sebagai penutup perkenankan kami atas nama Majelis Pertimbangan Pusat PK Sejahtera menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera, yang telah bersusah-payah mencurahkan perhatian dan tenaga bagi terbitnya dokumen ini. *Jazakumullah khairan katsiira*, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang baik atas jerih-payah antum semua. *Amin, amin ya rabbal ‘alamiin. Hasbunallah wa ni’mal wakil.*

Jakarta, Februari 2008/ Safar 1429 H

Drs. H. Suharna Surapranata, M.T
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
I	PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
	RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1	PENDAHULUAN	21
2	PARADIGMA PK SEJAHTERA	27
	2.1.URGENSI IDEOLOGI	29
	2.2 FALSAFAH DASAR PERJUANGAN PK SEJAHTERA	32
	2.3 HAKIKAT DAKWAH	36
	2.3 . 1 Grand Strategy Dakwah	37
	2.3 . 2 Mobilitas Kader	39
	2.3 . 3 Peluang Mobilitas Vertikal	44
	2.3 . 4 Orbit Dakwah	50
	2.3 5. Mengokohkan Jati Diri dan Citra PK Sejahtera	56
	2.3 .6 Fungsi dan Urgensi Wajihah	58
	2.4 DIALKETIKA ISLAM DAN NEGARA	61
	2.5. KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN	77
3	KONDISI NASIONAL DAN AKAR PERMASALAHAN BANGSA	81
	3.1 BIDANG POLITIK	84
	3.1 .1 Umum	84
	3.1 .2. Masalah Ketatanegaraan	85
	3.1 3. Masalah Politik Nasional	90
	3.1 4. Masalah Kepemimpinan Nasional	102

3.1 5. Masalah Politik Luar Negeri	106
3.1 6. Masalah Penegakan Hukum	107
3.1 7. Masalah Birokrasi	109
3.1 4. Masalah Kewilayahan	117
3.1 4. Masalah Pertahanan dan Keamanan	119
3.2 BIDANG PEREKONOMIAN	123
3.2 .1 Umum	123
3.2 .2. Pertumbuhan Ekonomi	125
3.2 .3. Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran	127
3.2 .4. Masalah Kemiskinan	130
3.2 .5. Masalah Kesenjangan	132
3.2 .6. Masalah Tekanan Globalisasi	134
3.2 .7. Masalah Kerusakan Lingkungan Hidup dan Overeksploitasi SDA	136
3.2 .8. Masalah Sektor Keuangan yang Terpisah dengan Sektor Riil	137
3.3 BIDANG SOSIAL BUDAYA	139
3.3.1. Umum	139
3.3 2. Masalah Identitas	141
Faktor Geografis	142
Faktor Demografis	146
Faktor Historis	152
Faktor Kultural	157
Faktor Agama	163
3.3 3. Masalah Madalitas	167
Madalitas Fisik	167

	Madalitas Intelektual	168
	Madalitas Sosial	169
	Modalitas Politik	170
	Modalitas Kultural	171
	Modalitas Spiritual	172
	3.3 4. Masalah Kebijakan	173
	3.3 5. Masalah Keteladanan	174
	Perilaku Elite	174
	Perilaku Massa	178
4	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	179
	4.1. GLOBAL	180
	4.2. REGIONAL	186
	4.3. NASIONAL	189
	4.4. PELUANG DAN KENDALA	197
5	INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN	203
	5.1. VISI	203
	5.2. MISI	213
6	PLATFORM BIDANG POLITIK	219
	6.1. PENDAHULUAN	220
	6.2. WAWASAN POLITIK	222
	6.3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	226
	6.4. PENEGAKAN HUKUM	229
	6.5. MEMBANGUN HANKAM	231
	6.6. ISU-ISU STRATEGIS SEKTORAL	233
	6.6.1. Politik Nasional	233
	6.6. 2. Kepemimpinan Nasional	235

6.6. 3. Ketatanegaraan	239
6.6. 4. Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi	243
6.6. 5. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM	246
6.6. 6. Pertahanan	249
6.6. 7. Keamanan	252
6.6. 8. Kewilayahan	254
6.6. 9. Politik Luar Negeri	257
6.6. 10. Komunikasi dan Informasi	261
7 PLATFORM BIDANG PEREKONOMIAN	265
7.1. PENDAHULUAN	267
7.2. FILOSOFI EKONOMI EGALITER	270
7.3. VISI, MISI, DAN STRATEGI	272
7.4. LANGKAH UTAMA PERBAIKAN	273
7.4.1 Melipatgandakan Pendapatan Petani dan Nelayan	276
7.4.2 Mendongkrak Daya Saing Industri Manufaktur Dan Jasa	280
7.4.3 Membangun Sektor-Sektor Yang Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru	290
7.5. ISU-ISU STRATEGIS SEKTORAL	293
7.5. 1. Menegakkan Reformasi Ekonomi	293
7.5. 2 Kerangka Ekonomi Makro	295
7.5. 3. Pengentasan Kemiskinan	297
7.5. 4. Investasi dan Infrastruktur	303
7.5. 5. Perbankan dan Finansial	304
7.5. 6. Ekonomi Syariah	308
7.5. 7. Industri, Iptek, BUMN, dan Perdagangan	310

7.5. 8. Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan	313
7.5. 9. Energi, Pertambangan, dan Pengelolaam SDA	317
7.5. 10. Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi	319
7.5. 11. Ketenagakerjaan, SDM, dan Penciptaan lapangan kerja	321
7.5. 12. Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, dan Pembangunan REGIONAL	325
7.5. 13. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	327
7.5. 14. Perjuangan Petani	329
7.5. 15. Perjuangan Buruh	331
7.5. 16. Perjuangan Nelayan	334
7.5. 17. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	336
8 PLATFORM BIDANG SOSIAL BUDAYA	339
8.1 PENDAHULUAN	340
8.2 MISI DAN STRATEGI	342
8.3 LANGKAH UTAMA	346
8.4 LANGKAH PENDUKUNG	350
8.5 FUNDAMENTAL SOSIAL-BUDAYA	353
8.6 ISU-ISU STRATEGIS SEKTORAL	354
8.6. 1 . Pendidikan Nasional	354
8.6. .2. Pembangunan Kesehatan Nasional	360
8.6. 3. Seni, Budaya dan Pariwisata	363
8.6.4.Pemberdayaan Masyarakat	370
8.6.5.Kepeloporan Pemuda	373
8.6.6. Olah Raga	375

	8.6.7. Perempuan Indonesia	377
	8.6.8. Pembinaan Keluarga	381
	8.6.9. Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama	384
II	FALSAFAH DASAR PERJUANGAN	
1	MUKADIMAH	395
2	ISLAM	403
3	Keadilan	413
4	TEOLOGI	433
5	INDIVIDU	445
6	KELUARGA	459
7	SOSIAL KEMASYARAKATAN	469
8	POLITIK	483
9	EKONOMI	505
10	HUKUM	519
11	KEBUDAYAAN	531
12	PENDIDIKAN	545
13	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	557
14	GENDER	565
15	KESEJAHTERAAN	573
16	KHATIMAH	583
III	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	587

PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN



TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI
YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT

Disusun oleh:
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

RINGKASAN EKSEKUTIF

PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARTAI Keadilan Sejahtera

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah :

Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan—baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-kemasyarakatan—ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*tafrith* dan *ifrath*).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang

memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).

Bermartabat secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas dan kreativitas.

Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah

yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
3. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung

pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkeaktivitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewedahi dan membantu proses pembangunan yang kontinyu.

PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab PK Sejahtera dalam perbaikan kehidupan bangsa dan negara dan sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader sekaligus komitmen politik PK Sejahtera.

A. BIDANG POLITIK

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni *Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah*.

Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang bebas agama berdasarkan sekulerisme, yang memisahkan agama dari negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia. Pemikiran yang itu tidak relevan, karena, Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat religius, bangsa dan negeri mayoritas Muslim. Indonesia adalah *NKRI yang Berketuhanan yang Mahaesa*.

Kedua berkaitan dengan dinamika politik nasional, PK Sejahtera mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial. Dengan demikian muncul *stabilitas politik* yang diakibatkan oleh kedewasaan elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta tingkat pendidikan politik masyarakat yang memadai. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan berinvestasi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terkait (*coupling*) dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik, dan etno-nasionalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan sikap tegas dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural secara terinci.

Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan praktek "Demokrasi Parlemen Multi Partai" memperlihatkan pergerakan bandul sejarah dari sistem liberal-

otoriter-liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial dan stabil. Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, bercermin dari pengalaman sejarah nasional, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa sistem multipartai sederhana tampak lebih mungkin dikembangkan. Karenanya, penyederhanaan jumlah partai peserta Pemilu secara bertahap dengan penerapan "batas ambang" adalah langkah yang rasional dan obyektif.

Indonesia yang bersifat multi etnik dan agama dan masyarakatnya berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dapat direkat dalam sistem politik nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang muncul untuk menyuarakan keadilan. Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, mampu menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

Keempat, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dengan wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke; dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara; serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali Indonesia demikian luas. Di sisi lain, pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional menuntut pementapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat ketidakadilan global yang melekat di dalamnya, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil, mantap namun dinamis. *PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat.* Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, proteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta *otonomi daerah*, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan peningkatan kapasitas. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan virus korupsi, kolusi dan nepotisme kepada oknum-oknum daerah yang menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.

Keenam, berkaitan dengan birokrasi, PK Sejahtera berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tatakelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. *Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional* merupakan cermin akan “tubuh” bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara. Tata pemerintahan yang baik, kami yakini menjadi prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang *bersih-peduli-profesional* harus menyatu dalam tubuh pengelolaan birokrasi, yakni: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, serta mendorong partisipasi publik.

Ketujuh, PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi *penegakan hukum* harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “*hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor*”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Untuk

itu, *bukti* dan *contoh* dari para kader PK Sejahtera di lapangan legislatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

PK Sejahtera meyakini, bahwa ***Pertama*** kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Mengingat penduduk miskin terutama adalah para petani dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan pada sektor pertanian merupakan paradoks, mengingat potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sangat besar. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian.

Kedua, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta tertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan terhadap gejolak sosial. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan hal ini mengakibatkan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitas pembangunan sektoral. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi, apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain dalam kerangka kerja integratif. Keterkaitan, baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor, terjadi dalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, dan menghasilkan pemerataan pendapatan.

Ketiga, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum kita menyadari, bahwa hakikat persaingan di era global ini sarat dengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasi berkaitan dengan produksi, tetapi juga perilaku pasar di tingkat global. PK Sejahtera berkeyakinan

bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi turut menentukan buruknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (*rent seeking*) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera meyakini bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil.

Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upaya untuk mereduksi kerusakan alam hanya bisa direalisasikan apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input

SDA. Proses teknologi yang bersih dan hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.

Keenam, PK Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. PK Sejahtera berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (*backtracking*) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK Sejahtera berpendapat, bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan Bergeraknya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan analisis permasalahan ekonomi nasional yg ada maka PK Sejahtera menetapkan platform perekonomiannya di atas landasan (filosofi) Ekonomi Egaliter dengan peran eksistensial (misi) untuk 1) mengentaskan kemiskinan, 2) mengurangi pengangguran, dan 3) meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Guna mencapai misi itu ditetapkan Strategi berupa 1) pemerataan pendapatan, 2) pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan 3) pembangunan berkesinambungan. Selanjutnya strategi ini dijabarkan ke dalam langkah-langkah utama dan langkah-langkah pendukung. Langkah-langkah utama itu adalah 1) melipatgandakan pendapatan petani dan nelayan, 2) meningkatkan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi, dan 3) membangun sektor-sektor yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru berbasis resources dan knowledge.

PK Sejahtera memandang bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (*equity*) adalah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Masalah pengentasan kemiskinan sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu sektor ini menjadi prioritas utama platform pembangunan ekonomi PK Sejahtera dengan *langkah utama pertama*, yaitu melipatgandakan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Langkah ini dilaksanakan melalui program utama modernisasi sektor pertanian dan kelautan, serta relokasi hingga separoh penduduk tani ke sektor industri dan jasa berbasis agro melalui pemberdayaan wirausaha dan program *outsourcing bottom of pyramid*.

Langkah utama kedua adalah untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan (*growth*) ekonomi nasional dengan titik berat pada koordinasi lintas sektor lintas wilayah dengan sasaran untuk meningkatkan efek pengganda sektor/wilayah yang kaya sumber daya alam terhadap sektor/wilayah lain melalui upaya peningkatan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri dengan mengandalkan SDM yang berkualitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai. Dengan koordinasi lintas sektoral dan wilayah yang baik diharapkan bisa tercapai pemerataan (*equity*) dan pertumbuhan (*growth*) secara bersamaan. Skema insentif/disinsentif diterapkan untuk merubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu tergantung pada luar menuju pada pola rantai pemasok yang kuat di dalam negeri dengan mengoptimalkan peran pemasok komponen dan litbang/universitas dalam negeri untuk mencapai tingkat kemandirian bangsa. Insentif utama diberikan untuk mendorong terbangunnya industri pemasok komponen dalam negeri yang kuat dan peran lembaga litbang/universitas sebagai pemasok teknologi dalam negeri yang optimal. Disinsentif terutama diterapkan pada impor barang jadi dan barang setengah jadi yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Langkah utama ketiga adalah membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar. Subsektor kelautan, peternakan,

perkebunan dan kehutanan adalah sektor-sektor yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk digali untuk membangun industri berbasis sumber daya alam dengan nilai tambah dan daya saing tinggi. Di samping itu di antara penduduk Indonesia yang demikian besar terdapat SDM yang berkualitas sangat tinggi dengan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang tinggi yang mampu bersaing di bidang-bidang yang paling *frontier* di dunia yang bisa diandalkan untuk membangun sektor ekonomi berbasis *knowledge*. Bidang-bidang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam kategori ini adalah sektor bioenergi, farmasi, bioteknologi, telematika, peralatan kedokteran dan instrumentasi. Diharapkan bidang-bidang ini akan bisa mengangkat martabat bangsa dan juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kunci keberhasilan ketiga langkah tersebut di atas terletak pada kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.

C. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama. Karenanya misi yang diemban PK Sejarah dalam bidang sosial-budaya adalah “Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat Martabat Bangsa”. Dalam bahasa yang lebih gamblang dapat diterjemahkan sebagai “Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya”, sebab kita memandang kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa.

Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan itu, maka langkah utama PK Sejahtera adalah:

pertama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga acap terbongkar adanya mafia dan spekulasi barang yang mengontrol harga di pasar. PK Sejahtera menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulasi yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulasi.

Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan diupayakan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9 – 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.

Ketiga, Terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt. Kesehatan paripurna dengan visi sehat badan, mental spiritual dan sosial yang dimulai dengan sehat individu, sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. Dengan demikian kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar itu, maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upaya mengimplementasikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan mengembangkan sistem pendukungnya secara berkualitas, antara lain: peningkatan kuota anggaran kesehatan, perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan peranserta masyarakat, peningkatan sumberdaya

kesehatan profesional yang berakhlakulkarimah, perbaikan sistem manajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta kefarmasian kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi masyarakat, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan kesehatan yang berkeadilan

Keempat, penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (*character building*) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (*mental model*) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditanam. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.

Kelima, gerakan kebudayaan yang progresif. PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern.

D. ISU - ISU STRATEGIS SEKTORAL:

No.	Bidang Politik	Ringkasan Platform
1.	Politik Nasional	Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
2.	Kepemimpinan Nasional	Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional).
3.	Ketatanegaraan	Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil.
4.	Reformasi Birokrasi	Memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien
5.	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM	Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
6.	Pertahanan	Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru.
7.	Keamanan	Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan polisi selaku aparat pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
8.	Kewilayahan	Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat

RINGKASAN EKSEKUTIF

		keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.
9.	Politik Luar Negeri	Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.
10.	Komunikasi dan Informasi	Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

No.	Bidang Ekonomi	Ringkasan Platform
1.	Reformasi Ekonomi	Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rente ekonomi.
2.	Kerangka Ekonomi Makro	Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
3.	Pengentasan Kemiskinan	Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional.
4.	Investasi Dan Infrastruktur	Investasi dan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi tanpa mengabaikan strategi industrialisasi nasional dengan memantapkan kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel harus dibangun.

RINGKASAN EKSEKUTIF

5.	Perbankan Dan Finansial	Membangun sektor perbankan dan finansial agar memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional dengan tetap menegakkan aspek keadilan dan mengedepankan pendekatan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan perbankan.
6.	Ekonomi Syariah	Ekonomi Syariah memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh sebagai bagian integral dari sistem fiskal nasional.
7.	Industri, Iptek, BUMN, dan Perdagangan	Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan moderen untuk mencapai kemandirian bangsa melalui industri berbasis hemat SDA, SDM unggul, kebijakan transfer teknologi, dan pengembangan riset.
8.	Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	Pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri merupakan sektor ekonomi fundamental yang menjadi tulang punggung bangsa untuk menopang pembangunan di berbagai sektor yang lain.
9.	Energi, Pertambangan Dan SDA	Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan penggunaan sumber daya energi, intensifikasi pengelolaan sumber daya energi, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan
10	Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi sebagai wujud perhatian dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga.
11	Ketenagakerjaan, SDM dan penciptaan lapangan perja	Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi buruh dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

		bukan hanya mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh
12	Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, dan Pembangunan Regional	Desain otonomi dan pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dengan membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan antar daerah.
13	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan; melalui pengembangan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.
14	Perjuangan Petani	Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas dengan cara memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.
15	Perjuangan Buruh	Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka dengan membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.
16	Perjuangan Nelayan	Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas melalui pengembangan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.
17	Pengelolaan dan Pelestarian	Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan

RINGKASAN EKSEKUTIF

	Lingkungan Hidup	meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional dengan tujuan menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.
--	------------------	--

No.	Bidang Sosial-Budaya	Ringkasan Platform
1.	Pendidikan Nasional	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.
2.	Pembangunan Kesehatan Nasional	Mewujudkan sehat paripurna untuk semua dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.
3.	Seni, Budaya Dan Parawisata	Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Mengembangkan pariwisata yang bersifat etis, religius, dan inovatif. Pariwisata menjadi salah satu aktivitas dan sumber devisa alternatif. Manusia yang berwisata berarti masih dapat menunaikan hak raganya untuk dapat merasakan nikmatnya istirahat dan berinteraksi dengan keindahan alam dan Sang Pencipta
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
5.	Kepeloporan Pemuda	Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya, dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

		mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa.
6.	Pembinaan Olahraga	Membangun manusia Indonesia yang kuat jasmani dan menumbuhkan karakter kepemimpinan, kerja keras, disiplin, kerja sama, sportif melalui aktivitas olahraga.
7.	Perempuan Indonesia	Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui pemantapan peran di sektor domestik dan publik.
8.	Pembinaan Keluarga	Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.
9.	Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama	Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya dan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

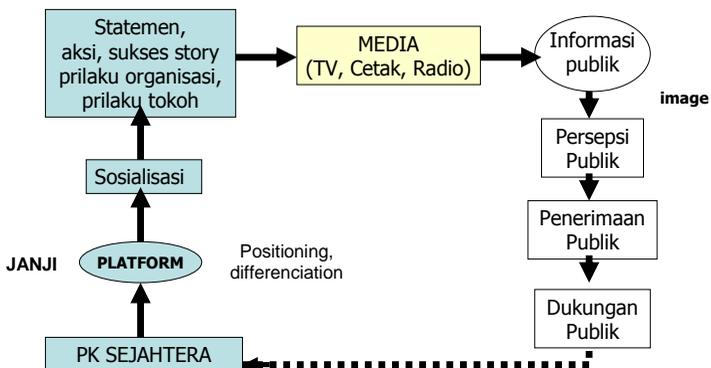
Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

Wujud dari rasa tanggung jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicita-citakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader sekaligus komitmen politik PK Sejahtera

Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan bangsa. Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai dan akan menjadikan segenap aset partai di semua sektor kehidupan –yaitu sektor publik, sektor swasta dan sektor ketiga – bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta secara langsung bisa dirasakan oleh konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Platform partai dalam berbagai bidang kehidupan yang strategis dipandang penting untuk meraih dua sasaran. **Pertama**, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen sekaligus sebagai alat untuk meresonansikan persepsi tentang kehidupan bersama yang diperjuangkan. Bagi masyarakat yang skeptis, platform tak ubahnya iklan yang penuh basa-basi. Namun, bagi pihak yang rasional, platform adalah alat ukur untuk menakar kesamaan kepentingan di antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Platform mencerminkan jati diri partai politik yang sebenarnya, isi hati dan kepala, serta komitmen apa yang akan dikerjakan.

Dalam bingkai politik, maka platform adalah proposal pengelolaan negara yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih dalam rangka menarik perhatian untuk mendulang suara secara obyektif dan bertanggung-jawab. Karenanya platform juga merupakan sikap sekaligus janji politik kepada publik, yang bila tidak dipenuhi atau tidak konsisten dijalani akan mendapat ganjaran negatif, yakni tidak dipilih kembali atau tidak dipercaya mereka (Gambar 1-1).



Gambar 1-1. Platform bagi partai politik dalam pemilu

Dalam bingkai pemilu, maka para juru kampanye sebuah partai wajib menguasai betul pesan utama platform yang ingin diperjuangkannya, kemudian mengkomunikasikan semua pesan itu kepada masyarakat konstituen secara baik. Pilihan kata yang tepat, metoda penyampaian yang menarik, dan pemaparan bukti-bukti yang meyakinkan akan mengarahkan pilihan suara konstituen. Itulah cara rasional dan elegan dalam menjangkau suara, bukan dengan sogokan politik uang atau intimidasi kekerasan fisik dan psikologis.

Dengan modal platform, mekanisme kontrol antara pemilih, partai politik dan lembaga kekuasaan mudah dijalankan. Dan, proses politik nasional berkembang menjadi lebih rasional secara bertahap. Prosedur dan hasil demokrasi dapat lebih dipertanggungjawabkan, bukan “*membeli kucing dalam karung*”. Dalam bingkai eksternal inilah sasaran pertama platform ditujukan.

Kedua, sasaran yang bersifat internal ke dalam tubuh PK Sejahtera sebagai institusi dakwah, platform adalah cara pandang institusi dakwah terhadap negara, pengelolaan negara dan kehidupan bersama dalam wilayah NKRI. Platform adalah derivasi sekaligus wahana (*vehicle*) dari ideologi partai. Ini merupakan subyektivitas dakwah, cara pandang dakwah terhadap dunia di sekelilingnya. Platform secara internal merupakan kristalisasi pemahaman akan arah bagaimana negara dan pengelolaan negara ke depan seharusnya dilakukan. Dengan demikian, platform tidak lain adalah sekumpulan nilai, harapan dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dengan itu menumbuhkan pemahaman konseptual dalam tubuh institusi dakwah itu sendiri. Dengan platform, setiap kader dakwah memahami bagaimana gerak-langkah, sikap dan arah institusi dakwah bergulir menembus waktu di dalam ruang publik secara obyektif.

Untuk mencapai dua sasaran di atas, maka platform harus ditulis secara jelas, lugas dan tuntas sebagai sebuah visi dan proposal PK Sejahtera bagi pengelolaan negara. Selain itu, ia mestilah

dirumuskan sedemikian rupa sehingga tampak jelas *positioning* dan *differentiation* dari PK Sejahtera dibanding partai politik lainnya.

Ketika platform dirumuskan dalam bingkai di atas, maka akan muncul koherensi dan sifat rasionalitasnya sebagai sebuah konsep yang akan ditawarkan. Namun bagi publik, kalau hanya sekedar konsep belum tentu akan menarik hati. Harus ada bukti komitmen partai politik, bahwa mereka benar-benar dan secara sungguh-sungguh akan menjalankan konsep politik yang telah dirumuskan. Artinya, perlu diungkap pula keberhasilan-keberhasilan atau langkah-langkah nyata yang menjadi *small success story* dari partai politik yang bersangkutan yang menunjukkan garis masa lalu yang akan terus bersambung ke masa depan. Selain itu untuk meyakinkan publik perlu dimunculkan tokoh sebagai *ikon* dari masing-masing bidang platform.

Untuk merealisasikan tugas berat ini, unsur MPP, DSP, DPP dan Dewan Pakar PK Sejahtera bahu-membahu memobilisasi kreativitas konseptual melalui serangkaian diskusi dan workshop. Berbagai seminar pun dirancang untuk mengayakan dan sekaligus mendalami substansi platform yang disusun. Dengan mengikuti alur berfikir sistemik, Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dirumuskan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para kader dakwah PK Sejahtera dalam menjelaskan kepada publik dan konstituen mengenai visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan bangsa. Tujuannya agar publik dan konstituen menjadi jelas akan visi dan konsepsi PK Sejahtera dalam pembangunan bangsa ke depan. Sebab dokumen ini mencerminkan jati diri, isi hati, serta komitmen PK Sejahtera dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Dengan penulisan dokumen ini diharapkan juga dapat memudahkan proses bagi terjadinya kesamaan pandangan di antara kader PK Sejahtera mengenai cita-

cita, harapan dan konsepsi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjadi jalan perjuangan PK Sejahtera.

1.3 SISTIMATIKA PENULISAN

Platform disusun berdasarkan pada inventarisasi dan analisis atas akar masalah kehidupan berbangsa dan bernegara serta kondisi kehidupan berdakwah saat ini. Kemudian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, dianalisis lingkungan strategis yang mempengaruhi dinamika pembangunan di Indonesia, yang dibingkai dengan paradigma sistem perundang-undangan RI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strategis dan Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera. Berdasarkan sistem berpikir ini, Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera untuk tiga kluster bidang utama (politik, perekonomian dan sosial-budaya) dan 36 isu penting pembangunan nasional dikembangkan.

Sistimatika penulisan dokumen ini adalah Bab 1 berisi Pendahuluan, yang dilanjutkan dengan Bab 2 berisi paradigma atau landasan berpikir kebijakan pembangunan PK Sejahtera, dimana dokumen ini berlandaskan pada paradigma nasional dan peraturan perundangan yang berlaku, serta secara khusus didasarkan pada AD/ART, Renstra serta Falsafah Dasar Perjuangan Partai. Pada Bab 3 dipaparkan kondisi nasional dan akar permasalahan bangsa dalam tiga bidang kehidupan besar, yakni bidang politik, perekonomian dan sosial-budaya. Bab 4 berisi analisis terhadap lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional serta analisis terhadap peluang dan kendala yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan PK Sejahtera. Bab 5 berisi visi pembangunan PK Sejahtera. Pada Bab 6, 7 dan 8 dijabarkan platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera dalam tiga bidang besar.

BAB 2

PARADIGMA

PARTAI Keadilan Sejahtera

Terminologi yang muncul di tengah kehidupan moderen untuk menggambarkan aktivitas perubahan sosial terencana adalah pembangunan. Sejak akhir tahun lima puluhan dan awal tahun enam puluhan, pembangunan disamakan artinya dengan kemajuan dan modernisasi. Menurut konsep ini, perbaikan lingkungan fisik atau kemajuan material merupakan fokus dari berbagai aktivitas pembangunan. Negara sedang berkembang atau negara terbelakang diartikan sebagai negara yang dalam bidang industri, ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan sedang berusaha untuk maju meniru model negara maju di Barat.

Implementasi konsep pembangunan semacam itu akan menihilkan perlindungan terhadap lima aspek utama kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas konsep pembangunan yang akan diterapkan. Urbanisasi dan industrialisasi melahirkan masalah kebodohan, kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan rasa tidak tenteram. Berbagai analisis mutakhir atas dampak ideologi *developmentalisme* Barat memperlihatkan suatu simpulan, bahwa pembangunan telah menyeret manusia kepada enam ancaman serius: industri yang tak terkendali; mengeringnya sumber-sumber alam (seperti energi, hutan, pangan dan air); tekanan per kapita yang telah melampaui titik kritis atas tanah dan lingkungan; limbah

industri dan rumah tangga yang terus bertambah; perlombaan senjata nuklir, kimia dan biologi; dan pertumbuhan serta penyebaran penduduk dunia secara tidak terkendali. Dalam semua itu manusia lebih diposisikan sebagai alat pembangunan.

Bangsa Indonesia harus segera merumuskan ulang paradigma pembangunannya dengan menyaring konsep yang datang dari luar secara kritis dan tepat, dan berani mengungkapkan gagasan-gagasan orisinalnya. Penyusunan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera melandaskan diri pada paradigma nasional (konsensus nasional), peraturan perundangan yang berlaku, AD/ART, Renstra, serta Falsafah Dasar Perjuangan Partai.

Secara obyektif dalam bingkai negara, maka Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini didasarkan pada paradigma dan konsensus nasional. Pancasila sebagai Dasar Negara secara konsepsional mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (*tauhid*), Demokrasi (*syura*), Hak Asasi Manusia (*maqashid syari'ah*), Pluralitas Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil kehidupan bersama; serta nilai-nilai dalam UUD digunakan sebagai landasan konstitusional Platform Kebijakan Pembangunan ini.

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera pasal 5, yaitu:

- (1) *Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan*
- (2) *Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa. Berdasarkan atas pemahaman tersebut, maka butir-

butir pemikiran dalam Platform Kebijakan Pembangunan ini dirumuskan.

Renstra PK Sejahtera 2005-2010 menjadi landasan operasional Platform Kebijakan Pembangunan dalam rentang waktu tersebut. Renstra yang menjadi arah pergerakan PK Sejahtera selama interval waktu 2005-2010 ini mengamanatkan 14 butir arah perjuangan dalam melipatgandakan aset-aset mobilitas, koneksitas, dan pencitraan dalam rangka membangun diri menjadi Partai Dakwah yang kokoh untuk melayani dan memimpin bangsa.

2.1 URGENSI IDEOLOGI

Ideologi sebagai istilah mulai diperkenalkan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy dan pertama kali digunakan ke publik pada tahun 1796. Bagi Tracy, ideologi dimaksudkan dengan “ilmu tentang ide” yang diharapkan dapat mengungkap asal-muasal dari ide-ide dan menjadi cabang ilmu baru yang kelak setara dengan biologi atau zoologi. Namun, makna ideologi berubah di tangan Karl Mark melalui kerja awalnya dalam buku *The German Ideology* yang ditulis bersama F. Engels.

Sebagaimana penjelasan Frank Bealey (*Blackwell, 2000*), kini ideologi lebih diartikan sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka, berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Berakar pada kaum liberalis, ideologi diartikan sebagai sistem kepercayaan individu tentang dunia yang lebih baik, sehingga tampak sebagai pola berpikir (*mind-set*) bagi penganutnya. Ideologi pun dapat dilihat sebagai “cara pandang dunia” (*world view*) penganutnya untuk menilai situasi keseharian mereka dalam rangka mencari jalan untuk mewujudkan kehidupan terbaik di masa yang akan datang. Namun berdasarkan kecenderungan masyarakat masa kini, ideologi dipandang sebagai kumpulan ide atau konsep mengenai cara hidup (*way of life*) diwarnai oleh budaya dan tatanan masyarakat serta kehidupan politik. Ideologi memiliki unsur konsep atau ide yang diyakini serta diaplikasikan sebagai cara pandang

menghadapi masa depan. Ideologi sarat dengan dimensi “keyakinan” dan “utopi”.

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik. Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasi secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, yang diyakini mampu menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam konsep ini, maka tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa ideologi. Manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia, dorongan, pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya. Karenanya, ideologi menyediakan *elan vital*, *etos*, dan bahkan *militansi* perjuangan. Semangat rela berkorban adalah refleksi keyakinan ideologis.

Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara dimensi “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan api semangat rela berkorban. Itulah yang terjadi di awal-awal kemerdekaan atau masa jauh sebelum kemerdekaan di era para pendiri bangsa ini berjuang bahu-membahu merebut kemerdekaan.

Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin, yang kemudian dilanjutkan Orde Baru dengan pragmatisme politiknya, praktis memandulkan ruh ideologi dari hati manusia-manusia Indonesia. Orde Baru dengan jargon pembangunan-isme telah mengarahkan mata bangsa Indonesia hanya pada pembangunan ekonomi. Modernisasi, pasar bebas, hubungan-hubungan pembangunan

yang lebih mementingkan tujuan jangka pendek, tumbuhnya elit kelas menengah yang sibuk dengan profesi, serta kompromi-kompromi pragmatis, meminimalkan perhatian orang pada aspek ideologi. Jargon yang diadopsi adalah seperti apa yang dikatakan Deng Xiao Ping, “*Tidak penting apakah kucing berwarna hitam atau abu-abu, yang penting dapat menangkap tikus.*”

Di sisi lain, asas tunggal Pancasila yang dipaksakan penguasa melalui indoktrinasi, tafsir tunggal dan sakralisasi terbukti tidak membawa kebaikan bagi bangsa ini. Stigma anti-Pancasila sebagai alat penghalau musuh-musuh politik Orde Baru secara represif telah menjadi trauma politis-ideologis yang masih membekas. Kondisi itu menjadi sangat mengenaskan ketika praktek sehari-hari rezim Orde Baru justru sama sekali tidak mencerminkan, bahkan mengingkari jiwa Pancasila. Pancasila menjadi mantra yang indah diucapkan, namun tidak pernah dipraktekkan. Maka, badai yang dituai kemudian adalah kemunafikan massal yang dipertontonkan penguasa otoritarian-militeristik.

Berbeda dengan China yang merasa sebagai bangsa besar dan dengan budaya kuno tinggi warisan ribuan tahun, atau Jepang yang melalui jalur *tenno heika* merasa sebagai bangsa keturunan Dewa Matahari (*Amaterasu*), maka Indonesia kontemporer tampak merunduk lesu secara ideologis. Tidak ada cita-cita besar dan heroisme untuk membangun peradaban adiluhung sebagai bangsa besar.

Budayawan Koentjaraningrat menyebut kita mengidap budaya “menerabas” budaya potong-kompas, budaya *miopis* (rabun dekat). Ingin cepat sukses, kaya, atau berkuasa dengan usaha sedikit, dan kalau perlu tabrak aturan. Tak mampu melihat masa depan yang jauh, paling banter melihat dalam periode “lima tahunan”. Budaya “menanam jagung” yang tiga bulanan, ketimbang budaya “menanam jati” yang harus menunggu puluhan tahun. Budaya “jalur cepat” menuju sasaran, kalau perlu melangkahi kepala orang. Budaya selebritis instan yang ingin populer dalam sekejap. Atau, budaya “satu hari untung beliung”. Penyakit kronis yang kita idap adalah kurang menghargai mutu, memburu rente dalam ekonomi, politik uang dalam kekuasaan, gelar palsu dalam pendidikan,

barang tiruan dalam perdagangan, serta budaya judi di kampung-kampung. Dalam budaya pragmatis dan hedonis itu, ideologi tak mendapat tempat, idealisme hanya tersisa di pojok-pojok sempit ruang kuliah atau kelompok diskusi publik.

Kita sempat bangga ketika pesawat N-250 diluncurkan, seratus prosen buatan anak bangsa, terbang *fly by wire* di atas dirgantara pertiwi. Rasa percaya diri dan nasionalisme produktif menyembul di balik baling-balingnya. Namun, emosi itu segera padam bersama diobralnya industri unggulan kita ke pihak asing serta dicabutnya subsidi bagi berbagai industri strategis. Selanjutnya, satu pertanyaan harus kita ajukan, apakah bangsa ini masih punya "mimpi" untuk menjadi negara besar? Atau sekedar menjadi *soft nation*, bangsa yang lembek tanpa militansi. Atau hari-hari berjalan *business as usual*, rutin, tanpa digerakkan oleh "masa depan" yang menantang.

Bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan mimpi, memfokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan cita-cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak terbuang dalam gerak *chaotic* melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus. Untuk itu, kita butuh kehangatan ideologi. Tanpa ideologi manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi dan spirit. Secara kolektif jadilah kita bangsa yang *adem-ayem*, miskin romantika —negara besar, namun dipenuhi dengan manusia kerdil yang tidak punya utopi.

2.2 FALSAFAH DASAR PERJUANGAN PK SEJAHTERA

PK Sejahtera, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan *dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam* untuk mencapai *tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat*. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PK Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PK

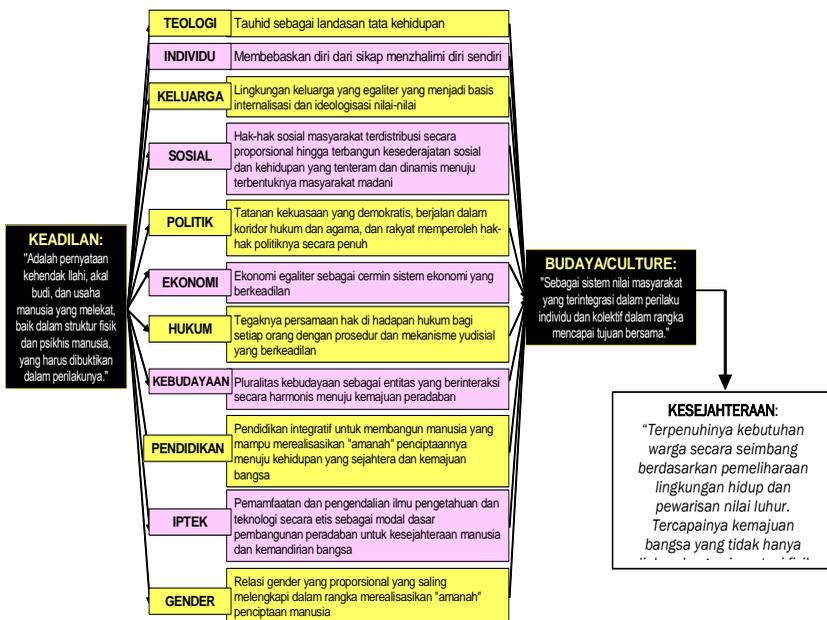
Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.

Itulah dasar PK Sejahtera secara internal-subyektif dalam menghimpun kader-kadernya dalam barisan yang rapi untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional. Atas dasar itu pula dibangun elan vital, etos, dan bahkan militansi perjuangan para kader, termasuk semangat rela berkorban. Dengan keyakinan, bahwa aktivitas politik bukan sekedar kegiatan profan-duniawi, namun sarat dengan dimensi sakral-religi-usukhrawi yang bernilai ibadah, maka dipercaya, bahwa politik bukanlah alat untuk sekedar mengejar kemajuan material-kekuasaan, tetapi hampa dalam aspek emosional-spiritual, sehingga para kader teralienasi dan kehilangan identitas diri yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, sarana untuk peningkatan kapasitas diri, dan juga sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik, sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama yang sarat dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan. Darah pergerakan itu menjadi mungkin dengan menempatkan Islam secara internal-subyektif sebagai aqidah, asas, dan moralitas perjuangan PK Sejahtera. *Substansi moralitas perjuangan PK Sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan profesional.*

Dalam tataran kenegaraan, PK Sejahtera meyakini, bahwa pluralitas etnik dan ideologis masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke—yang melebihi panjang dari pantai barat sampai pantai timur benua Amerika—adalah sebuah realita kebhinekaan yang nyata dan obyektif. Indonesia bagai zamrud khatulistiwa, sebagai benua maritim, paru-paru dunia, dengan biodiversitas yang berlimpah, kekayaan alam di darat maupun di laut, secara geografis dan demografis memperlihatkan fakta empiris kekayaan alam disamping pluralitas kekayaan budaya itu.

Secara khusus Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera didasarkan pada Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera. Kondisi “Indonesia Baru” yang kita inginkan sesuai dengan arahan ini adalah kondisi ideal normatif yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara. Sesuatu yang kita idam-idamkan bersama, sesuai dengan cita-cita dan tujuan luhur bangsa, yakni “masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang kita citakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai **tauhid** sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan **individu-individu** yang bebas dari sikap menzalimi diri sendiri. Berkumpul dalam **keluarga** yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Di antara kaum **laki-laki dan perempuan** terikat dalam relasi yang proporsional saling melengkapi dalam rangka merealisasikan “amanah” penciptaan manusia. Hak-hak **masyarakat** terdistribusi secara proporsional hingga terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani. Manusia Indonesia hidup dalam tatanan **kekuasaan** yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh. Di sana tegak persamaan hak di hadapan **hukum** bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan. Mereka berusaha dalam sistem **ekonomi** egaliter, sebagai cermin dari ekonomi yang berkeadilan, yang memungkinkan perilaku ekonomi yang adil dan memberikan akses yang sama pada seluruh rakyat sehingga kekayaan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang yang memicu jurang kesenjangan. Dimana pemanfaatan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi (**iptek**) secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia Indonesia dan kemandirian bangsa. Warna-warni kehidupan mencerminkan pluralitas **kebudayaan** sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan peradaban. Individu dan masyarakat mendapat **pendidikan** yang integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa.

BAB 2. PARADIGMA



Gambar 2-1. Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera.

Itulah masyarakat yang religius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil dan makmur, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang hidup berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya takwa. Indonesia yang kita citakan adalah kondisi masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

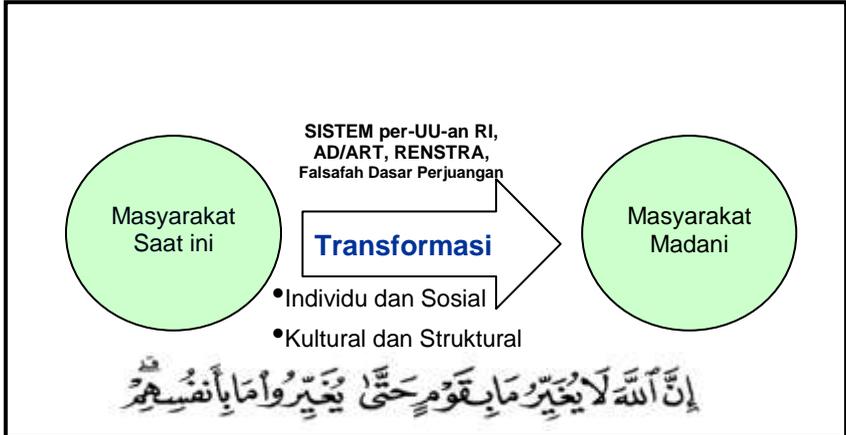
Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer

hidupnya, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2.3 HAKIKAT DAKWAH

Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktifitas terencana untuk men-transformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (*syakhsiyah islamiyah*) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (*syakhsiyah da'iyah*), sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial.

Dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh (*dakwah syamilah*), dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri. Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat. Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah.



Gambar 2-2. Hakikat dakwah

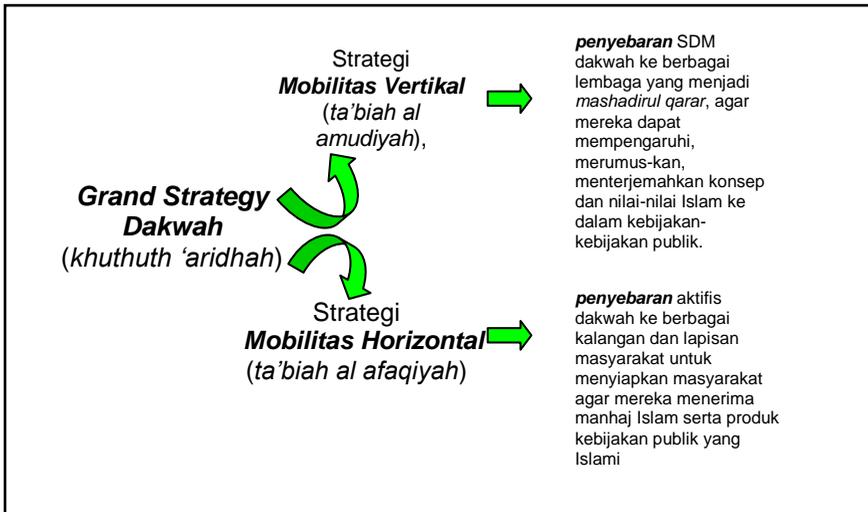
2.3.1 Grand Strategy Dakwah

Strategi PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah (*khuthuth 'aridhah*) dalam transformasi bangsa, adalah *gerakan kultural* (strategi mobilisasi horizontal/*ta'biah al afaqiyah*) dan *gerakan struktural* (strategi mobilitas vertikal/ *ta'biah al amudiyah*). mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami. Sedangkan Mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashadirul qarar* (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik .

Gerakan kultural (strategi mobilisasi horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas, dan berbagai

lembaga/organisasi lainnya, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom-up*. Kader PK Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya, dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

Dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dimungkinkan terbangunnya aliansi strategis antara Partai Dakwah dengan simpul simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat (*mashadirul quwwah*) sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan masyarakat kepada Partai Dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.



Gambar 2-3. Grand Strategy Dakwah

Gerakan struktural adalah penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka *melayani, membangun dan memimpin bangsa*, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

Dalam menjalankan gerakan struktural, dengan dasar kesamaan falsafah atau platform, dimungkinkan terbangunnya *strategic partnership* antara Partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan (*mashahidur qoror*), sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang membela rakyat.

Grand Strategy transformasi bangsa yang diusung PK Sejahtera ini tidak lain dari kombinasi antara gerakan kultural dengan struktural, kombinasi antara perubahan yang bersifat *bottom-up* dengan *top-down* yang merupakan ciri khas PK Sejahtera sebagai Partai dakwah. *Grand Strategy* transformasi bangsa PK Sejahtera ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan sektor ketiga) yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi, dengan kekuatan integritas moral-religijs dan kualitas-profesional. PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.

2.3.2 Mobilitas Kader

Dakwah dapat ditegakkan secara utuh bila bertumpu pada dua sayap, yakni sayap *syar'iyah* dan sayap *kauniyah*. Sayap *syar'iyah* bermakna bahwa segala kebijakan dan arah dakwah bersandar kepada aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana

yang tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan sayap *kauniah* adalah segala aturan, sifat, tabiat dan ketentuan yang terjadi di alam semesta yang merupakan *sunnatullah*. Dengan sayap *syar'iyah*, amal islami selalu berada pada jalan yang benar dan selalu terjaga *asholahnya*. Melalui sayap *kauniah*, amal islami ini menjadi dinamis dan bersesuaian dengan tabiat *kauniah*. Keduanya dilihat sebagai saling melengkapi, karena efektifitas dan dinamika amal islami akan tidak menentu arah dan tujuannya apabila tidak dipagari oleh rambu-rambu *syar'iyah*. Sebaliknya, amal islami yang berjalan menuju tujuan yang benar akan terasa monoton dan kurang dinamis tanpa dilengkapi dengan sayap *kauniah*. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimasi potensi dan kemampuan (*istighalul amsal lil kafa'ah*) kader, baik yang berada pada sayap *syar'iyah* maupun *kauniah*, dengan tujuan agar seluruh potensi kader yang terhimpun dapat berkembang dan berfungsi optimal, untuk mendukung dan memperkuat gerak dan perkembangan dakwah.

Sasaran mobilitas kader sebagaimana telah dijelaskan adalah penyebaran kader ke berbagai pusat kekuatan dan kekuasaan dalam rangka mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maka ada paling sedikit tiga tahap dalam strategi mobilitas vertikal, yaitu:

Pertama, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan. **Kedua**, penapakan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga tersebut. **Ketiga**, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan manhaj Islam.

Di dalam negara terdapat tiga jenis organisasi/lembaga yang menjalankan fungsi dari seluruh bidang kehidupan, yaitu organisasi pemerintahan (sektor publik), korporasi swasta (sektor privat) dan organisasi kemasyarakatan (LSM/sektor ke tiga). Dalam kegiatannya setiap individu merupakan bagian dari organisasi/lembaga tersebut, atau berada pada dua sektor atau bahkan ketiganya. Mobilitas kader perlu diarahkan ke berbagai

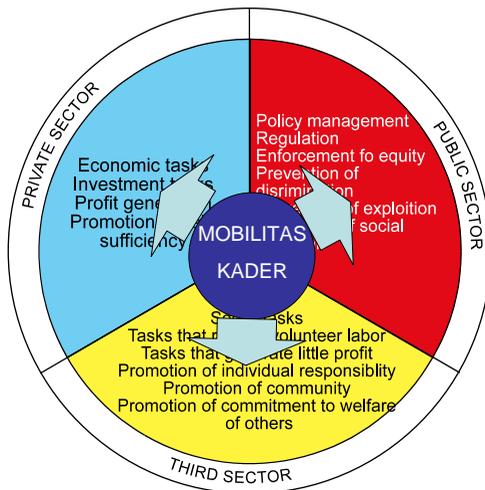
BAB 2. PARADIGMA

organisasi sektor kehidupan, kemudian menapaki kurva karir dalam setiap sektor yang digeluti dan bergerak secara vertikal. Sesuai dengan kemampuan, kecenderungan, dan kesempatan yang tersedia.

Tabel 2-1. Misi dan fungsi tiga jenis organisasi

Jenis Org	Bentuk	Misi	Motif	Fungsi
Publik	Legislatif Eksekutif Yudikatif	Kesejahteraan seluruh warga negara	Non profit	Mengelolala kebijakan, Regulasi, Mendorong persamaan, Mencegah eksploitasi, Mendorong kohesi sosial
Bisnis	Swasta Koperasi	Kesejahteraan pemilik usaha, pengelola, & kustomer	Profit	Fungsi/kerja ekonomi, Fungsi/kerja Investasi, Orientasi profit, Promosi kemandirian
Nirlaba	Politik Sosial Keagamaan Dll.	Kesejahteraan yg blm bisa diisi oleh pelayanan yg diberikan oleh pblik & swasta.	Kesinambungan	Fungsi/kerja sosial Kerja Voluntir Mendorong TJ individu Mendorong masyarakat Mdrgr komitmen u/ mensejahterakat org lain

Diadaptasi dari : Riant Nugroho D., *Reinventing Indonesia*, 2001



Gambar 2-4. Kebijakan dan Pelayanan di tiga sektor (Diadaptasi dari: Starling, Grover, *Managing The Public Sector*, 1998)

Sektor Publik. Organisasi sektor pemerintahan bersemangat utama *pelayanan* kepada publik, seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Pada hakekatnya, organisasi sektor publik dibentuk melalui kontrak sosial, dimana masyarakat memberikan mandat kepada sekelompok orang—sebagai bagian dari mereka—untuk mengatur, mengelola kebijakan publik, sebagai juri untuk mencegah diskriminasi, mencegah penindasan antara satu orang atau kelompok dalam masyarakat kepada orang atau kelompok lain, serta mempromosikan ikatan sosial di antara mereka. Dalam negara moderen, organisasi sektor ini dibentuk melalui kontrak sosial yang terbuka dan demokratis dalam proses politik. Presiden, menteri dan birokrat negara adalah aparat negara dalam sektor publik. Mereka mendapat mandat dari rakyat dalam suatu periode tertentu untuk melaksanakan layanan publik kepada mereka. Penyebaran kader dakwah sebagai gerakan struktural ke lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dimaksudkan dalam kerangka partisipasi dalam transformasi bangsa melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu. Tujuannya untuk berkontribusi dalam membangun sistem, kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

Sektor Swasta (*private sector*). Organisasi di sektor swasta adalah organisasi sektor kehidupan masyarakat yang semangatnya mencari keuntungan, yang bekerja dalam mekanisme pasar. Karenanya motif yang dikembangkan dalam sektor ini adalah motif ekonomi. Ukuran-ukuran yang ada serta nilai penting yang dianut adalah efisiensi dan produktivitas yang bermuara pada keuntungan material. Sebagian besar masyarakat suatu negara bergerak di sektor ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup diri mereka secara ekonomi menuju kemandirian. Ini adalah *sunatullah*, karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Penyebaran kader ke sektor ekonomi, pada prinsipnya adalah perjuangan menuju kemandirian ekonomi yang akhirnya memunculkan kekuatan ekonomi bangsa. Kekuatan ini

secara langsung sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik dalam perumusan kebijakan publik.

Sektor Ketiga (*third sector*). Organisasi/lembaga sektor ketiga, pada hakekatnya adalah pelengkap dari organisasi kedua sektor sebelumnya. Pemerintah, dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, kadang-kadang dalam batas tertentu, memerlukan bantuan masyarakat. Misalnya, dalam soal pelayanan kesehatan, sosial maupun pendidikan. Peran serta masyarakat ternyata dibutuhkan. Hal ini terjadi bukan saja di negara berkembang, juga di negara-negara maju. Peranserta masyarakat dalam lapangan sosial ini terbukti sangat tinggi. Semangat utama organisasi sektor ini adalah tanggung-jawab individu untuk mengusung tugas sosial mensejahterakan masyarakat. Istilah NGO (*Non-Governmental Organization*) yang disematkan kepada komponen organisasi sektor ketiga ini membuktikan bahwa organisasi sektor ini adalah komponen nonpemerintah yang mengambil peran komplementatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat—sebuah tugas yang secara normatif semestinya dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat, organisasi sektor ketiga juga berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi kualitas layanan publik pemerintah, termasuk juga terhadap regulasi yang dikembangkan pemerintah. Karenanya organisasi sektor ini bermata dua. Satu matanya dihadapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas komplementatif pemerintah dalam pelayanan publik. Sedang mata lainnya dihadapkan kepada pemerintah untuk mengawasi kualitas pelayanan publik.

Penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat adalah untuk menggerakkan peranserta masyarakat dalam mentransformasi diri mereka sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun institusional melalui yayasan dan ormas yang ada melaksanakan penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom-up*. Kader PK Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Karenanya dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

2.3.3 Peluang Mobilitas Vertikal

Secara umum mobilitas vertikal kader sangat ditentukan oleh dua faktor; yakni faktor *kualitas* dan *peluang* (jaringan). Kualitas kader berkaitan dengan *kredibilitas personal*, yakni profesionalitas, integritas moral dan keluwesan sosial. Sedangkan peluang mobilitas vertikal sangat ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal.

		Jaringan	
		Ada	tidak
Kualitas	Ada	MV Optimal	MV lambat
	tidak	MV semu	MV nihil

Gambar 2-5. Efektivitas mobilitas vertikal (MV) bergantung pada faktor kualitas kader dan jaringan

Paling tidak ada empat hal yang berkaitan dengan peluang mobilitas vertikal kader dakwah, yakni **perubahan konteks, peran amal siyasi, penataan kader dan kondisi obyektif dakwah.**

Perubahan Konteks.

Dinamika mobilitas dalam sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh sifat atau jenis masyarakatnya. Secara ekstrim masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis:

- a. Masyarakat feodal atau berkasta (*feudal or caste society*)
 Dalam masyarakat seperti ini strata sosial ditentukan oleh status bawaan (*ascribed status*) dan bersifat kaku

sehingga mobilitas hampir mustahil terjadi. Masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat tertutup (*closed society*). Contoh jenis ini adalah kasta-kasta di India atau pemisahan priyayi-wong cilik di Jawa yang hampir tidak memungkinkan adanya perubahan strata sosial anggotanya.

b. Masyarakat sederajat (*egalitarian society*)

Dalam masyarakat seperti ini strata sosial ditentukan oleh prestasi (*achieved status*) atau meritokrasi dan bersifat cair sehingga mobilitas sangat terbuka lebar. Masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*). Contohnya adalah apa yang terjadi di beberapa negara maju yang memungkinkan perubahan strata sosial lebih mudah terjadi.

Sebelum terjadi reformasi, Indonesia lebih cenderung bersifat feodal, sehingga mobilitas agak sulit terjadi. Kecenderungan ini sebenarnya masih terbawa di era reformasi. Meskipun demikian di era reformasi ini ada kecenderungan positif menuju masyarakat yang lebih egaliter. Bila disimpulkan beberapa indikasi ke arah masyarakat egaliter tersebut adalah:

- a. Adanya tuntutan transparansi dalam berbagai proses politik, sosial, dan ekonomi (*transparency*);
- b. Adanya permintaan pertanggungjawaban publik atas seluruh posisi-posisi penting negara dari sisi profesionalisme dan sisi moralitas (*public accountability*).
- c. Semakin terbukanya peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses politik dan pengambilan kebijakan pembangunan secara umum (*participatory management*).

Dengan adanya kecenderungan positif tersebut, dalam jangka pendek masyarakat akan condong pada pilihan-pilihan rasional sesuai prinsip meritokrasi. Pada saat inilah peluang-peluang mobilitas vertikal akan terbuka lebar.

Peran Amal Siyasi.

Seiring dengan perluasan orbit dakwah (*mahawir ad-dakwah*) dari *mihwar tanzhimi* (strukturalisasi) dan *mihwar sya'bi*

(sosialisasi) ke *mihwar muassasi* (institusionalisasi) dalam berbagai program politik, maka peluang dakwah berubah secara dinamis. Dengan digulirkannya dakwah melalui kelembagaan formal, kapabilitas internal yang terkait dengan keberadaan institusi dakwah beresonansi dengan dinamika sosial politik yang ada, yang kemudian memunculkan peluang untuk masuk ke pusat-pusat kebijakan. Antara lain, masuknya aktivis dakwah ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Kondisi di atas perlu ditindak-lanjuti dalam rangka menciptakan peluang mobilitas vertikal, yakni dengan membangun *link-birokrasi* melalui kekuatan kader politisi, baik dalam eksekutif maupun legislatif. Meskipun ada kecenderungan pembatasan jabatan politis dalam birokrasi, namun kekuatan *link-birokrasi* ini dapat memunculkan peluang bagi mobilitas vertikal kader dakwah baik dalam birokrasi maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Agenda mobilitas ini sudah tentu sejalan dengan reformasi birokrasi, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan.

Penataan kader.

Penataan kader lebih tampak sebagai upaya penyiapan kualitas kader, melalui pengembangan dan pemungisian potensi kader. Secara kolektif, upaya ini akan memperlebar peluang mobilitas vertikal kader dakwah. Karenanya penataan kader adalah bagian vital bagi perencanaan maupun implementasi kebijakan mobilitas vertikal.

Kondisi Obyektif dakwah.

Memasuki *mihwar muassasi* kondisi obyektif dakwah ditandai dengan proses akselerasi, baik kader maupun infrastruktur dakwah. Secara umum kader dakwah adalah pemuda dengan intelektualitas tinggi yang berada dan berperan di berbagai sektor. Kebijakan mobilitas vertikal mempunyai peluang yang baik untuk dilaksanakan di berbagai sektor. Karenanya *penataan kader* dan *pemunculan peluang* menjadi upaya yang strategis.

.

Untuk keberhasilan implementasi konsep mobilitas vertikal kader dakwah, perlu dirumuskan strategi pencapaiannya. Strategi tersebut diturunkan berdasarkan realitas kondisi eksternal dan internal dan dibagi menjadi dua, yakni strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum adalah strategi mobilitas vertikal yang berlaku umum untuk seluruh kelompok strategis, sementara strategis khusus adalah strategi yang diaplikasikan secara khusus untuk kelompok strategis tertentu.

Secara umum strategi mobilitas vertikal kader dakwah adalah upaya-upaya strategis dan sistematis berupa kombinasi antara penataan dalam rangka meningkatkan:

- a. ***kredibilitas personal*** dan
- b. penciptaan ***peluang***.

Upaya membangun ***kredibilitas personal*** diarahkan pada tiga aspek, yakni:

- a. ***kedribilitas moral*** yang tercermin dalam kesholehan moral, bersih, dan;
- b. ***kredibilitas sosial*** yang tercermin dalam kesholehan sosial, peduli.
- c. ***kredibilitas profesional*** (dimilikinya kompetensi, kacakapan manajerial, berpikir strategis sesuai dengan bingkai pengembangan potensi, *opend mind*), yang menghasilkan kesolehan profesional.

Hasil pembinaan kader dengan arahan di atas akan mewujudkan kader dakwah yang mempunyai ***kredibilitas personal yang bersih, peduli, dan profesional***.

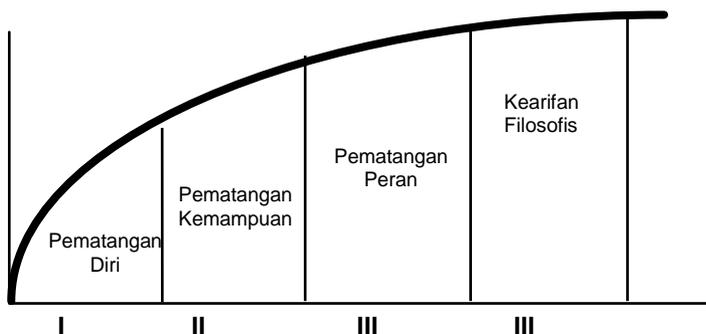
Dalam rangka penataan kader dan penciptaan peluang bagi mobilitas vertikal, maka potensi-potensi yang ada didayagunakan (***istighlallil amtsal***) secara harmonis dengan cara:

- a. ***pemagangan***, yakni bekerja di lembaga-lembaga strategis untuk menimba pengalaman;
- b. ***interaksi positif*** dengan semua pihak;

- c. **outsourcing** terhadap pakar-pakar eksternal, lembaga-lembaga eksternal dan lain-lain.
- d. penataan kader dengan memperhatikan dinamika transformasi masyarakat, sehingga program dakwah sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memunculkan sinergisme eksternal melalui upaya memperbanyak simpul-simpul kesamaan dengan pihak eksternal.

Perumusan *proyeksi kader* yang memerlukan proteksi, tugas khusus dan evaluasi khusus dalam rangka *targeting* dan *focusing* harus dipertimbangkan.

Pemberdayaan kader bukanlah proses yang sekali jadi atau seperti menanam jagung yang hasilnya segera dapat dipanen dalam waktu singkat. Proses pemberdayaan kader dalam bingkai pengembangan potensi adalah proses seperti “menanam jati”, yang hasilnya baru dapat dipanen puluhan tahun mendatang. Sebagai sebuah proses yang bertahap, proses pembinaan kader memerlukan kesabaran dan wawasan. Untuk memunculkan seorang ahli/pakar di bidang tertentu, maka secara kultural kader harus melalui tahapan demi tahapan jenjang karir (*learning curve*). Contoh kurva pembelajaran terlihat pada Gambar 2-6.



Gambar 2-6. Proses *tadaruj* pembinaan kader untuk mencapai tingkat kepakaran tinggi

Pematangan Diri. Tahap pertama adalah fase pematangan diri. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan segenap aspek kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

- a. matang dalam *aspek teknis* di bidangnya;
- b. matang dalam *pilihan profesionalisme*;
- c. mulai menemukan *jatidiri*;
- d. *dikenal di lingkungan profesi* di bidangnya.

Pematangan Kemampuan. Tahap kedua adalah fase pematangan kemampuan. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan kemampuan pada kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

- a. *pemahaman filosofis* bidang profesinya;
- b. *pemahaman multi aspek* pengembangan ilmunya;
- c. kemampuan *lobby*;
- d. pemikirannya *mulai mempengaruhi kebijakan nasional*.

Pematangan Peran. Pada tahap ketiga adalah fase pematangan peran. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan peran pada kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

- a. mulai berperan di *tingkat nasional*;
- b. dikenal di tingkat internasional;
- c. mengetahui multi aspek profesinya dan kaitannya dengan profesi lain.

Kearifan Filosofis. Pada tahap keempat adalah fase kearifan filosofis. Pada tahapan ini telah tercapai dan muncul kearifan pada diri kader. Indikator kearifan tersebut adalah:

- a. kaya pengalaman di kancah nasional dan internasional;
- b. berperan di *tingkat internasional*;
- c. menjadi *rujukan*.

Proses pengembangan karir di atas adalah tahapan-tahapan normal. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi khusus,

dimana seseorang dapat mencapai kematangan dan kearifan filosofis pada usia yang relatif lebih muda. Masalahnya, sulit merekayasa kondisi khusus itu untuk mengakselerasi kematangan kader secara massal.

Tahapan pematangan kader di atas mirip dengan konsep stratifikasi kompetensi kader (*haramul kafa'ah*). Bersama penambahan pengalaman dan kedalaman ilmu, maka seseorang akan terus meningkat dan menajam secara vertikal dari basis:

- a. *Harakiyah* (pergerakan);
- b. *Fikriyah* (pemikiran);
- c. *Siyasiyah* (kebijakan).

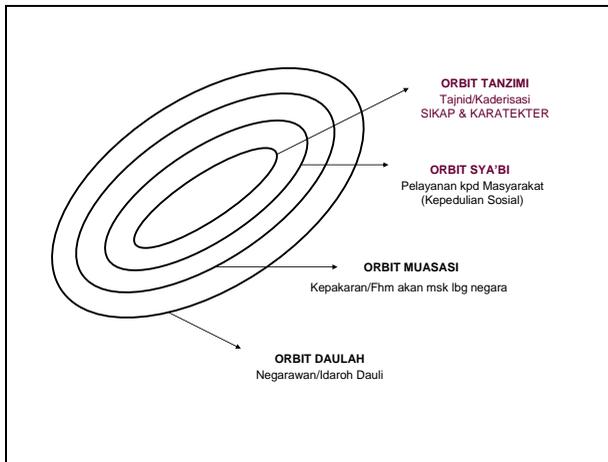
2.3.4 Orbit Dakwah

Li kulli marhalatin ahdafuha, li kulli marhalatin rijaluha. Dalam setiap tahapan dakwah ada tujuan dan tokohnya masing-masing. Setiap tahap bersifat unik, bukan sesuatu yang bersifat generik. Itu adalah prinsip dakwah yang tidak dapat diingkari. Kader dakwah perlahan tapi pasti melakukan mobilitas ke berbagai lembaga yang menjadi pusat kebijakan, mengaktualisasikan peran secara lebih maksimal serta mengekspresikan diri secara lebih terbuka, terlibat dalam menerjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Kader dakwah juga melakukan mobilitas horizontal ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami.

Sebenarnya tak ada yang luar biasa dengan capaian itu, suatu keniscayaan di tengah eksistensi umat yang mayoritas di negeri ini. Bahkan tidak terlalu salah kalau dikatakan, bahwa capaian itu agak terlambat. Namun kita juga tidak bisa menolak argumen, bahwa perubahan itu bukanlah suatu proses yang tiba-tiba atau secara *sim salabim* terwujud, tapi dengan sebuah sebab-musabab dan kerja keras. Setiap pemenuhan orbit dakwah adalah mukadimah bagi orbit berikutnya. Karenanya *mihwar dakwah* tidak bersifat diskrit tapi kontinyu, dan perubahan dari mihwar yang satu ke mihwar

lainnya merupakan perluasan jenjang pelayanan dan kepemimpinan.

Kalau diringkas, aktivitas dakwah kita kini telah melalui tiga fase perjuangannya (*mahawir ad dakwah*) lihat Gambar 2-7. *Pertama* adalah *mihwar tanzhimi*, pada tahap ini fokus utama dakwah adalah konsolidasi dan pembinaan kader. Tahap ini merupakan suatu keniscayaan dalam membangun kekuatan internal. Karenanya kata kunci gerakan dakwah pada fase ini adalah **pengokohan internal**, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur dakwah. Pekerjaan kaderisasi (*tajnid*) menjadi penekanan, karena itu prinsip yang sering dikemukakan adalah “tarbiyah/pembinaan bukanlah segalanya, namun segalanya dimulai dari tarbiyah”. Dalam tahap ini yang dibangun adalah kekuatan fondasi internal. Potensi pembinaan menjadi tulang-punggung gerakan dakwah. Konsolidasi internal dan pertumbuhan bola salju dakwah adalah target-target kuantitatif penting yang dikembangkan. Dalam fase ini yang dibutuhkan pembentukan kepribadian *Islami* dan *da'iyah*—sebuah proses yang pekat dengan semangat *inward looking* dan relatif terlindungi dari pengaruh dunia luar. Pembeneran tahap dan proses ini dalam sirah nabawiyah adalah pada fase Makkah dalam majelis Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam.



Gambar 2-7. Mahawir dakwah

Orbit *kedua* dakwah adalah Orbit Masyarakat (*mihwar sya'bi*) dimana aktivitas dakwah mulai mengalirkan energinya untuk kepentingan masyarakat secara umum melalui gerakan *amar ma'ruf wa nahyi munkar*, yakni layanan dalam berbagai bidang kehidupan—melalui instrumen organisasi keumatan—terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan berbagai kegiatan lainnya. Kata kunci dalam orbit dakwah ini adalah **pelayanan**. Dalam orbit ini tak heran kalau rumah sakit-rumah sakit Islam bermunculan, sekolah-sekolah Islam terpadu dan Universitas Islam, BMT dan bank syariah, serta lembaga layanan umat lainnya berdiri.

Sudah barang tentu ada banyak berkah dalam orbit ini. *Pertama* berdirinya berbagai LSM dakwah sebagai wajah untuk berinteraksi dengan publik. Memang wajah itu sendiri—dalam *mihwar sya'bi*—belum menjadi tujuan dan perhatian utama, namun efek bergandanya tetap ada. Secara sosiologis adanya wajah memudahkan kader dakwah berinteraksi dengan publik. *Kedua*, tokoh-tokoh internal secara tidak langsung lebih berpeluang untuk muncul ke wilayah publik (*syakhsiyah barizah*). *Ketiga*, munculnya peluang menarik tokoh luar untuk berhimpun di sekitar institusi dakwah. *Keempat*, secara kelembagaan institusi dakwah yang dibangun berpeluang menjadi lembaga penekan atau lembaga advokasi masyarakat. *Kelima*, pengelolaan lembaga dakwah secara profesional memungkinkan munculnya optimalisasi potensi dan pengempangan profesi bagi kader dakwah yang mengelola lembaga dakwah tersebut. Ternyata dalam banyak contoh terlihat, bahwa penyatuan antara aspek profesional dan dakwah dalam satu institusi tertentu memunculkan sinergi dan efisiensi yang sangat besar.

Orbit dakwah *ketiga* adalah Orbit Pelembagaan (*mihwar muasasi*) dimana kader dakwah mulai masuk ke dalam lembaga publik, baik di parlemen, birokrasi maupun lembaga-lembaga profesi lainnya. Mereka berkontribusi dalam lembaga-lembaga tersebut dengan menampakkan integritas moral serta kualitas profesional dan kepakarannya. Kata kunci dalam Orbit dakwah ini adalah

kepakaran. Misi utama kader dakwah naik secara vertikal (mobilitas vertikal) dan melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga publik ini adalah untuk mempengaruhi, menerjemahkan, atau merumuskan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjalankan misi ini sudah barang tentu—sekali lagi—menuntut kepakaran kader.

Dakwah dalam sektor organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Dakwah Parleментар
2. Dakwah Birokrasi

Dakwah parleментар merupakan perluasan medan dakwah, yakni dakwah dalam mimbar resmi negara untuk berjuang secara konstitusional bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dakwah parleментар adalah salah satu bentuk *amar ma'ruf nahyi munkar* dalam mimbar demokrasi yang mempunyai fungsi kontrol atas pemerintah (*hisbah*) dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dalam mimbar parleментар ini pula dapat diperlihatkan kepada masyarakat, bahwa Islam adalah agama yang sempurna (*syamil*) dan Islam adalah solusi. Karenanya dakwah parleментар menuntut fungsi:

1. Legislasi (*taqin*);
2. Pengawasan (*hisbah*);
3. Pernyataan publik (*tabligh*).

Dakwah birokrasi adalah dakwah dalam kancah eksekutif dalam upaya untuk menerjemahkan, mempengaruhi, menafsirkan dan melaksanakan agar kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Islam demi melayani masyarakat dan dalam rangka mensejahterakan mereka. Program reformasi pemerintahan untuk menegakkan pemerintah yang bersih –bebas dari virus KKN– serta terjadinya mobilitas vertikal kader dakwah dalam birokrasi. Fungsi utama dakwah dalam birokrasi adalah:

BAB 2. PARADIGMA

1. Penerjemahan dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik yang ada dalam rangka islamisasi kehidupan dan menegakkan nilai-nilai Islam;
2. Pelayanan publik;
3. Reformasi pemerintahan menuju *clean government*;
4. Mobilitas vertikal kader dakwah.

Fase dakwah ke tiga di atas sangat kentara merupakan perluasan dari fase ke dua. Kalau dalam Orbit Sya'bi, mulai muncul institusi dakwah sebagai wajah untuk berinteraksi dengan publik, maka dalam Orbit Muasasi pemikiran untuk mengokohkan institusi yang didirikan mulai mendapat penekanan. Pembelajaran untuk mengelola lembaga dakwah secara profesional menjadi penting, termasuk juga peran dalam institusi negara. Sehingga, dalam Orbit ini, kader dakwah menyebar secara horizontal ke seluruh lembaga masyarakat, baik di sektor privat, publik maupun sektor ketiga, dan mengokohkan peran mereka dalam lembaga-lembaga tersebut.

Tabel 2-2. Karakteristik orbit dakwah

Karakteristik	ORBIT DAKWAH			
	Tanzimi	Sya'biy	Muasasiy	Daulah
Orientasi	Tajnid	Khidmatul Ummat	Mihaniy-fanniy wa takhosus	Idaroh Dauliyah
Sarana Amal	Halaqoh	3 sektor	3 sektor	3 sektor
Kriteria sukses	Penambahan Kader	Akseptabilitas sosial (Kred. moral & sosial, Mobilitas Horizontal)	Peningkatan peran strategis di bidang masing2 (Mobilitas Vertikal)	Masuk dalam orbit kepemimpinan nasional
Akuntabilitas Publik	*	**	***	****
Kualifikasi SDM	Takwiner	Pekerja Sosial	Spesialis dan profesional	Negarawan
Manajemen	Instruktif	Konsultatif	Delegatif	Partisipatif

Pada orbit ini interaksi dengan publik mulai dilakukan secara institusional melalui organisasi politik dengan doktrin *al hizb huwal jama'ah al jama'ah hiyal hizb*—bukan secara individual atau parsial melalui wajah-wajah LSM.

Sampai di sini dapat dipahami kalau kriteria utama dalam Orbit Lembaga adalah **profesionalitas**. Dalam bingkai ini, maka yang perlu diusung adalah kader dakwah yang memahami nilai-nilai Islam dan memiliki komitmen tinggi bagi perwujudannya, yang memiliki **kedribilitas moral, kredibilitas sosial** dan **kredibilitas profesional**. Kader yang bukan saja memiliki kredibilitas moral yang tinggi dalam menggusung perubahan serta mampu berinteraksi sosial secara harmonis di dalam lingkungannya, namun juga profesional di bidangnya.

Pilar profesionalitas yang diperlukan untuk itu, yakni berkaitan dengan dimilikinya *kompetensi (core competence)*, *kacakapan manajerial, berpikir strategis* sesuai dengan bingkai pengembangan potensi, dan *berpikir terbuka (open mind)*. Seorang profesional dalam bingkai ini adalah ilmuwan yang manajer, dan manajer yang mampu berpikir strategis (negarawan). Ia bukan hanya unggul dalam kompetensi ilmiahnya, namun juga mampu mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya secara sinergi untuk kepentingan dakwah, dan terbiasa berpikir strategis. Mungkin ada yang bertanya, mengapa terlalu banyak kualifikasi yang digantungkan pada kader? Tak ada pilihan, karena kini kita memasuki zaman dimana kompetisi ideologis menggunakan bahasa infrastruktur sosial-budaya-politik yang makin canggih. Hanya mereka yang fasih dengan bahasa infrastruktur canggih itu yang dapat menanamkan pengaruh dan meraih kemenangan. Kita memerlukan tokoh yang siap melakukan islamisasi kehidupan dengan mengalahkan pengaruh para kompetitornya.

Pada titik ini para pakar menjadi penting ditumbuhkan dan tampil ke muka untuk menggusung perubahan. Sifat integralitas Islam menuntut ketersediaan para pakar dalam seluruh dimensi hidup manusia.

Orbit terakhir yang perlu dilalui adalah Orbit Negara (*mihwar daulah*). Ini adalah Orbit dimana dakwah telah memasuki pengelolaan institusi negara secara penuh dan sekaligus merupakan perluasan dari Orbit Lembaga. Kalau dalam orbit sebelumnya, interaksi dengan sektor negara dalam birokrasi dan lembaga negara lainnya (politik, legislatif, eksekutif dan lainnya) masih dilaksanakan secara individual dan parsial, maka dalam orbit ini interaksi dilakukan secara total.

2.3.5. Mengokohkan Jati Diri dan Citra PK Sejahtera

Slogan 'Bersih dan Peduli' yang dicanangkan PK Sejahtera menjelang Pemilu 2004 mengantarkan partai ini pada perolehan suara spektakuler. Dari semula hanya 1,5 persen pada Pemilu 1999 melonjak lima kali lipat menjadi 7,5 persen sehingga menjadikannya sebagai partai Islam paling fenomenal.

Ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 'Bersih dan Peduli' bukan semata slogan, tapi kristalisasi bukti-bukti di lapangan sejak partai ini berdiri tahun 1998. 'Bersih dan Peduli' dengan mudah diatribusikan kepada PK Sejahtera karena memang nilai-nilai itu dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Sampai kadar tertentu 'Bersih dan Peduli' telah menjadi *brand image* sekaligus *specific knowledge* PK Sejahtera. *Brand image* terkait dengan pencitraan diri, sementara *specific knowledge* terkait dengan penciptaan nilai (*value creation*) dan penyebaran manfaat (*benefit delivery*).

Penciptaan nilai dan penyebaran manfaat merupakan orisinalitas (jati diri), sementara citra merupakan buah atau cermin dari orisinalitas. Citra tidak dapat diciptakan dengan kemasan dan pemasaran semata, secanggih apa pun. Kemasan dan pemasaran tanpa orisinalitas melahirkan citra semu. Citra sejati dibangun oleh orisinalitas ditambah kemasan dan pemasaran yang baik.

Adalah penting untuk merevitalisasi dan mengokohkan citra 'Bersih dan Peduli' dan tetap menjadi *positioning* partai. Bersih cermin kesalahan personal (moral), sementara peduli cermin kesalahan sosial. Untuk dapat memimpin bangsa dibutuhkan juga kesalahan

profesional. Maka, slogan PK Sejahtera menjelang Pemilu 2009 adalah 'Bersih, Peduli, dan Profesional'. Pemaknaan profesional adalah dimilikinya kompetensi inti, kecakapan manajerial, kemampuan berpikir strategis, dan sikap terbuka (*open minded*).

Sejak PK Sejahtera menjadi bagian dari koalisi SBY-JK tahun 2004, citra 'Bersih dan Peduli' kurang kuat menggema. Kisah-kisah heroik sebelum 2004 yang merupakan pembuktian 'Bersih dan Peduli' di ruang publik seakan tenggelam oleh langkah-langkah politik yang mencerminkan kegamangan antara sebagai partai oposisi atau bagian dari pemerintahan.

Tentu ini dapat dimaknai positif sebagai proses pembelajaran dan pencarian bentuk ideal partai dakwah. Dalam kacamata dakwah – di antara prinsipnya adalah *amar ma'ruf nahiy munkar*, *fastabiqul khoirot*, dan *maslahat* umat – partai oposisi dan partai pemerintah tidak dilihat dalam oposisi biner (dua hal yang bertentangan secara diametral). Selalu ada ruang dan posisi yang bisa diisi untuk menjembatani keduanya.

Di sisi lain, ini juga dapat dilihat secara negatif sebagai *trial and error* yang dapat menggerus citra itu. *Trial and error* memang bagian dari proses pembelajaran. Namun, pembelajaran yang baik tentu ada evaluasi dan kerangka waktu yang jelas. Keduanya dibutuhkan agar proses pembelajaran selalu *on the right track* dan dapat mengukur dengan jelas kemajuan pembelajaran itu sendiri. Dengan itu pembelajaran menjadi efektif dan modal dasar 'Bersih dan Peduli' dapat dipertahankan dan dikokohkan serta disinergikan dengan citra profesional.

Jelas bahwa lonjakan lima kali lipat perolehan suara PK Sejahtera telah mengantarkan makin banyaknya kader-kader PK Sejahtera yang menduduki jabatan-jabatan publik, baik legislatif maupun eksekutif, di pusat maupun daerah. Ini membawa konsekuensi PK Sejahtera berhadapan dengan tantangan-tantangan dan peluang-peluang kekuasaan politik dan ekonomi yang makin besar. Tarik menarik antara tantangan dan peluang ini tentu saja harus disikapi dengan arif dan hati-hati agar tidak terjebak dalam pragmatisme

dan perilaku politik primitif. Pada titik ini penerjemahan dan elaborasi makna 'Bersih dan Peduli' perlu semakin diperjelas.

Disadari bahwa dalam perjalanan 3,5 tahun sejak 2004 penerjemahan ini belum membuahkan satu kejelasan dan standardisasi makna 'Bersih dan Peduli' versi PK Sejahtera. Yang terlihat adalah ijthad-ijthad pribadi para kader dalam menerjemahkan 'Bersih dan Peduli' ketika berhadapan dengan tantangan dan peluang.

Karenanya, pemaknaan 'Bersih dan Peduli' PK Sejahtera menjadi terasa beragam. Tentu ini tidak menguntungkan bagi penciptaan *brand image* PK Sejahtera, bahkan dapat mengaburkan orisinalitasnya. Sehingga perlu dengan serius mengevaluasi masalah ini dan berupaya menerjemahkan makna 'Bersih, Peduli, dan Profesional' dalam konteks ruang publik yang lebih luas sehingga ada standar pemahaman tentang ketiganya. Diharapkan ini dapat memperjelas orisinalitas dan mengokohkan citra PK Sejahtera.

2.3.6 Fungsi dan Urgensi Wajihah

Kekuatan dakwah sangat memerlukan dukungan masyarakat¹. Mereka adalah basis kekuatan bagi para aktivis dan kader dakwah dalam rangka memapankan gerakan perubahan. Bila landasan kekuatan masyarakat ini rapuh, maka akan rapuh pula bangunan dakwah di atasnya. Umumnya, masyarakat selalu melihat fenomena dakwah dari hal-hal yang kongkrit di depan mata mereka. Sementara itu kita pahami tidak semua kebijakan dakwah dapat dimunculkan ke permukaan. Oleh karena itu diperlukan payung (*mnizhalah*) atau wajihah (*cover*) yang tepat untuk berbagai posisi dan keadaan. Dengan cara ini gerakan dakwah dapat memenuhi tuntutan pembinaan masyarakatnya tanpa harus keluar dari manhaj yang telah digariskan Rasulullah SAW.

¹ Hilmi Aminuddin, 2003: "Strategi Dakwah Gerakan Islam", Jakarta: Tarbiatuna, hal. 18-21

Wajihah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam gerakan dakwah. Melalui wajah proses transformasi dan perubahan ke arah perbaikan dapat berjalan secara efektif. *Wajihah* dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk berbagai tindakan teknis, taktis maupun strategis seperti: menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat, mendidik dan mengembangkan sumber daya umat, melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, menggalang opini umum, menggerakkan dan memobilisasi massa untuk tujuan tertentu, mengajak masyarakat untuk berbuat produktif, meraih dukungan dan simpati publik, melibatkan masyarakat untuk proyek tertentu, mengajukan usul dan saran bagi pemecahan masalah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Wajihah dapat berupa organisasi profit atau lembaga nirlaba yang mawujud dalam berbagai bidang kerja. Wajihah dibentuk untuk kemaslahatan umat, sebagai sarana bagi gerakan dakwah yang memerlukan proteksi. Dengan misi utamanya memberikan layanan, perlindungan, pembelaan, pendidikan, pemberdayaan, dan penerangan kepada kelompok masyarakat tertentu, maka wajah menjadi sangat efektif untuk merealisasikan misi Islam yang membawa rahmat bagi semua orang. Dengan adanya wajah, format dakwah bukan lagi hanya dalam konteks menjelaskan dan mendidik mereka menjadi seorang muslim yang baik, tetapi juga menjadi wahana bagi kader untuk memberikan layanan dan bantuan yang sangat diperlukan umat, sebagaimana yang dipuji oleh Allah SWT: “ *wa man ahsanu qaulan min man da’a ilallah wa ‘amila shalihan...* “ (QS Al Fushhilat:33)

Setidaknya ada dua jenis wajah yang dapat dikembangkan, yaitu **wajihah tanzhim**, yang langsung terkait dengan salah satu struktur partai, yang tidak bertentangan dengan undang-undang kepartaian, sepenuhnya dikelola dan dikendalikan oleh personil-personil yang duduk dalam struktur partai. Jenis wajah yang lainnya adalah **wajihah amal**, yang secara peraturan perundang-undangan tidak bisa dikaitkan dengan partai, merupakan penjelmaan aktivitas kader dalam suatu institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang garapan tertentu. Dengan kata lain *wajihah amal* dikelola dan dikendalikan sepenuhnya oleh anggota-anggota gerakan

dakwah dan dapat melibatkan orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan struktural dengan struktur partai dakwah. Sementara itu, struktur partai hanya memberikan arahan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum.

Wajihah, baik *tanzhimi* maupun *amali*, dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Grand Strategy dakwah, dan diposisikan serta difungsikan sebagai perpanjangan tangan kebijakan partai dakwah. Wajihah juga dapat memainkan peranan yang sangat berarti dalam mempengaruhi dan menekan proses pengambilan kebijakan pihak-pihak yang berwenang agar sesuai dengan misi dakwah dan berpihak kepada kebenaran dan kemaslahatan. Peran ini akan semakin efektif ketika wajihah menjalin kerjasama taktis dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Dengan peran yang sedemikian penting dalam kancah dakwah, maka menjadi wajarlah apabila dalam mobilitas horisontal, keberadaan wajihah menjadi ujung tombak bagi percepatan ekspansi dakwah. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas wajihah di seluruh wilayah dakwah, pesan-pesan dakwah akan semakin efektif menyebar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Diperlukan suatu rencana aksi yang jelas dan terarah untuk meningkatkan keberadaan wajihah hingga dapat meningkatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat melalui serangkaian pembinaan yang efektif dan berkesinambungan. Pembinaan difokuskan pada wajihah yang bergerak dalam lingkup layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum dan menyentuh aspek kebutuhan dasar mereka, yaitu dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial dan kemasyarakatan serta bidang seni dan budaya.

Menata dengan mengembangkan keberadaan wajihah dalam dakwah di miḥwar *syā'bi* dan terlebih pula di miḥwar muassasi merupakan keharusan untuk:

- Menegefektifkan *mu'assasah* dan *wajihah* yang ada sebagai lembaga pemikir strategis dan sarana dalam optimalisasi hubungan dengan lembaga-lembaga eksternal;

- Mengokohkan eksistensi *mu'assasah* dan *wajihah* dalam tingkat nasional, regional dan internasional ;
- Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

2.4 DIALKETIKA ISLAM DAN NEGARA

Dalam konteks ideologis, dialektika antara Islam dan negara adalah masalah yang sangat penting bagi Indonesia, karena di sana tersimpan sumber energi bangsa yang menentukan masa depan. Dialektika ini perlu dibedah dari aspek akar sejarah, kondisi kontemporer, serta inti masalahnya sendiri, baru setelah itu dapat diusulkan solusi rasional, dewasa dan permanen yang mungkin dijalankan.

Pertama adalah aspek historis dialektika Islam dan Negara.

Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui Selat Malaka, menuju pulau Jawa di Jepara dan Gresik. Dari sana penyebaran Islam bergerak menuju Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate. Pada gilirannya, secara struktural berdiri Kerajaan Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, Kerajaan Ternate, dan lainnya. Secara damai, dialogis dan kultural, Islam masuk ke seluruh wilayah Nusantara ini.

Sebagai agama populis, egaliter, dengan etos dan budaya dagang; Islam telah membangkitkan semangat wirausaha para pemeluknya yang terutama tinggal di daerah pesisir. Pemeluk awal Islam Nusantara adalah para pedagang kaya, makmur, dan terpelajar. Segera saja hal itu menjadi daya tarik bagi kaum pribumi. Pengembangan Islam selanjutnya memunculkan apa yang disebut sebagai pusat-pusat lingkaran peradaban, yakni istana, pesantren, dan pasar. Dengan karakter yang tidak membedakan antara kegiatan agama dan politik, bahkan ekonomi, maka agama ini memiliki struktur-struktur tradisional mulai dari pesantren,

madrasah, meunasah, majlis taklim, organisasi dagang, sampai tarekat sufi, pengajian, gerakan pemuda, masjid sampai pranata haji. Struktur-struktur sosial ini selanjutnya menjadi wadah bagi upaya untuk menyediakan kader-kader kepemimpinan Islam.

Para pedagang, mubalig, guru-guru agama, raja-raja pribumi, pengeran, ulama, pemimpin tarekat sufi, wali, sufi pengembara, seniman, sastrawan, cendekiawan, tabib, dan sebagainya memerankan diri dalam transformasi sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Pranata-pranata sosial keagamaan dan budaya yang diciptakan oleh komunitas Islam Nusantara serta penulisan kitab keagamaan dalam bahasa Melayu sangat efektif sebagai faktor pendorong bagi terjadinya integrasi bangsa Indonesia. Sejak abad ke-16 praktis kepulauan Nusantara telah diintegrasikan oleh Islam, agama yang relatif baru dan jauh dari wilayah yang selama ini disebut sebagai pusat dunia Islam. Dalam tiga atau empat abad, Islam mampu menjadi agama rakyat yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Betapa sedikit sekali yang tertinggal dari warisan Hindu di masa lalu, bahkan di pedalaman Jawa sekalipun dan memunculkan pertanyaan mengapa kemenangan Islam begitu komplit (*Religion of Java*, Hodgson, 1974).

Ketika kolonialisme datang di bumi Nusantara, agama dan jiwa kebudayaan Islam yang menolak penindasan, ketidakadilan secara langsung telah menggerakkan sikap penentangan terhadap penjajah. Kesadaran nasionalisme umat Islam pada fase awal dalam praktiknya mengambil bentuk yang beragam, mulai dari perlawanan fisik terhadap kolonialisme (paling lambat sejak awal abad ke-19 dalam bentuk apa yang disebut sebagai pre/proto nasionalisme), sikap anti-kapitalisme, perjuangan mengembangkan identitas yang berbeda dari bangsa asing, serta peningkatan kualitas pendidikan, dan ekonomi masyarakat pribumi. Hal itu dimungkinkan, karena munculnya kesadaran sejarah Islam yang panjang di bumi Nusantara. Kesadaran inilah yang memunculkan nasionalisme Islam, yang berbeda dengan nasionalisme sekuler yang lepas dari agama.

Proto nasionalisme itu, menampakkan wajahnya pada konfrontasi langsung dengan kolonialisme Belanda yang dimulai sejak

pertengahan abad ke-17 dengan pecahnya Perang Ternate (1635-1646), Perang Makasar (1660-1669), Perang Trunojoyo (1675-1679) di Jawa, Perang Banten (1680-1682), dan terutama dalam perang antikolonial sejak akhir abad ke-18, ketika VOC bangkrut dan menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada pemerintah Hindia-Belanda. Pertempuran paling sengit dan menimbulkan kerugian besar bagi pihak Belanda adalah Perang Cirebon (1802-1806), Perang Palembang (1812-1816), Perang Paderi (1821-1838) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1859-1862), dan Perang Aceh (1872-1908). Semua aksi bersenjata ini digerakkan oleh raja-raja, pengeran, ulama, pemimpin tarekat serta santri-santri mereka.

Dalam pergerakan modern menjelang kemerdekaan, institusi penting Islam yang menonjol adalah Syarekat Islam (SI) yang bergerak dalam lapangan politik, Muhammadiyah yang bergerak dalam lapangan sosial dan pendidikan, serta NU yang terutama bergerak dalam lapangan pendidikan pesantren. Syarikat Islam yang merupakan organisasi kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi yang memiliki agenda politik selain ekonomi. Organisasi berskala nasional dan modern ini menghendaki pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari penjajahan. Tujuan lainnya adalah untuk membangkitkan semangat dagang pribumi dan membangun kerjasama untuk melawan kaum pedagang asing, yang mendapat perlakuan istimewa dari penjajah Belanda.

Dari fakta historis di atas, maka sangat jelas, bahwa Islam tidak merintang nasionalisme, justru melalui rahim Islam, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh subur. Pergerakan-pergerakan Islam sudah lama mempunyai ikatan kebangsaan. Dibandingkan organisasi kedaerahan yang masih berbasis etnik, termasuk Budi Utomo (basis kepentingan priyayi Jawa), gerakan SI justru bersifat nasional. Islam terbukti berfungsi sebagai faktor integrasi, bahkan lebih jauh lagi akar dari nasionalisme dan pembentukan negara-bangsa untuk kasus Indonesia. SI telah berhasil menarik para pedagang, para pekerja di kota-kota, para kyai dan bahkan sejumlah priyayi serta kaum tani ke dalam gerakan politik massal pertama di jaman penjajahan (Benda, 1958).

Kedua adalah fakta dan kondisi kontemporer hubungan Islam dan Negara.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang relatif baru merdeka, banyak yang masih dihantui oleh masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni masalah stabilitas ideologi. Kerap kali konsensus sejarah dalam memutuskan ideologi negara berakhir tanpa penerimaan total dari seluruh komponen bangsa yang bersangkutan. Ketika Ideologi negara yang melandaskan kebangsaan dalam kasus Indonesia dinegosiasikan secara demokratis di panggung politik, terlihat sekali bahwa proses dialektika tersebut berjalan sangat alot. Hal itu terlihat pada dialog tahap pertama selama diskusi di BPUPKI dan dilanjutkan di PPKI pada tahun 1945, maupun dalam dialog tahap kedua pada sidang-sidang Konstituante pada tahun 1956-1958.

Pada fase pertama dialog nasional, Piagam Jakarta yang memuat tujuh kata, "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,*" yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat BPUPKI sebelum lembaga ini dibubarkan pemerintah Jepang, berhasil dicoret dalam sidang PPKI. Sejarah memperlihatkan, bahwa secara politis penerimaan total pada pencoretan Piagam Jakarta itu tidak terjadi. Komponen Islam belum sepenuhnya menerima tafsiran nasionalis sekuler terhadap dasar negara. Maka, perjuangan untuk menjadikan keyakinan agama—penduduk mayoritas negeri ini—sebagai dasar negara tetap dilakukan, baik melalui perjuangan pergerakan oleh NII sejak 17 Agustus 1949 dan secara konstitusional melalui partai-partai Islam nasionalis seperti Mayumi, NU, dan PSII.

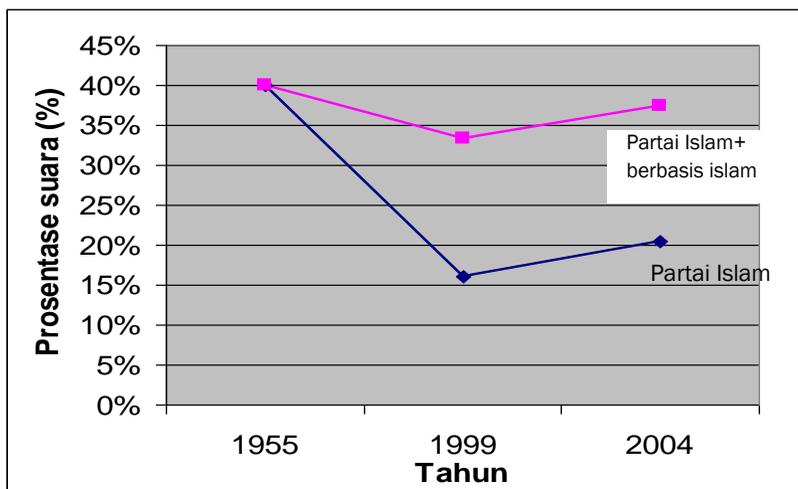
Pada dialog tahap kedua, partai-partai Islam dengan komposisi suara 40% di parlemen kembali dengan sangat alot mempertahankan konsep dasar negara berdasarkan keyakinan agama. Ujung akhirnya adalah ketiadaan kesepakatan Konstituante yang menyebabkan Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Melalui sistem Demokrasi Terpimpin, persoalan ideologi ditekan di bawah upaya-upaya

pembangunan negara. Penumpasan gerakan NII (1949-1965) pun dilakukan.

Sejarah memperlihatkan kedua jalur upaya penegakan dasar negara berdasarkan keyakinan agama gagal. Selama rezim Soeharto berkuasa, trauma ideologis ini mengambil bentuk marginalisasi partai politik dan penekanan pada kuasi-ideologi, yakni pragmatisme melalui pembangunan ekonomi, yang selanjutnya menghasilkan teknokratisme yang bebas ideologi. Kebijakan massa mengambang, kesibukan pembangunan, pengawasan oleh militer sampai tingkat-tingkat terkecil pemerintahan. Puncak dari itu semua adalah pemberlakuan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi politik. Maka, lengkap sudah *the end of ideology*.

Namun Islam tetap berkembang di Indonesia, terutama melalui jalur kultural. Fakta sosial, budaya dan politik umat Islam memperlihatkan bahwa umat Islam adalah penduduk mayoritas di negeri ini. Mereka tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Budaya Islam telah terakulturasi dalam budaya Indonesia. Islam, sebagai faktor budaya telah mempersatukan Nusantara yang terdiri lebih dari 250 etnik menjadi “bangsa baru” bernama Indonesia. Secara politis, meski negara nasional Indonesia tidak berdasarkan Islam, namun Islam diyakini para Pendiri Bangsa yang nasionalis sekuler sekalipun sebagai agen katalisator bagi nasionalisme dan persatuan kebangsaan; menjadi faktor integrasi dan kohesi sosial; sekaligus menjadi simbol nasional. Islam adalah api, spirit dan jiwa negara Indonesia; menjadi sumber karakter dan landasan moral bangsa dan negara. Hal itu terbukti dan terpatri dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara tekstual berbunyi: “*Atas berkat rahmat Allah*” serta “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” (sila pertama Pancasila) yang memperlihatkan keislaman Indonesia berdasar pada prinsip tauhid. Begitu pula, Dekrit Presiden Juli 1959 pada alinea kelima berbunyi: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 *menjiwai* Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan *suatu rangkaian kesatuan* dengan konstitusi tersebut”.

Sebagai kelanjutan dari capaian politis ini, maka perhatian negara terhadap agama adalah sebuah proses dialogis yang melalui pasang surut dan pasang naik. Adanya Departemen Agama yang mengatur urusan haji dan pendidikan agama Islam yang menjangkau dari Ibtidaiyah sampai universitas Islam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, penataan Bank Islam dan Badan Amil Zakat, penetapan pemberlakuan syariat di Aceh melalui UU. No.18/2001, serta penerapan syariah di daerah lain berdasarkan Perda.



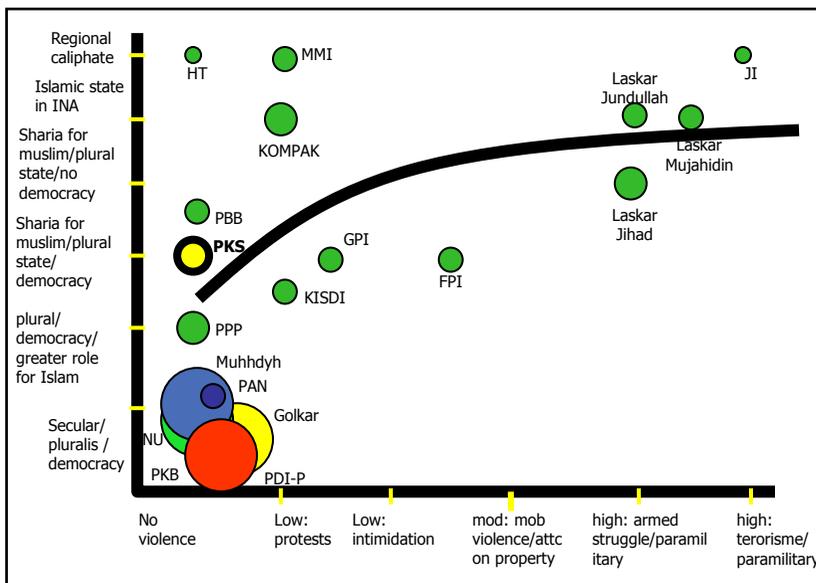
Gambar 2-8. Perolehan kursi partai Islam dan partai Islam plus berbasis massa Islam, dalam pemilu demokratis di Indonesia (Diolah dari data KPU).

Fakta politis menjelang akhir kejatuhan Orde Baru, umat Islam yang semula termarginalisasi mulai mendapat perhatian. Kesan “ijo royo-royo” di parlemen dan terutama adalah pembentukan ICMI dengan ketuanya B.J. Habibie menandakan politik mendekati ke umat mulai dijalankan. Terlihat mobilitas vertikal kaum Muslimin dalam birokrasi, seiring dengan tingkat pendidikan mereka, yang merupakan buah dari gerakan kultural Islam. Namun mobilitas vertikal SDM umat untuk ikut serta menentukan isi dan arah pembangunan kerap dipandang oleh sebagian komponen bangsa lain bukan sebagai suatu kewajiban atau sebagai suatu keniscayaan secara politis, sosial dan ekonomis.

Pasca reformasi, dengan kebebasan yang makin meluas, pendirian parpol yang lebih mudah memunculkan banyak partai berasaskan Islam, apalagi setelah Tap MPR tentang asas tunggal Pancasila dicabut. Penemuan kembali ideologi yang sudah mapan, maupun elemen-elemen ideologi dari butir-butir Pancasila terjadi, termasuk secara nyata muncul partai-partai Islam. Berdasarkan hasil pemilu demokratis di era reformasi memperlihatkan suara umat Islam secara politis menurun dibandingkan hasil pemilu tahun 1955 (Gambar 2-8). Meski Islam politik memiliki kecenderungan meningkat untuk hasil pemilu 2004 dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 1999, namun kenyataan, bahwa mayoritas Islam Indonesia bersifat moderat dan kultural ketimbang politis nampaknya masih valid. Ini mungkin disebabkan, karena mayoritas, sekitar 75% dari masyarakat. Muslim Indonesia berafiliasi ke NU atau Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar yang menganggap NKRI dan Pancasila sudah final bagi umat Islam Indonesia. Karenanya, dapat dipahami mengapa selama empat kali amandemen UUD-1945 di era reformasi, MPR tidak berkehendak untuk mengubah pembukaan UUD-1945.

Ketiga adalah inti masalah sebenarnya.

Berlatar belakang sejarah dan fakta serta kondisi kehidupan umat dalam berbangsa dan bernegara, terlihat bahwa penyelesaian atas krisis ideologis yang telah banyak memakan korban ini, nyatanya tidak bersifat permanen. Api nasionalisme yang meredup oleh pragmatisme, memunculkan separatisme dan radikalisme (Gambar 2-9) sebagai akibat ketimpangan pembangunan dan ideologis. Yang paling menyedihkan adalah menganggunya energi umat dalam pembangunan bangsa dan negara. Umat Islam termarginalisasi oleh trauma politis-ideologis masa lalu. Islam yang secara kuantitatif-nominal mayoritas belum representatif dalam aspek sosial-budaya dan sosial-politik. Fakta sejarah yang terpampang adalah mandulnya kebijakan pro-Islam di tingkat elit. Kebijakan pemerintah, baik era Soekarno maupun Soeharto, cenderung menyingkirkan peran Islam dari wilayah negara.



Gambar 2-9. Objective and tactics of Indonesian Islamic groups: Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, Routledge, London, 2007.

Semestinya, apabila Islam adalah agama mayoritas, pastilah ia juga merupakan agama mayoritas budaya daerah. Apabila kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, seperti tertera dalam UUD 1945, maka semestinya semenjak berdirinya Republik ini, Islam menjadi paradigma pembentukan kebudayaan nasional. Kenyataannya, pemerintah mengabaikan fakta antropologis dan kultural yang sangat penting ini. Dalam Orde Baru, Islam tidak boleh memberikan warna untuk dirinya sendiri dengan leluasa, apalagi kepada yang lain. Yang dipromosikan adalah nasionalisme non-Islam, nasionalisme Gajahmada-Majapahit yang mencontohkan persatuan dengan penaklukan kekerasan, bukan sejarah penyebaran Islam Nusantara yang dialogis, damai dan lebih moderen. Padahal, bangsa Indonesia menegakkan NKRI dilakukan dengan dialog dan jauh dari kekerasan-penaklukan sebagaimana model persatuan Majapahit tersebut.

Proses sejarah yang melahirkan pengaruh Islam di kepulauan Nusantara seringkali direduksi menjadi sekedar "sejarah Islam di Indonesia" dan bukannya "sejarah Indonesia" itu sendiri. Begitu

lama dan luasnya pengaruh Islam di Nusantara, namun dalam kenyataannya tidak dipandang penting dalam konstruksi negara moderen Indonesia. Dalam buku sejarah resmi maupun tidak, Islam diposisikan secara marjinal tidak signifikan dalam bangun pembentukan negara-bangsa. Peran Islam dalam mempersatukan ikatan emosional, dan heroisme perjuangan mengusir kolonial, serta pembentukan wilayah kepulauan Nusantara menjadi Indonesia pun hendak diabaikan. Indonesia berhutang budi pada nasionalisme, nasionalisme sendiri dalam konteks Indonesia sebenarnya identik dengan Islam. Nasionalisme sekuler datang terlambat, karena 150 tahun sebelum kedatangannya dasar-dasar suprastruktur nasional telah diletakkan oleh kekuatan Islam dan pemimpin-pemimpin Muslim, yang melahirkan proto-nasionalisme yang unik.

Keempat adalah solusi yang mungkin diambil.

Dalam rangka mencari solusi atas problem ideologis di atas, maka harus muncul kesadaran dasar dari seluruh komponen bangsa termasuk umat Islam sendiri, bahwa masa depan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh faktor Islam. Hal itu hanya akan berhasil bila nilai demokrasi eksplisit diartikulasi secara kompatibel dalam doktrin Islam secara ideologis (*Islam in Modern Indonesia*, 2002). Maju-mundurnya pembangunan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh sejauhmana peran umat Islam, karena Indonesia adalah bangsa Muslim, dimana sumberdaya budaya, sosial, politik dan ekonomi negara secara potensial berada dan melekat dalam tubuh umat Islam Indonesia. Energi bangsa Indonesia ada di dalam tubuh umat Islam. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam bertanggung-jawab penuh terhadap kelangsungan NKRI yang dulu diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata. Kolaborasi budaya lokal dengan ajaran Islam yang berlangsung berabad-abad telah meletakkan dasar yang kukuh bagi sebuah bangunan keindonesiaan moderen. Keislaman adalah faktor yang paling dominan dalam menopang identitas keindonesiaan. Itulah faktor keislaman Indonesia. Karenanya, memarjinalkan umat Islam Indonesia, sama seperti membonsai kebesaran bangsa Indonesia itu sendiri.

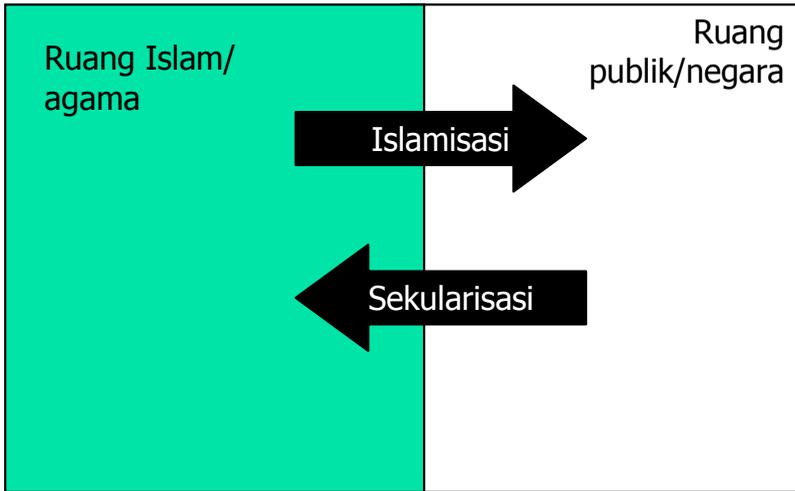
Solusi permanen dari problem ideologis ini perlu diupayakan melalui suatu penyelesaian yang dewasa dan rasional. Arah inilah yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara yang stabil, yang berdasarkan penerimaan komponen bangsanya secara rasional, obyektif, tulus dan menyeluruh. Bukan atas desakan represif dibawah moncong senjata atau berdasarkan marjinalisasi sumber daya energi umat yang sangat berlimpah, yang akhirnya hanya memunculkan Indonesia sebagai, negara yang lemah (*the weak state*) karena tidak didukung oleh mayoritas warganya.

Bila yang diinginkan adalah umat Islam yang kuat dalam negara Indonesia yang kuat, dimana umat Islam menjadi pelaku, yang menentukan arah dan isi jalannya negara, yang menjadi tulang-punggung negara dalam konteks Indonesia yang plural secara etnik dan agama, maka format perjuangan umat mestilah bersifat: Islami (damai dan non-kekerasan); rasional dan obyektif; kultural dan struktural, serta konstitusional.

Dengan format perjuangan seperti di atas, maka arah perjuangan umat akan mengambil bentuk:

Islamisasi secara struktural dan kultural, Gambar 2-10. Umat Islam Indonesia berhak melaksanakan Islamisasi kehidupan baik secara struktural maupun kultural—dalam maknanya yang positif dan obyektif. Karena agama berpengaruh pada manusia—secara individual maupun kolektif—yang kemudian pada gilirannya memberi pengaruh kepada publik dan lingkungan. Islamisasi secara *kultural* dilakukan melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya untuk menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas umat untuk mendorong mobilitas vertikal umat dalam berbagai lapangan baik birokrasi, ekonomi, budaya, intelektual, sosial maupun politik. Dengan ajaran moralitas Islam universal, maka akan tersedia basis moral yang tangguh yang selanjutnya akan menciptakan sistem ideologis dan politik yang sehat bagi sebuah bangsa. Di samping itu, islamisasi akan semakin cepat bila dilakukan dengan menggunakan kereta peradaban (IpTek). Basis kebudayaan akan menyebar bersama kemajuan peradaban material. Kecepatan penyebaran basis material akan jauh lebih cepat daripada basis kebudayaan,

karena penetrasi peradaban material akan merasuk jauh ke dalam kehidupan pragmatis manusia.



Gambar 2-10. Islamisasi dan sekularisasi:
Sebuah proses yang berlawanan.

Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyatul Islam dan risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karenanya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an maupun terorisme.

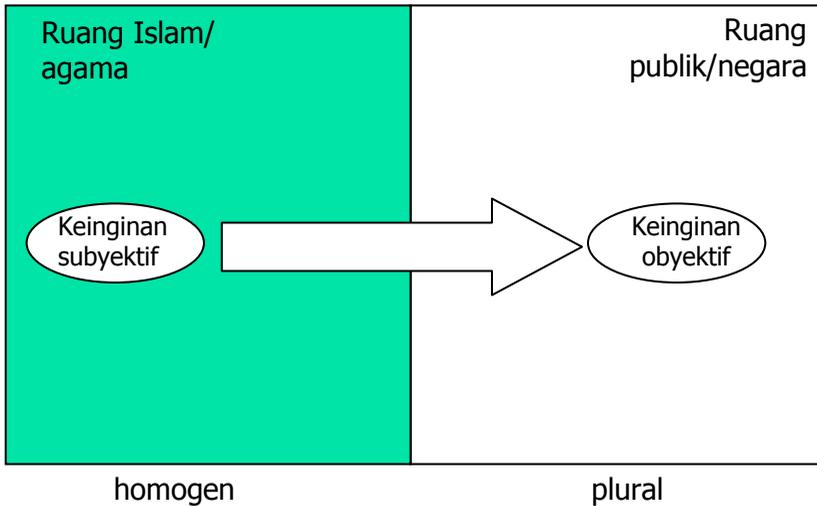
Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan Syuro, serta Amar Ma'ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui kegiatan Legislasi dengan menghadirkan undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis agar dapat hadir Masyarakat Madani yang dicitakan itu.

Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *absurd* bahkan *ahistoric*, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional itu sendiri. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain.

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotong-royong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dalam *Ukhuwwah Islamiyyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah*, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan

kontemporer. Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadir hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan era Reformasi.



Gambar 2-11. Obyektifikasi

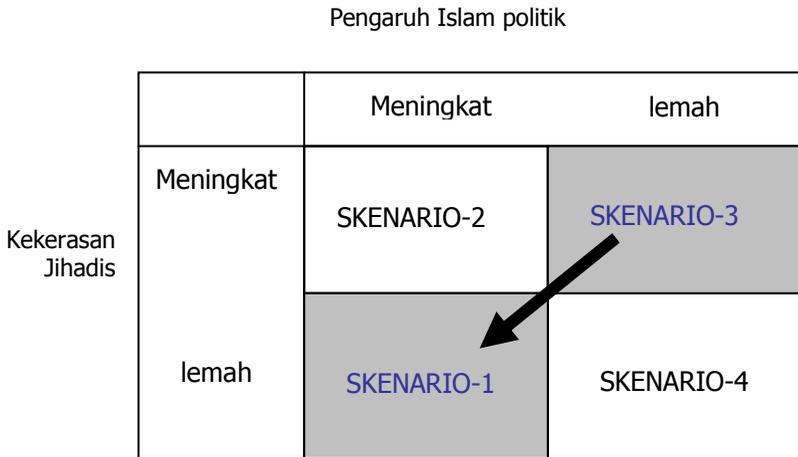
Islam tidak menjadi kekuatan penentang disintegratif atau sebagai ideologi alternatif. Islam menjadi kekuatan integratif bangsa dan negara. Format perjuangan Islam adalah partisipasi penuh dalam membentuk Indonesia yang kuat, adil sejahtera dan bermartabat. Perjuangan utama umat adalah menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya perjuangan umat adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka menebarkan rahmat bagi seluruh alam, menjadi guru bagi peradaban, yang dilakukan baik secara kultural maupun struktural.

Obyektifikasi nilai-nilai Islam adalah proses transposisi konsep atau ideologi dari wilayah personal-subyektif ke ranah publik-obyektif,

dari ranah internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh publik, Gambar 2-11. Secara subyektif, setiap Muslim berkeinginan agar syariat Islam diterapkan oleh negara. Namun keinginan subyektif tersebut agar dapat dimenangkan di wilayah publik mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai hubungan rasional-organik; memenuhi *rule of the game*; memenuhi prinsip pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif), dan; resolusi konflik, agar konsep atau ide tadi memenuhi prinsip “keadilan publik”. Kebajikan universal Islam yang mampu menembus dimensi zaman, teritorial, generasi, dimensi kehidupan, sebagai rahmat bagi semesta alam akan menjadi ide atau konsep yang mudah diterima publik. Dalam titik ini, maka persoalannya bukan terletak pada debat mengenai siapa yang memerintah atau apa bentuk negara, tetapi pada soal bagaimana menegakkan nilai-nilai universal Islam di negeri Muslim terbesar ini. Dengan demikian, ide *amar ma'ruf nahyi munkar* secara obyektif dapat dirumuskan bukan sekadar upaya untuk memberantas judi, miras, prostitusi dan mengajak ke masjid, infaq, shadaqah, puasa, haji dan sebagainya, tetapi juga upaya memberantas korupsi dan mafia peradilan, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, membela nasib buruh, tani dan nelayan, menegakkan HAM, demokratisasi dan pembangunan ekonomi umat, mengurangi diskriminasi di hadapan hukum, melestarikan lingkungan hidup, membangun Iptek, dan seterusnya. Bila gerakan ini digelorakan, maka sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah kita membangkitkan energi dan ruh umat untuk menyelesaikan masalah kita sendiri.

Pendekatan di atas, bila diringkas dan diasosiasikan dengan bentuk perjuangan awal Islam, maka akan serupa dengan konsep *Negara Madinah* dengan Piagam Madinahnya. Ini adalah basis untuk masyarakat plural religius dalam menjalankan agama juga memeliharanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, mengingat pluralitas keagamaan masyarakat Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Bila ini adalah arah yang ingin kita tempuh, maka Islam politik akan bergerak pada rel yang tepat. Gerakan Islam politik yang kuat dalam sistem demokrasi, maka secara langsung akan mereduksi gerakan radikalisme Islam non-

konstitusional, sesuai skenario Gambar 2-12. Bila hal itu terwujud, maka stabilitas Indonesia secara politik dan keamanan semakin kokoh, energi umat akan tersalurkan secara positif, dan terjadi sinergi luar biasa di tubuh bangsa ini.



Gambar 2-12. Skenario demokratisasi dan penguatan parpol Islam untuk mereduksi gerakan Islam garis keras di Indonesia.

Nasionalis substantif

Hal penting dalam diskursus dan dialektika Islam dan negara adalah persoalan Nasionalisme dan Keterbukaan partai-partai Islam. Bagi PK Sejahtera substansi keterbukaan dan nasionalisme sudah selesai. Yang diperlukan adalah pemaknaan dan reformatisasi keterbukaan dan nasionalisme baru yang sesuai dengan semangat zaman (kekinian) dan kondisi riil Indonesia yang majemuk (kedisinian). Ini agar nasionalisme dan keterbukaan tetap relevan dalam konteks tantangan zaman baru yang terus berubah, baik di tingkat global, kawasan, maupun dalam negeri.

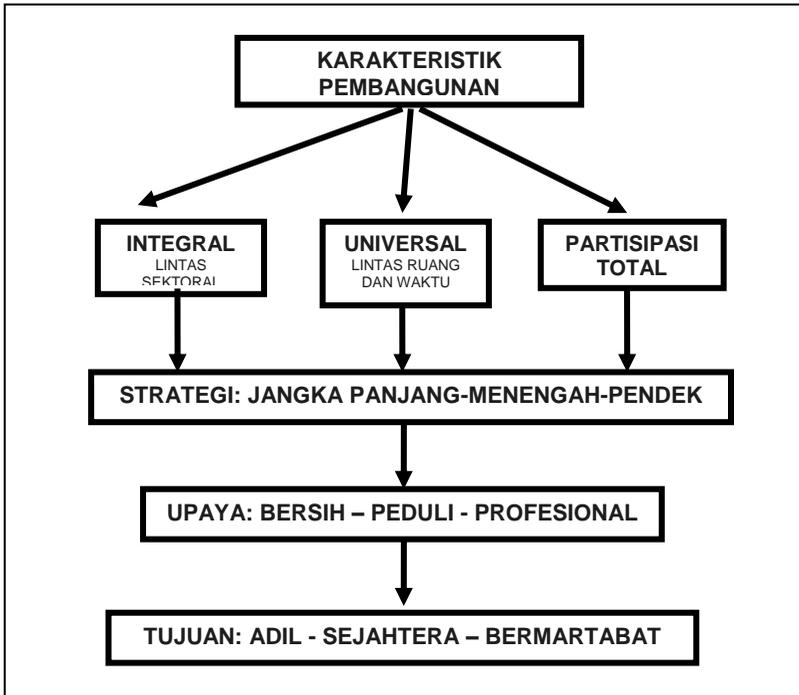
Kesadaran ideologis universal, tuntutan yuridis formal (undang-undang Parpol), dan kenyataan empiris masyarakat Indonesia yang

plural menjadikan masalah keterbukaan dan nasionalisme sudah selesai di tingkat institusional semua parpol (juga ormas) yang telah disahkan pemerintah. Yang sulit adalah di tingkat pergaulan dan perilaku politik sehari-hari.

Di kalangan kader dan simpatisan parpol (juga ormas) masih banyak yang belum memiliki kemampuan bergaul secara spontan (*spontaneous sociability*) dengan seluruh elemen bangsa dikarenakan sekat-sekat partai (juga ormas) masing-masing. Di kalangan elite juga masih banyak yang berpolitik dengan mengeksploitasi sentimen-sentimen primordial untuk meraih simpati konstituen.

Jadi, persoalan keterbukaan dan nasionalisme bukan terletak pada klaim-klaim verbal dan seberapa majemuk kepengurusan suatu partai (juga ormas) tapi lebih pada bukti-bukti substantif-faktual. Ini terkait dengan *mind set* dan kejujuran pelaku partai (juga ormas) terhadap logika sehat, nurani bersih, dan nilai luhur.

Oleh karena itu PK Sejahtera terus mengembangkan diskursus tentang nasionalisme dan keterbukaan dan menanamkan wawasan kepada kader-kadernya serta melatih mereka untuk memiliki kemampuan bergaul secara spontan dengan seluruh elemen bangsa. PK Sejahtera meyakini reformasi dan transformasi bangsa ini hanya dapat dilakukan oleh suatu *critical mass* (di dalam maupun di luar PK Sejahtera) yang memiliki kesalehan moral, kesalehan sosial, dan kesalehan profesional, serta memiliki daya rekat bangsa. Mereka ini akan tampil menjadi sosok nasionalis substantif, bukan nasionalis pragmatis.



Gambar 2-13. Karakteristik pembangunan PK Sejahtera

2.5. KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembangunan mestilah didasarkan pada tiga karakteristik berpikir yang realistis yakni integral, universal, dan partisipasi total, Gambar 2-13.

Pertama: bersifat **integral**, dimana program pembangunan di satu sektor tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di sektor lain. Pembangunan ekonomi misalnya, tidak terlepas dari pembangunan SDM yang berkualitas, pembangunan politik yang adil dan jujur serta bersih dari penyimpangan, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan iptek yang bertumpu pada kekuatan sendiri dan pembangunan sosial budaya yang berakhlak. Dalam pandangan ini tidak ada ruang bagi **arogansi sektoral** yang menyempitkan pembangunan pada satu sektor saja. Sekaligus ini mensyaratkan **koordinasi** yang harmonis antar sektor pembangunan. Sebab inti dari pembangunan adalah manusia baik sebagai pelaku, obyek dan sekaligus tujuan pembangunan.

Kedua, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap berbagai aset yang dimiliki, baik aset SDA, sosial, politik maupun budaya. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila berbagai modal dasar yang ada dipandang hanya untuk satu generasi saja. Karenanya perlu dikembangkan pandangan **universal**, yaitu pandangan yang mencakup lintas generasi, lintas teritorial dan lintas kehidupan, yaitu keberadaan akhirat. Dengan pandangan lintas generasi berarti pembangunan harus dijaga agar tetap dapat berlanjut (*sustainable*) untuk generasi berikutnya. Begitu pula dengan pandangan lintas teritorial, maka pembangunan di suatu tempat atau pembangunan wilayah Indonesia tidak dilakukan semena-mena dengan mengabaikan pengaruhnya terhadap tempat dan wilayah lain. Dengan pandangan lintas kehidupan, maka diyakini para pelaku pembangunan akan menjadikan segala aktivitasnya dalam pembangunan sebagai bagian dari ekspresi religiusitas mereka. Bahkan, bangsa Indonesia akan diakui dunia sebagai bangsa yang membawa rahmat bagi seluruh alam karena pandangan yang universal tersebut.



Gambar 2-14. Aktor pembangunan nasional. Ketiga institusi harus bekerjasama dengan prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya dominasi.

Ketiga, PK Sejahtera menilai bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan politis maupun ekonomis akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk merumuskan kepentingan bersama. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera memandang **partisipasi total** masyarakat, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan dengan pandangan yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Aktor pembangunan nasional diperlihatkan dalam Gambar 2-14. Ketiga komponen negara, pemerintah - dunia usaha - masyarakat, harus bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi. Dalam bingkai tersebut di atas, maka pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi penting dan strategis.

Prinsip-prinsip di atas dilaksanakan dengan jiwa dan komitmen **bersih, peduli dan profesional**, sebagai bentuk moralitas sekaligus integritas PK Sejahtera. Di atas prinsip dan paradigma berpikir inilah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera dirumuskan.

BAB 3

KONDISI NASIONAL DAN AKAR PERMASALAHAN BANGSA

Merenungkan masalah bangsa memerlukan kearifan dan menghendaki disiplin berpikir sistemik. Tak ada satu pun persoalan bangsa yang terlepas kaitannya dari persoalan lain. Hubungan antar perkara itu dapat bersifat positif (membawa perbaikan) atau negatif (memperparah keadaan). Karena itulah kecermatan bekerja dan keluasan wawasan pada segenap komponen bangsa dihajatkan. Jangan sampai para pemimpin bangsa terjebak pada sikap parsial atau sektoral, bukan memecahkan keseluruhan masalah, malah menanam bom waktu yang suatu saat bisa meledak dengan dahsyat.

Sebagai bangsa yang beriman, kita patut menyimak dan menghayati kembali doa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Doa itu bermakna: *“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan putus asa, aku berlindung kepada-Mu dari sifat hina dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari jerat utang dan dominasi orang lain”* (HR Abu Dawud).

Doa itu menggambarkan sejumlah masalah yang mengepung setiap perorangan maupun kelompok, perkara yang bersifat individual maupun kolektif, yang harus ditanggulangi dan dihilangkan. Permasalahan berkembang kumulatif, makin lama makin

menumpuk dan memuncak, sehingga akhirnya seseorang atau suatu bangsa tak bisa lagi mencari jalan keluar.

Permasalahan pertama bersifat psikologis, yakni merajanya **rasa cemas** (*anxiety*) dan **putus asa** (*despair*). Kecemasan bermula dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tak pasti. Krisis dan tekanan yang silih berganti memburamkan pandangan, dan mengubur harapan yang tersisa. Yang tinggal hanya perasaan bersalah (*guilty feeling*), atau kebiasaan menyalahkan orang lain (*"the enemy is out there"*), tanpa kesanggupan melakukan introspeksi atau otokritik secara kesatria.

Permasalahan peringkat kedua bersifat psikososilogis, yaitu **sifat hina** dan **malas**. Perasaan rendah diri menjangkiti, jika berhadapan dengan orang lain. Bahkan, kebiasaan mengisolasi diri dari pergaulan dengan sesama umat manusia tumbuh akibat takut bersaing. Ada bangsa yang merasa bodoh, miskin, dan terbelakang hanya karena faktor-faktor fisikal-materialistik belaka. Selanjutnya, tak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, mencapai taraf yang sama di depan bangsa lain. Malas untuk menuntut pengetahuan dan pengalaman baru, menghadapi tantangan dan melampaui ujian yang sudah sewajarnya dilakoni demi mencapai prestasi yang lebih baik atau yang terbaik. Akhirnya bangsa ini menghibur diri dengan keadaan yang stagnan.

Penyakit ketiga bersifat sosioantropologis, berupa **jiwa pengecut** dan **kikir**. Pada stadium ini, tak ada lagi semangat juang (*fighting spirit*) dan jiwa kepahlawanan (*heroism*), semuanya hanya cerita masa lalu yang dibangga-banggakan sebagai warisan nenek-moyang. Setiap orang merasa enggan untuk berkorban demi menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan, sebab pengorbanan yang tulus (*altruism*) dipandang sebagai kesia-siaan dan tak akan menghasilkan kompensasi kongkrit. Dengan demikian, musuh utama bukan berada di luar diri, melainkan di dalam diri sendiri, termasuk kekikiran dan ketamakan pribadi yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tak ada lagi keinginan untuk berbagi dengan orang lain, karena nafsu kepemilikan dan haus kekuasaan tak bisa dikendalikan. Masing-masing orang mencari

selamat sendiri, meskipun tahu perahu bangsa akan segera tenggelam.

Puncak dari permasalahan itu bersifat ekonomi-politis, yaitu **jeratan utang** dan **dominasi kekuatan asing**. Individu atau bangsa yang selalu cemas, serta malas berpikir dan bekerja biasanya suka mencari jalan pintas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus mendesak, sementara penghasilan terbatas, maka para pemalas cenderung memperbesar utang. Padahal, kekayaan terpendam yang dimiliki dan sumber daya yang menganggur masih berlimpah, namun tidak dikelola dengan baik. **Jerat utang** (*debt trap*) mulanya membuat orang hidup nyaman, karena tak perlu bekerja keras, cukup mengandalkan “kebaikan hati” orang lain. Namun, lama-kelamaan utang itu membuahkan ketergantungan, bahkan ketundukan pada kekuatan asing. Penyaluran utang adalah modus imperialisme yang paling canggih, sebab bangsa yang ditaklukkan tidak merasa dirinya dijajah oleh para kapitalis global.

Esensi doa Nabi ternyata memetakan secara tepat rangkaian permasalahan empiris atau penyakit individu dan sosial yang sedang kita hadapi. Sejak krisis ekonomi dan moneter satu dasawarsa silam, bangsa Indonesia belum berhasil lepas dari jerat masalah yang kini menjadi benang kusut krisis nasional multidimensional. Krisis ekonomi, politik, moral, dan budaya menjadi lebih mendalam. Perubahan yang sangat cepat, tatanan demokrasi yang belum mantap, arus globalisasi yang diawali dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, program pemulihan krisis yang belum tuntas diikuti pergantian pemimpin yang relatif cepat. Sementara tuntutan demokrasi, otonomi daerah dan kebebasan pers membuat pengelolaan negara tidak semudah dalam iklim otoritarian semi militeristik. Sementara tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat masih tergolong sangat rendah. Terjadi *decoupling* ekonomi-politik, dimana keterbukaan, kebebasan dan partisipasi masyarakat meningkat, namun tidak diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran justru meningkat di tengah arus demokratisasi. Bahkan, demokratisasi dan otonomi daerah telah menyebarkan virus KKN, bukan hanya

secara teritorial, tetapi secara faksional di lembaga-lembaga seperti legislatif, partai politik, lembaga sosial dan lain-lain.

Kita menyadari, melalui mekanisme otokritik kolektif yang serius, bahwa memahami persoalan atau mendeteksi penyakit lebih diutamakan ketimbang mencari solusi dan mencoba terapi yang bersifat spontan dan sporadik. Solusi tuntas hanya mungkin berdasarkan pemahaman atas akar masalah yang komprehensif. Masalah-masalah ini kita kelompokkan dalam bidang politik, perekonomian dan sosial-budaya.

3.1 BIDANG POLITIK

3.1.1 Umum

Politik adalah “aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan.” (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al-Siyasah Al-Hakimiyah).

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik dengan mengambil berbagai keputusan-keputusan yang otoritatif. Putusan itu berupa program, anggaran, regulasi maupun penentuan pejabat dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, berupa kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menggerakkan pembangunan nasional pasca-krisis di era globalisasi, maka dibutuhkan iklim politik yang kondusif, yakni terciptanya stabilitas keamanan dan politik dalam negeri yang mantap, sehingga investasi dan pariwisata asing tertarik datang ke Indonesia dan tumbuh secara normal. Selain itu, modal asing yang telah ada di dalam negeri tidak ke luar merelokasi usahanya ke luar negeri. Berbagai upaya pembangunan politik diarahkan untuk menciptakan stabilitas politik yang sehat dan dinamis yang menghasilkan pemerintahan yang efisien dan efektif, namun tetap dapat menyerap aspirasi publik yang plural dengan spektrumnya

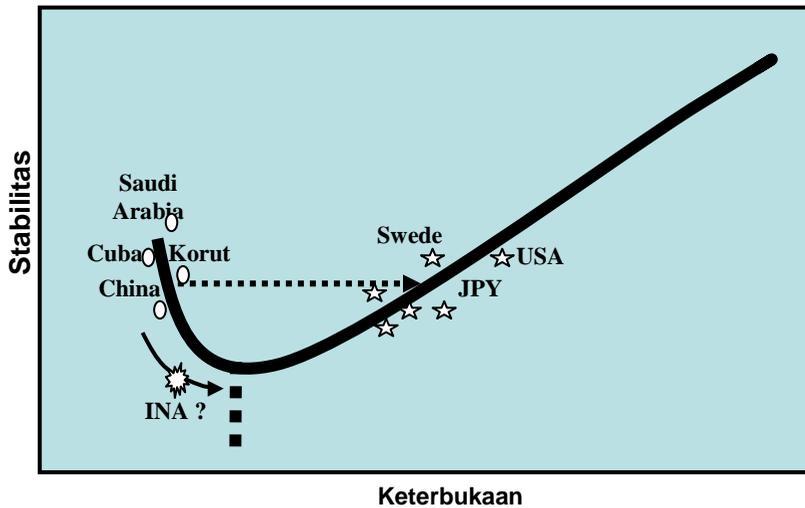
yang luas. Kondisi nasional dan akar permasalahan politik meliputi aspek ketatanegaraan, politik nasional, hukum, birokrasi, otonomi daerah dan hankam.

3.1.2. Masalah Ketatanegaraan

Globalisasi dengan semangat transparansi dan demokratisasi dengan nilai positif dan negatifnya ternyata meminta korban hancurnya federasi Uni Soviet, Yugoslavia dan meruntuhkan Tembok Berlin. Fenomena itu sebelumnya tidak terpikirkan sejarah. Negara adidaya Amerika Serikat kini berdiri tegak tanpa lawan, China dan India baru bangkit menyongsong perubahan sebagai calon negara adidaya baru. Sementara, Indonesia masih tertatih-tatih bangkit dari keterpurukan di tengah proses pemulihan ekonomi dan reformasi politik. Dalam keadaan yang serba transisional, institusi sosial-politik yang belum mapan, mentalitas aktor politik-ekonomi yang masih belum stabil, penegakan hukum yang masih bersifat tebang-pilih, serta birokrasi yang lambat dan sarat KKN, maka perlu dilakukan pembenahan ketatanegaraan.

Bila tidak menempuh jalan yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara gagal (*the failed state*). Gambar 3-1 memperlihatkan stabilitas negara dan keterbukaan karena faktor globalisasi. Mengikuti kurva-J, negara-negara yang bersifat tertutup akan bergerak ke kanan menuju titik stasioner di bawah kurva. Beberapa negara tidak mampu melewati titik ini dan pecah seperti USSR, Yugoslavia, dan lainnya.

China dengan *tunelling effect* menembus dari sisi kiri menuju sisi kanan kurva-J tanpa melewati titik stasioner. Sementara kondisi Indonesia, tidak disangkal lagi, kita memerlukan gerakan *state re-building*, membangun kembali pranata kebangsaan agar mampu melewati gelombang globalisasi dengan aman dan selamat menuju tujuan nasional yang dicitakan



Gambar 3-1. Kurva-J: Hubungan antara globalisasi dengan stabilitas nasional. Negara-negara yang demokratis terbuka ada di sebelah kanan kurva, sedang negara-negara yang tertutup dan otoritarian ada di sebelah kiri kurva. Negara seperti USSR dan Yugoslavia, bergerak dari kiri ke kanan kurva dan “pecah” di titik kritis. (Ian Bremmer, 2006).

Mengikuti cara berpikir F. Fukuyama (2004) ada dua dimensi penting pengelolaan negara, yakni: pertama berkaitan dengan dimensi *fungsi* dan kedua berkaitan dengan dimensi *kekuatan* menjalankan fungsi. Dimensi fungsi mencakup ruang lingkup pengelolaan negara, apakah minimal, pertengahan atau aktif. Dimensi kekuatan negara berkaitan dengan kemampuan menjalankan dan menegakkan fungsi-fungsi yang diembannya (Gambar 3-2). Mengingat kemampuan negara dalam mengimplementasikan fungsi-fungsinya, maka pertanyaannya sejauh mana peran negara akan dimainkan? Fungsi-fungsi apa saja yang akan menjadi lingkup dan peran negara, apakah akan mengambil fungsi aktif, pertengahan atau minimal?

Wilayah Indonesia amat luas dari Sabang hingga Merauke, dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara, serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali pemerintahan

demikian luas. Di sisi lain, pasca krisis ekonomi, tatanan politik-ekonomi yang masih transisional, menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Fungsi minimal negara dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, jaminan kepemilikan

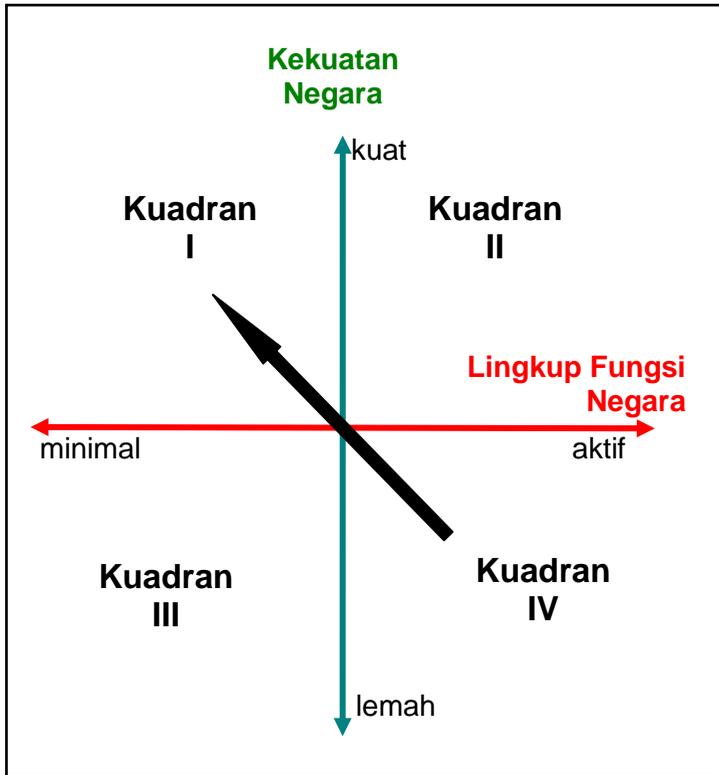
	Addressing Market Failure			Improving equity
Minimal Functions	Providing pure public goods: Defense Law and order Property rights Macroeconomic management Public health			Protecting the poor: Antipoverty programs Disaster relief
Intermediate Functions	Addressing externalities: Basic education Environmental protection	Regulating monopoly: Utility regulation Antitrust policy	Overcoming imperfect information: Insurance (health, life, pensions) Financial regulation Consumer protection	Providing social insurance: Redistributive pensions Family allowances Unemployment insurance
Activist Functions	Coordinating private activity: Fostering markets Cluster initiatives			Redistribution: Asset redistribution

Gambar 3-2. Lingkup fungsi negara.
 Source: World Development Report (1997).

pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program anti-kemiskinan dan penanggulangan bencana adalah jelas merupakan fungsi-fungsi negara yang harus dan menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya, meskipun dalam kekuatan yang terbatas.

Sementara itu fungsi pertengahan negara dalam kaitannya dengan eksternalitas seperti pendidikan dasar dan proteksi lingkungan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan monopoli juga masih menuntut peran pemerintah. Peran pemerintah semakin lama semakin berkurang bersama dengan tingginya partisipasi masyarakat. Hubungan antara dimensi fungsi dan dimensi kekuatan negara diperlihatkan pada Gambar 3-3. Hal itu menunjukkan transposisi negara dari kuadran IV (posisi dimana

fungsi negara yang aktif namun dengan kekuatan lemah) bergerak menuju kuadran I (posisi dengan fungsi negara yang minimal, namun dengan kekuatan yang tinggi). Secara ideal, negara bergerak dari fungsi aktif menjadi fungsi minimal bersama tumbuhnya kekuatan negara.



Gambar 3-3. Hubungan antara dimensi fungsi dan dimensi kekuatan negara. Kondisi ideal terjadi bila posisi negara meningkat dari kuadran IV menuju kuadran I.

Permasalahan yang relevan adalah seberapa kuatkah negara Indonesia ini dalam menjalankan fungsi minimalnya? Sudah cukupkah negara Indonesia menjalankan dan menegakkan

fungainya di bidang pertahanan, keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram? Apakah program-program antikeiskinan dan penanggulangan bencana sudah mampu mengentaskan mereka yang menderita? Inilah akar dari kondisi destabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada.

Di sisi lain, reposisi lembaga-lembaga kenegaraan belum berjalan mulus. Mekanisme kerja yang belum mapan dalam suprastruktur politik diperumit dengan munculnya tokoh-tokoh politik yang belum matang. Tak ada lagi tokoh sekelas para Pendiri Bangsa yang mampu menelurkan kebijakan atau menghadirkan konvensi menuju tatanan kenegaraan baru. Lembaga-lembaga penting, semisal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajah baru. Tetapi, bagaimana peran optimal DPD, DPR, dan MPR baru itu belum gamblang. Lembaga penting lain seperti Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili sengketa politik tingkat tinggi antar lembaga negara dan mengevaluasi perubahan undang-undang telah bekerja, namun menyimpan kekhawatiran tersendiri.

Pertanyaan-pertanyaan di atas berkaitan dengan empat hal besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: sistem politik, penegakan hukum, birokrasi, dan otonomi daerah. Masalah institusi politik-hukum-birokrasi berhubungan dengan: (1) kelemahan *regulatory body* untuk mengantisipasi perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat, (2) ketidaksiapan institusi untuk berubah dan mentransfer diri ke dalam sistem *good governance* (dengan karakter utama: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, mendorong partisipasi publik, dll.), (3) pengetahuan akan desain organisasi/institusi yang bersangkutan baik internal, maupun dalam hubungannya dengan pihak-pihak eksternal organisasi, dan (4) ambiguitas institusi—berupa ketidakjelasan tugas pokok, fungsi dan peran lembaga-lembaga negara.

3.1.3. Masalah Politik Nasional

Realita politik yang terpampang di depan mata kita ditandai dengan beberapa catatan penting anomali atau kontradiksi politik.

Pertama, sistem presidensial multipartai.

Sementara kita menganut sistem pemerintahan presidensial -- bahkan dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dalam satu paket-- namun parlemen kita menganut sistem multipartai. Karenanya muncul kasus, dimana presiden yang terpilih secara langsung, ternyata didukung oleh partai yang relatif kecil di parlemen. Presiden memang memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat dan semakin sulit untuk dijatuhkan, namun tanpa dukungan parlemen berupa dukungan program, anggaran, legislasi (termasuk ratifikasi perjanjian internasional), serta penetapan personil (Duta Besar, Panglima TNI, dll.), maka kesuksesan Presiden untuk mengelola negara akan lemah.

Tabel 3-1. Komposisi Partai Politik Di Parlemen
Hasil Pemilu 1999

Partai	Kursi	% suara
PDI-P	154	33.7
GOLKAR	120	22.4
PKB	51	12.6
PPP	39	10.7
PAN	35	7.1
PBB	11	1.9
PK	7	1.4
DLL	33	10.6

*) Islam: 33.3 %, Presiden dipilih oleh MPR.

Tabel 3-2. Komposisi Partai Politik Di Parlemen Hasil Pemilu 2004

Partai	Kursi	% suara
PDI-P	109	18.5
GOLKAR	128	21.6
PKB	52	10.6
PPP	58	8.2
PD	55	7.5
PAN	53	6.4
PBB	11	2.6
PKS	45	7.3
PBR	14	2.4
PDS	13	2.1
DLL	12	12.8

*) Islam: 37.5 %. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan jumlah partai politik dalam parlemen yang banyak dan terfragmentasi dalam kursi yang relatif kecil di bawah 20% (lihat Tabel 3-1 dan Tabel 3-2) menyebabkan tidak ada partai politik yang dominan di parlemen. Tidak ada tradisi koalisi permanen dalam parlemen—koalisi terutama berbasis isu temporal—maka yang terjadi adalah suatu proses negosiasi politik antara partai-partai di parlemen dengan presiden untuk berbagi kekuasaan di level eksekutif. Meski Presiden dipilih secara langsung dan memiliki legitimasi kuat dari publik, prakteknya dibutuhkan semacam “koalisi” pemerintahan berupa partai-partai penguasa, yang merupakan gabungan parpol di parlemen yang mendukung pemerintah agar efisien dan efektif. Kasus jatuhnya pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-1921) adalah contoh nyata ketika “kongsi” parpol pendukung yang dikenal dengan nama “Poros Tengah” pecah, sehingga terjadi destabilitas dukungan, bahkan akhirnya bermuara pada *impeachment* atas Presiden. Koalisi dalam parlemen sebagai *ruling parties* inilah yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen.

Dalam kondisi politik saat ini, sulit untuk menjatuhkan pemerintahan, karena Presiden dipilih langsung oleh masyarakat.

Namun sukses dan tidaknya pemerintah dalam mengemban amanat rakyat sangat bergantung pada keharmonisan hubungan antara pemerintah dan parlemen. Dengan demikian, dalam praktek, sebagaimana dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetap dilaksanakan semacam “koalisi” pemerintahan berupa *ruling parties*, yang merupakan gabungan parpol di parlemen yang mendukung pemerintah.

Realitanya, alih-alih “koalisi” tersebut bersifat permanen, tetapi lebih bersifat situasional bergantung kondisi internal dan eksternal parpol pendukung pemerintah tersebut. Sejarah memperlihatkan Partai Golkar, yang semula merupakan lawan dari SBY ketika pilpres, berkoalisi dengan PDI-P, PPP dan partai yang lebih kecil membentuk Koalisi Nasional (48% suara Pemilu April 2004) untuk mendukung Megawati. Sebagai respons Partai Demokrat, PBB, PKPI, PKS, PAN dan partai yang lebih kecil membentuk Koalisi Kerakyatan (24% suara Pemilu April 2004) untuk mendukung SBY-JK.

Pada akhirnya SBY-JK mengalahkan Megawati dengan suara 61% lawan 39%. Partai Golkar yang semula merupakan lawan dari SBY ketika pilpres, namun setelah SBY-JK menang, dan dua bulan kemudian (Desember 2004) JK terpilih menjadi Ketum Partai Golkar, maka posisi Golkar pun segera berubah menjadi partai pendukung pemerintah. Dalam sudut pandang ini tampaknya budaya koalisi dan budaya oposisi belum tumbuh mapan. Bahkan koalisi dalam Pilpres terkesan berbeda dengan koalisi di parlemen. Padahal setelah presiden terpilih, koalisi mestinya berlanjut di parlemen, dalam rangka mendukung pemerintah. Meski tidak mentradisi, praktis setiap bulan Oktober, wacana “tarik” dan “lepas” dukungan dimunculkan oleh partai-partai pendukung pemerintah dalam kaitannya dengan *bargaining position* kader mereka dalam kabinet SBY.

JK sebagai Wakil Presiden sangat aktif tidak sekadar berperan “ban serep” sebagaimana posisi Wapres di era Orde Baru. Partai Golkar pendukung JK mempunyai kekuatan lebih dari dua kali lipat dari Partai Demokrat pendukung SBY. Ada yang membayangkan JK lebih aktif di pemerintahan, lebih berkuasa dibanding Presiden sendiri. Bagaimanapun hubungan personal keduanya, tampak jelas

bahwa sistem multipartai di parlemen telah membuat ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka menjadi mungkin. Dengan kata lain “koalisi” yang terjadi ini sangat rawan dan tidak permanen. Karenanya dapat diprediksi ketika citra pemerintah terpuruk, maka para parpol pendukung pemerintah dapat lari tunggang langgang meninggalkan “koalisi”, khawatir kecipratan citra terpuruk itu. Apalagi ketika menjelang akhir-akhir masa pemerintahan atau menjelang pemilu tahun 2009. Akibat yang dihasilkan adalah pemerintahan yang tidak efisien dan efektif.

Untuk menyikapi kondisi ini, maka jalan keluar yang sederhana adalah bagaimana merancang sistem demokrasi dimana Presiden, meski dipilih langsung oleh masyarakat namun mendapat dukungan oleh parpol di parlemen. Pilihan model untuk itu secara generik yang tampak berpeluang hanya dua yakni: (1) sistem parlementer seperti tahun 1950-an, atau (2) sistem presidensial dengan jumlah partai yang lebih sedikit.

Membandingkan kedua model demokrasi tersebut akan terlihat, bahwa model Parlementer memang menyediakan basis dukungan yang kuat bagi pemerintah terpilih, karena Perdana Menteri dipilih oleh parlemen, artinya pemerintah akan didukung penuh oleh parlemen. Namun dalam praktek di berbagai negara termasuk pengalaman kita di masa Demokrasi Parlementer tahun 1955-an, koalisi permanen dalam parlemen nyatanya tidak terbentuk. Komposisi “koalisi” berubah secara situasional dan kondisional, akibatnya pemerintah jatuh dan berganti berkali-kali. Sejarah memperlihatkan akhirnya Demokrasi Terpimpin menjadi solusi otoritarian dari konflik parlementer yang tak berkesudahan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Sistem Demokrasi Presidensial dengan jumlah partai sedikit lebih menguntungkan dalam mendukung stabilitas politik nasional. Karena dengan sistem ini memungkinkan munculnya *ruling parties* yang lebih sederhana–namun dominan–, sehingga koalisi yang relatif lebih permanen dapat terwujud. Penetapan batas ambang parpol peserta Pemilu atau sistem distrik dapat secara efektif menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Jadi pilihan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu adalah upaya untuk menumbuhkan pemerintahan yang stabil, efektif dan efisien, namun juga

mengakomodasi kondisi spektrum pluralitas politik yang ada di Indonesia. Karenanya memang eksperimentasi demokrasi seperti ini mesti dilakukan secara bertahap dan gradual.

Kedua, *legislatif heavy* dalam sistem Presidensial.

Harus diakui, bahwa dalam semangat UUD-45 hasil empat kali amandemen—sebagai arus balik dari era otoritarian rejim Orde Baru—nampak kecenderungan *legislative heavy*, dimana DPR mempunyai peran yang kuat dan dominan dalam hal-hal dukungan program, anggaran, legislasi (termasuk ratifikasi perjanjian internasional), serta penetapan personil (Duta Besar, Panglima TNI, dll.). Padahal sistem pemerintahan presidensial sebenarnya mensyaratkan *executive heavy*, agar pemerintahan dapat kuat-implimentatif menjalankan amanat rakyat pemilih. Kondisi ini tidak terlalu bermasalah, andai pemerintah didukung kuat oleh parlemen, artinya mekanisme *chek and ballances* dapat bergulir dengan sehat dan dinamis. Namun bila kondisi itu tidak terwujud, maka akan memacetkan jalannya roda pemerintahan. Karenanya segaris dengan persoalan anomali pertama, eksistensi sistem Demokrasi Presidensial dengan jumlah partai sedikit lebih menguntungkan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik nasional.

Ketiga adalah terjadinya fenomena *decoupling* ekonomi-politik.

Saat ini, dimana kebebasan dan keterbukaan diperoleh secara luar biasa, bahkan terjadi euforia politik, namun nyatanya kesejahteraan rakyat, masih belum terwujud. Padahal semestinya demokrasi, kebebasan dan keterbukaan adalah alat bagi kepentingan nasional, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika politik dan demokrasi prosedural-formalistik di era Orde Baru runtuh, yang muncul adalah demokrasi liberal-transisional di era reformasi. Padahal yang kita inginkan adalah demokrasi yang dewasa, substansial, dimana demokrasi adalah alat bagi kepentingan nasional demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan bagi segenap warga bangsa.

		POLITIK	
		BEBAS	TIDAK BEBAS
EKONOMI	SEJAHTERA	Setuju	Kurang setuju
	TIDAK	tidak setuju	Sangat tidak setuju

Gambar 3-4. Penilaian masyarakat terhadap kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi.

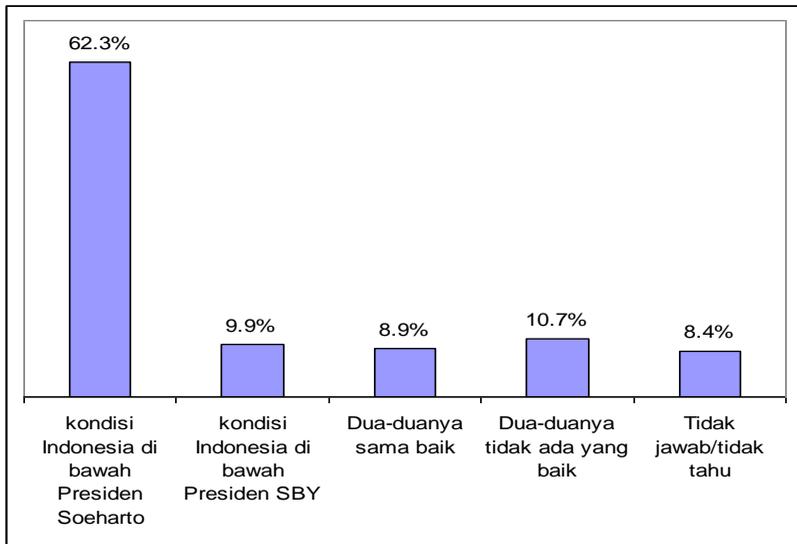
Gambar 3-4 memperlihatkan hubungan antara faktor politik (kebebasan) dihadapkan dengan faktor ekonomi (kesejahteraan). Dari empat kuadran tersebut, kondisi yang ideal terjadi bilamana masyarakat merasa bebas dan sejahtera. Kondisi yang memprihatinkan dan ditolak masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat terpuruk secara ekonomi dan secara politik tidak bebas. Masyarakat kurang bisa menerima kondisi politik yang bebas, namun mereka menderita secara ekonomi. Berdasarkan bingkai analisis ini, karenanya dapat dimengerti hasil survei yang diperlihatkan Gambar 3-5 dan Gambar 3-6.

Menjawab pertanyaan “mana yang lebih baik kondisi Indonesia di bawah Presiden Soeharto atautkah kondisi Indonesia saat ini di bawah Presiden SBY?” Serta pertanyaan “saat ini sudah 8 tahun era reformasi bergulir. Indonesia pernah berada di masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Menurut penilaian Saudara mana yang lebih baik dari kondisi ekonomi Indonesia, apakah di masa Orde Lama, Orde Baru atau Orde Reformasi?”

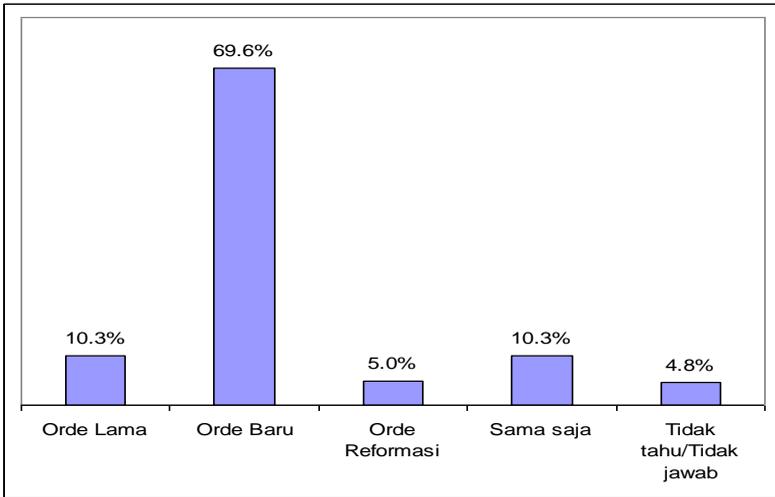
Survei nasional Lingkaran Survei Indonesia pada Mei 2006 di seluruh populasi menyimpulkan, bahwa meski Orde Baru tercatat sebagai rezim yang banyak melakukan pelanggaran HAM, dan membelenggu kebebasan, serta sangat tidak demokratis, namun demikian banyak publik yang rindu terhadap kondisi Indonesia selama Orde Baru dengan ekonomi yang stabil. Sebanyak 62.3% publik Jakarta menilai lebih baik berada pada masa Orde Baru dibanding sekarang ini. Untuk bidang ekonomi, sebanyak 69.6% publik Jakarta menilai kondisi ekonomi di masa Orde Baru jauh lebih baik dibanding Orde Reformasi. Kalau boleh memilih antara

kebebasan dan kesejahteraan masyarakat, maka banyak orang lebih memilih kesejahteraan ekonomi ketimbang kebebasan politik saja.

Evaluasi positif atau negatif terhadap kinerja lembaga-lembaga demokrasi seperti partai, DPR, atau Presiden dipercaya berakar dalam evaluasi publik atas kinerja ekonomi nasional, yakni apakah keadaan ekonomi nasional tahun ini menjadi lebih baik, lebih buruk, atau sama saja, dibanding tahun lalu. Bila keadaan ekonomi



Gambar 3-5. Penilaian masyarakat terhadap kondisi di bawah rezim Ode Baru (LSI, 2006)



Gambar 3-6. Penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi di bawah rezim Ode Baru (LSI, 2006).

nasional dirasakan lebih baik, maka pada gilirannya lembaga-lembaga demokrasi seperti partai, DPR, dan Presiden juga dinilai berkinerja baik, dan kemudian muncul rasa puas di masyarakat bagaimana demokrasi kita dipraktikkan. Pada akhirnya publik menjadi semakin yakin bahwa demokrasi memang sistem politik terbaik.

Masalahnya, sejak otoritarianisme Soeharto tumbang umumnya masyarakat tidak pernah merasa bahwa keadaan ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu sekitar satu windu, rata-rata anggota masyarakat yang merasakan bahwa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya hanya sekitar 24%. Sejak tahun 1999 hingga sekarang memang ada perbaikan, misalnya dari 7% pada tahun 1999 menjadi 28% pada tahun 2001. Pernah mencapai perbaikan tertinggi pada tahun 2004 ketika masa pemilihan umum. Tapi tidak melampaui 35%. Siapapun pemimpin nasionalnya dalam delapan tahun terakhir, publik pada umumnya tidak merasakan

bahwa keadaan ekonomi nasional menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Persoalan ekonomi ini merupakan persoalan lintas kepemimpinan nasional, dan seperti akan ditunjukkan di bawah, bahwa masalah ekonomi ini berhubungan secara berarti dengan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, kepuasan publik atas praktek demokrasi, dan dukungan terhadap keyakinan bahwa demokrasi merupakan sistem politik terbaik. Evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional berhubungan secara berarti dengan evaluasi terhadap lembaga-lembaga demokrasi, dan juga secara langsung dengan evaluasi atas praktek demokrasi secara umum. Warga yang merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih baik cenderung juga menilai bahwa lembaga-lembaga demokrasi berkinerja baik, dan juga cenderung lebih positif dalam menilai praktek demokrasi kita. Pola hubungan seperti itu mengindikasikan bahwa lambatnya pemulihan ekonomi bisa berdampak negatif terhadap kepuasan publik terhadap praktek demokrasi di negara kita, dan pada akhirnya masyarakat semakin tidak yakin bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik atau paling pas untuk negara kita. Dengan kata lain, legitimasi atas konsolidasi demokrasi kita potensial terancam oleh lambannya pemulihan ekonomi nasional.

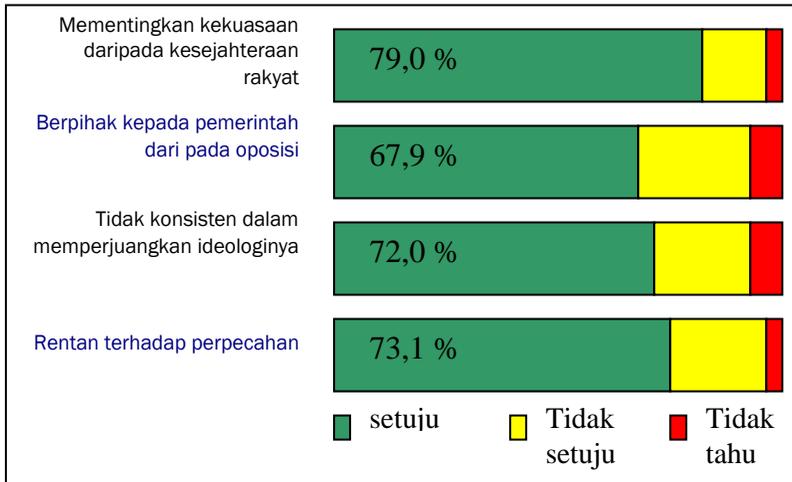
Pola hubungan antara kinerja ekonomi nasional dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi tersebut bersifat konsisten dan penting. Analisis ini menunjukkan bahwa demokrasi kita bisa terselamatkan, atau terancam keberlangsungannya, tergantung pada kinerja lembaga-lembaga demokrasi, terutama presiden, DPR, dan partai politik. Sedang, kinerja lembaga-lembaga itu di mata publik tergantung pada seberapa baik kekuatan kolektif mereka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dari kenyataan itu, maka ke depan upaya untuk melakukan *coupling* antara ekonomi dan politik menjadi penting. Kondisi politik yang sehat dan stabil sangat dibutuhkan sebagai basis yang baik bagi pembangunan ekonomi.

Keempat adalah demokrasi yang inefisien.

Sekarang ini harus diakui, bahwa dalam suatu daerah dapat terjadi beberapa kali pilkada/pemilu mulai dari level Kabupaten/Kota, Propinsi, kemudian pemilu dan pilpres di tingkat nasional. Dengan model demokrasi yang ada, calon peserta pilkada/balon aleg harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keperluan kampanye politik, baik yang transparan ataupun tidak.

Model demokrasi mahal seperti itu, mengurangi kesempatan bagi calon berkualitas yang tidak kaya-raya, atau dengan kata lain model ini hanya cocok untuk calon yang kaya-raya terlepas dari bobot kualitas yang bersangkutan. Tentu saja demokrasi seperti ini sangat inefisien dan rawan politik uang. Karenanya ke depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat yang mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

Kelima adalah persoalan kepartaian.



Gambar 3-7. Persepsi publik terhadap kinerja partai (Kompas, 2007).

Konflik internal partai, pecahnya partai lama dan pembentukan partai baru adalah penyakit dalam tubuh partai seiring dengan munculnya euforia kebebasan. Budaya berpartai belum tumbuh. Ideologi partai dan sistem kaderisasi lebih tampak hanya sebagai slogan teoritis. Kenyataannya di lapangan, sikap pragmatisme menjadi denyut nadi partai politik. Gambar 3-7 memperlihatkan hasil survei Kompas (September 2007). Secara umum, 79 persen responden mengakui, parpol saat ini cenderung mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Bahkan, fenomena tersebut juga diakui 52 persen responden terhadap parpol pilihan mereka. Pertanyaannya, apakah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat parpol harus memenangi kekuasaan terlebih dahulu? Responden (50,8 persen) tidak percaya kesejahteraan rakyat hanya bisa diperjuangkan setelah parpol mendapatkan kekuasaan. Faktanya, hampir semua parpol yang memegang kekuasaan, baik di eksekutif maupun di legislatif, melupakan rakyat begitu kekuasaan sudah ada di tangannya. Bagi sebagian masyarakat, kepercayaan mereka terhadap parpol tidak sedikit yang disalahgunakan para elitnya. Wajar saja kalau sebagian besar (63,9 persen) responden mencurigai parpol saat ini cenderung dijadikan sebagai komoditas (barang dagangan) untuk kepentingan elite-elitnya.

Menguatnya kepentingan pribadi dalam orientasi perjuangan parpol bisa dirasakan juga oleh publik dengan melemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan parpol saat ini. Munculnya kepentingan yang beragam di balik faksionalisme yang berkembang saat ini mencerminkan gagalnya parpol mengompromikan perbedaan-perbedaan tersebut. Fungsi agregasi (menggabungkan kepentingan-kepentingan) publik tidak berjalan. Kegagalan itu tercermin dari ungkapan 72 persen responden yang tidak puas dengan kinerja parpol dalam menangkap aspirasi masyarakat. Selain agregasi politik, parpol juga memiliki fungsi artikulasi politik, yaitu mengolah berbagai kepentingan yang sudah diagregat menjadi sebuah rumusan yang teratur, entah sebagai program atau strategi perjuangan partai. Fungsi ini pun tidak dirasakan oleh publik. Mereka mengaku, parpol gagal mengartikulasikan kepentingan mereka (67,4 persen).

Secara eksternal, parpol juga dinilai gagal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ketidakmampuan parpol dalam mengartikulasikan kepentingan publik membuat fungsi partai dalam perumusan kebijakan ikut mandek. Padahal, parpol memiliki kader-kader yang berkualitas di legislatif untuk ikut merumuskan kebijakan publik bersama pemerintah.

Melemahnya kontrol partai terhadap pemerintah bisa jadi disebabkan oleh terkooptasinya parpol ke dalam pemerintahan. Hampir semua partai diberi jatah kekuasaan sehingga sikap oposisi terhadap pemerintah hampir tidak ada. Sebagian besar (67,9 persen) responden setuju bahwa parpol saat ini cenderung berpihak kepada pemerintah daripada menjadi oposisi. Sementara PDI-P sebagai satu-satunya partai yang secara terbuka menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintah juga masih belum maksimal dalam menjalankan perannya.

Ketidajelasan sikap parpol terhadap pemerintah barangkali merefleksikan ketidak konsistenan partai menjaga haluan perjuangannya. Semangat perjuangan yang biasanya lekat dengan ideologi yang dibawa bisa saja berubah, tergantung kepentingan yang ditawarkan. Lebih dari separuh responden menganggap parpol telah berpaling dari ideologi dan konstituennya. Tingkat kekritisian parpol dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan sendirinya melemah. Hal ini bisa dilihat dari sikap partai-partai besar—terutama yang terkooptasi oleh pemerintah—yang lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra pemerintah. Masih sedikit—bahkan hampir tak ada—partai yang mau menempatkan dirinya sebagai agregator kepentingan masyarakat. Partai-partai politik di Indonesia, tampaknya, memang berdiri hanya dengan satu tujuan: kekuasaan. Kegairahan sebagai artikulasi kepentingan masyarakat nyaris tak tampak.

Partai sebagai instrumen bagi saluran aspirasi rakyat, agregasi berbagai kepentingan, serta wadah pendidikan politik rakyat menjadi mandeg dan rapuh. Yang muncul dalam partai adalah rebutan kursi dan kepentingan. Upaya memodernisasi manajemen partai politik tidak terlihat. Alih-alih partai politik memunculkan tokoh-tokoh politik berkualitas, yang terpampang malah politikus

yang lemah dari aspek kapasitas, integritas, dan moralitas serta berkembangnya kekerasan politik. Partai politik mudah dipengaruhi sponsor pengusaha. Akibatnya tulang-punggung negara dalam mengelola konflik, yakni partai politik, menjadi tidak jelas statusnya. Yang marak adalah *political corruption* melalui berbagai bentuk dan aromanya seperti *rent seeking*. Kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik muncul dengan gerakan golput dan calon perorangan dalam pilkada. Karena itu reformasi kepartaian adalah agenda penting yang menjawab akar persoalan demokrasi di Indonesia. Penetapan batas ambang untuk penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu menjadi niscaya dalam rangka pembinaan politik, serta berbagai bentuk pendidikan politik lainnya.

Masalah utama kita adalah bagaimana membangun sistem demokrasi yang lebih akomodatif dan aspiratif terhadap keragaman baik etnik, agama, maupun ideologi yang ada di Indonesia, namun cukup kuat menopang pemerintahan yang dihasilkan untuk bekerja efisien dan efektif dalam mengelola negara demi mensejahterakan rakyat. Jumlah partai yang lebih sederhana, sistem distrik yang dapat menghasilkan partai di parlemen yang sederhana, pemilihan presiden yang lebih dulu sebelum pemilihan legislatif, adalah opsi-opsi penting untuk dipertimbangkan.

3.1.4. Masalah Kepemimpinan Nasional

Sejarah kepemimpinan nasional dapat dikatakan berakhir dengan sepihnya gemuruh tepuk tangan dan puja-puji. Bahkan, para pemimpin kita selalu saja jatuh tersungkur di akhir masa kepemimpinannya secara tragis. Tragedi kepemimpinan nasional di panggung sejarah penuh dengan nestapa, yang bahkan rintihannya menyentuh rasa kemanusiaan terdalam. Tidak jauh dengan apa yang ditulis Ibnu Khaldun dalam *Mukadimah*-nya tentang sejarah para dinasti, yakni ada masa-masa muda, masa jaya dan masa tua. Namun dalam konteks Indonesia, kepemimpinan nasional di masa tua sungguh mengenaskan. Bisa dilihat masa akhir kepemimpinan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya, yang harus tersungkur

bersama dengan penumpasan Gerakan 30 September/PKI. Penggantinya, Soeharto, tidak lebih baik. Masa akhir kepemimpinan Soeharto sarat dengan KKN yang dituduhkan kepadanya dan keluarganya, lalu tumbang di atas altar reformasi yang digerakkan mahasiswa. Sejak itu hujatan tidak berkesudahan hingga hari ini. Kasus-kasus KKN era Suharto dan anak-anaknya masih terus bergulir. Habibie, terlalu pendek bagi ukiran sejarah kepemimpinan nasional kita. Tidak banyak tragedi yang bisa tertulis, namun ketika Abdurrahman Wahid naik ke pucuk pimpinan nasional, hukum besi sejarah Ibnu Khaldun sepertinya kembali berlaku. Masa bulan madu pemerintahan Wahid tidak terlalu lama, setelah itu adalah riuh-rendah demonstrasi yang berakhir dengan pemakzulan, suatu babakan tragis kepemimpinan di masa transisi. Wahid harus tersungkur dari altar kepemimpinannya dengan cara yang hampir mustahil di negeri ini, tapi itulah fakta sejarah. Dalam rentang waktu yang pendek (1998-2004), Indonesia mengalami proses suksesi kepemimpinan nasional berkali-kali, namun semuanya tidak memuaskan hati.

Penjelasan yang paling sederhana dan bisa dinalar dengan mudah adalah adagium bahwa “pemimpin adalah produk masyarakatnya”. Pemimpin nasional adalah cermin dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perlakuan rakyat terhadap pemimpinnya adalah refleksi sikap budaya itu. Ketika mitos “Ratu Adil” (*messianism*) masih mengontrol alam bawah sadar budaya masyarakat kita dalam memilih pemimpin, maka pemimpin dipaksa menjadi “setengah dewa” yang tercerabut dari bingkai kemanusiaannya. Atas nama kharisma, harapan setinggi langit disandangkan kepadanya. Maka, siapa menabur harapan akan menuai kecewa. Itulah yang terjadi, ketika aspek kemanusiaan dari seorang pemimpin muncul saat rakyat terbangun dari mimpi, bersama kesadaran kehidupan ekonomi dan politik harian yang tak kunjung sesuai harapan. Kesadaran itu umumnya datang terlambat. Sang pemimpin sudah terlanjur jauh melenceng, dan kenyataan sudah semakin jauh dari harapan. Borok pemimpin sudah menjadi nanah yang menjijikan. Ratu Adil sudah berubah menjadi “Buto Ijo”, yang caci-maki dan sumpah-serapah pantas dilontarkan kepadanya.

Sesungguhnya pemimpin bukan datang dari langit dengan kekuatan supernatural. Mereka diciptakan oleh masyarakatnya, muncul dari sistem sosial-politik yang ada dengan mekanisme dan aturan main tersendiri. Pemimpin adalah bagian dari masyarakat dan muncul dari dalam masyarakat dengan segenap konteksnya. Dia tidak dimunculkan, tetapi muncul dengan sendirinya sesuai takdir yang melingkupinya. Karenanya, masyarakat rasional akan melahirkan pemimpin yang rasional. Masyarakat yang memaksakan “Satria Piningit” akan menuai kekecewaan sejarah.

Tidak banyak pilihan bagi kita untuk memunculkan kepemimpinan nasional, selain kesadaran sejarah, bahwa: **pertama** masyarakat perlu rasional dengan harapan dan cita-cita perubahannya. Mitos Ratu Adil dan superpersonal pemimpin yang mencabut akar kemanusiaan mereka adalah sikap yang tidak proporsional dan bahkan secara langsung menyiapkan jebakan bagi sang pemimpin untuk menjadi diktator yang menyengsarakan rakyat dan diri mereka sendiri. Rakyat perlu rasional dengan kondisi sosial-politik-ekonomi bangsa serta masalah dan tantangan zaman yang ada. Secara rasional, pemimpin adalah sosok yang akan diperhadapkan dengan tantangan zaman, untuk kemudian mencarikan solusinya demi kesejahteraan rakyat.

Kedua, cepat atau lambat, kecenderungan rasionalitas ini akan mengantarkan kita pada kondisi dimana tumbuhnya sistem demokrasi yang semakin kuat, dan pemimpin yang dihasilkan terikat dalam *rule of the game* yang jelas, sehingga tidak terlalu banyak ruang manuver dan interpretasi pemimpin disediakan. Sistem yang kuat memunculkan rasionalitas dan kepastian, harapan yang proporsional dan adil. Lalu sang pemimpin ditempatkan secara utuh dalam bingkai kemanusiaannya. Kepemimpinan baru adalah kepemimpinan rasional dan modern, yakni pemimpin yang tubuh dan muncul dari masyarakat modern yang terikat dalam sistem demokrasi yang kuat dengan aturan main yang jelas.

Di era reformasi yang masih bersifat transisional ini dibutuhkan sosok kepemimpinan yang **visioner** dan **transformatif**, sehingga seluruh bangsa tidak kehilangan semangat untuk mengangkat beban berat, dan tersesat di rimba krisis yang gelap tak berujung. Kepemimpinan yang kuat, bukan dalam makna otoritarian-semi militeristik, tetapi kepemimpinan yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni pemimpin yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (**Bersih, Peduli, dan Profesional**). Sumber daya kepemimpinan nasional harus disegarkan kembali (*rejuvenasi*) melalui saluran regenerasi secara menyeluruh. Bila tidak, maka kita tinggal menunggu keajaiban politik bagi eksisnya bangsa ini dalam peradaban dunia yang semakin tinggi tingkat persaingannya. Pemimpin yang dapat berdiri tegak dalam hembusan demokratisasi dan kebebasan pers, serta mampu mengelola perubahan di era transisional, dimana kondisi berbagai pranata sosial-politik baik pusat maupun daerah masih belum mantap serta tekanan global yang keras, menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar bagi gerak kemajuan Indonesia Baru ke depan.

Pemimpin yang menjadi suri teladan, karena masyarakat membutuhkan keteladanan. Sudah banyak perangkat hukum dan lembaga yang dimunculkan, tetapi tak ada satupun figur yang mampu menjalankannya dengan sepenuh hati. Figur pemimpin yang tampil di masa transisi telah memunculkan kekecewaan baru, karena harapan akan perubahan tidak kunjung diwujudkan. Para pemimpin asyik sendiri dengan pemuasan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Masyarakat kehilangan panutan, sehingga terjadi disorientasi yang dahsyat. “Jika para pemimpin bisa berpesta pora dengan menyelewengkan aset negara, tanpa pernah tersentuh tangan hukum sedikitpun, maka mengapa kami harus terus menderita?”, begitu jerit rakyat. Kepemimpinan baru harus tampil dengan menegakkan nilai-nilai bersih, peduli, dan profesional.

3.1.5. Masalah Politik Luar Negeri

Prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945 telah dan akan terus dipraktekkan oleh pemerintahan Indonesia di panggung internasional. Pendekatan yang digunakan terus berubah bersama dinamika global dan tantangan zaman. Sikap yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara adidaya pada masa itu adalah bentuk sikap politik luar negeri kita. Ketika Perang Dingin usai, Uni Soviet runtuh, dan tembok Berlin hancur, maka bentuk-bentuk pendekatan politik luar negeri kita perlu disesuaikan.

Saat ini Amerika Serikat tampil sebagai adidaya tunggal, berdampingan dengan negara-negara yang terlihat kuat seperti Rusia, China dan India. Sementara, globalisasi dengan fenomena dunia tanpa batas memunculkan wacana *the end of nation state*, telah mengantarkan perusahaan-perusahaan multinasional menjadi semacam “negara” yang bahkan lebih kuat dari negara tradisional. Lembaga-lembaga multinasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB) juga memperlihatkan kekuatan mempengaruhi negara secara sangat berarti. Belum lagi berbagai tantangan yang muncul dari kondisi asimetrik, baik informasi asimetrik, perang asimetrik, ancaman asimetrik, dan ketidakadilan global menjadi angin yang berhembus bersama arus globalisasi.

Dinamika global ini membawa perubahan cara pandang kita pada wilayah konsentrik politik luar negeri kita. Perang melawan terorisme yang dimunculkan AS pasca serangan terhadap gedung WTC (peristiwa 11/9/2001) mempengaruhi peta hubungan kita dengan negara tetangga, yang sebagian merupakan sekutu AS. Berdasarkan perubahan lingkungan strategis inilah penyesuaian politik luar negeri yang bebas dan aktif perlu diformat ulang secara lebih kontekstual.

PK Sejahtera menegaskan kembali, segenap aspek hubungan luar negeri diselenggarakan dengan prinsip: kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, saling menguntungkan, serta penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam koridor itu, PK Sejahtera meyakini, peran internasional bangsa Indonesia akan

menjadi kontribusi yang positif bagi peradaban dunia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia harus berpartisipasi dalam penciptaan stabilitas regional dan perdamaian dunia. Salah satu agendanya adalah menggalang solidaritas bagi bangsa-bangsa yang tertindas dalam memperjuangkan kemerdekaannya, seperti Palestina. Krisis bisa dikatakan merupakan induk dari berbagai ketegangan dunia, sehingga perlu dituntaskan segera.

3.1.6 Masalah Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan superioritas aparat penegak hukum. Itu tidak berarti upaya menggapai keadilan menjadi suatu pekerjaan yang mudah. Ketika intervensi rezim penguasa terhadap hukum berkurang di era kebebasan ini, nyatanya kekuatan lain—yang berhubungan dengan pasar—dapat melakukan penetrasi kedalam lembaga-lembaga penegak hukum yang sama kuat dengan rezim sebelumnya. Penegakan hukum yang bersifat “tebang pilih” tak terhindarkan, meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Faktor-faktor teknis yang berkaitan dengan kekuatan dan profesionalitas lembaga dan aparat menjadi sangat menentukan dalam memberikan keadilan hukum bagi rakyat. Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengungkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini. Tindakan represif harus bersifat imparial dan nondiskriminatif, sehingga mudah mendapat dukungan masyarakat, apalagi untuk kasus korupsi yang luar biasa. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya menjadi momentum baru dalam perang total melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman agar menjadi ujung tombak penegakan keadilan. Kita menyaksikan dengan penuh kecemasan, adanya upaya pemangkasan wewenang

KPK dan pembusukan dari dalam, sehingga lembaga penegak hukum yang kredibel masih jauh dari harapan. Masalah korupsi sangat penting karena ia merupakan virus yang menyengsarakan rakyat dan melemahkan sendi-sendi kenegaraan. Jumlah uang negara yang hilang sangat besar dan modus operasinya bersifat kasat mata. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diselewengkan para konglomerat hitam di masa krisis, menurut catatan Masyarakat Transparansi Indonesia, berjumlah Rp 130,6 trilyun. Mantan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, membuat perhitungan yang lebih memiriskan: subsidi untuk rekapitalisasi perbankan yang tidak pernah akan sehat minimal Rp 40 trilyun, kebocoran dana APBN pada tahun 2003 sebesar Rp 370 trilyun bisa mencapai lebih dari 20% (yakni Rp 74 trilyun), pencurian kayu (*illegal logging*) dan pencurian ikan (*illegal fishing*) serta ekspor pasir (*illegal mining*) gelap sekitar Rp 90 trilyun, lalu pajak yang digelapkan sekitar Rp 240 trilyun. Dengan demikian total uang rakyat yang menguap sebesar Rp 444 trilyun, lebih besar dari total APBN tahun 2003. Korupsi legislatif dan pimpinan daerah menjadi fenomena yang makin banyak ditemukan. Virus korupsi yang semula terpusat, bersama dengan arus otonomi daerah, kini menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok negeri. Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang (*money laundering*). Benar-benar kerugian negara yang amat besar, dan semua itu ditujukan untuk melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Pemeringkatan yang dilakukan Transparency Internasional atau PERC pada Tabel 3-3 dan Tabel 3-4, secara umum konsisten, bahwa Indonesia menempati negara yang paling korup. Dalam skala PERC nilai Indonesia mendekati 10, dan dalam skala TI, posisi Indonesia jauh di bawah 4.

Hasil survei kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba, kriminalitas, perjudian, dan perlindungan TKI dinilai publik cukup baik (> 72%), Gambar 3-8. Namun berkaitan dengan pemberantasan korupsi, termasuk pembalakan hutan dan penambangan liar (*illegal mining*), publik menilai sebanyak 36% buruk. Hanya 50% responden yang menilai

baik terhadap penanganan pemerintah atas masalah korupsi.

Tabel 3-3. Peringkat korupsi di Indonesia versi Transparency International sejak tahun 1995-2007

Tahun	NILAI	KETERANGAN
1995	1,94	Terkorup di dunia dari 41 negara
1996	2,65	Peringkat ke-10 / 54 negara
1997	2,72	Peringkat ke-7 / 52 negara
1998	2,00	Peringkat ke-6 / 85 negara
1999	1,70	Peringkat ke-3 / 99 negara
2000	1,70	Peringkat ke-4 / 90 negara
2001	1,90	Peringkat ke-3 / 91 negara
2002	1,90	Peringkat ke-4 / 102 negara
2003	1,90	Peringkat ke-6 / 133 negara
2004	2,00	Peringkat ke-5 / 146 negara
2005	2,20	Peringkat ke-6 / 179 negara
2006	2,40	Peringkat ke-5 / 179 negara
2007	2,30	Dari 180 negara

Catatan: Dianggap cukup parah kalau nilainya di bawah 4.

3.1.7 Masalah Birokrasi

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai administrasi pemerintah yang dilembagakan dan ditandai dengan peraturan yang berdasarkan undang-undang, kualifikasi profesional dan disiplin, karenanya bersifat nirpribadi dan netral, dimana keputusan diambil tanpa memandang manusianya serta berdasarkan tujuan dan aturan rasional. Namun dalam realitas, termasuk pengalaman Eropa,

birokrasi Weberian ini lebih merupakan sebuah idealita yang menuntut proses pencapaian panjang. Terlebih lagi dalam kasus Indonesia atau negara Asia Tenggara pada umumnya. Ide birokrasi yang nirpribadi, netral dan rasional adalah sebuah proyek gigantik negara yang masih terkesan utopis.

Tabel 3-4. Peringkat korupsi di Indonesia versi PERC
(*Political and Economic Risk Consultancy*) survei tahun 2005.

NEGARA	NILAI
1. Indonesia	9.10
2. Filipina	8.80
3. Vietnam	8.65
4. India	8.63
5. China	7.68
6. Thailand	7.20
7. Malaysia	8.80
8. Korea Selatan	6.50
9. Taiwan	6.15

Catatan: Nilai 0 = sangat bersih ; nilai 10 = sangat korup
 Pemeringkatan ini dilakukan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) berdasarkan survei pada bulan Januari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai Responden

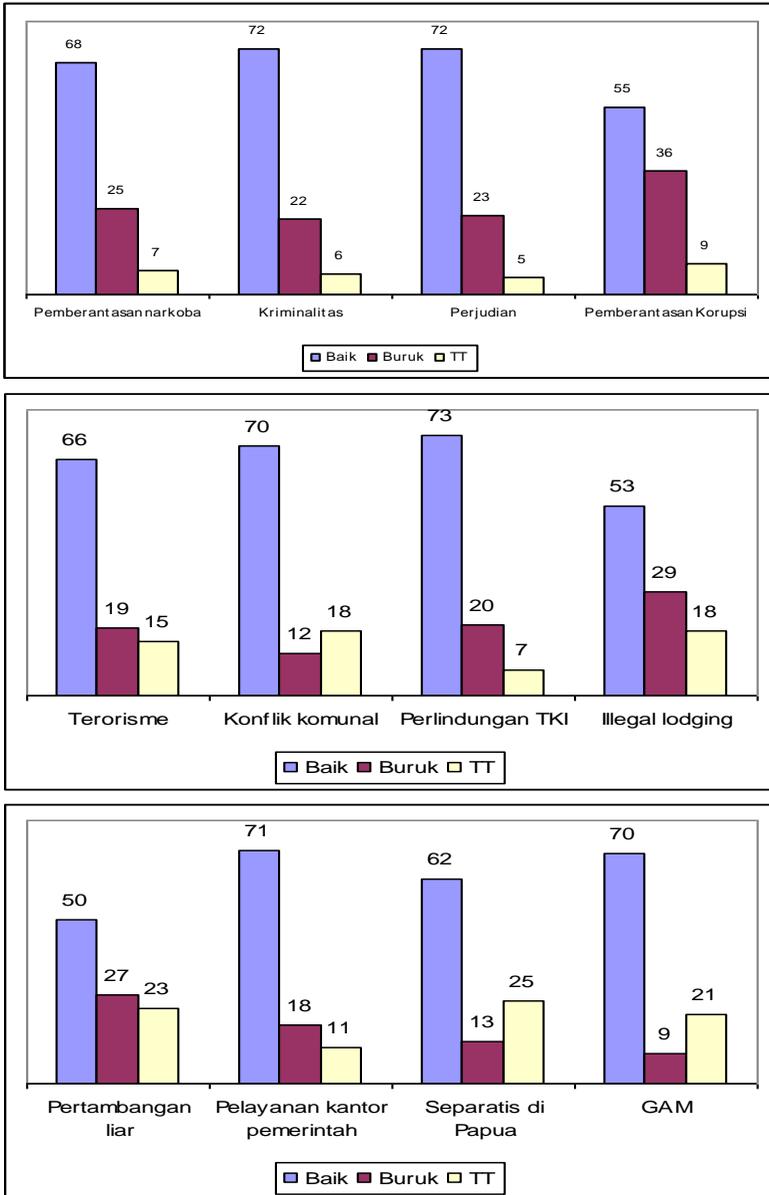
Dalam prakteknya ada tiga aspek birokratisasi yang tidak selalu nirpribadi, netral dan rasional, khususnya kondisi birokrasi di Asia Tenggara (Evers, *Kelompok-kelompok Strategis*, 1992). Aspek *pertama*, Weberisasi birokrasi sebagai pertumbuhan pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi yang profesional yang memisahkan secara formal antara kepentingan pribadi (birokrat) dengan kepentingan negara oleh administrasi pemerintahan. *Kedua*, Parkinsonisasi birokrasi sebagai tumbuhnya aparat birokrasi sesuai hukum Parkinson, dimana birokrasi menciptakan kerja untuk dirinya sendiri.

Ketiga adalah Orwellisasi birokrasi sebagai tumbuhnya birokrasi yang diikuti dengan meluasnya pengawasan birokrasi atas rakyat.

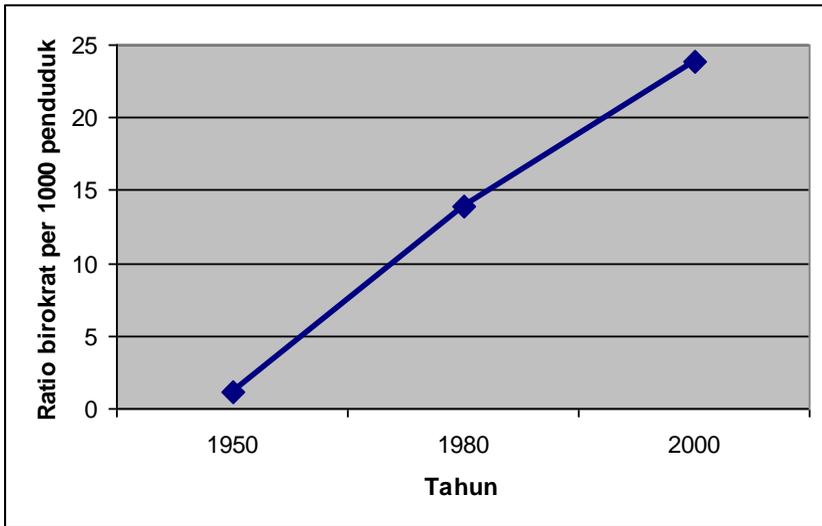
Tiga aspek birokratisasi tersebut tumbuh saling mempengaruhi, meski masing-masing berkembang dengan prosesnya sendiri-sendiri yang independen. Pertambahan jumlah pegawai negeri tidak secara otomatis menggambarkan pertumbuhan rasionalitas formal dalam proses administrasi negara atau bertambahnya pengawasan negara atas rakyat. Untuk kasus Indonesia aspek-aspek di atas juga teramati bersama pertumbuhan birokrasi. Jumlah birokrat yang hanya 1,1 per seribu penduduk saat pra-revolusi, berubah menjadi 3,7 pada tahun 1950. Jumlah ini bergerak naik menjadi 13,9 pada tahun 1980 dan kini menjadi sekitar 23,8 atau sekitar 5 juta orang (**Gambar 3-9**). Parkinsonisasi birokrasi ini tidak serta merta diikuti dengan efektivitas dan efisiensi dalam pengertian Weber yang nirpribadi, netral dan rasional.

Dalam beberapa hal birokrasi justru terkesan sebagai dinasti tersendiri sesuai dengan model Parkinson atau menjadi 'hantu' dalam fiksi Orwell yang selalu membayangi dan mengawasi rakyat. Borok birokrasi—berupa pemihakan, kapitalisasi dan irasionalitas—terus membusuk seiring dengan parkinsonisasi itu. Ada beberapa borok yang membusukkan birokrasi kita. *Pertama* adalah politisasi yang memberangus netralitas. Parkinsonisasi birokrasi nampak seperti "gula" bagi semut-semut politik, baik pada saat Orde Lama dengan multipartai ataupun pada saat Orde Baru dengan Golkar plus dua partai. Persaingan partai politik dalam mengintervensi birokrasi dalam hal penempatan orang, penerjemahan kebijakan publik, dan penghimpunan dana partai adalah sejarah kelam, yang harus dibayar mahal dengan rendahnya kualitas pelayanan, multiloyalitas PNS, dan pembusukan birokrasi.

BAB 3. KONDISI NASIONAL DAN AKAR PERMASALAHAN BANGSA



Gambar 3-8. Hasil survei atas kinerja pemerintah dalam bidang hukum, birokrasi dan pemberantasan korupsi (LSI 2006).



Gambar 3-9. Rasio birokrat per 1000 penduduk sejak awal kemerdekaan sampai hari ini (Evers, 1992).

Persaingan ini berakhir setelah Golkar menguasai birokrasi sepenuhnya. Dengan konsep monoloyalitas dan jargon “abdi rakyat” atau “abdi negara”, birokrasi malah menjelma menjadi abdi partai penguasa. Bagi PNS era Orde Baru, silogisme yang dijejalkan sungguh menjengkelkan, yakni “PNS harus Korpri”, “wadah perjuangan Kopri adalah Golkar”, maka “PNS harus Golkar”.

Penyakit kedua birokrasi adalah KKN. *Moral hazard* di lingkungan birokrasi sebenarnya bukanlah persoalan khas Indonesia, tetapi masalah yang umum terjadi di negara berkembang. Robert O Tillman menyebut fenomena ini sebagai *black-market bureaucracy* (birokrasi pasar gelap), dimana transaksi birokrasi yang sesungguhnya terjadi di bawah tangan. Virus KKN ini dapat menyulap birokrasi menjadi *bureau-crazy*, drakula yang menyedot uang rakyat.

Kapitalisasi birokrasi baik sipil ataupun militer di atas terjadi dalam berbagai bentuk. Richard Robinson menunjukkan bahwa bukan hanya pejabat sipil atau militer terlibat dalam proses kapitalisasi ini, bahkan juga keluarga-keluarga mereka (*Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State*, 1978). Dari sini berkembang koncoisme dan aktivitas *rent seeker* yang didukung faksi-faksi politik.

Penyakit birokrasi *ketiga* adalah *bureaucratism*, yakni pelayanan dan prosedur kerja yang lambat dan berbelit-belit. Adagiumnya “kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?”. Akibatnya, soal yang sepele menjadi rumit. Bintoro Tjokroamidjojo (*Manajemen Pembangunan*, 1986) mengangap penyakit ini sebagai gejala *empire building*, tak lain manifestasi hukum Parkinson, “*ngedabyah ngambra-ambra*” (melebar ke mana-mana) Penyebabnya adalah komersialisasi birokrasi atau biasa diistilahkan dengan “UUD” (*ujung-ujungnya duit*). Selain itu, karena pendekatan yang terlalu legalistik dan membuat terlalu banyak “meja” (*control points*) perijinan. Selain bertentangan dengan prinsip meritokrasi, penyakit ini cenderung melahirkan raja-raja kecil. Akibatnya bukan saja terjadi pemborosan dan inefisiensi, namun juga irasionalitas. Anggapan bahwa kerja lambatpun tidak ada masalah, serta absennya semangat persaingan menyebabkan borok birokrasi ini kian membesar.

Masalah birokrasi *keempat* yang akhir-akhir ini menguat adalah mengenai organisasi birokrasi. Pembubaran dan penggabungan beberapa departemen serta perubahan birokrasi daerah untuk mengantisipasi desentralisasi adalah persoalan penataan ulang organisasi birokrasi. Hal itu tidak hanyalah soal teknis yang berkaitan dengan promosi SDM, koordinasi dan sinkronisasi program departemental. Memang tidak terlalu mencemaskan, namun tanpa penyelesaian yang baik masalah ini dapat memicu munculnya penyakit-penyakit lainnya. Munculnya lembaga-lembaga *ad hoc* komisi negara menambah kerumitan, karena perlu koordinasi tugas pokok, fungsi dan peran.

Komplikasi penyakit-penyakit di atas telah menjadikan borok birokrasi kita mengalami pembusukan. Perlu operasi besar berupa penyesuaian pada tuntutan pasar dan demokratisasi. *Pertama* adalah depolitisasi birokrasi. Di masa Orde Baru, banyak pakar administrasi yang tidak sepekat dengan upaya ini, bahkan mereka menilai bahwa netralitas birokrasi terhadap politik adalah sikap kolot dan membawa dampak negatif bagi birokrasi (Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, 1981). Alasannya, tak ada batas hitam-putih lagi antara politik dan birokrasi. Antara birokrasi dan politik saling kait-mengkait, karena itu PNS tidak boleh netral terhadap pembangunan. Padahal, sudah jelas bahwa lembaga politik (*policy making body*), termasuk kabinet bertugas menghasilkan kebijakan publik, dan birokrasi bertugas melaksanakannya (*policy executing body*). Memang untuk melaksanakan suatu kebijakan publik perlu interpretasi dan perumusan langkah sebelum implementasi, termasuk pemberian umpan balik dan sebagainya. Apapun langkah itu semuanya adalah bagian dari suatu proses eksekusi kebijakan publik bukan perumusan kebijakan publik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan aksioma "*when politics ends, administration begins*". Ketegasan ini penting untuk mencegah kesimpang-siuran tugas. Karenanya, argumen yang menyebut bahwa menjaga netralitas ini sebagai tindakan kolot yang berdampak negatif adalah pandangan yang bias akibat rezim Orde Baru, serta bertolak-belakang dengan kenyataan sejarah.

Dalam perspektif ini, pelarangan PNS menjadi anggota atau pengurus parpol adalah arah yang tepat. Pengembalian birokrasi pada "fitrahnya", berarti menjaga konsistensi birokrasi di tengah gelombang perubahan politik. Itu bermanfaat bagi kemandirian birokrasi dalam perencanaan program, promosi SDM, dan kualitas pelayanan. Sebagai instrumen negara, birokrasi harus berkonsentrasi pada tugas pokoknya, tanpa dipengaruhi atau mendapat pesan sponsor dari partai politik. Birokrasi bekerja setelah politik berhenti, sesuai dengan asas "*administration is basically implementation of policies*". Paradigma ini konsisten dengan prinsip pemisahan antara *regulator* dan *eksekutor*.

Dalam logika ini perlu dipikirkan kembali urgensi Korps Pegawai Republik Indonesia dalam keseluruhan bangun birokrasi modern kita. Apakah masih pantas organisasi tunggal dalam birokrasi di era demokratisasi sekarang ini? Ada dua pilihan realistis, pertama Korpri tetap berdiri, namun peluang bagi serikat pekerja lain di lingkungan birokrasi harus dibuka. Atau, kedua bubarkan Korpri dan kita dorong tumbuhnya asosiasi profesi yang cocok untuk berbagai bidang birokrasi.

Upaya *kedua* adalah peningkatan kesejahteraan PNS. Langkah ini secara empiris-kolektif mujarab untuk membasmi *moral poison* dan *black-market bureaucracy*. Memang KKN adalah persoalan moralitas, bukan soal gaji. Kelayakan gaji secara empiris sangat berpengaruh untuk mereduksi KKN. Di sisi lain kebijakan *zero growth* tetap dipertahankan dalam bingkai rasionalisasi birokrasi. Upaya rasionalisasi PNS dari 5 juta orang menjadi hanya sekitar 2 juta saja atau dari 23,8 per seribu penduduk menjadi sekitar 9,5 akan digulirkan melalui opsi pensiun dini. Beberapa negara seperti Jerman atau Malaysia memiliki birokrasi yang baik, meski rasionya jauh lebih besar dari kita.

Upaya *ketiga* untuk reformasi birokrasi adalah pengembangan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas publik dari segi fungsi, hukum, pelayanan, dan keuangan birokrasi. Langkah ini sangat penting, karena secara langsung akan menghambat tumbuhnya praktek politisasi birokrasi,

Secara internal dalam birokrasi sendiri terdapat sistem pengawasan, yang bersifat *top down* serta eksistensi lembaga inspektorat. Sudah menjadi rahasia umum kalau model pengawasan seperti itu tidak efektif. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, model pengawasan yang lebih bersifat horizontal dan *bottom up* perlu dikembangkan. Berbagai saluran informasi ke lembaga pengawasan formal, maupun independen perlu dibuka, tanpa harus melanggar rahasia jabatan. Atau, rahasia jabatan itu sendiri perlu ditafsirkan secara lebih kontekstual. Kasus Letjen Agus Wirahadikusuma selaku Pangkostrad yang mengekspose audit keuangan TNI AD ke wilayah publik termasuk dalam kategori ini. Itu adalah indikator

transparansi di tubuh birokrasi militer, yakni kesiapan militer terhadap tuntutan akuntabilitas publik.

3.1.8 Masalah Kewilayahan

Untuk memenuhi amanat reformasi, keadilan, percepatan pembangunan daerah, maka Otonomi Daerah sebagai paradigma baru dalam pendekatan pembangunan, telah digulirkan. Pemberian otonomi sekarang ini didasarkan pada asas desentralisasi dan kewenangan yang utuh (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi). Meski masih dibingkai oleh tiga hal strategis, yakni koridor *peraturan perundangan yang berlaku, keutuhan NKRI, serta di luar enam bidang otoritas pusat* (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama).

Dengan peluang baru bagi daerah, maka akan terjadi perubahan pada tata kehidupan masyarakat, khususnya pada mekanisme pemenuhan kepemimpinan dan kepentingan mereka. Bila dilihat dari faktor **tujuan**, kepentingan masyarakat terarah pada cita-cita rakyat yang berisikan gambaran mengenai dambaan kehidupan yang ideal, yakni kebutuhan hidup manusia secara universal, yang secara umum berupa hasrat untuk hidup secara aman dan sejahtera. Dilihat dari faktor **sarana**, kepentingan masyarakat itu bercirikan sosial-budaya yang meliputi falsafah hidup rakyat, lingkungan fisik dan cara hidup masyarakat. Dilihat dari faktor **manajemen**, pemenuhan kepentingan masyarakat secara umum dilakukan melalui proses pembudayaan (akulturasi) masyarakat terhadap lingkungannya, dan secara khusus melalui proses pembentukan pendapat umum. Lembaga yang dapat berfungsi menyuarakan kepentingan dan pendapat umum masyarakat, antara lain lembaga desa, nagari, marga, sebagai institusi etnis-geografis yang cukup mantap, sehingga memungkinkan terwujudnya kepemimpinan informal pada tingkat bawah.

Secara teoritis dengan Otonomi Daerah di bidang ideologi, maka peluang untuk penghayatan nilai-nilai ideologis yang tumbuh di daerah menjadi lebih leluasa dan mengakar. Di bidang politik,

karena asas otda adalah desentralisasi dan demokratisasi, maka otda dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, yang memungkinkan pemerintahan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan taat asas terhadap pertanggungjawaban publik. Otda juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, efektif dan berbasis meritokrasi. Di bidang Ekonomi, otda di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, di lain pihak memungkinkan terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal, dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya, otda membuka peluang daerah untuk mengelola bidang sosial-budaya masyarakat lokal secara utuh sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam merespons dinamika kehidupan di sekitarnya, sehingga tercipta dan terpelihara keharmonisan sosial. Di bidang Hankam, daerah berpeluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian hankam secara lebih partisipatif, meskipun ini adalah bidang yang menjadi tanggung-jawab pusat.

Dengan terbukanya ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menentukan keinginan, merencanakan, mengelola, serta mengevaluasi pembangunan daerahnya secara desentralistik, otonomis dan mandiri di berbagai bidang pembangunan, maka fungsi pengenalan kepentingan dan kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan lebih berkualitas. Kepentingan keamanan dan kesejahteraan yang merupakan "*basic need*" dan "*social need*" dapat terpenuhi melalui proses pembudayaan dan pembentukan pendapat umum secara lebih berkualitas, melalui peningkatan partisipasi rakyat yang lebih luas. Sedang untuk pengenalan kepemimpinan yang berakar dari kepemimpinan masyarakat (*societal leadership*) –berada pada kelompok-kelompok masyarakat profesi/asosiasi, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta, pemerintahan Desa/Kelurahan, LKMD, dan RT/RW – menjadi semakin terbuka. Kepemimpinan tersebut, dalam menyuarkan kepentingan publik, dilakukan secara berjenjang

sesuai tatanan yang berlaku dan memiliki posisi tawar, serta dapat dijadikan sarana kontrol dalam upaya mengoptimalkan pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kepentingan dan kepemimpinan masyarakat di atas, akan meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan “*bottom-up*” ini diharapkan program-program pembangunan dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat, yang berarti meningkatnya kualitas Otda. Konsep perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat akan meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat.

Dalam praktek di lapangan, memang kondisi ideal ini masih belum tercapai dengan baik. Otonomi daerah juga tidak disertai dengan kelengkapan sistem dan prosedur yang mengatur otoritas masing-masing level pemerintahan dan kesiapan daerah untuk menata dirinya. Konsepsi ini tanpa sengaja menciptakan konflik otoritas antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan antara daerah dengan pusat, serta memicu munculnya raja-raja kecil sekaligus koruptor-koruptor kecil di berbagai daerah. Di kemudian hari, penjara-penjara di daerah banyak dihuni oleh koruptor-koruptor baru itu, baik yang berasal dari legislatif maupun eksekutif. Itu semua menyebabkan pembangunan daerah —melalui dana dekonsentrasi— menjadi sulit dikontrol dan tidak jelas efektivitas dan efisiensinya. Muncul gerakan pemekaran daerah yang membebani anggaran pemerintah, serta orientasi pembangunan yang sekedar berorientasi pada peningkatan PAD.

3.1.9 Masalah Pertahanan dan Keamanan

Di tengah kondisi politik yang serba tidak stabil, isu terorisme muncul secara global. Pemerintah tidak punya pilihan untuk tidak ikut serta dalam perang melawan terorisme. Kondisi diperburuk dengan munculnya berbagai peristiwa yang secara sepintas dapat dijadikan bukti kasat mata bahwa Indonesia merupakan salah satu

sarang teroris, seperti peristiwa bom Bali, bom di Hotel J.W. Marriot, dan di depan kedubes Australia di Jakarta. Terlepas dari benartidaknya fakta yang ada, penangkapan terhadap Omar Faruq, Amrozi dkk, Hambali di Thailand, serta tewasnya DR. Azhari, dan tertangkapnya Abu Durjana semakin mengokohkan citra Indonesia sebagai sarang teroris.

Gejala terorisme punya akar tersendiri dalam kehidupan domestik, karena faktor teritorial, kemiskinan, pendidikan, dan faktor sosial-budaya. Namun kondisi ini semakin meruyak, tatkala unsur-unsur asing masuk mempengaruhi sistem nasional yang rentan. Berbagai modus teror yang selama ini hanya berskala rendah dengan target tertentu, kini berubah menjadi stadium tinggi dengan target massif. Tekanan asing yang tak dapat direspon dengan baik membuat terorisme yang dipicu negara (*state terrorism*) menjadi sulit terkontrol. Kebebasan dan keamanan warga (*civil liberties*) pun terancam, sedang negara menjadi sasaran adu domba kekuatan asing yang ingin mencengkeram.

Masalah keamanan lain adalah gejala separatisme di wilayah yang kaya sumber daya alam semisal Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan sebagainya. Gerakan ini memperoleh justifikasi dari sejarah penganaktirian yang berkepanjangan. Jalan dialog tertutup saat semangat desentralisasi bangkit. Padahal, yang dibutuhkan sebenarnya adalah proses komunikasi dan ruang partisipasi antar kelompok etnik dan agama serta golongan sosial-ekonomi yang beragam. Sebagaimana kerepotan di tingkat lokal, maka secara nasional kesulitan mencari figur pemersatu antar kelompok etnik dan warga daerah yang amat majemuk seperti Indonesia adalah ujung yang dihadapi. Nasib NKRI berada di tepi jurang perpecahan, bila alternatif penyelamatan tak kunjung disepakati.

Masalah radikalisme yang menguat di era reformasi sebagai akibat iklim keterbukaan, kebebasan yang luas mengambil bentuk pemaksaan kehendak dengan jalan kekerasan. Secara teoritis keterbukaan dan kebebasan memberikan akses yang luas dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang lebih baik, artinya berbagai kehendak yang tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat dapat mengalir dengan baik melalui jalur tatanan politik nasional,

sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya penyaluran aspirasi melalui pemaksaan kehendak di luar jalur konstitusional, apalagi dengan cara kekerasan. Di era reformasi berbagai tatanan politik, pembangunan, dan pengelolaan perubahan belum berjalan mantap dan masih bersifat transisional. Berbagai masalah warisan Orde Baru masih belum terselesaikan tuntas, dimana rasa keadilan, ketimpangan, sumbatan aspirasi, eforia, budaya miopis, hedonis-individualis yang terbawa arus globalisasi, seringkali muncul ke permukaan dalam bentuk eksklusivisme aliran, kedaerahan, kesukuan dan sektarianisme agama. Primordialisme ini berubah menjadi radikalisme, ketika saluran aspirasi tersumbat dan intoleransi menjadi pilihan sikap yang dibarengi dengan pemaksaan kehendak melalui bentuk kekerasan.

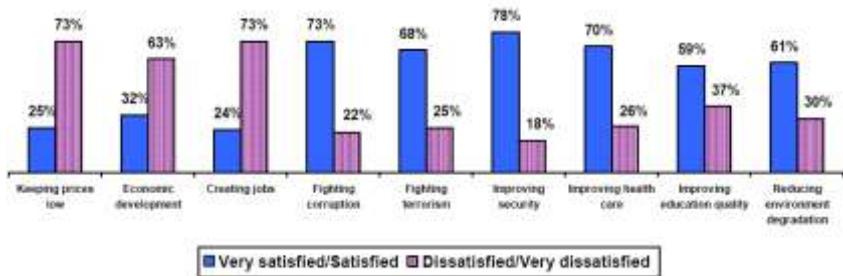
Di sisi lain peran negara dalam menciptakan saluran aspirasi, keadilan, kesejahteraan dan keamanan serta penegakan hukum dirasakan masih belum mantap. Tidak harmonisnya hubungan kemitraan dan kurang lancarnya komunikasi politik antara pihak eksekutif dengan lembaga legislatif, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah dengan Rakyat, dan antara Lembaga Legislatif dengan Rakyat, dapat berakibat negatif bagi tumbuhnya radikalisme.

Kondisi ini dapat membahayakan stabilitas nasional, bila kita tidak waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penangkalan. Implementasi kewaspadaan nasional, yang membuat kita menjadi peka, siaga dan sigap terhadap ancaman, untuk kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan pengelolaan aspirasi, kesejahteraan dan keamanan dapat menangkal tumbuhnya radikalisme di Indonesia.

Upaya penting untuk menurunkan tensi gerakan radikal di Indonesia adalah demokratisasi dan keterlibatan Islam politik di parlemen. Skenario tersebut sebenarnya adalah menciptakan saluran aspirasi dari gerakan jalanan menuju ruang-ruang parlemen yang lebih terkontrol.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia tergolong rawan dan lemah, bahkan dibandingkan dengan kondisi negara-negara di kawasan

Asia Tenggara. Selama ini sarana pertahanan dan keamanan tergantung pada dukungan satu poros, yakni AS dan sekutunya. Ketika AS melakukan embargo terhadap bantuan militer dan memberi tekanan politik yang gencar, pemerintah seperti kewalahan. Untuk itu, perlu dirintis kembali hubungan yang lebih seimbang dengan AS dan negara-negara besar lain sesuai dengan kepentingan nasional jangka panjang. Pihak AS sendiri amat memperhatikan pola hubungannya dengan Indonesia, seperti tercermin dalam skenario Indonesia masa depan yang pernah dirancang *Rand Corporation*, sebuah lembaga pemikiran dalam bidang pertahanan nasional di AS. Dalam skenario itu diungkapkan enam kondisi yang mungkin terjadi di Indonesia masa transisi: konsolidasi demokrasi, kekacauan berkelanjutan (*muddling through*), bangkitnya otoriterisme baru, tampilnya radikal Islam, terjadinya desentralisasi radikalisme, dan kemungkinan disintegrasi nasional. Kita harus lebih sigap mengantisipasi perubahan, agar skenario asing tidak menjadi kenyataan buruk.



Gambar 3-10. Kinerja pemerintah menurut penilaian publik (IFES, 2006).

Hasil survei kinerja pemerintah di bidang hankam yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme dan separatisme termasuk penanganan konflik komunal dinilai publik cukup baik (> 60%), Gambar 3-8. Dari 10 orang responden hanya satu orang yang menilai buruk kinerja pemerintah dalam penanganan terorisme dan separatisme termasuk penanganan konflik komunal ini. Gambar 3-10 memperlihatkan kinerja pemerintah dari survei lembaga yang berbeda. Untuk kasus penanganan terorisme dan peningkatan

keamanan, publik menilai kinerja pemerintah sangat memuaskan. Namun, kita tentu tidak pantas untuk berpuas diri dengan capaian ini. Ke depan langkah-langkah peningkatan harus tetap dilakukan.

3.2 BIDANG PEREKONOMIAN

3.2.1 Umum

Sejalan dengan pembangunan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi, akan selalu terjadi perubahan struktur permintaan domestik, struktur produksi dan struktur perdagangan internasional¹. Perubahan ini tidaklah terjadi seketika, melainkan merupakan proses yang memakan waktu panjang. Indonesia, selama 1950-2007 mengalami proses perubahan struktur ekonomi secara nyata. Dari negara agraris yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, tahun 1970-an, kemudian sejak tahun 1980 berkembang menjadi negara yang mengandalkan diri dari sektor industri.

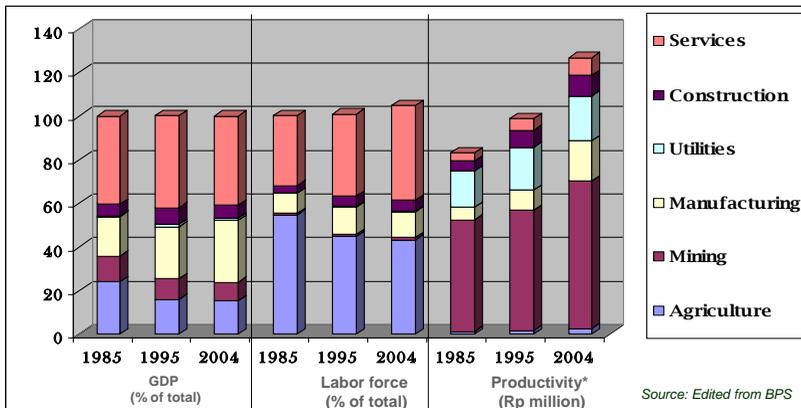
Kondisi industri yang mengalami pasang naik sejak tahun 1983 kemudian mengalami pasang surut sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Proses pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur kependudukan dan ketenagakerjaan, dalam istilah Cheney dan Syrquin disebut sebagai proses demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan,

¹ Hera Susanti, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. *Indikator-indikator Makroekonomi*, edisi kedua, hal. 1.

gizi serta pendidikan yang timbul seiring dengan pertumbuhan pendapatan perkapita². Beranjak dari kondisi inilah muncul akar permasalahan bangsa di bidang ekonomi, yakni pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, tekanan globalisasi, overeksplotasi SDA, serta terpisahnya sektor keuangan dari sektor riil.

Tabel 3-5. Peranan sektor Industri dan Pertanian dalam PDB

Tahun	Pertanian	Industri
	24,3%	11,4%
1993	17,8%	22,3%
2004	15,2%	28,2%

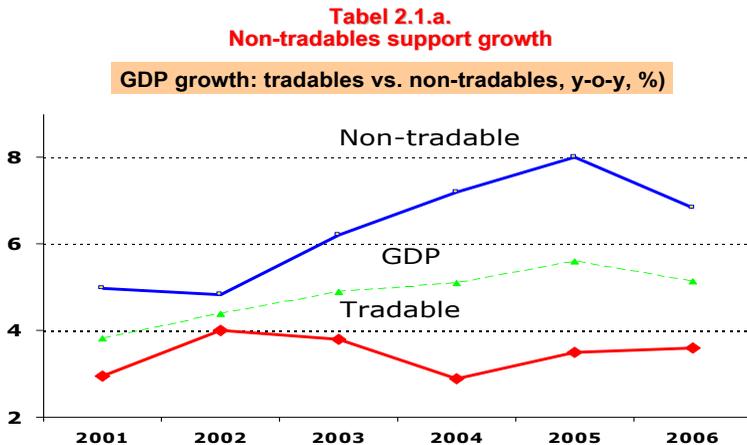


Gambar 3-11. Perubahan struktur ekonomi nasional dn pendapatan menurut sektor dan sub sektor produksi.

² Ibid. hal. 81.

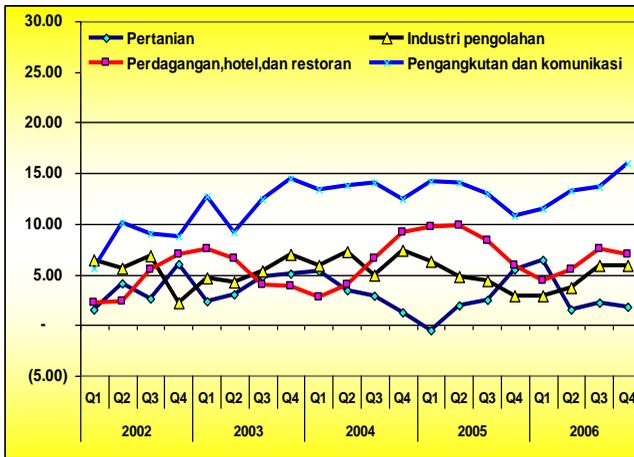
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional per kapita dalam kurun waktu yang cukup lama biasanya disertai dengan terjadinya berbagai macam proses transformasi sosial ekonomi. Salah satu yang terpenting adalah proses transformasi struktur produksi (*structural changes*), atau proses perubahan komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sektor dan sub sektor produksi, sebagaimana terlihat dalam **Gambar 3-11**. Pertumbuhan ekonomi juga biasanya disertai dengan berubahnya struktur ketenagakerjaan menurut sektor dan lapangan pekerjaan³.



Gambar 3-12. Pertumbuhan sektor tradable dan non-tradable

³ Moh. Arsjad Anwar, dalam "HUT ke 70 Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli", hal. 328



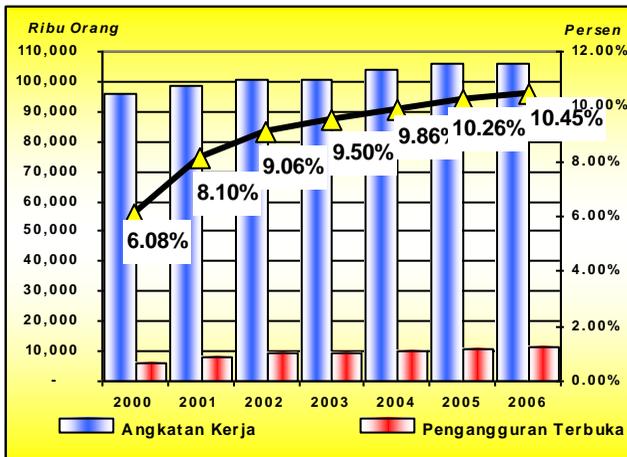
Gambar 3-13. Pertumbuhan sektor utama: pertanian, manufaktur, dan jasa.

Selama periode tahun 2001-2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hubungannya dengan perdagangan maupun jasa, terlihat bahwa sumbangan sektor jasa (*non-tradable*) lebih besar dari pada sumbangan sektor barang (*tradable*). Terlihat pula, bahwa ada *trend* kenaikan impor dan ekspor pada tahun 2003-2004, meski kemudian terus menurun pada tahun 2005-2006. Sementara itu, terlihat bahwa pertumbuhan sektor transportasi dan telekomunikasi tampak tinggi, sementara pertumbuhan sektor industri pengolahan (*manufaktur*) terlihat rendah dan cenderung stagnan. Dari aspek konsumsi dan investasi, terlihat bahwa pertumbuhan PMTDB (pembentukan modal tetap domestik bruto/investasi) naik pada tahun 2003-2004 dan kemudian cenderung menurun pada tahun 2004-2006, meskipun ada trend naik lagi di penghujung tahun 2006. Sementara, pertumbuhan konsumsi beriringan dengan pertumbuhan PDB. Bila dibandingkan dengan negara lain, maka besarnya proporsi investasi langsung di Vietnam sekitar satu setengah kali dari yang terjadi di Indonesia dan besarnya proporsi investasi langsung di China dua kali dari Indonesia. Hal ini memberikan gambaran bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi di Vietnam diperkirakan satu setengah kali

kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan besarnya pertumbuhan ekonomi di China diperkirakan dua kalinya dari pertumbuhan ekonomi kita.

3.2.3 Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Dalam demografi yang dimaksud dengan penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini terdiri atas angkatan kerja (yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan) dan bukan angkatan kerja (yang tidak bekerja karena alasan masih dalam proses pendidikan, mengurus rumah tangga tanpa dibayar, atau karena mereka dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja)⁴.



Gambar 3-14. Angkatan kerja dan pengangguran terbuka

Transformasi struktur ketenagakerjaan yang menyertai pertumbuhan ekonomi, sebenarnya tidak hanya terbatas pada perubahan struktur ketenagakerjaan menurut sektor dan lapangan

⁴, Op.cit, hal. 89.

pekerjaan, melainkan juga mencakup transformasi ketenagakerjaan menurut status dan jenis pekerjaan. Memperhatikan bahwa transformasi struktur ketenagakerjaan dipengaruhi tidak hanya oleh laju dan pertumbuhan ekonomi namun juga dipengaruhi oleh keadaan penawaran angkatan kerja⁵.

Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa, pada tahun 2002, 2004 dan 2006, jumlah Penduduk yang bekerja adalah 91,647 juta, 93,722 juta dan 95,460 juta, dengan jumlah Angkatan Kerja 100,78 juta (2002), 103,97 juta (2004) dan 106,39 juta (2006). Dari tahun 2002-2006, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus menurun, pada bulan Agustus tahun 2002 (67.76%), Agustus tahun 2004 (67,55%) dan pada Agustus tahun 2006 (66,16%).

Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka naik, pada bulan Agustus tahun 2002 (9.06%), Agustus tahun 2004 (9.86%) dan pada Agustus tahun 2006 (10.28%).

Di tahun 2006 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 40,140 juta dari jumlah penduduk yang bekerja 95,460 juta (42 persen). Sementara mereka yang bekerja di sektor manufaktur sebesar 12,45 persen. Lima besar sektor yang menyerap banyak tenaga kerja adalah: pertanian (40,14 juta), perdagangan, hotel dan restoran (19,21 juta), industri manufaktur (11,89 juta), jasa lainnya (11,36 juta) dan transportasi komunikasi (5,66 juta) dengan Nilai Tambah Bruto untuk kelima sektor tersebut adalah sebagai berikut: pertanian (1.77), perdagangan hotel restoran (4.19), industri manufaktur (11.03), jasa lainnya (3.80) dan transportasi komunikasi (5,62).

Dari tingkat pendidikan maka proporsi jumlah pengangguran di Indonesia kebanyakan berasal dari jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMU). Di sisi lain, pengangguran yang terjadi terkonsentrasi pada sektor manufaktur di perkotaan.

⁵ Moh. Arsjad Anwar, Op.cit. Hal. 329.

Pergeseran dan perubahan sektor produksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi ketenagakerjaan, terutama dari sektor pertanian kepada sektor industri manufaktur dan lainnya. Prosentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung menurun dan prosentase penduduk yang bekerja di sektor industri manufaktur, perdagangan dan jasa cenderung meningkat.

Pada triwulan III tahun 2006 terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya sebesar 14,9% tetapi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada saat yang sama sebesar 42,0%, bila dibandingkan dengan kontribusi sektor industri manufaktur dan sektor perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 27,6% dan 17,0%, tetapi jumlah penduduk yang bekerja di kedua sektor tersebut hanya 12,5% dan 20,1%. Jadi meskipun kontribusi terhadap PDB-nya demikian besar, namun karena yang dikembangkan dalam sektor tersebut adalah bisnis padat modal seperti, industri manufaktur perakitan dengan pasokan komponen dari luar negeri, pasar-pasar modern, mall dan hypermarket yang tidak padat karya, karenanya tidak dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sisi lain, pasar-pasar tradisional yang padat karya dibiarkan merana tidak diperbaiki sehingga menjadi kotor dan kumuh.

Sektor transportasi dan komunikasi adalah kontributor PDB terbesar dibandingkan sektor lainnya, namun dengan jumlah pekerja yang sangat sedikit.

Pertumbuhan ekonomi dalam kurun tahun 2001, 2002, 2004 dan 2006 yang sebesar 6%, 9% dan 12% hanya menyerap pekerja sebesar 1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan angkatan kerja sejak tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 justru sebesar 3,73%, 1,82%, dan 2,33%. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja baru dua kali lipat dari kemampuan lapangan pekerjaan menyerap tenaga kerja. Setiap tahun hanya separuh dari jumlah angkatan kerja baru yang diserap lapangan pekerjaan dan sisanya secara akumulatif menambah angka pengangguran. Dengan bertambahnya angka pengangguran, maka angka kemiskinan juga terus bertambah.

Program pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi, akan menjadikan sektor-sektor dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) per pekerja tinggi sebagai fokus utama pembangunan dengan mengabaikan sektor-sektor yang mempunyai NTB per pekerja rendah. Dalam periode 2001-2006, sektor pertanian yang hanya mempunyai NTB per pekerja sebesar 1,54 - 1,77 jauh di bawah nilai NTB per pekerja nasional yang mencapai 4,05 - 4,97 akan semakin terabaikan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah akan berlomba membangun sektor unggulan tersebut dengan mengabaikan sektor pertanian. Di satu sisi pemerintah daerah memang akan mendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain, sektor pertanian yang mampu menyerap lebih dari 40% angkatan kerja terabaikan. Hal ini mengakibatkan dikonversi lahan-lahan pertanian menjadi kawasan-kawasan bisnis dan industri, yang mendorong angka pengangguran dan angka kemiskinan naik dengan cepat.

Kecenderungan ini akan semakin mempercepat proses urbanisasi angkatan kerja baru pedesaan pergi ke kota untuk mencari kerja, meski dengan mengandalkan bekal taraf pendidikan yang rendah.

3.2.4. Masalah Kemiskinan

Prosentase tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung menurun sejak tahun 2001 sampai tahun 2005, namun nampak naik kembali dari tahun 2005 sampai 2006. Sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan pada tahun 2001 sampai tahun 2002 menaik tajam, kemudian menurun sampai tahun 2005, untuk kemudian naik kembali tahun 2006.

Sejak tahun 1990 sampai bulan maret 2006 terlihat jumlah penduduk miskin terus bertambah. Kalau pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 27,20 juta, maka pada tahun 2006 jumlahnya sudah mencapai 39,05 juta, naik sebesar 43,56% selama enam belas tahun, diperkirakan rata-rata naik 2,72% per tahun.

Dari peta kemiskinan berdasarkan sektor terlihat, bahwa kemiskinan berpusat pada sektor pertanian dengan prosentase sebesar 61,3% dari total 44,6%, selanjutnya terjadi pada sektor perdagangan sebesar 12,2% dari total 18,3% dan sektor manufakturing sebesar 10,2% dari total 11,8%. Sedangkan berdasarkan status pekerjaan, peta kemiskinan di Indonesia berpusat pada status pekerjaan informal, dengan prosentase sebesar 75,2% dari total 64,1% pekerja informal dan pada status pekerjaan formal, sebesar 24,8% dari total 35,9% pekerja formal.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi pada sektor pertanian di pedesaan dan pekerja informal di perkotaan.

Kemiskinan yang terjadi tersebut tidak terkait langsung dengan tingkat pengangguran yang terjadi, tetapi lebih disebabkan oleh kondisi *under employment*. Para pemuda dan wanita adalah segmen penduduk yang mempunyai tingkat pengangguran dan kemiskinan yang paling tinggi.

Sayogya (1971) telah menetapkan kriteria dan garis kemiskinan yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg), yakni sebesar 480 kg (kota) dan 320 kg (desa). BPS pada tahun 1984 menetapkan kriteria dan garis kemiskinan yang diukur dari konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 2100 kalori.

Dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp. 152.847 per kapita per bulan atau kurang lebih Rp. 5000 per kapita per hari (nilai sekarang), angka kemiskinan yang sempat mencapai titik terendah tahun 1996 yaitu 11,3% dan kemudian meningkat menjadi 23,4% pada tahun 1999, karena krisis ekonomi dan tidak berubah pada kisaran 18% hingga sekarang merupakan angka kemiskinan yang sangat tinggi bagi Indonesia yang kaya akan SDA. Apabila digunakan standar Bank Dunia, yakni \$2 per kapita per hari untuk menetapkan garis kemiskinan, sesuai dengan target yang dicanangkan dalam MDG (*Millenium Development Goals*), maka angka kemiskinan di atas akan mencapai 60-80%.

Pada sektor pertanian, 55% dari total rumah tangga petani pengguna lahan adalah petani gurem. Sempitnya lahan menghasilkan pendapatan yang rendah. Sekitar 70% penduduk miskin di pedesaan ada di sektor pertanian.⁶ Kenyataan ini merupakan paradoks, mengingat potensi besar Indonesia di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan, bahwa sektor pertanian tidak mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Karenanya, upaya pengentasan kemiskinan ke depan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian.

Mengingat para pemuda (15-22 tahun) dan wanita adalah segmen penduduk yang tingkat pengangguran dan kemiskinannya paling tinggi, maka penanganan kemiskinan juga harus difokuskan pada penciptaan kesempatan kerja baru bagi para pemuda dan wanita di pedesaan serta penanganan sektor informal di perkotaan. Penurunan angka pengangguran harus difokuskan pada penanganan sektor formal industri dan jasa, melalui peningkatan daya saing untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja dan membangun UKM baru untuk menciptakan lapangan kerja baru.

3.2.5 Masalah Kesenjangan

Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, umumnya sangat memperhatikan masalah distribusi pendapatan yang terjadi di negaranya. Beberapa ekonom berpendapat bahwa perbedaan pendapatan (*income inequality*) timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Perbedaan (kesenjangan) pendapatan karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori neoklasik akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu

⁶ *Kompas*, 16 Oktober 2006.

proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut hasil pembangunan akan menetes (*trickle down*) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Bila setelah proses tersebut masih ada perbedaan pendapatan yang cukup timpang, maka dapat dilakukan pendekatan Keynesian yaitu melalui sistem perpajakan dan subsidi, yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk redistribusi pendapatan. Pendapat lain mengatakan bahwa ketidakmerataan pembagian pendapatan terjadi akibat dari ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar di sini diartikan sebagai adanya gangguan yang mengakibatkan persaingan dalam pasar tidak dapat bekerja secara sempurna. Gangguan-gangguan tersebut selain berupa perbedaan dalam kepemilikan sumber daya juga dalam bentuk perbedaan dalam kepemilikan informasi, adanya intervensi pemerintah melalui berbagai peraturannya, dan yang seringkali terjadi di negara sedang berkembang adalah adanya keterkaitan antara pelaku ekonomi dengan pemerintah.⁷

Di Indonesia sendiri terjadi berbagai macam kesenjangan, di antaranya adalah kesenjangan pendapatan (*income*), kesenjangan konsumsi, kesenjangan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, kesenjangan upah, kesenjangan GDP per kapita antar pulau dan sebagainya.

Prosentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian jauh lebih besar daripada prosentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian, tetapi prosentase total pendapatan sektor pertanian jauh lebih kecil daripada prosentase total pendapatan dari sektor non pertanian.

Konsumsi bulanan dari rumah tangga di perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kesenjangan yang menyolok. Penduduk perdesaan yang jumlahnya 67,9% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 1993, mengeluarkan konsumsi bulanan sebesar Rp. 143.000, sekitar setengah dari konsumsi bulanan penduduk perkotaan.

⁷ Hera Susanti, Op.cit hal. 105.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, terdapat kesenjangan bagi tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan, baik antara perkotaan dan perdesaan, antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali, juga antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

Kesenjangan juga terjadi pada tingkat upah pekerja berdasarkan pendidikan. Terdapat kesenjangan upah, baik antara perkotaan dan perdesaan, antara Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali, juga antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur. Kesenjangan upah yang tinggi terdapat antara pekerja di perkotaan dan perdesaan, dibandingkan dengan kesenjangan antara Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali dan antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

Kesenjangan di Indonesia juga terjadi pada GDP per kapita berdasarkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Hanya pulau Kalimantan yang mempunyai GDP per kapita lebih besar 1,2 kali dari GDP per kapita pulau Jawa. Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya mempunyai GDP per kapita lebih rendah dari pulau Jawa, meskipun semua pulau tersebut mempunyai kecenderungan peningkatan GDP per kapita sejak 1997 sebagai akibat dari berjalannya otonomi daerah.

3.2.6 Masalah Tekanan Globalisasi

Peran perdagangan komoditas yang berjalan selama beberapa dekade terlihat titik balik perubahannya pada tahun 1975-1979, dimana negara-negara yang peran perdagangan komoditasnya dominan, proporsi sumbangan ekspor-impornya terhadap GDP cenderung stagnan dan menurun, dibandingkan dengan negara yang peran perdagangan komoditasnya tidak dominan.

Hal demikian terjadi karena harga komoditas yang selama ini diandalkan dalam perdagangan global seperti kopi, gula, kain katun, dan biji cokelat, selama dua dekade terakhir harganya selalu menurun dan jatuh. Secara rata-rata, harga komoditas tersebut jatuh menjadi sekitar 20% - 40% dari harga komoditas tersebut

pada tahun 1980. Kopi dan gula harganya tinggal 20% dari harga tahun 1980, sedangkan kain katun dan biji coklat harganya tinggal 40% dari harga pada tahun 1980. Di sisi yang lain, harga barang industri manufaktur naik sampai 100%.

Semua negara yang tergantung dengan harga perdagangan komoditas tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Secara rata-rata, pada tahun 1990, pertumbuhan tahunan GDP per kapita negara yang tidak mengandalkan komoditas perdagangan tumbuh sebesar 2%, sedangkan negara yang sangat mengandalkan perdagangan komoditas tumbuh 0%.

Demikian juga yang terjadi dalam penentuan tarif antara kedua model negara tersebut. Selama satu dekade terakhir upah relatif dari masyarakat berpendidikan tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar, naik menjadi 1,6 kalinya dan upah relatif masyarakat yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan pendidikan menengah naik 1,4 kalinya. Imigrasi yang berasal dari negara berkembang menuju negara maju didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah. Perawat yang dikirim dari negara-negara sahara di Afrika menuju Inggris mengalami peningkatan sampai 800%. Dan krisis ekonomi global pada tahun 1997-1998, telah memindahkan pendapatan dari penduduk miskin kepada penduduk yang kaya di negara-negara sedang berkembang.

Fakta hari ini, dimana industri nasional belum bertransformasi dari industri berbasis teknologi rendah ke industri berbasis teknologi tinggi, maka globalisasi dengan liberalisasi perdagangan merupakan ancaman bagi pembangunan ekonomi nasional. Beberapa studi menunjukkan penurunan produksi pada hampir seluruh komoditas perdagangan internasional Indonesia sejak dimulainya Putaran Uruguay. Satu-satunya komoditas yang mengalami peningkatan produksi secara signifikan hanyalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Ini pun mengalami penurunan produksi secara terus-menerus, akibat tekanan Cina dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, daya saing kita sangat rendah di pasar global, sehingga terbukanya pasar global bukan hanya tidak dapat dimanfaatkan, bahkan menekan ke dalam. Buktinya, kita tidak mampu

mendongkrak ekspor pada saat rupiah mengalami depresiasi tajam semasa krisis ekonomi 1997/1998.

Lemahnya daya saing ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan iptek. Selain itu, diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan sebab utama memburuknya iklim investasi nasional.

3.2.7 Masalah Kerusakan Lingkungan Hidup dan Overeksploitasi SDA.⁸

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang spektakuler selama 1985-1995, secara faktual ditopang oleh eksploitasi intensif sumber daya alam (SDA), baik tambang, migas, dan hutan. Meskipun sumber kekayaan alam itu semakin terbatas, ironisnya sumber pendapatan utama non-pajak pemerintah hampir 60% masih tergantung pada ekspor migas. Parahnya lagi, pada saat kita menjadi *net importer* migas, ketergantungan APBN terhadap devisa dari ekspor migas masih belum bisa dilepaskan. Sementara itu kemampuan industri untuk mengolah SDA menjadi produk bernilai tambah tinggi masih sangat terbatas, karenanya untuk memenuhi target pertumbuhan kecenderungan over eksploitasi SDA masih akan terus berlanjut. Over eksploitasi SDA berakibat akan munculnya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta pencemaran lingkungan hidup. Isu pemanasan global semakin menekan kita untuk lebih serius dan konsisten dalam melakukan upaya konservasi SDA, agar pembangunan menjadi berkelanjutan (*sustainable development*).

Selama hampir dua puluh tahun, di Sumatera total luas hutan menyusut dari 23,32 juta Ha menjadi 16,63 juta Ha. Di Kalimantan kawasan hutan menyusut dari 39,98 juta Ha menjadi 31,51 juta Ha. Di Sulawesi kawasan hutan menyusut dari 11,26 juta Ha menjadi 9,00 juta Ha. Di seluruh Indonesia kawasan hutan menyusut dari 119,70 juta Ha menjadi sekitar 100 juta Ha, atau 19,70 juta Ha

⁸ World Bank. INDONESIA Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition.

selama dua puluh tahun, dengan kecepatan penyusutan sebesar 1,64 juta Ha per tahun.⁹

Pengalihan fungsi lahan juga terjadi secara besar-besaran dari kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri atau kawasan pengolahan kayu, terutama menjadi industri kayu lapis, pabrik bubur kertas dan industri minyak kelapa sawit, serta menjadi kawasan transmigrasi. Selain berubahnya fungsi lahan, menyusutnya luas kawasan hutan di Indonesia juga disebabkan oleh kebakaran hutan, dan berkembangnya usaha pertambangan.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh peralihan fungsi lahan hutan menjadi area pertambangan, tidak hanya menyusutkan luas lahan hutan di Indonesia secara tajam tetapi juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial.

Pengeluaran perusahaan pertambangan besar untuk reklamasi tanah dan penanganan kerukan lingkungan hanya sekitar 10% per tahun, sedangkan *discount rate* per tahun sekitar 12%, dari total benefit dari aktifitas pertambangan di Indonesia yang mencapai \$ 5.225 juta. Sementara pengeluaran pemerintah Indonesia sendiri untuk perbaikan lingkungan hidup sebesar 0,163% dari APBN 1997 dan 0,079% dari APBN 1998.

Permasalahan lain yang menyebabkan rendahnya penanganan masalah lingkungan dari kawasan hutan yang diubah fungsinya menjadi hutan industri dan industri pertambangan adalah karena otonomi daerah yang belum berjalan secara optimal yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah.

3.2.8 Masalah Sektor Keuangan yang Terpisah dengan Sektor Riil

Sektor keuangan merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh arus globalisasi, Rasio perdagangan uang terhadap total perdagangan dunia adalah sebesar 2/1 (1973); 10/1 (1980); 50/1

⁹ Ibid. hlm : 9

(1992); 70/1 (1995); 90/1 (2005).¹⁰ Rasio tersebut menggambarkan, bahwa tingginya peningkatan volume perdagangan uang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan barang. Bagi negara dengan sistem ekonomi terbuka, *capital inflow* dan *capital outflow* dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cepat tentu akan memberikan guncangan stabilitas moneter, apalagi apabila negara tersebut tidak mempunyai fundamental ekonomi yang kuat.

Itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya krisis moneter yang disusul oleh krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pacto 88) yang merupakan deregulasi perbankan, sehingga bank-bank baru lahir dengan sangat cepat. Reformasi yang dilakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1988-1989 meningkatkan jumlah perusahaan yang *listed* sampai 400%. Modal domestik terkumpul di bank-bank dengan cepat, pemilik bank dengan mudah mendapatkan kredit untuk anak-anak perusahaannya, akibatnya kredit macet di mana-mana. Modal asing masuk melalui BEJ, perusahaan banyak mendapatkan modal murah dari luar negeri, dan ketika saham perusahaan *listing* jatuh karena kredit macet, dengan cepat terjadi *capital flight*. Pada tahun 1995, jumlah uang masuk ke sektor swasta tiga kali lipat dari uang masuk ke sektor pemerintahan.

Sejak tahun 2003/2004, kinerja bidang ekonomi cukup baik, dengan pertumbuhan mencapai rata-rata di atas 5%; tingkat inflasi yang cukup rendah; nilai tukar rupiah yang stabil pada kisaran Rp 9.200 per dolar; serta cadangan devisa mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah, yakni di atas 50 milyar dolar. Namun sayangnya, stabilitas ekonomi makro ini tidak serta-merta berdampak pada membaiknya sektor riil. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi itu masih relatif rendah untuk mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Penyebabnya adalah kebijakan ekonomi kontraktif hasil kesepakatan dengan IMF, yang mengakibatkan terhambatnya investasi.

¹⁰ Kiki Veriko. MPKP. FEUI.

Indikator ekonomi justru menunjukkan tren yang memburuk selama pemerintahan SBY-JK, antara lain: pertumbuhan investasi dan perdagangan (ekspor dan impor) yang terus menurun; serta semakin meningkatnya penyimpanan dana dalam bentuk SBI yang tidak memutar ekonomi riil. Tidak berjalannya investasi di sektor riil disebabkan antara lain karena tidak optimalnya fungsi intermediasi perbankan. Suku bunga kredit yang tinggi, mendorong fenomena ‘*decoupling*’ sektor finansial dari sektor riil, terutama diakibatkan oleh kecenderungan spekulatif pemilik modal untuk memburu keuntungan lebih besar dalam waktu singkat. Hal ini ditunjukkan dengan melambungnya IHSG yang mencapai angka di atas 2500 (tertinggi sepanjang sejarah), sementara sektor riil tidak mengalami perbaikan yang berarti. Pertumbuhan ekonomi sebesar 60% lebih berasal dari konsumsi masyarakat, bukan dari investasi yang merupakan motor penggerak pertumbuhan. Karena itu, kita ragu akan keberkelanjutan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

3.3 BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.3.1 Umum

Meski telah memasuki usia enam dasawarsa lebih sejak kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia ternyata masih kesulitan untuk menentukan jati diri yang sesungguhnya. Inilah permasalahan utama bangsa yang sejak dahulu disebut “Nusantara” – negeri yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera besar, yang mengalami krisis identitas. Krisis itu semakin kentara di masa reformasi yang digencarkan sejak 1998, ketika nilai-nilai lama telah diruntuhkan, namun nilai-nilai baru belum kunjung ditubuhkan. Proses pencarian jati diri itu bertambah rumit di tengah gelombang informasi global yang mengalir ke seluruh pelosok negeri.

Kini kita bertanya kembali tentang masalah yang fundamental, “apa artinya menjadi sebuah bangsa” dan “mau dibawa ke mana bangsa ini setelah enam dasawarsa merdeka”? Pertanyaan itu

mengingatkan kita pada tesis utama berdirinya sebuah bangsa, yakni adanya kehendak untuk bersatu (Ernest Renan, 1930). Apakah kita masih memiliki ikatan perasaan yang sama sebagai bangsa berpenduduk 220 juta orang, yang mendiami 17.000 pulau dan terdiri dari 250-an suku bangsa? Jarak geografis dan keragaman kultural mungkin memisahkan kita secara fisik, namun secara psikologis dan spiritual kita harus merasa dekat dan selalu bersatu, bila masih ingin disebut satu bangsa. Kualitas kebangsaan (*nationality*) itu akan terus diuji di masa datang seiring dengan perkembangan zaman.

Kita juga diingatkan bahwa pada hakekatnya suatu bangsa ada karena “cita-cita bersama”, dalam bahasa Benedict Anderson (1983), bangsa adalah “masyarakat yang dibayangkan bersatu dan memiliki tujuan hidup sama” (*imagined communities*). Walaupun sebenarnya setiap orang dan setiap kelompok masyarakat menghadapi persoalan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan dan zaman yang dihadapinya, namun perasaan bersatu itu muncul karena senasib dan sepenanggungan. Itulah perasaan yang mengkristal pada masa awal kemerdekaan dulu, karena mayoritas bangsa ini menyadari betapa pahitnya era penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Itulah perasaan yang menggumpal sejak “Soempah Pemoeda” di tahun 1928, ketika penjajah menjalankan strategi pecah-belah (*divide et impera*) dengan mempertentangkan perbedaan fisik-kultural. Tetapi, kita berhasil mengatasi skenario penjajah itu dengan menyatakan diri “bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu”, yaitu “Indonesia”.

Ironisnya, gumpalan perasaan senasib-sepenanggungan itu semakin mencair, kristalisasi nilai kebangsaan pun mengalami keretakan di sana-sini, salah satunya akibat kekeliruan dalam mengelola kekuasaan di masa Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia kini mengalami krisis identitas dan modalitas sebagai bangsa, serta krisis kebijakan dan keteladanan di segenap lapisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3.3.2 Masalah Identitas

Pada masa Orde Lama, kekuasaan dijalankan dengan sistem otoriterian berbungkus “Demokrasi Terpimpin”. Pemerintah pusat mendapat tantangan hebat dengan munculnya pemberontakan daerah. Lebih tragis lagi, kebijakan pemerintah saat itu hanya bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan konflik sampai ke akarnya, sehingga muncul stigma terhadap kekuatan yang sebenarnya ingin melakukan kontrol obyektif terhadap pemerintahan yang sudah melenceng dari aspirasi rakyat. Rezim Orde Baru pada awalnya mencoba menangani konflik dan menciptakan stabilitas, tetapi ideologi pembangunan (*developmentalism*) yang dipaksakan telah mematikan inisiatif masyarakat kritis dan aspirasi lokal. Semua potensi lokal diserap ke pusat, sementara masyarakat daerah hanya memperoleh sangat sedikit dari berkah atas hak kekayaan alamnya, dan kekuatan oposisi yang menuntut keadilan minimal pun ditumpas habis.

Penyimpangan kekuasaan itu telah berdampak buruk bagi pembentukan identitas nasional yang belum tuntas sepenuhnya. Sejumlah masyarakat lokal yang kebetulan berasal dari daerah kaya sumberdaya alamnya merasa tersisihkan dan diperlakukan seperti anak tiri dari keluarga besar bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dalam konteks Aceh dan Papua, juga penduduk Riau dan Kalimantan. Pengalaman di Aceh sangat relevan untuk diambil sebagai pelajaran, meski sudah diberi otonomi khusus dengan label konstitusional sebagai “Nanggroe Aceh Darussalam” dan diselenggarakan perdamaian dengan kelompok perlawanan (Gerakan Aceh Merdeka) yang akhirnya berpartisipasi dalam pemilihan umum lokal, namun luka akibat perlakuan diskriminatif belum sembuh benar. Tak dinyana, kasus Aceh mengilhami daerah lain untuk menuntut kekhususan serupa dengan alasan berbeda, seperti di Papua, sehingga penerapan otonomi daerah bak membuka kotak pandora yang akan mengancam keutuhan NKRI. Penumbuhan semangat kebangsaan (*nation building*) kini berkompetisi dengan munculnya kebangkitan etnik yang berpangkal dari salah urus kebijakan ekonomi dan politik pusat.

Menurut Joko Suryo (2002), identitas nasional suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari faktor obyektif, yaitu berkaitan dengan kondisi geografis-ekologis dan demografis; serta faktor subyektif, yaitu berkaitan dengan kondisi historis, politik, sosial dan kebudayaan yang dimiliki bangsa tersebut. Lebih rinci lagi, Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells (*The Power of Identity*, 1997), mengemukakan pandangan tentang munculnya identitas nasional sebagai interaksi historis antara faktor primer (mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan sejenisnya), faktor pendorong (pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan sentralisasi monarkis), faktor penarik (kodifikasi bahasa resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional), serta faktor reaktif (penindasan, dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat).

Semua faktor itu perlu dievaluasi kembali, apakah mengalami penguatan atau pelemahan dalam kehidupan kebangsaan, dan bagaimana mempercepat atau memperkuat proses yang konstruktif di masa depan. Hal itu mutlak dilakukan, bila kita ingin menjadi bangsa yang berusia lebih panjang dan mampu memberi kontribusi positif bagi peradaban manusia. Bila kita lalai mengelolanya, maka ajal bangsa ini sudah dekat di depan mata, dan nama Indonesia mungkin sebentar lagi akan terhapus dari peta dunia digantikan negeri-negeri kecil yang memproklamasikan kemerdekaan dan kebebasannya sendiri. Semoga mimpi buruk itu tidak terjadi.

3.3.2.1. Faktor Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan yang amat luas, terdiri dari 17.508 pulau, namun hanya 5.707 yang bernama. Itu merupakan data yang dikeluarkan Pusat Survei dan Pemetaan ABRI pada tahun 1987. Data dari lembaga lain amat beragam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1972, mempublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Sementara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional pada tahun 1992 menerbitkan "Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia" yang mencatat sebanyak 6.489 pulau bernama,

termasuk 374 nama pulau di sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, pada tahun 2002, berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 18.306 buah.

Dengan wilayah seluas itu, sepatutnya apabila Indonesia dikelola sebagai "negara maritim" yang kuat. Tanpa kekuatan maritim yang memadai, maka kedaulatan wilayah nasional akan terancam. Luas wilayah formal setara 93.000 kilometer per segi laut-pedalaman, dan luas total menurut Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 7,9 juta kilometer per segi. Luas itu sesuai dengan prinsip wilayah Indonesia yang mencakup "tanah dan air", serta doktrin kesatuan politik dan keamanan nusantara (*archipelagic*). Sayangnya, kondisi armada maritim nasional saat ini masih sangat jauh standar armada pertahanan. Menurut Kepala Staf TNI AL, jumlah 114 armada yang aktif dan umur kapal yang rata-rata lebih dari 20 tahun tidak mencukupi untuk kebutuhan minimal 138 kapal (*Kompas*, 23/1/2004). Padahal kebutuhan minimal untuk standar internasional adalah 300 kapal, kebutuhan normalnya 1.000 kapal, dan kebutuhan idealnya 2.000 untuk memantau dan mengawal seluruh titik wilayah laut kita.

Pemerintah pernah mencanangkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan maritim dunia (*Global Ocean Power*) pada 15 - 20 tahun ke depan. Hal itu ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memaparkan "Tantangan Kelautan Indonesia 2020: Penetapan Agenda dan Sasaran" (*Tempo Interaktif*, 26/7/2004). Konsep itu tampaknya masih di atas kertas, karena langkah-langkah nyata belum terlihat di lapangan.

Kebijakan nasional saat ini masih bertumpu pada pertahanan darat untuk mengawal daerah yang padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan aspek pertahanan laut dan udara masih belum dikembangkan dengan optimal. Akibatnya, wilayah yang berada jauh di pinggir perbatasan merasa kurang diperhatikan dan dijaga dari kemungkinan datangnya ancaman luar. Ikatan kebangsaan pun mengalami erosi dahsyat.

Kendala geografis juga menyebabkan rumitnya prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan daerah perbatasan, baik di perbatasan laut maupun di darat. Daerah tersebut adalah pantai timur Pulau Sumatra dan kepulauan yang berada di sekitarnya yang berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Lalu, daerah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak Malaysia; Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak-Sabah Malaysia; Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina; Nusatenggara Timur (pulau Timor) yang berbatasan dengan wilayah Timor Timur dan Australia; dan bagian dari Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nuigini.

Kebanyakan daerah perbatasan mengalami kelambanan dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi, sehingga mereka kurang berinteraksi dengan penduduk di wilayah lain di Tanah Air, bahkan merasa lebih dekat dengan penduduk negara tetangga. Sarana transportasi laut dan udara sangat terbatas. Hal itu membuat warga yang berada di kawasan terpencil menjadi terasing dengan daerah lain di Indonesia, apalagi dengan pola birokrasi pemerintah pusat yang tak memberi pelayanan optimal.

Sebagian besar daerah perbatasan itu masih berada dalam keadaan terbelakang. Jumlah penduduknya sangat sedikit dan terpencar-pencar, jauh letaknya dari ibukota propinsi atau kabupaten dan dari tempat pemusatan penduduk lainnya. Berbagai prasarana sosial-ekonomi masih sangat kurang, dan lapangan kehidupan penduduk terutama terdiri atas kegiatan-kegiatan pertanian yang berpindah, serta usaha penangkapan ikan dengan alat-alat dan cara-cara yang masih sederhana. Daerah itu menghadapi beragam permasalahan yang berhubungan dengan penyelundupan dan gangguan keamanan yang bersifat infiltrasi politis-ideologis, disamping permasalahan lainnya dari kelompok masyarakat terpencil.

Potensi ancaman maritim sangat besar. Dari sisi pencurian ikan (*illegal fishing*) saja, sebelum 2004 Indonesia kehilangan sekitar Rp 36,5 trilyun per tahun. Dengan kebijakan yang lebih tegas, akhirnya kerugian negara berhasil ditekan menjadi sekitar Rp 18,2 trilyun per tahun. Sedangkan menurut *International Maritime Bureau*, dari 445

serangan bajak-laut terhadap kapal komersial tahun 2003, tercatat 121 terjadi di wilayah laut Indonesia. Dalam perompakan yang paling sering terjadi di Selat Malaka itu, 20 pelaut terbunuh, 350 disandera, dan 70 hilang. Belum lagi ancaman navigasi, pencurian benda arkeologi laut, penyelundupan kayu gelondongan, penyelundupan BBM dan penjualan manusia, penyebaran senjata pemusnah-massal, kerusakan lingkungan laut, serta sengketa pemilikan pulau dengan beberapa negara tetangga. Semua itu mestinya menyadarkan kita agar lebih serius membangun armada pertahanan dan transportasi laut yang lebih kuat.

Kondisi geografis yang senjang juga terlihat mencolok antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Warga pedesaan merasa tertinggal dan tidak diperhatikan dibandingkan warga di perkotaan. Muncul pelbagai masalah sosial akibat ketimpangan pembangunan antar daerah, dan proses urbanisasi yang tak terencana. Potensi masyarakat desa tergerus habis perlahan tapi pasti, karena sumber daya yang produktif banyak berpindah ke kota. Karakter masyarakat desa pun berubah drastik, sehingga banyak di antara mereka yang tak mengenali atau merawat tradisi yang sebenarnya positif seperti sikap gotong-royong atau setia kawan, akibat derasnya arus informasi dan proses migrasi antar penduduk.

Permasalahan kemudian bergeser ke kota yang menampung segala beban yang tak sanggup dipecahkan di desa. Padahal, kota mestinya dikembangkan sebagai tempat berkumpulnya (*melting pot*) berbagai jenis keterampilan dan sumber daya yang penting bagi perindustrian modern. Dalam suasana urban, budaya melek huruf dan media massa akan berkembang. Kepandaian tulis-baca itu penting untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar, sementara media massa penting untuk mempercepat perkembangan masyarakat modern, termasuk dalam hal peningkatan partisipasi politik. Daniel Lerner dalam *The Passing of Traditional Society* (1959) mengungkapkan hasil penelitiannya di 54 negara, bahwa variabel urbanisme, melek huruf, akses media, dan partisipasi politik sangat erat berhubungan, karena semua itu berkaitan dengan pasar komunikasi yang terbuka dan membentuk masyarakat modern. Prasyarat itu masih jauh dari kenyataan masyarakat Indonesia di berbagai daerah, tingkat melek huruf

masih sangat rendah, perkembangan media lokal sangat terbatas dan partisipasi politik lokal pun belum terbuka sepenuhnya. Budaya politik lokal masih didominasi *money politics* dan patrimonialisme.

Sementara itu kebijakan transmigrasi tak diterapkan dengan optimal sebagai bagian dari strategi pemantapan kehidupan nasional. Sejak dipraktekkan di masa kolonial hingga era Orde Baru, transmigrasi menjadi solusi darurat untuk mencegah ledakan demografi di daerah padat seperti Pulau Jawa. Namun, kesiapan daerah tempat tujuan dan kapasitas para calon transmigran tak diperhatikan dengan matang, sehingga mengalami banyak hambatan dan akhirnya seperti memindahkan persoalan dari suatu daerah ke daerah lain saja. Masalah bertambah akut karena masyarakat baru telah terbentuk di daerah transmigran yang tak tertata dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antara penduduk asli dan kaum pendatang tumbuh subur, yang membuka kemungkinan pemicu konflik komunal. Kerusakan yang terjadi di Sampit dan Sambas, Kalimantan Tengah serta konflik di Poso, Sulawesi Tengah merupakan efek lanjutan dari kurang harmonisnya hubungan antara warga tempatan dan kaum pendatang, disamping masih adanya sejumlah provokator yang memperuncing perbedaan etnik dan kondisi sosial-ekonomi. Jika identitas kebangsaan cukup kuat, maka semua perbedaan itu akan dapat didamaikan, lalu pembentukan identitas lokal justru memperkuat keragaman nasional.

3.3.2.2 Faktor Demografis

Saat ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 218 juta orang. Bila dilihat berdasarkan kelompok usia produktif, maka komposisi penduduk Indonesia menggambarkan potensi yang besar di kelompok muda (20 – 39 tahun) yang mencapai 73,5 juta. Potensi itu lebih besar lagi bila kita tambahkan dengan kelompok usia anak-anak dan remaja (0 – 19 tahun) sebanyak 83,9 juta. Jumlah yang cukup besar juga terlihat di kelompok usia dewasa dan penuh kematangan (40 – 59 tahun) yang berkisar 44,9 juta. Sementara kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) berjumlah sekitar 15,8 juta (Lihat Tabel 3-5).

Namun, kita mencatat terjadi kesenjangan antara generasi muda dan tua dalam memandang persoalan bangsa dan menghadapi tantangan hidup masing-masing. Kaum muda disibukkan dengan persoalan lapangan kerja yang terbatas dan lingkungan pergaulan yang semakin bebas, sedangkan kaum tua harus memikirkan beban hidup yang semakin berat dan masa depan keluarga yang penuh fluktuasi. Pergantian generasi yang berlangsung cepat tidak diiringi dengan pewarisan nilai yang kokoh, hingga akhirnya terjadi disorientasi nilai yang harus diperjuangkan bersama.

Generasi perintis kemerdekaan yang sekarang berusia lebih dari 70 tahun mengalami romantisme, sulit beradaptasi dengan perubahan yang penuh ketidakpastian dan merindukan "zaman normal", ketika semua hal bisa dikendalikan dari pusat. Generasi era Orde Lama yang kini berusia 50-60 tahun mungkin masih berjiwa revolusioner, namun mereka terbagi di antara kelompok nasionalis sekuler maupun religius militan. Sebaliknya, generasi produk Orde Baru, kini berusia 30-40 tahun, mengalami proses pembangunan fisik yang pesat. Sebagian mereka ada yang bersikap pragmatis dan oportunis, meski ada yang tetap mempertahankan idealisme. Sedangkan generasi "reformasi" yang baru berusia 20 tahun tak jelas visi ideologisnya, mereka mencari panutan yang hilang. Pada titik ini pemupukan identitas bersama lintas generasi menjadi krusial.

Tabel 3-6. Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1.	0 - 19	83.883.364
2.	20 - 39	73.535.630
3.	40 - 59	44.852.783
4.	60 - dst	15.814.192
	TOTAL	218.086.288

Sumber: BPS, 2005.

Bila kita lihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, terlihat keseimbangan antara jumlah kaum laki-laki (109,6 juta) dan perempuan (108,5 juta). Hal ini bisa menjadi faktor positif untuk menyeimbangkan peran di antara jenis yang berbeda, meskipun pandangan kultural tetap harus dipertimbangkan dalam pembagian fungsi domestik dan publik. Sebab, pembagian peran yang adil menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang kokoh sebagai sokoguru masyarakat yang stabil.

Bila kita perhatikan dengan lebih teliti, maka jumlah kaum perempuan pada usia 20 - 39 tahun (37,5 juta) dan usia 60 tahun ke atas (8,1 juta) lebih besar dibandingkan kaum lelaki (Lihat Tabel 3-7). Hal itu menunjukkan persoalan tersendiri, karena banyak kaum perempuan di usia produktif yang mencari lapangan kerja informal demi mendukung kehidupan keluarga, bahkan sebagian di antara mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya tertipu dan terjebak pada sindikat perdagangan manusia (*human trafficking*). Demikian pula kelompok usia lanjut yang telah melampaui masa produktif membawa persoalan tersendiri, karena masih terbatasnya sarana sosial yang mendukung, sedang kondisi keluarga tak lagi mampu menampung dan melayani mereka dengan selayaknya. Dalam kaitan ini, program pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan pendidikan, serta penguatan tatanan keluarga yang sakinah dan produktif menjadi tuntutan utama.

Tabel 3-7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	USIA	LELAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0 - 19	42.962.866	40.920.498	83.883.364
2.	20 - 39	36.079.484	37.456.146	73.535.630
3.	40 - 59	22.900.517	21.952.266	44.852.783
4.	60 - dst	7.670.652	8.143.859	15.814.192
	TOTAL	109.613.519	108.472.769	218.086.288

Sumber: BPS, 2005

Ketimpangan segera tampak, bila kita cermati komposisi penduduk Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya di berbagai pulau. Dalam Tabel 3-8 terlihat bahwa penduduk Pulau Jawa dan Madura sangat padat (58,8%), sementara luas wilayahnya sempit sekali (6,9%). Bandingkan dengan wilayah Sumatera (24,7%) dan Kalimantan (28,1%) yang sangat luas, tapi hanya berpenduduk terbatas (21,0% dan 5,5%). Kondisi serupa juga terlihat di Sulawesi (luas 9,9%) dan pulau lain (termasuk Maluku dan Papua, total 30,4) yang hanya dihuni sebagian kecil penduduk (7,2% dan 7,5). Program persebaran dan pemerataan penduduk menjadi penting agar potensi alam yang tersedia dapat dioptimalkan, dengan catatan, perlu dilakukan perbaikan fundamental dalam kebijakan transmigrasi. Setiap wilayah mestinya diidentifikasi potensi khasnya, lalu persebaran SDM disesuaikan dengan kapasitasnya. Hal itu juga akan mencegah eksplosif demografis dan kerawanan yang ditimbulkan di wilayah padat seperti Jawa dan Madura.

Tabel 3-8. Persentase Luas Wilayah dan Penduduk menurut Pulau

NO	PULAU	LUAS WILAYAH	PENDUDUK
1.	Jawa dan Madura	6,9	58,8
2.	Sumatera	24,7	21,0
3.	Kalimantan	28,1	5,5
4.	Sulawesi	9,9	7,2
5.	Pulau lainnya	30,4	7,5
	TOTAL	100	100

Sumber: BPS, 2005

Gejala penyimpang semakin mencolok bila kita menelusuri proses migrasi di kalangan penduduk. Migrasi masuk ke wilayah Jakarta (3,5 juta), Jawa Barat (3,3 juta), Banten (1,8 juta) dan Riau (1,5 juta) menempati urutan tertinggi. Mungkin karena di wilayah tersebut terdapat potensi ekonomi yang cukup besar (lihat Tabel 3-9).

Tabel 3-9. Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi.

Provinsi	Migrasi Masuk			
	1971	1980	1990	2000
1. Nanggroe Aceh Darussalam	60,982	143,365	193,285	100,166
2. Sumatera Utara	530,012	547,715	452,918	447,897
3. Sumatera Barat	87,901	131,438	216,014	245,000
4. Riau	20,606	343,024	681,627	1,534,849
5. Jambi	155,924	293,245	470,848	566,153
6. Sumatera Selatan	327,312	608,497	932,032	987,157
7. Bengkulu	36,038	121,274	251,232	355,048
8. Lampung	1,001,103	1,782,703	1,726,969	1,485,218
9. Kep. Bangka Belitung	na	na	na	94,334
10. DKI Jakarta	1,791,635	2,565,158	3,141,214	3,541,972
11. Jawa Barat	371,448	963,870	2,391,890	3,271,882
12. Jawa Tengah	253,477	336,611	509,401	708,308
13. DI Yogyakarta	99,782	175,789	264,842	385,117
14. Jawa Timur	273,228	433,451	564,401	781,590
15. Banten	na	na	na	1,758,408
16. Bali	22,010	63,365	122,899	221,722
17. Nusa Tenggara Barat	33,575	51,493	67,023	107,605
18. Nusa Tenggara Timur	10,218	38,735	46,310	106,053
19. Kalimantan Barat	20,805	104,856	196,876	269,722
20. Kalimantan Tengah	50,078	140,042	240,374	423,014
21. Kalimantan Selatan	66,119	142,619	272,797	360,324
22. Kalimantan Timur	39,548	292,028	600,201	856,251
23. Sulawesi Utara	48,668	88,266	87,715	147,091
24. Sulawesi Tengah	50,937	184,526	286,142	369,634
25. Sulawesi Selatan	66,984	108,038	219,666	273,875
26. Sulawesi Tenggara	25,906	104,793	236,848	366,817
27. Gorontalo	na	na	na	26,888
28. Maluku	42,228	124,894	184,892	75,540
29. Maluku Utara	na	na	na	60,834
30. Papua	33,513	93,030	261,308	332,015

Sumber: BPS, 2005

Tabel 3-10. Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi.

Provinsi	Migrasi Keluar			
	1971	1980	1990	2000
1. Nanggroe Aceh Darussalam	65,835	116,010	125,563	244,314
2. Sumatera Utara	188,326	417,659	770,093	1,336,772
3. Sumatera Barat	324,897	558,804	642,908	937,799
4. Riau	41,636	86,540	127,672	164,358
5. Jambi	27,487	47,151	77,299	149,376
6. Sumatera Selatan	199,060	333,024	443,384	525,954
7. Bengkulu	24,753	39,019	46,720	73,390
8. Lampung	29,728	57,664	167,565	385,748
9. Kep. Bangka Belitung	na	na	na	120,027
10. DKI Jakarta	132,215	400,767	1,052,234	1,836,664
11. Jawa Barat	1,192,987	1,487,935	1,751,879	2,046,279
12. Jawa Tengah	1,798,001	3,227,892	4,524,988	5,354,459
13. DI Yogyakarta	266,933	253,447	508,215	784,154
14. Jawa Timur	749,848	1,597,851	2,479,487	3,063,297
15. Banten	na	na	na	475,440
16. Bali	57,072	117,828	221,599	250,724
17. Nusa Tenggara Barat	12,764	44,487	96,774	145,546
18. Nusa Tenggara Timur	26,222	47,534	99,442	156,602
19. Kalimantan Barat	35,109	72,358	116,735	154,620
20. Kalimantan Tengah	11,514	25,086	47,700	53,291
21. Kalimantan Selatan	84,257	169,561	201,936	255,595
22. Kalimantan Timur	23,723	34,059	63,533	90,635
23. Sulawesi Utara	60,837	121,231	153,466	151,326
24. Sulawesi Tengah	34,274	33,912	48,360	74,463
25. Sulawesi Selatan	241,726	511,725	641,961	874,338
26. Sulawesi Tenggara	30,771	89,957	107,673	95,189
27. Gorontalo	na	na	na	113,050
28. Maluku	36,613	64,725	95,361	157,066
29. Maluku Utara	na	na	na	43,712
30. Papua	6,449	15,559	30,786	46,824

Sumber: BPS, 2005

Sebaliknya, migrasi keluar tertinggi terjadi di wilayah Jawa Tengah (5,4 juta), Jawa Timur (3,1 juta), Jawa Barat (2,1 juta), dan Sumatera Utara (1,3 juta). Perpindahan itu bukan hanya berlangsung di skala domestik, banyak di antara penduduk wilayah tersebut yang mungkin berpindah ke luar negeri dengan alasan untuk mencari rezeki. Sebenarnya bisa potensi demografis itu dikelola dengan baik akan memberi manfaat bagi perkembangan daerah dan pemerataan pembangunan secara nasional. Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan wilayah yang mencakup semua sektor dan mempertimbangkan betul keunggulan setiap daerah.

Kebijakan nasional juga harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi kondisi di pedesaan dan perkotaan pada setiap wilayah, agar tidak terjadi involusi sumber daya akibat urbanisasi yang tak terkendali. Perbedaan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi tak hanya mempengaruhi kondisi fisik, namun juga menghasilkan format budaya yang berbeda. Bila perbedaan itu tidak segera ditangani, maka akan membuat suatu daerah mungkin tertinggal dan terbelakang dibanding daerah lain. Jika itu dibiarkan, maka keutuhan nasional akan terganggu.

3.3.2.3 Faktor Historis

Manusia adalah "makhluk historis", berkembang berdasarkan pengalaman dan pikiran bersama lingkungan dan zamannya (Anton Bakker, 1990). Bila perkembangan itu bersifat positif, maka warisan masa lalu akan membentuk karakter masa kini yang lebih baik dan menentukan masa depan yang dicita-citakan. Tetapi, sampai sekarang kita belum dapat menghapuskan warisan penjajahan yang mempengaruhi sikap dan perilaku secara individual maupun kolektif. Mental sebagian besar warga bangsa ini belum mencerminkan sebagai bangsa yang merdeka untuk menentukan kondisi hidup yang diinginkan. Warisan itu antara lain:

Penjajah Belanda sering disalahtafsirkan telah menjajah bangsa ini selama 350 tahun, padahal banyak wilayah di Tanah Air yang tetap melakukan perlawanan hingga awal abad ke-20. Dalam proses sejarah yang panjang, kolonialis Belanda ternyata melestarikan sebagian nilai feodalisme Jawa dan membentuk karakter birokrasi yang lebih suka memerintah (*pangreh praja*) ketimbang melayani dan mengayomi warga (*pamong praja*). Gejala itu masih tampak nyata di masa modern, ketika para pejabat menuntut hak-hak istimewa bagi kepentingan pribadinya, meskipun hak-hak dasar rakyat pada umumnya belum terpenuhi. Sikap itu pada gilirannya membuahkan tragedi pemerintahan yang lamban di tengah desakan kepentingan umum akibat bencana yang terjadi di mana-mana dan kondisi sosial-ekonomi yang diterpa krisis dari waktu ke waktu. Meski telah merdeka secara fisik, namun rakyat merasa dikorbankan atau "dijajah" secara sosial-ekonomi, karena perkembangan zaman tidak memihak kepentingan mereka pada umumnya.

Penjajah Inggris hanya sebentar menancapkan pengaruh kekuasaannya di masa Raffles, dan menyisakan warisan kecil di daerah Bogor (Kebun Raya) dan Bengkulu (Taman Nasional). Orang kemudian membandingkan dampak penjajahan Belanda atas Indonesia dengan bekas penjajahan Inggris di Malaysia, Singapura dan negara persemakmuran lainnya. Dari segi pendidikan dan kebudayaan memang terlihat perbedaan mencolok, betapa negara-negara persemakmuran lebih maju dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang berubah cepat. Kondisi sosial-ekonomi mereka pun relatif lebih berkembang, namun hal itu tidak bisa menjustifikasi adanya karakter penjajah yang baik hati (*benevolent colonialist*), karena kemampuan belajar dari bangsa-bangsa bekas jajahan tetap paling menentukan. Bila kita mampu meningkatkan kapasitas belajar dari peristiwa sejarah, maka kita akan menggali nilai-nilai positif yang relevan untuk dikembangkan di masa kini dan masa datang.

Penjajah Portugis juga hanya terbatas dari segi waktu dan lokasi jajahannya, dan terakhir mampu bertahan di wilayah Timor Timur yang kini sudah lepas dari pangkuan NKRI. Pelajaran berharga bisa dipetik dari penguasaan wilayah yang dipaksakan bahwa proses

intervensi atau aneksasi sama kompleksnya dengan kolonisasi, karena kita seperti meniru jejak penjajah yang ingin memaksakan kepentingannya di suatu wilayah. Kebijakan dominasi dalam bentuk apapun tidak akan bertahan lama, bila tak diikuti program penguatan hak masyarakat lokal dan rekonsiliasi semua pihak yang pernah menjadi korban kekerasan negara. Trauma sejarah itu bisa terulang kembali di daerah lain dalam konteks hubungan pusat dan daerah, jika kebijakan pemerintah pusat masih memakai pola lama yang secara tak sadar mewarisi sikap penjajah.

Penjajah Jepang, walau bersifat sementara, hanya berkuasa sekitar 3,5 tahun hingga menjelang Perang Dunia II, namun memberikan dampak yang agak berbeda. Pada saat itu tumbuh semangat patriotisme dengan lahirnya pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dilatih khusus dari kalangan kaum muda. Walau pada awalnya mereka dibentuk untuk menjadi satuan pendukung tentara penjajah Jepang di kawasan Asia Pasifik, tetapi pada masa kemerdekaan mereka menjadi ujung tombak perlawanan terhadap penjajah Belanda yang ingin menancapkan kembali pengaruhnya di bumi Indonesia. Dari kalangan prajurit PETA pula lahir tokoh-tokoh nasional yang akhirnya mengawal kedaulatan bangsa. Hal itu menunjukkan bahwa pada masa sulit penjajahan, kita masih bisa belajar untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan solidaritas nasional. Pelajaran serupa bisa ditransfer sekarang, agar di tengah rentetan bencana kita bisa mengembangkan solidaritas nasional yang baru.

Dari tinjauan sejarah singkat itu, kita dapat mengembangkan kapasitas belajar untuk membentuk identitas genuin sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Yakni, kemampuan untuk mempelajari perkara yang dibutuhkan di masa kini (*learning how to learn*), mempelajari perkara yang harus ditinggalkan dari masa lalu (*learning how to unlearn*), dan mempelajari perkara yang diperlukan untuk merancang masa depan (*learning how to relearn*). Proses belajar yang dinamik dan bersifat sistematis itu akan membuat kita lebih obyektif dengan warisan sejarah manapun, tidak lagi sekadar menyesali dan mencaci-maki sejarah karena menimbulkan luka yang dalam, atau sebaliknya juga tidak memuja-muji dan membangga-banggakan masa lalu tanpa sikap kritis.

Kita perlu bersikap lebih kritis dan obyektif terhadap sejarah yang telah dilalui pasca kemerdekaan, karena dari sanalah kita akan menimba pengalaman berharga untuk membangun bangsa yang bermartabat di era globalisasi saat ini. Bila ditelusuri kembali sejarah pasca kemerdekaan, maka kita akan mendapat jejak yang mencerahkan dari segi proses pembinaan kehidupan demokrasi, yaitu:

Masa demokrasi liberal (1945 – 1958) ditandai dengan tampilnya berbagai kekuatan sosial-politik, bahkan kelompok dan perorangan yang memiliki akses politik yang luas di peringkat nasional atau lokal. Persemaian demokrasi itu tumbuh berkat Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta (1949) agar setiap kelompok yang ingin turut serta dalam pemerintahan baru setelah penyerahan kedaulatan dapat membentuk entitas politik formal. Dinamika politik mencapai puncaknya tatkala digelar pemilihan umum yang pertama di tahun 1955, yang disebut sebagai momen demokrasi yang bebas dan terbuka di masa awal pendirian Republik. Karena kuatnya pengaruh partai, maka sistem pemerintahan masa itu bergeser dari presidensial menjadi parlementer. Dari sisi politik, sistem manapun yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dari segi sosial-budaya, kita harus mengakui bahwa suasana kebebasan sipil cukup terjaga disamping idealisme yang masih kuat pasca kemerdekaan.

Masa demokrasi terpimpin (1959-1965) menyimpan luka yang dalam, karena kebebasan sipil yang baru tumbuh harus dikorbankan demi stabilitas pemerintahan. Sosok kepemimpinan Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 diakui berbeda dengan sosok Wakil Presiden Hatta, meski keduanya diapresiasi sebagai simbol duet kepemimpinan nasional yang ideal. Soekarno dikenal sebagai seorang agitator yang mampu membangkitkan semangat persatuan di tengah bangsa yang baru lepas dari penjajahan, sementara Hatta bersikap lebih tenang dan berpandangan jauh ke depan dengan memainkan peran administrator negara yang kompeten dan berintegritas. Disamping kedua tokoh itu tentu saja hadir banyak tokoh lain yang mewarnai

perjalanan sejarah nasional, namun situasi pada masa itu diburamkan dengan munculnya kekuatan politik yang dominan beraliran komunis. Soekarno ternyata memilih beraliansi dengan kekuatan komunis dan menyingkirkan potensi Islam, nasionalis, dan sosialis yang telah memberi kontribusi besar bagi pematangan kehidupan berbangsa. Kebijakan otoriterian mempengaruhi kondisi sosial-budaya yang bersifat antagonistik, sehingga Indonesia terancam perpecahan internal dan perang saudara yang hanya menghancurkan semua pihak.

Masa demokrasi Pancasila (1966 – 1998) ditandai dengan koreksi atas kebijakan otoriterian dan politik agitasi. Orde Baru terbentuk sebagai aliansi berbagai kekuatan pembaharu seperti gerakan mahasiswa yang bersinergi dengan kalangan nasionalis (religijs maupun sekuler) dengan dukungan tentara. Pada awalnya juga dimunculkan semangat kekaryaannya dengan berbasis kompetensi modern sebagai pengganti kultur agitasi dan bombastisme tanpa kerja nyata. Namun, semangat itu selanjutnya berkembang menjadi pragmatisme, bahkan oportunistik yang menggerogoti idealisme awal, karena kebijakan pembangunan telah disalahpahami sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dan kelompok masing-masing. Saat itu posisi masyarakat dan berbagai organisasi nonpemerintah sangat dilemahkan, karena kekuatan oposisi dianggap tabu dan kontrol publik dipandang campur tangan terhadap urusan pemerintah yang tiba-tiba merasa dirinya sakral. Bahkan, kebijakan yang paling mengancam kebebasan warga ialah diberlakukannya asas tunggal Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga justru menyebabkan Pancasila kehilangan elan vitalnya sebagai ideologi negara dan perekat dari kemajemukan masyarakat. Ideologi yang dipaksakan akan mematikan kreativitas masyarakat dan meminggirkan aspirasi lokal yang mestinya memperkaya identitas nasional. Jika di masa Orde Lama kekuatan politik didominasi komunis, maka di era Orde Baru kekuatan militer yang dominan. Kondisi sosial-budaya mengalami kemandulan, karena semua aspek kehidupan masyarakat hendak diseragamkan demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

Masa demokrasi transisional (1999 – sekarang) membuka semua keran politik dan hukum yang membelenggu kebebasan warga.

Beragam kekuatan sosial-politik baru bermunculan dengan basis idealisme dan ideologinya masing-masing. Pada saat itu terbukti sekali lagi bahwa peran mahasiswa, kelompok pemuda dan masyarakat kritis amat penting dalam mendorong perubahan. Namun sayang, mereka tak mampu melakukan konsolidasi kekuatan reformis, sehingga akhirnya setelah masa euforia berangsur surut, kekuatan elite politik dan ekonomi lama kembali naik panggung. Dari aspek sosial-budaya, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat telah membuka ruang kreativitas yang tak terbatas. Tetapi, aktualisasi dari daya kreatif itu sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas dan kapasitas obyektif dari para pelaku baru. Dalam bidang informasi, misalnya, pada mulanya bermunculan media massa alternatif untuk menyuarakan aspirasi kelompok yang berbeda. Selanjutnya, mekanisme pasar membuat media yang bermodal besar saja yang mampu bertahan, sementara pemerintah tak bisa melakukan kontrol agar terjadi keseimbangan informasi publik. Akibatnya, terjadi konglomerasi media yang dipegang oleh segelintir pemodal dan menguasai bisnis media dari hulu sampai ke hilir. Sedangkan, informasi publik yang dijalankan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) tak mencapai hasil optimal karena kelemahan sumber daya dan ketidakmampuan kebijakan. Saat ini memang bermunculan pula pelbagai media lokal dan komunitas, namun jangan sampai media berskala terbatas itu juga dikuasai jaringan pemodal yang sama, sehingga dapat mematikan aspirasi masyarakat yang orisinal.

Masa reformasi yang berkepanjangan jelas membutuhkan hadirnya kepemimpinan nasional yang kuat agar dapat mewujudkan cita-cita "Indonesia Baru" yang pernah dicanangkan. Untuk itu, selain menelusuri jejak sejarah kolektif, kita juga perlu mengevaluasi format kepemimpinan nasional di masa mutakhir, terutama yang berkembang di era transisi. Kesadaran akan peran pemimpin yang menentukan arah perjalanan bangsa dan membentuk identitas nasional menjadi niscaya.

3.3.2.4 Faktor Kultural

Manusia sebagai "mahluk berbudaya" dibentuk oleh nilai dan simbol yang diyakininya, dan memiliki kemampuan untuk memberi

makna serta penafsiran atas kehidupan yang dijalaninya. Manusia Indonesia juga dipengaruhi lingkungan fisik dan demografis, serta sistem nilai yang diwarisi dari zaman ke zaman. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha, dilanjutkan dengan kebudayaan Islam dan Barat, saling berinteraksi dengan nilai-nilai lokal. Pergulatan nilai itu membentuk karakter manusia Indonesia yang bergerak dinamik. Karena itu, kita perlu menelaah karakter manusia Indonesia secara jujur dari sisi positif maupun negatifnya, lalu meramu suatu perpaduan nilai yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman di masa kini dan mendatang.

Perdebatan tentang sistem nilai apa saja yang mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia pada era penjajahan mencuat dalam bentuk "Polemik Kebudayaan" (1935). Saat itu tampil budayawan muda Sutan Takdir Alisjahbana yang menawarkan formula baru untuk mengangkat martabat bangsa yang sedang terpuruk akibat proses penjajahan yang panjang. Takdir menawarkan adopsi terhadap nilai baru yang datang dari Barat dan Islam untuk menggantikan warisan lama yang disebutnya "Pra-Indonesia" dan bersumber dari Hindu-Budha atau kebudayaan India. Berbeda dengan Takdir, budayawan lain semisal Sanusi Pane, intelektual Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara menekankan tetap perlunya menggali nilai-nilai lokal untuk membentuk "keindonesiaan" modern. Ki Hajar bahkan terkenal dengan definisinya tentang "kebudayaan nasional", yang kemudian dipakai di masa Orde Baru, sebagai "puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah". Definisi dan pemahaman semacam itu ditolak oleh Takdir yang mewakili generasi baru kaum intelektual Indonesia. Ia mempromosikan sikap terbuka terhadap kebudayaan dan peradaban yang datang dari luar. Dari momen perdebatan historik itu kita menyadari bahwa ketegangan antara sisi lokalitas dan globalitas telah terjadi sejak lama, dan hingga saat ini masih berlangsung.

Sebelum menelaah format kebudayaan nasional yang cocok dengan kondisi Indonesia di masa kini dan mendatang, kita perlu menguliti secara obyektif siapa sesungguhnya yang disebut "manusia Indonesia". Salah seorang budayawan, Mochtar Lubis (1977), mengungkapkan karakter asli manusia Indonesia sebagai bentuk pertanggung-jawaban intelektualnya. Lubis membeberkan sejumlah

ciri negatif (misalnya: sifat munafik, enggan bertanggung-jawab, feodalistik, percaya takhayul, berwatak lemah, boros, malas, suka menggerutu, cepat cemburu, mengambil jalan pintas, mabuk kuasa, tukang tiru dll), disamping mengakui sifat positifnya (dekat dengan alam, artistik, dan spiritualistik). Kita perlu mengevaluasi, apakah proses reformasi telah mampu menekan ciri negatif dan memperkuat ciri positif dari karakter manusia Indonesia itu. Sebab, dari sanalah bisa dipetakan arah perubahan yang diinginkan. Satu hal telah pasti, mustahil kita melakukan perubahan sistem sosial, politik dan ekonomi nasional, apabila manusia yang menjadi faktor pelaku utama tidak kunjung berubah.

Selain menguliti model manusia Indonesia secara obyektif, kita perlu melacak dimensi lokal dari identitas kemanusiaan yang tercermin dari budaya dominan. Perlu dicermati, sejauhmana karakter "manusia Jawa" yang secara nominal menempati posisi dominan dalam komposisi etnik kita turut membentuk wajah manusia Indonesia. Pada zaman Belanda, seorang peneliti John Joseph Stockdale (1811) menjelaskan watak manusia Jawa yang disebutnya lambat kerja, hingga dibutuhkan upaya keras untuk mendorongnya suka bekerja. Penilaian itu menjadi stereotipe bagi masyarakat yang hidup di wilayah tropik dan di bawah pemerintahan despotik. Satu abad kemudian, anggapan miring itu dibantah keras oleh Syed Husein Alatas (1959), pemikir dari Malaysia yang menyanggah "Mitos Pribumi Malas". Bagi warga suku Jawa kini tak cukup lagi hanya membantah asumsi negatif, namun menggali aspek positif dan mengembangkannya sebagai kontributor utama bagi pembangunan karakter manusia Indonesia di era baru.

"Manusia Sunda", menurut Ajip Rosidi (1984), berorientasi pada kekuatan dari dunia atas (kosmologi kuno), memperhatikan kecantikan yang seimbang, pekerja keras (adaptasi dan kreativitas), dan ulet (beretos kerja). Nilai-nilai itu tercermin dari tokoh-tokoh sastra Sunda yang tipikal – seperti sosok Purbasari Ayu Wangi dari tataran Sunda kuno, *duo wanoja* luar biasa dari tataran kamari (Dewi Pramanik-Ratna Suminar), dan dari tataran kiwari (Raden Dewi Sartika). Karakter manusia bisa digali dari dunia mitos dan realitas, kemudian dikelola dalam proses pendidikan berkelanjutan.

Itu perlu dilakukan karena suku Jawa dan Sunda merupakan mayoritas bangsa ini dan memiliki peran besar di berbagai bidang.

Dalam sejarah kepemimpinan nasional, kita mengenal pemimpin dari kalangan non-Jawa, yakni Mohammad Hatta (Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden RI yang pertama) serta B.J. Habibie (Presiden RI ketiga). Mereka memiliki pengaruh tersendiri dibanding pemimpin nasional yang berlatar belakang Jawa atau Sunda yang dominan (Soekarno, Soeharto, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono). Pengaruh itu tak hanya mencakup dimensi komunitas, melainkan juga kultur birokrasi di saat mereka berkuasa. Fakta itu mempertegas urgensi keseimbangan antar budaya, sehingga kelompok etnik dominan tidak memonopoli klaim budaya nasional. Harus dieksplorasi terus-menerus kultur yang mungkin selama ini dipandang marginal, seperti karakter khas "manusia Madura" yang dijabarkan: tahan banting, ulet bekerja, teguh berprinsip, suka berpetualang, setia, hemat, ceria dan humoris (Mien A. Rifai, 2007). Karakter positif itu seyogyanya menepis prasangka umum negatif, bahwa warga "Pulau Garam" itu dinilai gampang marah dan suka kekerasan, termasuk suka menipu dan bersikap statis. Setiap komunitas memang memiliki kelemahan dan kelebihan. Tugas sebuah bangsa untuk mengakumulasi kelebihan warganya dan menekan kelemahannya.

Pendekatan serupa bisa dilakukan terhadap "manusia Minangkabau atau Bugis" yang sering dipandang membawa arus "budaya seberang". Peran mereka bisa menjadi penyeimbang bagi budaya dominan supaya terwujud kondisi dinamik. Budaya Minang mungkin sulit dipahami orang komunitas lain, karena mereka memiliki ketinggian harga diri. Bagi orang Minang, berposisi rendah apalagi direndahkan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Sistem kekerabatan yang mereka anut juga unik, yakni matrilineal dengan menjadikan ibu adalah tokoh sentral yang menyebabkan orang lain, baik laki-laki atau perempuan, berhimpun di sekitarnya. Keunikan lain dari suku Minang, sebagaimana Madura, ialah kebiasaan mereka untuk pergi merantau. Hal itu menyebabkan mereka terbuka dengan tantangan baru dalam skala nasional maupun global, berbeda dengan karakter suku Jawa/Sunda yang lebih menyukai harmoni dan tinggal di tanah sendiri.

Tetapi, kita harus berani melakukan kritik obyektif atas berbagai mitos yang melingkungi warisan budaya lokal, seperti tercermin dalam sebuah lagu kanak-kanak tentang "nenek moyangku orang pelaut". Karakter masyarakat pantai acap dinisbatkan kepada suku Bugis karena peran mereka sebagai pedagang yang tak segan menyeberangi lautan. Padahal, menurut penelitian intensif Christian Pelras (1996), hal itu mitos belaka, karena sebagian besar anggota masyarakat Bugis adalah petani. Kegiatan laut masyarakat Bugis baru dimulai di abad ke- 18, atau seabad setelah armada laut Kesultanan Gowa dan Tallo dihancurkan VOC. Demikian pula kapal Phinisi yang dikenal luas ternyata baru dibuat paling cepat di akhir abad ke-19 atau lebih tepatnya di awal abad ke-20. Pembongkaran mitos itu membuat kita semakin menyadari potensi nyata, disamping obsesi yang belum terpenuhi. Pelras tidak hanya mengkaji aspek material masyarakat Bugis, tapi juga aspek mental dengan menganalisis epik Galigo. Epik itu dianggap mencerminkan kosmologi dan aturan keagamaan Bugis pra-Islam. Dari aspek mental, dipaparkan pula bagaimana masyarakat Bugis sejak abad ke-19 terserap ke dalam dunia moderen melalui globalisasi dan kolonialisme. Proses penyerapan inilah yang membawa perubahan sosial dan spiritual setempat.

Suku lain tak hanya dipandang sebagai budaya marjinal, namun berpengaruh kritikal semisal Aceh dan Papua. Sebagianarganya mungkin bertanya, apakah mereka mewakili dan memberi kontribusi bagi identitas budaya nasional, karena apresiasi yang diterima yak memadai. Perasaan sebagai warga bangsa yang satu mengalami tekanan permanen. Bila diamati, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang pluralistis dan "terbuka". Mereka terdiri dari delapan sub etnis, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang. Semuanya mempunyai sejarah asal-usul dan budaya yang sangat berbeda satu sama lain. Pada masa pemerintahan Sultan Alaaidin Al-Kahar (1530-1552), warga Aceh dibagi menjadi empat *kawom* (kaum), yaitu 1) *Kawom Ihee reutoh* (suku tiga ratus) yang berasal dari orang-orang Mante-Batak sebagai penduduk asli; 2) *Kawom imuem peut* (suku imam empat) berasal dari orang-orang Hindu atau India sebagai pendatang; 3) *Kawom tol Batee* (suku yang mencukupi batu) berasal dari berbagai etnis

pendatang dari seantero tempat; dan 4) *Kawom Ja Sandang* (suku penyandang) adalah para imigran Hindu yang telah memeluk agama Islam. Dengan formasi itu, bisa dibayangkan terjadinya kemajemukan di dalam suatu suku, disamping kemajemukan antar-suku yang membentuk keindonesiaan. Pada masa konflik dan penerapan darurat militer, kohesi sosial di Aceh amat rapuh. Setelah perdamaian terjadi dan pemilu lokal dilaksanakan dengan lancar, maka perlu dirajut proses kohesi baru yang menjamin hak semua warga. Hanya dengan cara itu, maka aspirasi lokal Aceh tak akan lepas dari bingkai nasional Indonesia.

Proses serupa, meski terlihat lebih rumit, perlu dipikirkan untuk masyarakat Papua yang dari segi karakter paling mencolok perbedaannya dengan suku lain di Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan warga Papua mewakili ras yang berbeda dari kebanyakan komunitas di Tanah Air. Salah satu upaya untuk mengakomodasi budaya lokal ialah dengan menampilkan tokoh-tokoh pemimpin lokal yang mampu mengartikulasikan kepentingan mereka di tataran nasional. Sayangnya, kaderisasi kepemimpinan nasional belum memungkinkan tumbuhnya sosok pemimpin lokal yang kritis, sehingga muncul gerakan perlawanan untuk mempertahankan identitas lokal.

Gesekan antar komunitas yang mempertentangkan aspirasi lokal versus pusat, atau yang mewakili kelompok mayoritas versus minoritas, tak cuma menyangkut perbedaan kultural, namun juga terkait ketimpangan sosial-ekonomi yang melatarinya. Isu perbedaan kepentingan antar kelompok pribumi dan non-pribumi (warga negara keturunan) masih bersifat laten hingga kini. Menurut Amy Chua dalam buku *“World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability”* (2003), jurang perbedaan kesejahteraan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi sekarang memang sangat besar. Warga etnik Tionghoa yang berjumlah hanya 3% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, ternyata menguasai 70% sektor bisnis dan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan tindakan afirmasi guna mengangkat golongan masyarakat paling miskin dan terpinggirkan, seraya membenahi struktur ekonomi yang timpang. Dengan kebijakan yang konsisten, maka prasangka sosial yang berkembang terhadap suatu kelompok

akan dapat dipupus. Pada akhirnya kebijakan sosial-budaya tak bisa dilepaskan dari kerangka kebijakan ekonomi dan politik nasional secara komprehensif.

3.3.2.5 Faktor Agama

Faktor agama dalam konteks perubahan sosial-budaya di Indonesia perlu disorot khusus, karena pengaruhnya sangat besar. Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam (86,1%), dan selebihnya menganut Katolik (6,3%), Kristen (3,6%), Hindu (2,4%), Budha (1,4%) serta kepercayaan lain (0,2%). Secara resmi lima agama itulah yang diakui pemerintah, disamping Kong Fu Tsu yang coba diartikulasikan di masa transisi oleh para pemeluknya. Selain memeluk agama yang bersifat formal, harus diakui cukup banyak warga yang memeluk kepercayaan tradisional. Keragaman dalam beragama tidak menyebabkan Indonesia terpecah-belah, karena semangat toleransi dan saling menghargai perbedaan terus dikembangkan. Walaupun harus diakui terjadi gesekan di sejumlah daerah akibat miskomunikasi atau pemaksaan kehendak oleh sebagian pihak. Agama merupakan faktor sensitif sebagai perekat atau pemecah kesatuan sosial, karena itu peran tokoh agama menjadi sentral. Bila tokoh agama bersikap moderat dan terbuka, maka pemeluknya juga akan membentuk komunitas yang toleran dengan segenap perbedaan. Mereka akan bekerjasama dalam hal yang disepakati dan saling memahami dalam perkara yang tidak disepakati.

Tabel 3-11. Komposisi Pemeluk Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	86,1
2.	Katolik	6,3
3.	Protestan	3,6
4.	Hindu	2,4
5.	Budha	1,4
6.	Lainnya	0,2
	TOTAL	100

Sumber: Departemen Agama RI, 2005

Islam sebagai "faktor budaya" telah mempersatukan Nusantara menjadi bangsa baru bernama Indonesia (Taufik Abdullah, 1996). Sejarah penyebaran Hindu dan Budha (abad 6-7 M) diikuti masuknya Islam (abad 8) mulai dari Samudera Pasai, Aceh. Kemudian merebak kerajaan Islam mulai dari Aceh, Jawa, hingga Maluku dan Papua (abad 9-15). Interupsi penjajahan berlangsung sejak masuknya Portugis (membawa ajaran Katolik) dan Belanda (membawa ajaran Kristen), menimbulkan ketegangan dan perlawanan lokal. Kontribusi Islam terbukti dengan terbentuknya identitas nasional yang diawali organisasi modern pertama di Indonesia (Jamiat Khair dan Serikat Dagang Islam), lalu menjadi partai politik pertama di Indonesia (Syarikat Islam akhirnya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia). Semuanya memberi warna khas kebangsaan hingga perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah berhasil diraih tahun 1945.

Walau berpenduduk mayoritas Muslim, namun interaksi sosial tetap menghargai perbedaan agama dan latar belakang lain. Pandangan Islam yang paripurna sebagaimana dirumuskan Mahmud Syaltur (1966) mencakup "Aqidah, Syariah dan Akhlaq" akhirnya membentuk sikap dan perilaku warga Muslimin secara individual dan kolektif.

Tabel 3-12. Perkembangan Masjid di Indonesia Tahun 1981-2003

TAHUN	MASJID			JUMLAH
	Masjid Besar	Mushalla	Langgar	
1981-1985	116,905 (3.02)	32,673 (15.50)	372,050 (1.04)	521,528 (2.20)
1985-1990	142,061 (3.90)	42,324 (5.20)	361,416 (-0.58)	545,801 (0.91)
1990-1995	168,719 (3.44)	53,242 (4.60)	378,496 (0.92)	600,457 (1.91)
1995-2003	193,225 (1.70)	62,234 (1.95)	388,375 (0.32)	643,834 (0.87)

Sumber: 1) Direktorat Urusan Agama Islam, Ditjen BIUH, Departemen Agama RI, 1999 dan 2) Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.

Faktor agama dipercaya dan dipraktekkan sebagai perekat bangsa dan pembentuk identitas nasional, bukan pengganggu dan penghambat pembangunan bangsa. Berdasarkan temuan Yusnar Yusuf (2004) yang melakukan riset tentang "Masjid sebagai Wadah Kepemimpinan dalam Pembangunan Negara: Sebuah Pengalaman Empirik di Indonesia", peran agama sangat sentral dalam membentuk formasi sosial. Posisi masjid tak hanya dijadikan sebagai rumah ibadah, tetapi juga ruang publik untuk berinteraksi sosial di antara warga yang berbeda latar belakang sosialnya. Biasanya dalam struktur masyarakat tradisional, lokasi masjid berdekatan dengan pusat pemerintahan (istana keraton), ruang publik terbuka (alun-alun) dan pasar umum. Sementara dalam masyarakat yang bergerak maju, masjid juga terdapat di tengah perkantoran dan perumahan. Dari lanskap wilayah itu terlihat bahwa masjid menjadi titik temu untuk proses sosial, politik dan ekonomi warga. Apakah rumah ibadah non-Muslim memiliki fungsi serupa, masih perlu dilakukan penelitian tersendiri, tapi tampaknya bersifat lebih minimal.

Tabel 3-13. Jumlah Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal Kelolaan Masyarakat

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1.	Majelis Taklim	170,186
2.	Taman Pendidikan Al Qur'an	36,652

Sumber: Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.

Jumlah masjid di seluruh Indonesia (lihat Tabel 3-12) menunjukkan gejala menarik, termasuk juga laju pertumbuhannya. Bila diamati sejak tahun 1981 hingga 2003, maka jumlah total masjid dengan berbagai ukuran – termasuk mushalla dan langgar – berkembang dari 521.528 buah menjadi 643.834 buah. Jumlah terbesar berupa langgar yang biasa digunakan komunitas terbatas, dari 372.050 (tahun 1981) menjadi 388.375 (2003). Namun, masjid jami' yang digunakan untuk pertemuan semua kelompok seperti shalat Jum'at

juga cukup banyak, dari 116.905 (1981) menjadi 193.225 (2003). Sebenarnya lebih penting dari sekadar peningkatan jumlah dan pembangunan fisik, pemenuhan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan warga Muslim belum optimal. Kecuali diisi dengan ibadah ritual, aktivitas masjid dimeriahkan oleh kelompok majelis taklim dan pendidikan al Qur'an (lihat Tabel 3-13). Jumlah kelompok informal yang bergerak di masyarakat sudah pasti lebih banyak lagi dibanding data formal yang tersedia, karena program pemberantasan buta huruf al Qur'an telah menjadi gerakan nasional yang secara tak langsung telah mengangkat tingkat melek huruf warga. Tugas pemerintah sesungguhnya untuk melakukan sinkronisasi program pemberantasan buta huruf latin dengan pemberantasan buta huruf al Qur'an, agar indeks pembangunan sosial meningkat.

Pentingnya peran pranata keagamaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan warga dan selanjutnya membentuk karakter budaya nasional pernah diungkap oleh dr. Soetomo, salah seorang penganjur kebangkitan nasional, dan Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Dalam polemiknya dengan Sutan Takdir, kedua tokoh itu membela posisi "pesantren" sebagai model pendidikan nasional yang memadukan fungsi transfer pengetahuan dan pembentukan akhlak (budi pekerti). Peran itu dipandang vital karena dapat menjaga keutuhan pribadi manusia Indonesia agar tidak larut dengan perkembangan zaman, atau mengalami keterbelahan kepribadian. Di masa modern, keadaan pesantren semakin berkembang dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan bentuk pelayanannya, hingga bermunculan pula di berbagai kota, tak hanya di wilayah pedesaan. Demi memenuhi kebutuhan pendidikan di kota, maka berdiri model "sekolah Islam terpadu" yang pada intinya bermaksud memadukan kurikulum pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Hal itu menunjukkan inisiatif masyarakat yang selalu tumbuh, walau dukungan pemerintah sangat terbatas.

Masalah baru muncul, ketika institusi pendidikan Islam, khususnya pesantren dicitrakan buruk dengan berkembangnya isu terorisme. Seakan-akan pesantren dan kelompok santri menjadi penganjur paham ekstrem dan terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan, seperti dikesankan dari pemberitaan media massa. Pembentukan

opini yang negatif itu hanya akan merugikan bangsa ini secara keseluruhan, karena pesantren dan berbagai model *Islamic Boarding School* menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan warga. Kita harus memulihkan kembali citra yang telah dirusak itu dan meluruskan salah paham terhadap beberapa kelompok yang dipandang ekstrem atau radikal. Untuk itu diperlukan wawasan dakwah yang komprehensif dan moderat serta berorientasi pada kerja nyata, karena tantangan yang dihadapi umat dan bangsa amat berat – tak bisa hanya diselesaikan dengan militansi, namun membutuhkan kompetensi dalam beragam ilmu.

3.3.3 Masalah Modalitas

Disamping mengalami krisis identitas (siapa kita sebenarnya?), bangsa ini juga mengalami krisis modalitas (apa yang kita memiliki sesungguhnya?). Modal kebangsaan yang semakin tipis dan langka tidak dipupuk dan dirawat dengan benar, karena kebanyakan orang hanya sibuk memikirkan persoalan jangka pendek yang datang bertubi-tubi. Secara menyeluruh kita mengalami erosi, bukan akumulasi, nilai-nilai fundamental, sehingga kemungkinan mengalami defisit kebangsaan.

3.3.3.1 Modal Fisik

Sumber daya alam yang kaya tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga eksploitasi menyebabkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Kita bisa saksikan hal itu di sejumlah daerah pertambangan yang kini memasuki fase akhir dari proses pemanfaatannya. Tak pernah dipikirkan sebelumnya, bahwa sumber alam itu akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi, sehingga diperlukan rencana jangka panjang untuk mengantisipasinya. Lokasi pertambangan yang sekarang masih aktif sekalipun belum memperlihatkan kepedulian yang kuat akan kelestarian lingkungan. Kesadaran baru mencuat setelah efek bencana tak dapat dikendalikan, seperti kasus lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Lemahnya perencanaan dan antisipasi pun tergambar dari penanganan terhadap daerah bencana. Dalam era mutakhir kita

saksikan lemahnya koordinasi sejak gempa dan tsunami melanda Aceh (2004), lalu gempa Yogyakarta (2006) hingga gempa Bengkulu (2007). Proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana mengalami banyak hambatan, sehingga kondisi masyarakat mengalami kemerosotan dibanding sebelum bencana.

Infrastruktur publik seperti terabaikan, tidak dibangun dan dirawat dengan semestinya. Akibatnya fatal, sarana transportasi yang tak laik pakai menimbulkan korban tak berdosa terus berjatuh. Kecelakaan kereta api, pesawat udara hingga kapal laut terjadi berturut-turut, namun tak diikuti dengan proses perbaikan agar memenuhi standar keselamatan internasional. Masyarakat terpaksa menggunakan transportasi dengan resiko bahaya yang tinggi, karena daya beli yang amat rendah sementara tarif transportasi selalu berfluktuasi. Mahalnya fasilitas publik juga dirasakan dalam bidang kesehatan, sehingga warga miskin mendapat pelayanan minimal, akibatnya tingkat kesehatan publik menurun dan angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Kelemahan infrastruktur juga terjadi di sektor komunikasi dan ekonomi-bisnis, sehingga kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kesejahteraannya jadi terhambat.

Secara umum, kondisi fisik manusia Indonesia masih rentan dengan tingkat harapan hidup yang rendah. Masih banyak wabah penyakit belum tertangani sepenuhnya (seperti gejala flu burung atau demam berdarah), sedang gejala kurang gizi dan busung lapar masih terdengar di beberapa daerah yang sebenarnya termasuk kategori surplus dalam produksi pangan. Bila hal ini tak ditangani secepatnya, maka sumber daya utama pembangunan dalam bahaya.

3.3.3.2 Modal Intelektual

Lemahnya infrastruktur pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat fisik. Kualitas guru dan dosen dalam berbagai peringkat pendidikan belum ideal, karena mereka masih disibukkan untuk memenuhi kesejahteraan pribadi dan keluarga, sehingga tidak bisa berkonsentrasi penuh

untuk menjalankan tugasnya. Mutu lulusan pendidikan pun menjadi rendah, tak mampu bersaing dengan negara lain. Mereka yang lulus dengan pengetahuan dan keterampilan terbatas selanjutnya tak bisa tertampung dalam dunia kerja, disamping lapangan kerja juga terbatas. Dengan mutu yang SDM rendah, maka produktivitas nasional pun tak beranjak naik. Dalam konteks global, lemahnya lembaga pendidikan nasional menempatkan sejumlah perguruan tinggi kita berada di bawah peringkat negara tetangga. Hal itu berdampak pada lemahnya daya saing SDM kita di pasar global, sehingga kita hanya mampu mengeksport tenaga kerja yang tak terampil ke mancanegara.

Upaya untuk memperbesar porsi anggaran pendidikan belum sepenuhnya berhasil, apalagi usulan anggaran riset yang masih jauh dari kebutuhan. Lemahnya inovasi dalam bidang riset mempengaruhi proses industrialisasi dan perkembangan ekonomi secara makro. Posisi Indonesia masih sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih kecil potensi sumber daya alam atau manusianya, seperti Malaysia dan Singapura atau Vietnam. Mereka dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam dengan cara mengkompensasi potensi intelektualnya secara optimal. Kita belum memiliki pusat informasi yang mengintegrasikan seluruh khazanah ilmu dan keahlian yang dimiliki SDM di seluruh Tanah Air sebagai modal unggulan nasional. Jika ada, maka informasi itu bersifat sektoral dan masih tersebar di beberapa regional.

3.3.3.3 Modal Sosial

Modal sosial merupakan faktor utama demi mewujudkan harmoni dan stabilitas. Saat ini, rasa saling percaya antara warga yang berbeda latar belakang cenderung sangat rendah. Bahkan sebaliknya, sikap mudah curiga dan berprasangka semakin menyebar. Sebabnya bisa diusut dari kondisi sosial-ekonomi yang belum pulih dan tak berkembang, sehingga warga yang berbeda kepentingan harus berbagi lahan ekonomi yang sempit. Karena sumber daya yang sangat terbatas, maka banyak kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secukupnya. Kompetisi ekonomi

yang tak tersalurkan dengan adil dan terbuka membuahakan konflik lebih luas setelah dipanasi oleh perbedaan etnik dan religius.

Modal sosial bisa dipupuk bila pola komunikasi bersifat terbuka antara kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, kedudukan media massa sebagai saluran komunikasi dan informasi publik harus netral dan melayani kepentingan semua kelompok. Namun, konstelasi media sekarang dikuasai oleh sejumlah kecil pemilik modal besar, tentu saja mereka memiliki kepentingan tersendiri yang tak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Intervensi terdapat kebijakan media demi memenangkan kepentingan politik atau ekonomi tertentu sering membakar emosi massa, terutama pada momen-momen politik krusial seperti pemilu atau pilkada. Situasi bertambah rumit, bila para tokoh masyarakat sebagai *opinion leaders* terjebak permainan kuasa, masyarakat pun diadu-domba. Pemerintah belum mampu sepenuhnya mengefektifkan saluran informasi publik, bahkan sebagian unsur pejabat intelijen justru memainkan peran ganda yang destruktif. Karena itu perlu segera diatur mekanisme pengelolaan informasi publik yang bebas dan bertanggung-jawab, termasuk kontrol terhadap fungsi intelijen, dan kerangka perlindungan informasi publik.

3.3.3.4 Modal Politik

Proses demokrasi tak hanya berujud formal dan seremonial berupa penyelenggaraan pemilu secara reguler. Demokrasi yang sehat bermakna penumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah yang mereka pilih. Kenyataannya, modal politik itu masih sangat rendah, bila kita perhatikan goncangan politik yang masih kerap terjadi pasca pemilu atau pilkada. Rakyat merasa para elite pemerintahan lebih sibuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau golongan daripada mempedulikan kepentingan umum. Lebih menyakitkan lagi, tatkala rakyat mengalami suara mereka hanya dihargai setiap lima tahun sekali, itupun dengan nilai yang sangat murah. Mereka tak punya hak kontrol yang efektif. Kondisi yang sama juga terlihat dari rendahnya derajat keterwakilan (representativitas) anggota parlemen, karena kepentingan yang mereka teriakkan dan perjuangkan ternyata jauh dari kebutuhan

masyarakat. Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat umum.

Dalam tataran elite, maraknya fenomena koalisi politik yang labil menandai saling percaya yang rendah di antara kekuatan politik berpengaruh. Koalisi dan kerjasama politik lebih dimaksudkan untuk meraih posisi pribadi ketimbang mengembangkan sistem yang kokoh demi pelayanan prima terhadap masyarakat. Jika sesama elite saja sulit membangun saling pengertian, bagaimana mungkin kerjasama akan terbentuk di kalangan konstituen dan warga pada umumnya. Situasi bertambah rentan karena masih menjalarnya modus provokasi dan black propaganda demi mencapai tujuan politik. Pertaruhan politik jangka pendek akhirnya menggadaikan modal politik jangka panjang untuk membangun bangsa yang kuat dan bersatu teguh.

3.3.3.5 Modal Kultural

Kemajemukan budaya semestinya menjadi kekuatan kolektif, seperti sebuah mozaik yang merekatkan semua potensi yang terserak. Namun saat ini, kemajemukan dalam berbagai aspeknya menjadi faktor rawan yang mungkin memecah-belah persatuan dan kesatuan nasional. Titik rawan baru terasa bila satu segi perbedaan telah direkayasa dan diprovokasi oleh kelompok yang kecewa atau kekuatan asing yang ingin mencampuri urusan domestik. Mereka bertekad memenuhi ambisi kelompoknya, meski harus mengorbankan kepentingan bersama. Kebijakan diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu, baik yang minoritas maupun mayoritas di suatu daerah, juga dapat memicu konflik berkepanjangan. Untuk membenahinya dibutuhkan perubahan kebijakan, tak hanya pola komunikasi yang lebih terbuka.

Kemunduran budaya terlihat dari produk kesenian atau hiburan yang dekaden di tengah masyarakat. Tayangan dan informasi bernuansa kekerasan, takhayul atau pornografis masih mendominasi berbagai media. Masyarakat disesaki dan tanpa sadar telah dibentuk perilakunya, terutama bagi kelompok usia kanak-kanak dan remaja, dengan berbagai model kepribadian yang buruk.

Dengan alasan kebebasan informasi yang kebablasan dan menjaga kreativitas, maka tak ada tindakan sistematis yang dilakukan untuk mengurangi kecenderungan buruk itu. Padahal, dampak sosial dari informasi yang menyesatkan, berupa kekerasan maupun tindakan asusila, semakin meresahkan karena terjadi hingga pelosok kota dan desa. Kita kehilangan kebanggaan untuk berhadapan dengan bangsa lain (Taufik Ismail, *Malu Aku Jadi Orang Indonesia*, 2004), karena karakter khas bangsa yang positif semakin kabur.

3.3.3.6 Modal Spiritual

Bangsa yang religius selalu menjadi rujukan untuk menggambarkan kondisi umum masyarakat Indonesia, namun harus diakui religiusitas itu masih bersifat formalistik. Sejak zaman lampau sudah dikenal pembagian kelompok masyarakat yang berwatak Santri, Abangan dan Priyayi (Clifford Geertz, 1980). Meskipun terdapat kritik terhadap pembagian itu, karena Geertz menggabungkan kriteria ketaatan kepada agama (santri versus abangan) dengan kriteria golongan sosial-ekonomi (abangan). Secara umum kita melihat proses peningkatan kualitas hidup beragama atau biasa disebut "santrinisasi". Itu tergambar dari maraknya aktivitas keagamaan, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masih terasa kurang. Orang kemudian mengkontraskan, mengapa angka kriminalitas dan penyimpangan kekuasaan masih tinggi, bila religiusitas masyarakat terus meningkat. Hingga timbul keraguan di sebagian pihak, sejauhmana agama dapat mengontrol perilaku pemeluknya agar sejalan dengan nilai-nilai luhur.

Di kalangan Muslim, tanda bangkitnya religiusitas diperkuat oleh rancaknya aktivitas dakwah dengan berbagai metoda. Ada yang memompa militansi aqidah, mempopulerkan zikir dan muhasabah kolektif, membangkitkan etos kerja berbasis religius, atau menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi. Setiap format dakwah itu memiliki juru bicara tersendiri dan membentuk komunitas yang setia. Sayangnya, mereka belum dipertemukan dalam suatu program keumatan yang mempersatukan semua kelompok dengan arahan kepemimpinan kolektif. Kegersangan spiritual yang dirasakan sebagian orang di kota maupun daerah

tertentu juga telah menggiring mereka untuk mencari modus spiritual yang berbeda dengan agama formal. Ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi kelompok arus utama yang ingin memantapkan peran agama di tengah perubahan sosial.

3.3.4 Masalah Kebijakan

Krisis identitas dan modalitas bangsa mengejawantah dalam proses pembuatan kebijakan yang tak jelas arah dan tujuannya. Perumusan kebijakan lebih dihayati sebagai akomodasi terhadap kepentingan yang berbeda dan menghindari kemungkinan pecahnya konflik kepentingan. Tak ada upaya yang serius untuk mengkristalisasi semua aspirasi yang ada hingga membentuk kepentingan bersama (*common interest*), lalu menyatukan tekad untuk mencapainya berdasar kesamaan pandangan (*common platform*). Setiap kebijakan lebih menonjolkan aspek tertentu yang cocok dengan kepentingan penguasa.

Kebijakan nasional di bidang sosial-budaya sering menghadapi masalah yang saling terkait bak "lingkaran setan" (*vicious circle*). Semua faktor krisis yang menyebabkan "keterbelakangan bangsa" (*national backwardness*) berhubungan langsung atau tak langsung. Faktor-faktor yang harus diwaspadai adalah:

1. Krisis ekonomi, yang mulanya hanya menyentuh aspek moneter dan fiskal, namun kemudian menjalar ke aspek fundamental. Merembaknya gejala kemiskinan dan pengangguran merupakan puncak gunung es dari persoalan struktur ekonomi yang timpang sejak lama.
2. Krisis ekonomi berkelanjutan membuat merosotnya kualitas kesehatan publik, seperti terdeteksi dari tak tertanganinya penyebaran wabah penyakit, masih terjadinya gejala maltrunisi dan fenomena "*lost generation*", dan rendahnya kualitas lingkungan.
3. Krisis ekonomi juga memperparah problema yang lama telah membebani sektor pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan merosot karena biaya pendidikan masih tinggi, sementara produk/lulusan pendidikan tidak memenuhi

standar yang diinginkan untuk menunjang produktivitas nasional.

4. Krisis ekonomi juga membawa dampak sosial yang lebih luas dengan merebaknya kerawanan sosial dan gejala kriminalitas di berbagai daerah/kota, serta melanda lapisan masyarakat yang beragam.
5. Kerawanan sosial mengarah pada krisis politik akibat ketidakmampuan lembaga menyelesaikan masalah yang muncul, terutama dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik mendasar. Krisis lembaga bertambah runyam karena interaksi antar pelaku politik yang tidak prosedural dan tidak membangun kebersamaan.
6. Krisis sosial, politik dan ekonomi berakumulasi menjadi krisis budaya ditandai dengan ketertinggalan budaya dan peradaban di tengah persaingan global yang semakin ketat, sehingga menimbulkan rasa rendah diri kita sebagai bangsa.

Setelah memetakan persoalan dengan komprehensif, maka perlu diambil kebijakan yang tegas untuk menyelesaikannya satu per satu hingga tuntas. Ketegasan itu membutuhkan hadirnya sosok pemimpin yang bervisi jangka panjang, namun memiliki empati tinggi terhadap kondisi masyarakat saat ini. Sosok pemimpin macam ini amat langka dan sulit dicari.

3.3.5 Masalah Keteladanan

3.3.5.1 Perilaku Elite

Masyarakat menghadapi kenyataan pahit, hilangnya figur kepemimpinan dengan model keteladanan yang tak diragukan. "Kita menghadapi zaman besar dengan orang kerdil", ucapan Schiller yang sering dikutip Mohammad Hatta. Kesadaran akan pentingnya peran kepemimpinan telah diungkapkan para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Tidak mudah memang melahirkan generasi pemimpin yang memikirkan nasib bangsanya dalam mengarungi perjalanan sejarah. Mereka yang akan mengangkat martabat dan kehormatan bangsa dalam pergaulan dunia.

Sementara kebanyakan elite terkurung oleh persoalannya sendiri seperti katak dalam tempurung.

Faktor hukum yang lembek (*soft culture*) turut membentuk karakter elite yang lemah, seperti disebutkan Gunnar Myrdal dalam "*Asian Drama*" (1968). Massa rakyat mudah memaafkan pemimpin yang salah, karena mereka dipersepsi membela kepentingan bersama, sementara elite pemimpin justru memanipulasi sikap lugu itu. Budaya "gotong-royong", yang sebenarnya bermakna positif untuk menunjukkan kolektivisme genuin, telah disalahsartikan menjadi tanggung-jawab bersama, sehingga pemimpin juga tak merasa bertanggung-jawab atas kesalahan dan kekeliruan kebijakan yang telah diambilnya.

Tak ada prinsip budaya malu dalam melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang publik tak mengetahuinya. Apabila publik kemudian tahu kesalahan elite dari pemberitaan media, maka tinggal ditunggu waktu beberapa lama sampai masyarakat melupakan kesalahan itu. Memori kolektif bangsa ini masih terlalu pendek. Tak ada kontrol sosial yang efektif dari masyarakat, dan tak ada tradisi mundur bagi pejabat publik yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum atau nilai kepatutan moral.

Bila dicermati praktek kepemimpinan pasca Orde Baru, maka kita akan melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing, yaitu:

B.J Habibie (1998 - 1999), termasuk pemimpin bertipe penuh inisiatif dan suka bergerak cepat. Dalam waktu singkat, 17 bulan, Habibie menerbitkan sangat banyak undang-undang dan mengeluarkan keputusan penting, walaupun sinkronisasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Terlalu singkat waktu yang dimilikinya, sementara terlalu berat beban yang harus dipikul. Dalam kondisi seperti itu, mestinya ada tindakan besar yang diambil untuk memberi sinyal perubahan secara kuat: apa beda masa reformasi dengan masa sebelumnya? Perkara itu ialah pengadilan atas kasus korupsi rezim Soeharto, yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam "Visi Reformasi" dan sampai sekarang belum tuntas ditunaikan. Selain itu, cita-cita Habibie yang membumbung

untuk membangun bangsa yang maju berteknologi tinggi tak diikuti dengan komunikasi publik yang populis dan berempati dengan penderitaan rakyat. Akibatnya, sebagian warga memandang rencana pemerintah itu sebagai utopia dan tidak menyelesaikan persoalan kongkrit.

Abdurrahman Wahid (1999 – 2001), memiliki gaya komunikasi yang terlampau bebas dan cenderung tanpa aturan. Bahkan, diiringi dengan tindakan dan kebijakan yang kontroversial serta tidak memberi solusi yang pasti bagi persoalan mendesak. Kebebasan memang diperlukan demi melahirkan terobosan atas berbagai masalah dan tantangan, namun ketertiban dan disiplin juga dibutuhkan agar tercapai kemantapan. Proses penyelesaian masalah apapun yang dilakukan harus berada dalam kerangka perbaikan sistem. Wahid telah menyia-nyiaakan modal kepercayaan publik yang diraihinya sebagai pemimpin alternatif di luar pemimpin politik formal yang saling bertentangan waktu itu (Habibie dan Megawati). Tetapi, kinerja kepemimpinan Wahid ada batasnya, dan terbukti jauh dari harapan dan bayangan masyarakat. Masyarakat seperti mengalami ilusi kepemimpinan yang bisa menyelesaikan semua masalah dengan sikap menggampangkan (terlihat dari ungkapan, “Gitu aja kok repot”). Padahal itu suatu bentuk eskapisme elite dari kegagalan dalam mengambil kebijakan.

Megawati Soekarnoputeri (2001 – 2004), berbeda dengan karakter dua pemimpin sebelumnya yang bersifat penuh inisiatif (Habibie) dan sangat terbuka (Wahid). Megawati sejak lama dikenal sebagai figur pendiam dan tidak banyak inisiatif. Di zaman Orde Baru, sikap pasif itu bisa ditafsirkan untuk menghindari konflik dengan penguasa yang otoritarian, sambil membangun basis kekuatan yang solid. Namun, setelah berkuasa baru terbukti bahwa kelemahan inisiatif pemimpin telah dimanfaatkan oleh lingkaran kekuasaan di sekitarnya untuk memaksakan kepentingan dan agenda mereka masing-masing. Akibatnya, kepemimpinan nasional mengalami kemandulan dan agenda politik atau ekonomi justru datang dari kelompok tertentu. Pada masa inilah isu penting seperti privatisasi ases-aset strategis nasional dan terorisme global mencuat. Di tengah tekanan domestik dan global yang terus mengeras, bangsa ini justru menghadapi kenyataan pemimpin yang lemah.

Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – sekarang) hadir setelah masyarakat mengalami kekecewaan akumulatif, karena para pemimpin generasi baru ternyata tak memperlihatkan kinerja yang menjanjikan. Tak ada perubahan keadaan secara fundamental, tak ada perbaikan sistem yang digariskan dalam agenda reformasi. Dengan dukungan media massa yang luas, Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden yang pertama dilakukan secara langsung. Citra perubahan terus diusungnya, bahkan dirancang pola komunikasi yang sistematis untuk menjaganya. Dalam praktek, masyarakat menyadari sikapnya yang tak tegas dalam mengambil keputusan, mungkin terlalu banyak pertimbangan atau ingin berkompromi dengan keadaan, atau demi mempertahankan citra yang positif. Substansi kebijakan seakan terabaikan, karena lebih mementingkan faktor seremoni dan tanggapan publik.

Pemimpin generasi baru itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan kepemimpinan era Soekarno dan Hatta, sebab mereka menghadapi tantangan zaman yang berbeda pula. Kehadiran tokoh-tokoh lain yang berpengaruh di tataran nasional membuktikan peran kepemimpinan dan keteladanan sangat penting, dan sejarah telah membuktikannya. Mereka yang melupakan sejarah ini, akan terjebak kesalahan yang sama.

Bila dicermati, proses transformasi pemimpin memiliki lima tahapan. Pertama, pemimpin yang diikuti karena posisi formalnya, sehingga masyarakat merasa takut untuk menentang kebijakan mereka. Kedua, pemimpin yang diikuti karena hubungan yang dekat, masyarakat mengikutinya tanpa pertimbangan rasional. Ketiga, pemimpin yang diikuti karena prestasi yang diraihinya, masyarakat bangga dengan capaian kerjanya. Keempat, pemimpin yang diikuti karena mereka membangun kepercayaan diri masyarakat. Kelima, pemimpin yang diikuti karena mereka menjadi contoh/representasi dari cita-cita dan harapan hidup masyarakat. Dalam setiap proses itu terjadi pemupukan kepercayaan (*trust/tsiqah*) dan penghormatan (*respect/ihthiram*) kepada sosok pemimpin yang dicari. Sekarang sosok seperti itu sangat langka, karena kebanyakan pemimpin bersifat formal, padahal kualitas

kepemimpinannya sangat rendah, sedang resistensi masyarakat sangat tinggi.

3.3.5.2 Perilaku Massa

Kegagalan elite untuk menampilkan teladan dalam berbagai bidang membuat masyarakat menempuh jalannya sendiri-sendiri. Mereka jadi bersikap individualistik, hedonistik dan permisif dalam menyikapi berbagai persoalan di sekitarnya. Gejala itu diperkuat oleh penyebaran informasi dan pembentukan sikap melalui berbagai media. Masyarakat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Bila mereka mendapatkan kelebihan fasilitas, maka diperuntukkan bagi diri dan keluarga terdekatnya. Perasaan untuk berbagi semakin luntur, terutama di wilayah perkotaan.

Sementara itu warga masyarakat yang kurang beruntung menjadi bersikap mudah marah dan cepat tersinggung. Mereka memiliki emosi yang bersumbu pendek, jika menghadapi tekanan atau perbedaan dengan lingkungannya, sehingga konflik sosial mudah tersulut seperti terjadi di Maluku, Poso, Sampit dan Sambas. Akhirnya konflik berkembang menjadi isu komunalisme, penduduk asli versus kaum pendatang, dan pembentukan identitas nasional berada di tepi jurang disintegrasi.

Paling menyedihkan, gejala kekerasan juga merasuki dunia rumah tangga, dengan korban terutama kalangan perempuan dan anak-anak yang lemah. Hal itu mencerminkan mulai rapuhnya kehidupan keluarga sebagai sokoguru masyarakat. Terpaan budaya asing dan arus urbanisasi/modernisasi yang destruktif juga turut andil.#

BAB 4

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Sepanjang abad 20 lalu setidaknya ada tiga temuan teknologi yang telah mengubah kehidupan umat manusia secara sangat mendasar, yaitu: teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi. Teknologi transportasi menghilangkan jarak tempat, teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak waktu, sementara teknologi informasi menciptakan transparansi dan menghapus jarak pengetahuan. Dunia bukan saja berubah menjadi sebuah dusun kecil, tetapi penduduk bumi bahkan tampak seperti sekumpulan ikan yang hidup dalam akuarium. Semua negara saling terhubung dan semua warga saling berinteraksi. Semua pihak saling terlihat dan semua orang saling mempengaruhi.

Tingkat interaksi antar masyarakat manusia di seluruh dunia menjadi sangat intensif. Pada dekade terakhir saja dari abad 20 lalu, John Naisbit mencatat ada sekitar tiga milyar manusia atau 60% penduduk bumi yang melakukan perjalanan global per tahun. Arus pemikiran, budaya, informasi, barang, orang, uang, dan teknologi mengalir deras ke berbagai penjuru dunia tanpa dapat dihambat oleh batas-batas negara. Dengan membuka internet, kita bisa mengakses informasi tidak terbatas dari seluruh dunia. Maka, peristiwa yang terjadi di satu negara dengan cepat tersebar ke seluruh dunia dan melahirkan berbagai reaksi yang berbeda. Tren politik pada satu kawasan bisa dengan cepat menyebar dan menjadi tren internasional.

Setiap individu dan organisasi, lembaga keluarga atau yayasan sosial, lembaga pendidikan atau perusahaan bisnis, ormas atau partai politik, apalagi sebuah negara, tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh perubahan yang terjadi di luar dirinya. Mereka hanya punya pilihan untuk bersikap reaktif terhadap perubahan-perubahan tersebut atau sebaliknya, bersikap proaktif dan antisipatif.

Sebagai gerakan dakwah, kita dipandu oleh manhaj untuk selalu bersikap positif (*ijabiyat al ru'yah*) dan proaktif. Karena, perubahan-perubahan itu sebenarnya bukan hanya menciptakan *kendala-kendala*, tetapi juga membuka *peluang-peluang*. Dalam konteks itulah, analisis lingkungan strategis diperlukan untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di luar arena dakwah, khususnya pada berbagai kekuatan politik, militer, dan ekonomi, baik di tingkat global, regional, maupun nasional yang berimplikasi ke dalam dan mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung implementasi platform dakwah.

Dari analisis ini, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang muncul di tengah perubahan-perubahan lingkungan strategis, sehingga kita dapat menentukan upaya-upaya konkrit sebagai cara untuk mencapai platform dan target dakwah. Dari situ, kita juga dapat mengetahui kendala-kendala yang akan menghambat proses pencapaian platform dan target dakwah, sehingga secara dini kita dapat mengambil langkah-langkah antisipasi.

4.1 GLOBAL

Di tingkat global, kita mencatat beberapa perubahan penting dalam aspek sosial-politik, keamanan dan pertahanan, serta ekonomi dan budaya yang berdampak luas pada berbagai perubahan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia.

Pertama, Proses demokratisasi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998 sebenarnya merupakan kesinambungan dari gelombang demokratisasi dunia yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Negara-negara yang pernah berada di bawah

dominasi adidaya itu, baik di kawasan Asia Tengah maupun Eropa Timur, semua menyatakan kemerdekaannya, lalu secara politik berubah menjadi negara demokrasi dan secara ekonomi menjadi kapitalis. Keruntuhan yang sudah diprediksi itu – sejak munculnya Michail Gorbachev dengan ide *glasnost* (keterbukaan) dan *perestroika* (reformasi ekonomi) – dan makin terpuruknya Uni Soviet dalam perang Afganistan serta runtuhnya tembok Berlin pada November 1989, berimplikasi sangat luas. Bukan saja pada negara-negara satelit Uni Soviet, tetapi juga pada sebagian besar negara-negara berkembang di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Pengaruh serupa juga dirasakan negara-negara satelit kekuatan sekutu AS yang dipimpin oleh militer atau penguasa diktator.

Di sisi lain, keruntuhan Uni Soviet dipersepsikan sebagai kemenangan demokrasi dan kapitalisme yang dipimpin AS, seperti dinyatakan oleh Francis Fukuyama merupakan gejala “*The End of History*”. Proses demokratisasi global telah membawa implikasi sendiri dengan mengubah pola hubungan antara gerakan Islam dan rezim-rezim diktator di banyak negeri Muslim. Gerakan-gerakan Islam di berbagai negara bermetamorfosis menjadi partai politik. Dengan mengecualikan gerakan Islam di Libya, hampir semua gerakan Islam di wilayah Afrika Utara, seperti Front Penyelamat Islam (FIS) dan Gerakan Masyarakat Islam (Hamas) di Aljazair yang masing-masing memenangkan pemilu pada 1992 dan 1997. Juga, Partai Kebangkitan (Al-Nahdhah) di Tunisia dan Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko yang menarik perhatian dunia.

Sementara itu, gerakan Islam yang sebelumnya sudah mendirikan partai secara progresif mengkapitalisasi kebebasan politik baru itu untuk melakukan lompatan-lompatan politik seperti Partai Refah yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan berkuasa di Turki (2002). Demikian juga gerakan Islam di Yaman, setelah berhasil mengalahkan kekuatan komunis di wilayah Selatan dan mempersatukan Yaman, gerakan Islam yang bersekutu dengan pemerintah Yaman Utara dalam perang itu langsung mendirikan Partai Ishlah dan menjadi pemenang kedua pemilu. Partai Front Amal Islami juga berdiri di Yordania dan menjadi pemimpin partai-partai oposisi. Hal yang sama terjadi di Mesir,

walaupun tidak menggunakan nama Ikhwanul Muslimin, aktivis gerakan Islam menjadi kekuatan politik di parlemen melalui wakil-wakil independen. Gelombang demokratisasi juga bergulir di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Bahrain, meskipun mereka tetap mempertahankan sistem monarki serta berjalan lebih lambat karena prosesnya baru dimulai sejak 2002.

Latar singkat ini perlu diangkat untuk menggambarkan bagaimana masyarakat dunia menyikapi munculnya wacana baru Islam dan demokrasi. Di tengah minimnya komunikasi pemikiran dan relasi politik antara Islam dan Barat, dan meskipun capaian-capaian politik partai-partai Islam di berbagai negara itu sebenarnya masih dikategorikan papan tengah, namun wacana Islam dan demokrasi telah menimbulkan polarisasi sikap di Barat. Sebagian masyarakat Barat menganggap bahwa proses demokratisasi dapat menjadi titik temu (*meeting point*) antara Islam dan Barat, karena demokrasi akan memberikan ruang gerak yang lebih bebas dan luas bagi gerakan-gerakan Islam untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu dapat menyerap energi mereka serta menjauhkan gagasan kudeta dari seperti yang terjadi di Sudan. Namun sebagian pemikir Barat lainnya, semisal Samuel Huntington, memandang demokrasi akan menjadi batu loncatan bagi gerakan Islam menuju negara dan itu bisa menjadi ancaman bagi Barat. Pemikiran yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung neo-konservatif itu tetap memposisikan gerakan Islam adalah musuh potensial bagi Barat.

Kedua, bagi masyarakat Barat, demokratisasi sebenarnya identik dengan liberalisasi, khususnya dalam bidang ekonomi dan budaya. Proses demokratisasi di negara-negara bekas Uni Soviet yang kemudian berimplikasi di kawasan Asia dan Afrika sesungguhnya merupakan prakondisi yang diperlukan untuk menggulirkan sistem ekonomi pasar bebas. Demokrasi akan membuka akses pasar tanpa batas dimana fungsi negara secara perlahan direduksi menjadi sekedar regulator. Negara tidak boleh lagi menjadi pelaku pasar, misalnya melalui perusahaan-perusahaan negara. Maka, program privatisasi atau swastanisasi bergulir bersama proses demokratisasi.

Itulah yang melatar-belakangi sikap IMF ketika memaksa pemerintah Indonesia untuk segera melakukan privatisasi atau swastanisasi perusahaan-perusahaan negara. Sementara negara-negara bekas Uni Soviet dan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara menikmati pesta demokrasi, penguasa dan pemilik kapital Barat secara sistematis menyiapkan rencana mempertahankan hegemoni mereka sampai setengah abad ke depan. Salah satunya dengan menyiapkan *armada bisnisnya* melalui perusahaan-perusahaan multinasional untuk menyerbu pasar-pasar yang baru terbuka. Pola aliansi global berubah dari aliansi ideologi di era Perang Dingin menjadi aliansi ekonomi dalam era Tata Dunia Baru.

Dalam konteks itulah, kita menyaksikan tiga fenomena ekonomi global yang sangat penting:

1. Munculnya WTO sebagai regulator ekonomi dunia yang ingin membebaskan arus barang dan jasa global dari hambatan pajak dan tarif di berbagai negara dengan kesepakatan GATT. Proses globalisasi sudah pasti sangat menguntungkan negara-negara yang berperan sebagai produsen, sementara mayoritas negara-negara berkembang hanya menjadi konsumen dan pasar yang diperebutkan.
2. Terjadi berbagai aliansi strategis kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, dimana Eropa segera mengkonsolidasikan diri melalui Uni Eropa pada sejak 7 Februari 1992 dan menyatukan mata uang mereka. Sementara AS mengomandani aliansi ekonomi Amerika Utara (NAFTA) pada Januari 1994. Setelah itu, baik AS maupun Eropa, sama-sama berebut pasar Asia-Pasifik, dimana AS bersama Jepang berusaha menguasai pasar Asia-Pasifik melalui APEC yang dideklarasikan di Bogor pada tahun 1994. Terakhir, Eropa juga mendirikan ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang dideklarasikan di Bangkok, 1 Maret 1996.
3. Menguatnya peran perusahaan-perusahaan multinasional sebagai armada perang ekonomi neo-

liberalisme. Dalam proses liberalisasi ekonomi, perusahaan-perusahaan multi-nasional memiliki kekuatan yang bahkan melampaui otoritas dan pengaruh negara.

Ketiga, Kemenangan George W. Bush dalam pemilihan Presiden AS pada November 2000 mulanya berlangsung kontroversial, hingga terjadi serangan ke gedung WTC pada 11 September 2001. Terlepas dari siapapun pelaku serangan itu, yang pasti Bush kemudian menjadikannya sebagai momentum untuk memimpin perang melawan terorisme, bahkan menyebutnya sebagai “Perang Salib” baru. Sikap otu mengubah cara pandang AS terhadap Dunia Islam, karena tertuduh utamanya adalah Osamah bin Laden yang disebut pemimpin jaringan Al Qaidah. Padahal Bush sangat mengenal Osamah dan keluarga Bush memiliki ikatan bisnis dengan keluarga Osamah. Ketegangan baru antara Islam dan Barat mencuat. Satu bulan kemudian pasca serangan WTC, tepatnya tanggal 7 Oktober 2001, Bush melakukan invasi ke Afganistan untuk mengejar Osama dan menggulingkan pemerintahan Taliban serta kemudian mendirikan pemerintahan baru di bawah pimpinan Hamid Karzai. Usai serangan brutal di Afganistan, Bush melanjutkan dengan menginvasi Irak pada 20 Maret 2003 untuk mengakhiri riwayat rezim Saddam Husein dengan alasan telah memproduksi senjata pembunuh massal. Semua alasan itu hanya dalih Bush untuk menguasai sumber minyak dan jalur transportasi yang amat vital bagi perekonomian AS.

Dengan membuat polarisasi “*bersama kami*” (AS) atau “*bersama mereka*” (teroris), perang melawan terorisme yang dikobarkan Bush berubah menjadi proyek raksasa multidimensi: keamanan, politik, dan ekonomi. Dengan anggaran perang sebesar 40 milyar USD pada tahun 2001, 75 milyar USD tahun 2002, dan 80 milyar USD pada tahun 2003 (jumlah itu sama dengan lima kali APBN Indonesia), perang melawan terorisme menjadi perburuan global terhadap apa yang ia sebut sebagai “Axis of Evil”. Setelah invasi ke Irak berlarut-larut, AS terus menekan Iran dan Syria yang ditudingnya melatih para teroris, memberikan penguatan baru bagi Israel melalui ide *Road Map* yang menekan Palestina, kemudian mencanangkan proses demokratisasi di Timur Tengah dengan konsep *The New*

Middle East. Konsep itulah yang mendorong terbukanya kran demokrasi di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Bahrain serta negara Arab lain, namun pada saat yang sama menimbulkan gejala domestik karena para penguasa yang tak mau berbagi kekuasaan. Secara verbal, AS mempromosikan nilai demokrasi dan HAM, namun secara faktual melakukan intimidasi, invasi serta destruksi terhadap sistem politik dan peradaban negara lain. Perang melawan terorisme telah menimbulkan ketegangan di berbagai kawasan, terutama negara-negara yang dipandang sebagai sarang atau tempat persembunyian teroris dikendalikan jaringan Al Qaidah. Indonesia termasuk salah negara yang mendapat tekanan hebat karena posisinya yang strategis di Asia Tenggara dan peran pentingnya di dunia Islam.

Keempat, salah satu implikasi paling penting dari invasi AS ke Irak adalah naiknya harga minyak dunia hingga mencapai angka US\$ 55 per barel. Hal itu jelas mempengaruhi perekonomian global karena harga minyak dunia diperkirakan akan terus naik hingga mencapai \$ 100 per barel. Terlepas dari efek kenaikan harga minyak dunia di berbagai negara, kehadiran militer AS di Irak dan negara Teluk lainnya telah memungkinkan AS menguasai secara fisik sumber-sumber energi dunia. Setelah Arab Saudi yang produksi minyaknya mencapai 12 juta barel per hari, maka Irak adalah penghasil minyak terbesar kedua dengan total produksi 8 juta barel per hari.

Sebagaimana Perang Teluk I tahun 1991, invasi ke AS ke Irak semakin mengokohkan prinsip tentang industri militer sebagai penopang utama bagi perekonomian mereka. Hamid Rabi' dalam *Qira'ah Fii Fikri Ulama al Istirajiyah* (Telaah atas Pemikiran Para Ahli Strategi) menyatakan, apa yang disebut sebagai keamanan nasional AS sebenarnya adalah kepentingan nasional AS. Setiap pemerintahan di AS menyadari bahwa tugas mereka adalah mempertahankan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakatnya, walaupun itu mengharuskan mereka menyengsarakan bangsa-bangsa lain.

Kelima, kemenangan milisi Hizbullah di Lebanon atas Israel menegaskan fenomena baru dimana aktor negara (Israel) dapat dikalahkan oleh aktor non-negara (milisi Hizbullah). Bukan itu saja,

bahkan senjata militer yang super canggih juga terbukti dapat ditaklukkan oleh produk-produk militer sederhana, yang teknologinya mengalir dari Rusia ke Cina dan kemudian dimodifikasi oleh Irak, lalu dijual dengan harga murah. Kekuatan non-negara saat ini menjadi faktor yang harus diperhitungkan dengan seksama dalam percaturan global. Isu pasar gelap nuklir merebak di tahun 2004 dengan sasaran tembak Dr. Abdul Kadir Khan, “Bapak Bom Pakistan”. Tuduhnya cukup berat, karena dinilai memberikan bantuan nuklir kepada Korea Utara, Irak, Iran dan Lybia. Padahal aktor utama bisnis nuklir di pasar gelap adalah AS sendiri. Badan PBB yang mengurus pengawasan senjata nuklir (IAEA) menengarai lebih dari 20 perusahaan di 20 negara di dunia —beberapa di antaranya bermukim di Amerika Utara— memasok senjata nuklir di pasar gelap kepada negara-negara yang menginginkan (*Kompas*, 9/7/04). Salah satu dari perusahaan itu bermarkas di AS. Pemerintah India menilai bukan hanya Pakistan yang harus dipersalahkan dalam hal penyebaran pengetahuan tentang nuklir, tetapi yang diperlukan adalah penghentian pasar gelap teknologi nuklir yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Sementara itu, pemerintah Pakistan menyatakan bahwa mereka mengetahui nama-nama pengusaha di Eropa yang terlibat dalam alih teknologi ilegal di pasar gelap nuklir. Sudah terbukti, pemain penting bisnis pasar gelap nuklir ini adalah perusahaan-perusahaan AS dan Eropa. Namun, negara-negara maju yang menguasai teknologi nuklir kini malah menekan negara-negara berkembang yang sedang merintis penguasaan energi nuklir untuk tujuan damai. Kondisi yang timpang ini harus ditangani karena isu energi nuklir telah menarik perhatian publik, termasuk di Indonesia yang membutuhkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan domestik.

4.2 REGIONAL

Perubahan-perubahan penting yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan sepenuhnya merupakan implikasi perubahan-perubahan global, disamping perluasan dari kondisi domestik yang bergerak dinamik. Perubahan-perubahan penting adalah sebagai berikut :

Pertama, proses demokratisasi juga bergulir di kawasan ini sebagaimana terjadi di belahan dunia lainnya. Hanya saja proses demokratisasi di Asia Tenggara dipercepat oleh krisis moneter 1997 yang secara drastik berkembang menjadi krisis multidimensi. Dengan pola yang berbeda-beda, demokratisasi mendorong percepatan suksesi kepemimpinan di hampir semua negara Asia Tenggara. Kejatuhan Soeharto di Indonesia mungkin yang paling dramatis, sementara konflik Mahathir Mohammad dengan Anwar Ibrahim telah mendorong Mahathir untuk segera mundur dengan cara yang lebih terhormat, sambil tetap berusaha mempengaruhi kebijakan penggantinya di Malaysia. Suksesi yang relatif stabil terjadi di Singapura karena sistem politik semi-otoritarian dengan firgur sentral Lee Kuan Yew. Sementara Thailand dan Filipina mengalami goncangan hebat akibat pengaruh militer yang sangat kuat dan kepemimpinan sipil yang lemah serta terpecah dalam berbagai kelompok. Dominasi militer yang tak tergoyahkan di Myanmar telah menjadikan negara itu terisolir dari pergaulan dunia, bahkan hubungan dengan sesama negara kawasan pun amat terbatas, karena kekuatan oposisi dan kebebasan sipil telah dikorbankan. Situasi itu menunjukkan gelombang demokratisasi selalu menghadapi tantangan, meski kecenderungannya tetap positif.

Kedua, krisis moneter yang melanda beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia telah mengubah posisi kawasan ini dari keajaiban ekonomi awal 1990-an menjadi pesakitan yang harus dirawat oleh IMF. Namun, resep generik IMF ternyata semakin memperparah keadaan. Walaupun Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Malaysia lebih cepat pulih, krisis moneter itu bukan saja telah mendorong reformasi politik, tetapi juga mengubah banyak regulasi dan tren ekonomi kawasan. Salah satunya adalah tuntutan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Proses privatisasi ini telah memberi kepada negara dengan modal berlimpah seperti Singapura memperluas investasinya ke negara lain, khususnya ke Indonesia. Privatisasi perusahaan milik negara telah memancing debat publik yang hangat karena dipandang menjual aset strategis bangsa, namun kebutuhan pemerintah untuk menarik investasi

asing telah menimbulkan dilema tersendiri. Krisis moneter juga telah menyebabkan mata uang domestik anjlok dan nilai-nilai perusahaan-perusahaan menjadi sangat murah.

Ketiga, isu terorisme merambah dan mengubah peta kawasan Asia Tenggara yang pada mulanya dikenal aman dan damai. Tiba-tiba kawasan ini diisukan sebagai tempat pelarian anggota jaringan Al Qaidah dan karenanya menjadi sarang terorisme, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina (bagian Selatan), dan Thailand (juga wilayah Selatan). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghadapi persoalan yang lebih pelik daripada isu terorisme, yakni konflik etnik/rasial dan gejolak kedaerahan akibat ketimpangan sosial-ekonomi. Karena itu, gencarnya isu terorisme telah mengabaikan sejumlah pemerintahan dari pemecahan masalah yang lebih prioritas. Ancaman pembajakan laut di Selat Malaka, misalnya, merupakan persoalan yang lebih kongkrit daripada isu terorisme. Namun, pihak AS sengaja melontarkan isu terorisme dan keamanan regional agar mendapat legitimasi untuk mengirim pasukan pengaman ke wilayah strategid itu. Keinginan itu ditolak oleh negara-negara anggota ASEAN, kecuali beberapa sekutu setia AS. Di situ terlihat bahwa isu terorisme digunakan sebagai dalih untuk kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Isu terorisme bukan saja berdampak buruk pada iklim investasi di Asia Tenggara yang sedang dilanda krisis ekonomi, tetapi juga memperburuk hubungan bilateral di antara anggota kawasan, karena perbedaan sikap mereka terhadap masalah domestik dan tekanan asing., Pemerintah Singapura bersama Australia terus menerus memojokkan Indonesia dan Malaysia sebagai sarang terorisme, namun perubahan politik di Australia mungkin membawa perubahan kebijakan karena Partai Buruh pimpinan PM Kevin Rudd dipandang lebih kritis terhadap kebijakan AS. Bahkan, banyak yang meramalkan bahwa kemenangan Partai Buruh di Australia merupakan prolog dari kemenangan Partai Demokrat di AS, dan perubahan kebijakan global akan terjadi bila Bush benar-benar dikalahkan.

4.3 NASIONAL

Perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat nasional juga dipengaruhi secara kuat oleh berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global dan regional.

Pertama, Proses demokratisasi di Indonesia terjadi dengan cara yang sangat dramatis dan sangat cepat.

Krisis moneter dan tekanan internasional telah memaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya. Pada saat Habibie berkuasa, ia segera membuka kran demokrasi dengan menciptakan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, mendukung sistem multipartai, dan memberikan otonomi daerah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Terjadilah ledakan partisipasi politik yang luar biasa. Sekitar 160 partai politik mendaftarkan diri dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut pemilu pada Juni 1999. Akhirnya pada tahun 2004 tersisa hanya 24 partai yang berhak ikut pemilu. Namun, akselerasi politik itu tidak disertai dengan kesiapan mental dan manajerial pada kepemimpinan nasional di masa transisi. Walaupun pemilu berlangsung aman dan damai serta Presiden terpilih memiliki legitimasi kuat, baik di masa pemerintahan Wahid, maupun Megawati, namun karakter pribadi mereka tak memadai untuk menghadapi anek turbulensi. Pemerintahan Susilo tampil dengan komitmen melanjutkan reformasi dan melepas peran politik TNI, namun sekali lagi tampak kapasitas pemerintahan transisi sangat tidak memadai untuk mengawal dan mengimplementasikan amanat reformasi, terutama di bidang penegakan hukum dan pembenahan ekonomi.

Kedua, Kelemahan kepemimpinan kaum sipil juga terlihat pada kondisi internal partai-partai politik.

Hampir semua partai politik mengadakan pemilihan ulang formasi pimpinannya menjelang penyelenggaraan pemilu. Proses itu berlangsung gaduh dan penuh konflik internal di hampir semua partai, kecuali sedikit partai yang memiliki disiplin pengkaderan yang ketat. Kondisi itu merusak citra partai-partai tersebut, sebab konflik internal menunjukkan tidak adanya mekanisme dalam

organisasi yang dapat menyerap berbagai perbedaan, sekaligus menunjukkan ketidakmatangan para elit partai. Kekecewaan masyarakat terlihat dari besarnya jumlah pemilih golput dalam pemilu. Jumlah golput lebih besar lagi dalam penyelenggaraan pilkada. Bahkan, kemudian muncul wacana calon perorangan agar dapat berpartisipasi dalam pilkada, yang tidak terikat partai manapun. Wacana itu ingin dikembangkan lebih lanjut agar juga mencakup partisipasi dalam pilpres. Hal itu makin menguatkan indikator ketidakpercayaan publik kepada partai politik, walaupun jika dipenuhi, belum menjamin meningkatnya kualitas demokrasi kita.

Ketiga, kondisi serupa terjadi di kalangan militer (TNI) yang mengalami demoralisasi, sebab proses demokrasi membuat negara kehilangan kendali sentral, tekanan publik domestik dan internasional menuntut agar peran militer dibatasi dalam kancah sosial-politik.

Tuntutan agar militer berkonsentrasi dalam sektor pertahanan negara hadir setelah konflik berkepanjangan di berbagai daerah. Cikal bakal konflik itu sudah ada jauh sebelum reformasi, namun meledak seperti bisul yang menimbulkan luka bernanah, tatkala keterbukaan dan kebebasan informasi melanda. Konflik dalam berbagai peringkat mengancam kelangsungan NKRI. Setidak-tidaknya ada tiga jenis konflik yang pernah terjadi di Indonesia dan berpotensi untuk muncul kembali di masa depan. *Pertama*, konflik antarelit politik, baik di internal partai maupun antar partai politik. *Kedua*, konflik vertikal antara masyarakat dengan negara, seperti gejolak separatisme di Aceh dan Papua. *Ketiga*, konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal seperti konflik di Maluku dan Poso, maupun bermotif kecemburuan sosial seperti konflik-konflik perburuhan. Hampir semua konflik itu tidak tertangani dengan baik karena pemerintah pusat benar-benar kehilangan kendali. Konflik di Aceh berakhir dengan perjanjian damai yang disponsori lembaga mancanegara, lalu dilanjutkan penyelenggaraan pilkada yang dimenangkan calon gubernur perorangan dari tokoh independen. Tokoh baru itu sesungguhnya berasal dari kelompok yang menuntut kemerdekaan (GAM dan SIRA). Kenyataan itu membawa peluang

besar di masa depan untuk kembalinya secara riil kekuatan GAM walau berubah wujud menjadi partai lokal. Sementara kekuatan personal TNI dan Polri di wilayah Aceh terus berkurang secara drastis. Pola perubahan yang terjadi di Aceh mungkin mengilhami kekuatan lokal di wilayah lain untuk menempuh strategi serupa: perjuangan bersenjata berganti menjadi perjuangan merebut suara rakyat (*from bullet to ballot*).

Keempat, peran parlemen yang begitu besar di era reformasi tidak disertai dengan integritas moral dan kompetensi politik yang memadai.

Rekrutmen pejabat negara dan wakil rakyat tidak memiliki standar yang baku dan layak dipercaya, karena sebagian besar partai politik kurang serius mengembangkan sistem pengkaderan internal. Akibatnya, publik menyaksikan sejumlah tokoh yang tidak dikenal rekam jejaknya bisa tampil sebagai kandidat pejabat tinggi, hanya karena kedekatan dengan elite pimpinan partai tertentu. Bahkan, ada pula calon pejabat yang dikenal masyarakat memiliki rekam jejak negatif, namun tetap dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu. Publik tak lagi melihat peran partai untuk melakukan seleksi dan rekrutmen pejabat yang berkualitas, namun hanya sekadar mempertahankan kepentingannya. Pejabat yang lemah dibayangkan dapat dikendalikan dengan mudah, sehingga pada saat berkuasa tidak melayani masyarakat sepenuhnya, namun malah mengamankan beking politiknya. Isu korupsi merebak luas di parlemen, baik di pusat maupun daerah, dalam menjalankan proses legislasi, penyusunan anggaran, pengawasan terhadap lembaga eksekutif yang menjaid mitra kerjanya. Sehingga peraturan yang dihasilkan atau perbaikan yang direkomendasikan tidak lagi bergigi, bahkan penyusunan anggaran telah dipersepsikan sebagai kesempatan untuk memfasilitasi diri sendiri. Meski sejumlah anggota parlemen telah merasakan pahitnya kehidupan penjara, namun gejala korupsi tak kunjung berkurang. Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan standar rekrutmen lebih ketat, sehingga integritas dan kompetensi pejabat menjadi kriteris utama.

Kelima, Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik karena gagalnya agenda reformasi, baik di pusat maupun di daerah.

Faktor utama adalah lemahnya pemerintahan transisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pembawa agenda perubahan agar terlihat jelas perbedaan era reformasi dengan era sebelumnya. Publik melihat kepala pemerintahan di masa transisi kurang tegas dalam menentukan kebijakan, bahkan ada tokoh yang mencoba berkompromi dengan kekuatan di masa lalu. Jika ditelusuri lebih teliti, kelemahan lembaga pemerintah diawali oleh buruknya kinerja partai-partai politik – termasuk partai yang mendukung pemerintah – akibat kompetisi terselubung atau konflik-konflik internal yang bersifat laten. Selain itu, hancurnya citra lembaga legislatif dan eksekutif akibat kasus korupsi yang terus melanda, bahkan virus korupsi juga menjalar ke lembaga yudikatif. Masyarakat memandang aktivitas politik tidak lagi terkait dengan nasib mereka yang semakin terpuruk, karena para elite dipersepsi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya semata. Rendahnya kepercayaan publik mengakibatkan lemahnya legitimasi pemerintah yang berkuasa, sehingga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan pun menjadi terganggu. Institusi politik yang lemah tak bisa diharapkan akan memperbaiki nasib rakyat; mereka justru akan mempertahankan posisinya dan melemahkan kekuatan lain yang dianggap mengganggu

Keenam, penerapan otonomi daerah selama ini tidak disertai dengan kelengkapan sistem dan prosedur yang mengatur otoritas setiap peringkat pemerintahan dan kesiapan daerah untuk menata infrastrukturnya sendiri.

Implementasi otonomi daerah yang tak terencana dengan baik akhirnya menciptakan konflik otoritas antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan antara daerah dengan pusat, serta memicu munculnya ‘raja-raja kecil’ sekaligus ‘koruptor-koruptor kecil’ di berbagai daerah. Sejumlah tokoh daerah yang melakukan penyimpangan telah diperiksa dan dikenai hukuman, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif lokal. Konsekuensinya, pembangunan daerah menjai terhambat dan sulit dikontrol, serta tidak jelas efektivitas dan efisiensinya. Data dan fakta

memperlihatkan sebenarnya anggaran daerah cukup memadai di berbagai kasus, namun tidak optimal karena dana publik itu hanya disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga lainnya. Sejumlah Kepala Daerah beralasan bahwa mereka khawatir akan terjebak kasus korupsi, apabila membelanjakan dana daerah tanpa prosedur yang jelas, tetapi akibatnya program daerah banyak yang macet dan kondisi ekonomi rakyat tak bergerak. Kondisi stagnan itu harus diakhiri dengan mendorong pemimpin daerah agar berani mengambil keputusan yang tepat dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan otonomi daerah

Ketujuh, program pemulihan ekonomi nasional belum berjalan sebagaimana diharapkan akibat situasi keamanan yang belum stabil dan penegakan hukum yang lemah.

Kondisi dalam negeri yang belum mantap membuat kalangan investor tak tertarik untuk menanamkan modalnya, baik investor domestik, apalagi investor asing. Kalaupun ada investor yang mengalirkan modalnya, maka mereka lebih memilih pasar uang atau bursa saham yang cenderung bersifat instan, bukan menanam modal untuk suatu investasi yang berjangka panjang. Sepanjang masa transisi arus investasi cenderung macet, bahkan ada gejala mundur ke belakang karena sejumlah perusahaan asing melakukan relokasi usaha ke negara lain. Di masa pemerintahan SBY-JK, kondisi ekonomi makro terus membaik, namun sektor riil belum bergerak dan investasi asing juga baru bersifat komitmen. Kunjungan Kepala Pemerintah dan pejabat tinggi lainnya ke luar negeri perlu dievaluasi secara kritis, agar tak hanya memboroskan dana negara, namun benar-benar memberikan dampak positif bagi masuknya investasi strategis. Pangkal soalnya sudah jelas, bukan semata-mata promosi dagang yang diperlukan, tetapi pembangunan infrastruktur yang lengkap dan jaminan kepastian berusaha, karena itu koordinasi antar berbagai instansi yang terkait dengan pemulihan ekonomi harus ditingkatkan. Selain itu, konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan oleh pihak asing yang akan berinvestasi. Jangan sampai masuknya modal asing justru menimbulkan gejala xenophobia, sehingga upaya yang telah dirintis akan sia-sia.

Kedelapan, gencarnya program privatisasi BUMN menyebabkan tidak jelasnya arah pembangunan fundamental ekonomi nasional; sejumlah BUMN yang terlihat cukup sehat akhirnya lepas ke tangan asing, sementara BUMN strategis mengalami kebangkrutan..

Program privatisasi merupakan syarat generik dari IMF dan pemerintah Indonesia tetap menjalankannya untuk mempertahankan pemasukan APBN, meskipun secara resmi tidak lagi terikat dengan IMF. Kebijakan pemerintah untuk melunasi utang luar negeri secara terjadwal, namun strategi untuk mendapatkan dana segar dari dalam dan luar negeri harus lebih dikerahkan. Optimalisasi pemasukan negara dari pajak termasuk salah satu alternatif penting, sehingga program privatisasi dilakukan dengan penuh perhitungan. Pemerintah harus berani menentukan BUMN mana saja sesungguhnya yang paling dan masih dibutuhkan negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, disamping memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Sementara itu, BUMN yang tidak terlalu urgen bidangnya dan ternyata dapat dijalankan oleh pihak swasta, maka BUMN itu dapat dilepas ke pasar dengan tetap memperhitungkan harga yang wajar. Faktor lain yang harus diperhatikan, bila kebijakan privatisasi akan tetap dijalankan untuk suatu BUMN ialah dengan mengantisipasi kemungkinan PHK atau rasionalisasi pekerja. Harus dihindari agar kebijakan privatisasi justru meningkatkan angka pengangguran, sedang keuntungan yang diperoleh negara tak seberapa besar. Kebijakan yang tak berempati kepada nasib rakyat akan disalahpersepsi hanya menguntungkan segelintir orang atau suatu kelompok tertentu.

Kesembilan, bencana alam yang terjadi beruntun di berbagai daerah telah memberi tekanan internal yang sangat berat, karena infrastruktur fisik hancur berantakan dan sejumlah kelompok masyarakat mengalami goncangan psikologis yang bersifat traumatik.

Data Bakornas Penanggulangan Bencana mencatat bahwa jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia antara tahun 1998-2003 adalah 647 kejadian, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 2022

orang. Rekor tragis terpecahkan dengan terjadinya gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang meminta korban sekitar 190.000 jiwa. Sebagaimana terlihat dalam beberapa aspek pelayanan publik, penanganan korban bencana dan para pengungsi oleh instansi pemerintah tidak berjalan memuaskan. Pemerintahan transisi sempat mengalami disorientasi kebijakan, tatkala pemerintahan Abdurrahman Wahid menghapus Departemen Sosial, sementara instansi pengganti atau lembaga non-pemerintah yang bertugas menangani kerawanan sosial belum diintrodusir. Disamping bencana alam yang sering di luar kemampuan manusia untuk mengantisipasinya, Indonesia juga dilanda bencana sosial yang bermula dari keteledoran manusia, seperti semburan lumpus panas di Sidoarjo yang disebabkan kelalaian pekerja PT Lapindo Brantas. Kecelakaan transportasi yang terjadi di darat (kereta api), laut (kapal) dan udara (pesawat) juga menunjukkan rentannya infrastruktur publik. Dengan kondisi amat rentan dan frekuensi bencana yang tinggi, maka strategi penanggulangan bencana harus bersifat komprehensif, dan dilaksanakan secara konsisten dengan semangat pelayanan yang prima.

Kesepuluh, Di tengah kondisi sosial-politik yang serba tidak stabil, isu terorisme muncul dalam skala global, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi yang belum pulih dari krisis.

Pemerintahan di masa transisi tidak punya pilihan untuk menolak ikut serta dalam perang melawan terorisme, karena tekanan luar negeri begitu kencang, sementara kondisi domestik masih rapuh. Kita menolak stigma yang ditujukan kepada negeri ini sebagai sarang terorisme internasional, namun gejala di berbagai daerah memang memperlihatkan rangkaian kekerasan yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi pemerintahan yang sedang terancam legitimasinya pada akhir tahun 2000, terjadi bom berantai di malam Natal. Dunia terbelalak menyaksikan sebuah orkestrasi kekerasan yang spektakuler menyambut pergantian millennium di sebuah negeri yang kebetulan mayoritas Muslim. Setahun kemudian terjadilah aksi yang lebih spektakuler di AS, ketika dua pesawat komersial menabrakkan diri ke gedung kembar WTC di New York (2001). Setelah setelah itu terjadi lagi aksi kekerasan yang

mengejutkannya di Pulau Bali, tatkala bom melantakkan dua buah kafe di Pantai Kuta (2002). Rentetan kekerasan itu membuat Indonesia terpojok, apalagi masih diikuti kekerasan lain semidal bom di Hotel J.W. Marriot (2003) dan bom mobil di depan kantor kedubes Australia di Jakarta (2004). Indonesia telah kehilangan argumentasi untuk menolak dirinya sebagai zona aman bagi para teroris, terlebih lagi dengan penangkapan sejumlah tokoh misterius semacam Omar Farouq dan Hambali yang sampai saat ini tidak bisa diakses oleh pemerintah RI. Persidangan terhadap tersangka pelaku terorisme telah dilakukan, perburuan terhadap tersangka yang masih buron semisal Noordin M. Top dan Dulmatin terus dilancarkan, namun akar permasalahan terorisme ternyata belum kunjung terungkap jelas. Pihak Polri dengan Detasemen Khusus 88 terkesan menutup diri dari pengawasan domestik dan lebih melayani kepentingan asing, karena memang sebagian besar dana untuk menunjang operasi pemberantasan terorisme berasal dari mancanegara (AS dan sekutunya). Begitu pula pihak intelejen negara (BIN) yang mestinya memasok informasi yang benar kepada pimpinan lembaga negara malah terlihat asyik dengan agendanya sendiri, sehingga menimbulkan keresahan yang lebih luas. Contohnya, isu pengambilan sidik jari untuk kalangan santri, rencana pelarangan terhadap buku-buku yang dinilai membawa paham radikalisme agama, pengawasan yang lebih ketat kepada khatib dan mubaligh yang bersikap vokal, dan pengawasan terhadap yayasan/lembaga yang mendapat bantuan dana dari Timur Tengah. Semua rencana itu terbukti berlandaskan informasi yang tak akurat, termasuk bahaya ideologi transnasionalisme beberapa waktu lalu dimunculkan. Kondisi itu hanya akan memperbesar kecurigaan di antara kelompok yang berbeda pandangan, dan sama sekali tidak menyelesaikan akar kekerasan yang diperlukan.

4.4 PELUANG DAN KENDALA

4.4.1 Peluang

Pertama, kebebasan dan keterbukaan yang terus berlanjut adalah angin segar yang memungkinkan partisipasi masyarakat berhembus kencang menyejukan iklim demokratisasi di negeri ini. Meski tingkat kepuasan publik terhadap lembaga-lembaga politik tidak seberapa besar, namun faktanya tuntutan publik masih dapat leluasa mempengaruhi keputusan penting lembaga-lembaga negara. Salah satu buktinya adalah dalam UU yang mengatur Pilkada, dimana gagasan tentang calon independen terakomodasi dengan baik. Demikian pula pengesahan UU tentang perlindungan saksi dan korban yang sangat diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Beberapa komisi negara yang bersifat independen juga telah diisi oleh kalangan akademisi dan aktivis LSM yang selama ini bermain di luar kekuasaan. Hal itu menandakan bahwa penyaluran aspirasi publik masih bekerja relatif baik dan kesempatan untuk melakukan perubahan tetap terbuka.

Kedua, partisipasi publik di bidang pengawasan memperlihatkan kegairan yang meningkat, apalagi lagi di tengah iklim yang lebih bebas dan terbuka. Namun kualitas kontrol publik masih bersifat sporadik dan belum mengarah pada isu yang fundamental. Seleksi pemilihan anggota KPU serta KPK mendapat perhatian luas dan sorotan yang tinggi kritis dari media massa dan organisasi non-pemerintah. Namun hasilnya telah mengecewakan, karena salah seorang anggota KPU kemudian menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi, sementara anggota yang lain diragukan kapabilitasnya. Lebih mengejutkan lagi hasil akhir dari seleksi anggota KPK yang memunculkan tokoh yang dikenal negatif rekam jejaknya dalam penegakan hukum, sehingga hal itu dipandang sebagai upaya sistematis untuk melemahkan lembaga yang berperan sentral dalam pemberantasan korupsi. Penyingkapan kasus korupsi yang melibatkan anggota Komisi Yudisial membuktikan bahwa lembaga pengawas pun sepatutnya harus tetap diawasi publik. Karena itu ruang partisipasi publik harus tetap dipertahankan, jangan diintervensi oleh kekuasaan atau

kepentingan ekonomi manapun, agar cita-cita pemerintahan yang bersih dapat terus diperjuangkan..

Ketiga, perkembangan stabilitas ekonomi makro yang cukup menggembirakan, yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%, stabilitas nilai tukar rupiah, tingginya nilai Indeks Harga Saham Gabungan, serta laju inflasi yang terkendali. Gejala makro itu memperlihatkan berjalannya proses pemulihan ekonomi pasca krisis, namun harus diperbaiki dengan meningkatkan kinerja di sektor riil. Dengan pembenahan regulasi di pusat dan daerah serta jaminan penegakan hukum, maka daya tarik investasi semakin tinggi, hingga dapat menggerakkan sektor riil dan menyerap tenaga kerja lebih besar. Kita perlu memanfaatkan momentum yang baik ini, jangan menyia-nyiakannya dengan belanja negara yang tak terarah dan prioritas pembangunan yang salah.

4.4.2 Kendala

Pertama, meski iklim kebebasan dan keterbukaan semakin lapang, terbukti dengan munculnya puluhan partai politik baru dengan berbagai identitasnya, namun tradisi berpartai secara modern, profesional dan bertanggung-jawab di negeri ini masih belum mantap. Sejumlah partai politik masih mengesankan didominasi oleh sekelompok elit, ketimbang digerakkan oleh ideologi bersama yang menjadi basis pendirian dan aksinya. Proses kaderisasi dan rekrutmen politik acap didasarkan pada pragmatisme jangka pendek melalui mekanisme lima tahunan untuk memenuhi kebutuhan pemilu. Sedangkan kebutuhan pendidikan politik jangka panjang dalam membangun lembaga yang kokoh dan terpercaya masih jauh dari harapan. Pragmatisme politik kekuasaan masih menjadi warna dominan dalam kanvas perpolitikan Tanah Air, termasuk mempengaruhi partai-partai baru yang lahir di era reformasi yang sejatinya memiliki potensi besar untuk melakukan diferensiasi dengan partai yang telah lama bercokol. Kendala itu harus segera ditangani serius, agar masa depan politik nasional tetap memiliki harapan.

Kedua, ketika kompetisi antar elit politik berujung pada konflik, maka pilihan pahitnya adalah perpecahan dan pendirian partai baru. Tumbuhnya puluhan partai, bahkan ratusan jumlahnya di era reformasi, menyebabkan sistem demokrasi Presidensial dan multipartai tak cukup kokoh. Tradisi politik lama masih belum berubah seperti di era-era sebelumnya, seperti budaya koalisi dan oposisi yang tidak dijalankan secara konsisten dalam kancah politik nasional. Pemerintah yang berasal dari partai kelas tengah didukung partai-partai lain, tetapi dengan model koalisi yang longgar, sehingga dukungan di parlemen kurang kuat dan bisa bergeser setiap saat. Sementara itu, partai yang menempuh jalan oposisi juga hanya menggunakannya sebagai manuver untuk menarik perhatian publik dan tidak pernah menawarkan alternatif kebijakan yang lebih rasional dan mampu meraih dukungan mayoritas. Kontradiksi itu menyebabkan pengelolaan pemerintahan tidak berjalan efektif, dan energi politik nasional hanya terkuras untuk melayani tarik-menarik kepentingan elite.

Ketiga, proses pemulihan dari krisis ekonomi di era reformasi masih bertumpu pada kelembagaan yang bersifat transisional di tengah tekanan kuat globalisasi. Secara kasat mata akibatnya terlihat, bahwa dimensi fungsi dan kekuatan negara dalam menjalankan tugas-tugas utamanya masih minimal dan belum mapan. Terbukti dengan kelambatan respon terhadap situasi darurast (bencana alam atau wabah flu burung), tumpang-tindih program antar instansi yang berbeda, tugas pokok dan fungsi lembaga negara yang baru berdiri tak kunjung jelas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga strategis. Sehingga fenomena penyalahgunaan wewenang di lembaga birokrasi/eksekutif, legislatif, peradilan, dan aparat keamanan masih sering terungkap.

Keempat, semangat pemekaran daerah yang merupakan kelanjutan dari problem otonomi daerah makin mendominasi pembahasan dan lobi-lobi informal di parlemen lokal maupun pusat. Hal itu memperburuk konflik otoritas, tidak efektifnya dana dekonsentrasi, pembangunan daerah yang sekedar mengejar target PAD, ketidaksiapan SDM dan kapasitas kelembagaan daerah. Dampak yang paling mencolok tampilnya tokoh tertentu dengan akses ekonomi dan politik yang sangat besar sehingga berperan sebagai

“raja-raja kecil” yang bisa menentukan hitam-putihnya kebijakan daerah. Para penguasa lokal itu sering berhubungan dan memiliki jaringan khusus dengan orang yang berpengaruh di tingkat pusat, sehingga pembangunan daerah seakan berubah menjadi perpanjangan proyek di pusat saja. Gejala yang harus diwaspadai di balik ide pemekaran daerah yang berkembang semakin liar adalah keinginan tersembunyi unyuk menjadi sektor negara (birokrasi) sebagai jalan pintas untuk membuk alapangan kerja (pegawai daerah/negeri), di tangan peluang kerja terbatas di sektor swasta, pembangunan sarana dan prasarana yang terbatas di daerah. Bila gejala ini tidak segera ditangani, maka potensi daerah yang besar akan terbuang percuma, bahkan dapat menyulut benih konflik baru bagi kelompok yang merasa disingkirkan.

Kelima, pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri serta besarnya subsidi menyebabkan tekanan terhadap anggaran negara menjadi sangat ketat. Besarnya anggaran rutin di pusat dan daerah membuat anggaran pembangunan menjadi sangat rendah. Dana publik hanya beredar di kalangan terbatas dan tidak pernah menetes kepada jutaan rakyat yang benar-benar membutuhkannya. Solusi pragmatis yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan harga BBM (berarti mengurangi subsidi), diferensiasi sumber energi, dan penurunan suku bunga secara bertahap menjadi opsi yang jangka pendek. Akibatnya stimulan pembangunan menjadi lemah. Kasus mutakhir tersingkap tentang 70% anggaran perjalanan dinas yang tidak mengikat dari APBN 2007 yang harus dibekukan. Itu menunjukkan masih lemahnya kemampuan perencanaan pembangunan pasca krisis. Pengelolaan anggaran menghadapi tekanan baru dengan fluktuasi harga minyak dunia dan menurunnya nilai kurs dolar Amerika, karena devisa kita disandarkan pada hal itu, lalu beban berat pada akhirnya akan dilimpahkan kepada rakyat juga.

Keenam, meski stabilitas ekonomi makro dicapai beberapa tahun terakhir dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan, namun masih terjadi fenomena ketidakterkaitan antara pertumbuhan dengan pengangguran. Kinerja ekonomi nasional memang tumbuh, namun angka pengangguran juga bertambah. Pertumbuhan ekonomi nasional belum berkualitas, masih bertumpu pada sektor-

sektor yang miskin serapan tenaga kerja (pertambangan, jasa telekomunikasi, dan konsumsi). Akibatnya secara total nasional tenaga kerja yang terserap masih sedikit. Sektor riil yang menyerap tenaga kerja tinggi masih berjalan di tempat. Muncul kecenderungan memburuk pertumbuhan investasi dan perdagangan, serta semakin meningkatnya penyimpanan dana dalam bentuk SBI dan ORI yang tidak memutar ekonomi riil. Suku bunga kredit yang tinggi menciptakan sektor keuangan yang cenderung mengalami fenomena penggelembungan sekaligus terjadinya fenomena keterputusan antara sektor finansial dari sektor riil. Pertumbuhan ekonomi sebesar 60% lebih berasal dari konsumsi masyarakat, bukan dari investasi yang merupakan motor penggerak pertumbuhan. Fenomena ini menimbulkan kesangsian akan keberkelanjutan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Ketujuh, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat spektakuler pada kurun waktu 1985-1995 ternyata hanya mengandalkan eksploitasi secara intensif sumber kekayaan alam. Meskipun SDA kita semakin terbatas, namun ironisnya sumber pendapatan utama non-pajak pemerintah hampir 60% masih tergantung pada ekspor SDA ini. Over eksploitasi SDA tanpa diikuti konservasi memadai telah memunculkan bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta pencemaran lingkungan hidup. Kemampuan alam dalam menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan semakin terbatas dan ketersediaan SDA bagi generasi penerus semakin disangsikan. Bencana lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo adalah contoh yang paling mengesankan, betapa sulitnya kita memahami gejala alam dan mengontrolnya secara tepat, termasuk gejala deforestasi yang berlangsung di beberapa wilayah. Sebagai tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim Dunia (2007), kita patut malu karena ketidakmampuan kita untuk mengelola sumber daya yang ada demi keselamatan dan kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

Kedelapan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah yang terkena bencana berjalan sangat lambat, sehingga korban dan keluarga yang tinggal di pengungsian menjerit karena tak mendapat

kebutuhan dasarnya. Mereka telah kehilangan harta-benda dan harus memulai kehidupan dari nol kembali. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, maka pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi akibat bencana harus menjadi prioritas, sambil membangun infrastruktur publik yang paling diutamakan. Jika kita mampu memecahkan persoalan yang muncul di waktu bencana, maka kita akan lebih piawai menangani masalah di waktu normal. Bahkan, kita dapat mempersiapkan diri lebih matang demi mengantisipasi kemungkinan bencana di masa datang.

BAB 5

INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN PARTAI Keadilan Sejahtera

5.1 *Visi* Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah :

Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Perjuangan untuk **mewujudkan masyarakat madani**, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam

Anggaran Dasar PK Sejahtera¹. Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.

Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiaikan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya; ajakan untuk menyebarkan budaya hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturahmi; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt. Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998).

Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di Seluruh Nusantara bahkan

¹ Anggaran Dasar PK Sejahtera, pasal 5 ayat 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP PK Sejahtera, 2007.

menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragam kerajaan-kerajaan Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.

Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyatul Islam dan risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karena agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.

Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan Syuro, serta Amar Ma'ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun Legislasi dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirilah Masyarakat Madani yang dicitakan itu.

Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *absurd* bahkan *ahistoric*,

bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD NRI 1945. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain.

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotong-royong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk ber-*silaturrahim* dan ber-*ta'awun* untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya. Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirilah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era Reformasi.

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya

Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui *musyarakah* (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*ifrath* dan *tafrith*).

Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Mahakuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Semenetera itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasi-situasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan. Sebab, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah situasi kemanusiaannya, setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut.

Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada dalam aspek kemanusiaan adalah sikap "pertengahan" yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para

cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itu sebabnya keseimbangan yang sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan (*'adalah*) yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (*i`tidal*). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna.

Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Sebuah hadits Nabi Saw menyebutkan: *"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu kelak di sisi Allah Swt berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka."* Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. *Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya.* Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia, baik secara individual maupun kolektif, bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan.

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt menegaskan, *"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu,*

Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS, al-Nahl 16: 112).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran modal (kapital) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (*moral hazard*) akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yang menjamin kesetaraan sosial (*social equity*), kelestarian lingkungan (*environmental prudence*), dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (*Our Common Future*, World Committee for Environment and Development, United Nation, 1987).

Ekonomi yang maju ialah kondisi yang dibangun di atas kesadaran adanya misi peradaban untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keterpeliharaan moralitas manusia, baik secara individual maupun kolektif, keseimbangan kemajuan ekonomi, kemandirian, kesatuan ekonomi nasional, dan kelestarian alam semesta menjadi patokan utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, di tengah dinamika meraih kemajuan ekonomi, maka

penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik harus dapat diminimalisasi. Karena, pembangunan ditujukan bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia. Pada titik itu, kemajuan ekonomi harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa, bahkan umat manusia, secara adil.

Atas dasar itu perlu ditegakkan prinsip penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan, berbagai bentuk kezaliman. Memprioritaskan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok, guna menjamin hak-hak ekonomi semua pihak dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pengutamaan ini harus menjadi kebijakan yang dipatuhi bersama.

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

Untuk itu semua warga negara dapat mengambil peran dalam membangun negara sehingga menjadi masyarakat madani berdaya dan berkeadilan, masyarakat yang tidak mudah dipatronisasi oleh kekuatan manapun. Sebab, kehidupan sosial manusia di muka bumi akan lebih tertata dengan sistem sosial yang berkeadilan walau masih disertai suatu perbuatan dosa, daripada dengan sistem tirani yang zalim. Kewajiban individu untuk menegakkan keadilan harus dipandang sebagai prosedur regulatif bagi tindakan sosial dan

etik, sehingga akhirnya menghasilkan keadilan sosial yang efek kebaikannya akan dirasakan bersama.

Substansi keadilan sosial ialah terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hak-hak sosialnya secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab sosialnya dalam rangka merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak ini merangkumi semua hak-hak individual dan sosial manusia Indonesia yang bermartabat.

Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat yang egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaan dan prestasinya, bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor bawaan lainnya. Oleh sebab pluralitas kebudayaan merupakan realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau komunitas, maka perlu kearifan dalam memandang dan menyikapnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa dengan cara menghargai kebudayaannya.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu mensyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek substansial yang universal daripada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapat memperkaya kebudayaan nasional menjadi satu sistem yang indah, efektif, dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat.

Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang religius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya

menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

5.2 Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.
2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan

melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

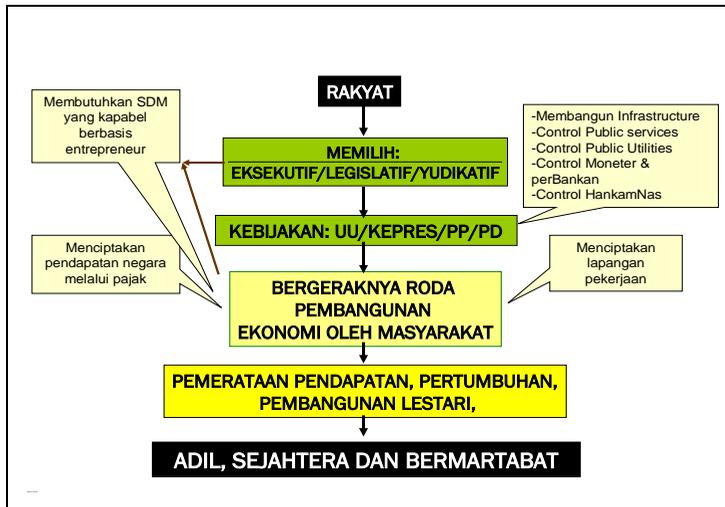
PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk

mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandangi partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangka yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.

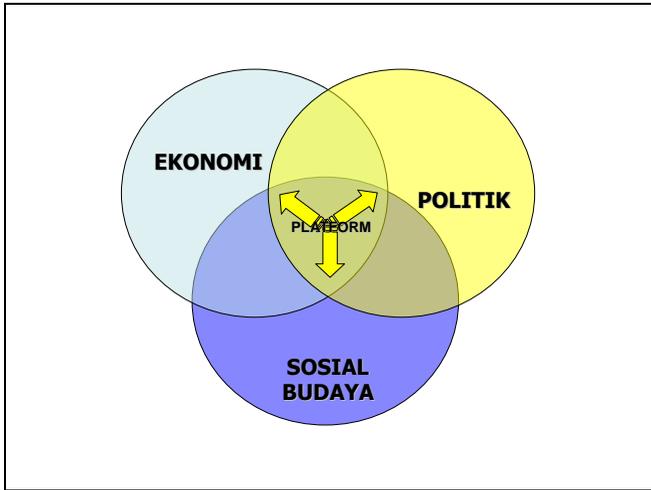
Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisor melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis.

BAB 5. INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN



Gambar 5-1. Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis.

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.



Gambar 5-2. Irisan tiga bidang platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera.

BAB 6

PLATFORM BIDANG POLITIK

Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional). Reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-hukuman, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan mereka pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

BAB 6. PLATFORM BIDANG POLITIK

FALSAFAH DASAR	Prinsip Demokrasi dan Keadilan			
VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI	Mempelopori Reformasi Sistem Politik, Birokrasi, Hukum, dan Hankam			
STRATEGI	Membangun Sistem Politik yang Sehat, Penegakan Hukum yang Adil, dan Hankam yang Mantab			
LANGKAH UTAMA	Membangun Sistem Ketatanegaraan yang baik	Membangun Sistem Politik yang Stabil, Dinamis dan Efisien	Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Adil	Membangun Sistem Hankam yang Adil
LANGKAH PENDUKUNG	Otonomi Daerah yang Proposional			
	Pengokohan Sistem Multipartai Sederhana			
	Penegakan RuleOf Law			
FUNDAMENTAL POLITIK	Pemilu yang Demokratis dan Sederhana	Aparat Birokrasi dan Penegak Hukum yang Bersih	Infrastruktur Hankam yang Tangguh	

Kerangka Platform Politik

6.1 PENDAHULUAN

Politik adalah *“aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan.* (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al-Siyasah Al-Hakimiyyah).

Secara naluriah manusia tak mungkin lepas dari kegiatan politik. *Al-Insan madaniyyun bi thabi'ih* (manusia berpolitik secara alamiyah). Ungkapan itu sudah menjadi semacam kredo dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama dalam ilmu sosial-politik, dan spektrum maknanya menjadi sangat luas, khususnya dalam pembahasan mengenai hubungan manusia dengan politik. Kendati banyak ragam definisi politik dan aksi manusia secara individu dan kelompok dikemukakan para ahli, namun esensi yang terkandung dalam definisi dan aksi politik manusia tetap menekankan unsur-unsur dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, terutama yang

menyangkut ketenteraman dan kesejahteraan. Maka setiap aktivitas, upaya, dan perjuangan individu atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan ide individu dan kolektif tersebut secara umum dikategorikan sebagai tindakan politik dalam arti luas. Dalam literatur Islam, politik didefinisikan sebagai *“aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan”*. Politik merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup paripurna. Karenanya, dalam pandangan Islam, aktivitas politik yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai universal, diniatkan dengan ikhlas, dan dilaksanakan dengan akhlak terpuji, akan bernilai ibadah.

Secara umum, tujuan utama manusia dalam kegiatan politik berkaitan dengan keinginan untuk menciptakan keteraturan, rasa aman, dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Tujuan itu dicapai dengan menggunakan sistem yang dapat mengorganisir keanekaragaman individu dan kelompok yang memperjuangkannya, serta didasarkan pada watak ideologi yang melahirkan sejumlah nilai-nilai moral dan etika untuk memastikan agar aktivitas politik tidak keluar dari koridor ideologinya. Logikanya, politik harus sarat dengan dimensi moral-etis yang berakar pada ajaran, konsep, dan ideologi Islam. Dengan demikian, dalam jagat politik, moralitas dapat dikategorikan sebagai atribut ontologis yang menegaskan hakikat ideologi politik suatu bangsa. Politik yang tercerabut dari akar moral-ideologi sama dengan mendegradasi politik itu sendiri, sebab hakikat politik sesungguhnya mengandung keutamaan-keutamaan moral seperti kejujuran, kebijaksanaan, keadilan dan kebenaran, pelayanan, mementingkan orang banyak daripada diri sendiri dan kelompoknya, pengabdian, dan lain sebagainya. Setiap tindakan politik harus menampilkan dimensi-dimensi etis tersebut.

PK Sejahtera, sebagai bagian dari entitas politik nasional, berjuang dengan dasar aqidah dan asas Islam untuk mencapai tujuan universal Islam, yakni menciptakan Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat, dan dengan cara-cara yang sarat dengan moral-etis Islam tersebut.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, demi menggerakkan roda pembangunan nasional pasca krisis, dibutuhkan iklim politik yang kondusif, yakni terciptanya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang mantap dan dinamis, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja secara produktif untuk mensejahterakan bangsa. PK Sejahtera sebagai entitas politik Indonesia yang berjuang dengan dasar Islam dan moralitas terpuji berkeyakinan, bahwa berbagai upaya pembangunan di bidang politik, yang meliputi aspek ketatanegaraan, politik nasional, hukum, birokrasi, otonomi daerah dan hankam semestinya diarahkan untuk menciptakan stabilitas yang sehat dan dinamis. Kondisi stabilitas akan menghasilkan pemerintahan yang efisien dan efektif dalam menjalankan amanahnya demi menciptakan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi publik yang plural dengan spektrum luas dari segi etnik dan ideologis.

6.2 WAWASAN POLITIK

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara.

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah Swt dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama dalam masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Dalam realitas kebhinekaan itu, faktor Islam dan kaum Muslimin mengambil peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan maupun upaya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka membentuk masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Sebagai fakta historik, Islam dan berbagai manifestasi kebudayaannya telah berakulturasi dalam budaya Indonesia, telah menyatu dan menjadi identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Peran kaum Muslimin yang berjumlah mayoritas dalam mengisi dan mewarnai negeri ini dari Sabang hingga Merauke

adalah faktor penentu bagi kohesivitas Indonesia itu. Toleransi dan inklusivitas kaum Muslimin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perekat yang secara faktual bekerja dalam sejarah Indonesia, yang terus menyebabkan Indonesia eksis dalam pentas peradaban mutakhir. Inilah posisi kaum Muslimin dalam bingkai pluralitas bangsa Indonesia yang diyakini PK Sejahtera. Karenanya, tanggung-jawab terbesar bagi pembangunan Indonesia berada di pundak kaum Muslimin. Maju-mundurnya negara Indonesia berada di tangan kaum Muslimin, kerja pemikiran, serta tetesan darah dan keringat mereka.

Berdasarkan hal itu, pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang bebas agama, yakni negara sekuler, yang memisahkan agama dari negara secara total, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa Muslim. Pemikiran yang absurd ini sungguh tidak relevan, karena, Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat religius. Indonesia adalah negara kesatuan berdasar Ketuhanan Yang Mahaesa.

Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin dalam membangun rumah besarnya yang bernama Indonesia dan panggilan dakwah yang membawa misi rahmat bagi semesta alam, maka PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan bangsa menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang aman dan makmur di bawah ampunan Yang Mahakuasa).

PK Sejahtera mencitakan para pemimpin negeri ini termasuk para elit politiknya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai akhlaqul karimah, yakni bersikap santun, toleran, menepati janji, dan berkompetisi secara positif. PK Sejahtera ingin menjalankan politik keadilan dan menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli dan profesional. Dengan nilai-nilai luhur itu diyakini perjuangan bangsa Indonesia

untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya akan semakin cepat dan dekat.

Inilah wawasan politik PK Sejahtera dalam memandang realitas pluralitas Indonesia dan cita-cita atas negara di masa depan, yang menjadi konsepsi dan cara pandang bagi gerak langkah perjuangannya.

Kedua, berkaitan dengan konsolidasi demokrasi di masa transisi.

Berdasarkan pemahaman yang mendalam atas kondisi perpolitikan Tanah Air dewasa ini, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa “Indonesia Baru” di masa depan mestilah berada pada fase yang sehat dan dinamis. Yakni, terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial yang mapan. Stabilitas politik hadir akibat kedewasaan elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta tingkat pendidikan politik masyarakat terus meningkat.

Stabilitas politik yang sehat dan dinamis muncul karena kesadaran akan konstitusi dan hukum serta peran sejarah seluruh anak bangsa untuk mengukir jalan ke masa depan Indonesia yang lebih baik, bukan stabilitas politik yang dipaksakan secara otoritarian-militeristik seperti zaman Orde Baru. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan pihak luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk keterkaitan dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di

dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tenteram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa itu, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik, dan etno-nasionalisme perlu ditangani secara persuasif, arif bijaksana dan sikap tegas, dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural.

ketiga, berkaitan dengan model demokrasi.

Eksperimentasi politik di era transisi reformasi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parleментар, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan sistem Demokrasi Parlemen Multi-Partai memperlihatkan pergerakan "bandul sejarah" dari sistem liberal-otoriter-liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial dan stabil. Bercermin dari pengalaman sejarah, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa sistem multipartai sederhana tampak lebih mungkin untuk dicapai. Karena itu, penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan "batas ambang" adalah langkah yang rasional dan obyektif.

Indonesia yang multi etnik dan agama, dimana masyarakat berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dapat diintegrasikan dalam sistem politik terkendali tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang beragam untuk menyuatkan keadilan.

Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sederhana, efisien dan murah. Sebab, saat ini dalam suatu daerah dapat terjadi beberapa kali pilkada/pemilu – mulai dari level Kabupaten/Kota, Propinsi, kemudian Pemilu dan Pilpres di tingkat nasional. Dengan model demokrasi yang berjalan, maka calon peserta pilkada atau calon anggota legislatif harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keperluan kampanye politik. Model

seperti itu telah mengurangi kesempatan bagi calon berkualitas yang tidak memiliki sumber daya melimpah. Atau dengan kata lain, model demokrasi berbiaya tinggi itu hanya cocok untuk calon yang kaya-raya, terlepas dari bobot kualitas yang bersangkutan. Sudah saatnya dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat dan mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

6.3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Sebagai negeri yang luas dengan beragam etnik dan budaya, serta sumber daya alam yang berlimpah dan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali pemerintahan di Indonesia demikian luas. Pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi masih bersifat transisional, sehingga menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi merupakan tekanan eksternal karena bersemangat ketidakadilan global yang merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Dalam kondisi penuh tekanan, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, kecuali membangun sistem ketatanegaraan yang stabil, mantap dan dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan membuka fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, proteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi-fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya. Dengan fungsi yang lebih terkendali, maka pemerintah akan bekerja lebih fokus dan tidak terkuras energinya untuk mengurus seremoni, sementara pembinaan negara akan tumbuh kuat.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kelembagaan baik dalam aspek politik, hukum, maupun birokrasi dilakukan dengan meningkatkan: (1) kemampuan badan pembuat

regulasi untuk mengantisipasi perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat melalui serangkaian reformasi perundang-undangan, sehingga pembangunan politik dan ekonomi berjalan progresif; (2) kesiapan lembaga-lembaga negara untuk berubah dan mentransfer diri ke dalam tata pemerintahan yang baik –dengan karakter utama: berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, dan mendorong partisipasi publik– melalui serangkaian peraturan, perbaikan tata-laksana, sistem insentif, pembinaan mental dan budaya, serta seleksi SDM berkualitas; (3) pengetahuan akan desain organisasi/institusi yang bersangkutan, baik internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal organisasi; dan (4) menghapus ambiguitas lembaga, sehingga nampak kejelasan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing lembaga negara.

PK Sejahtera berkeyakinan bahwa hubungan vertikal ketatanegaraan dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan dan pembinaan SDM. Hal itu sebagai upaya untuk mendekatkan perputaran ekonomi dan pembangunan secara umum dengan dinamika masyarakat. Untuk itu, PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi dengan dan oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan virus KKN kepada oknum-oknum daerah yang pada akhirnya menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting. Sebagaimana tata-kelola dan tata hubungan pemerintahan secara horizontal, maka tata hubungan pemerintahan secara vertikal pun perlu kejelasan dan ketegasan, sehingga dihasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengeksekusi berbagai program demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta **otonomi daerah**, sebagai upaya untuk mendekatkan perputaran ekonomi dan pembangunan secara umum dengan masyarakat, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan vertikal ketatanegaraan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan *capacity building*. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi dengan dan oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan racun KKN kepada oknum-oknum daerah yang ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat. Karenanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting. Seperti juga tata-kelola dan tata hubungan pemerintahan secara horizontal, maka tata hubungan pemerintahan secara vertikal pun perlu kejelasan dan ketegasan, sehingga dihasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengeksekusi berbagai program demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan rakyat.

PK Sejahtera berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cerminan “tubuh” bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara..

Berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi telah dilakukan berkaitan dengan netralitas birokrasi, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta pengembangan sistem pengawasan. Namun, tindakan itu jelas belum cukup. Untuk itu di masa depan PK Sejahtera meyakini, bahwa perbaikan sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan sistem meritokrasi serta pengembangan

sistem renumerasi dan kesejahteraan pegawai negeri menjadi sangat penting dan strategis. Jumlah dan komposisi tingkat pendidikan SDM birokrasi perlu ditata ulang, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di pusat maupun daerah, dan dalam bingkai fungsi minimalis negara.

6.4 PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Karena itu, PK Sejahtera bertekad untuk memelopori tegaknya supremasi hukum di Indonesia, dimana: (1) pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum; (2) setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum; (3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan (4) keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban.

PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut.

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin, pengadaan barang dan jasa, hingga perumusan kebijakan publik diwarnai dengan gejala penyelewengan. Korupsi legislatif dan pimpinan daerah menjadi fenomena yang makin banyak ditemukan.

Virus korupsi yang semula terpusat, bersama dengan penyelenggaraan otonomi daerah kini menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok negeri, termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif penuh dengan aroma politik uang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal. Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang, sehingga membuat perekonomian negara terkendala berat. Bahkan, virus KKN menyebar hingga lembaga-lembaga hukum dan penegak keadilan. Gejala itu tidak hanya menimbulkan kerugian negara yang amat besar, namun melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

PK Sejahtera menilai, bahwa tidak maksimalnya gerak Indonesia untuk maju ke depan menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bangsa disebabkan terutama oleh virus KKN. Energi negara boros, sumberdaya inefisien, kelembagaan rusak, moralitas SDM semakin terpuruk, dan akibat akhirnya adalah kesengsaraan dan penderitaan masyarakat. Elite kaya semakin kaya, warga miskin semakin miskin; cita-cita Indonesia yang aman dan sejahtera makin sulit terjangkau.

Karena itu, komitmen PK Sejahtera untuk memberantas KKN tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan bahkan menjadi jati diri yang dipertaruhkan di hadapan sejarah. PK Sejahtera yang mendeklarasikan diri sebagai Partai Da'wah dan mengusung prinsip "Bersih-Peduli-Profesional" menjadikan KKN sebagai musuh besar bersama yang harus ditumpas seluruh komponen bangsa dengan komitmen penuh. Langkah nyata yang digariskan PK Sejahtera adalah memberikan contoh dan bukti pada perilaku kader-kadernya, baik yang berada di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif, disamping komitmen untuk terus mendorong lembaga seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Pengadilan untuk merapatkan barisan dan menkonsolidasikan pikiran dan tindakan.

6.5 MEMBANGUN HANKAM

PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa segala usaha pertahanan negara harus berujung pada upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam, maupun dari luar negeri. Landasan pokok pembangunan pertahanan difokuskan pada fungsi TNI sebagai faktor penggentar, penindak dan perehabilitasi. Secara umum, seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam usaha pertahanan negara. PK Sejahtera berpandangan, kesamaan langkah dan kesatuan gerak antara rakyat dan negara akan memperkokoh pertahanan negara.

Untuk itu, PK Sejahtera merekomendasikan tujuh langkah solusi strategis: (1) menjadikan TNI sebagai elemen pertahanan negara yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan dengan meningkatkan kesejahteraan personil, memperbaharui teknologi peralatan kerja, termasuk persenjataan (alutsista), meningkatkan proporsionalitas TNI dengan jumlah penduduk, dan mengubah pengorganisasian tentara dari pendekatan teritorial ke pendekatan tempur; (2) mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan kekuatan nasional yang tangguh, terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan global yang berniat melemahkan Indonesia dengan politik penjajahan ekonomi, sosial, budaya maupun taktik intelejen; (3) pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri, sehingga tumbuh kemandirian dalam bidang peralatan kemiliteran dan tidak tergantung pada produk peralatan militer asing; (4) peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, selain untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional, juga dalam rangka transfer teknologi pertahanan; (5) menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara rakyat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 UUD 1945) serta keterampilan pertahanan negara; (6) meminimalisir bibit-bibit separatisme dengan mengutamakan proses dialog untuk perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan bagi daerah

tertingal dan terbelakang, sehingga perlu transformasi paradigma penyelesaian konflik dari aksi militer sporadik menjadi aksi politik dan diplomasi damai; (7) penegakan disiplin keprajuritan harus dilandasi prinsip keadilan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Kebijakan tentang keamanan nasional tidak hanya didasarkan pada suatu persepsi tentang kebutuhan dan prioritas keamanan nasional, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, internal, tekanan tanggung jawab dan komitmen. Untuk itu kebijakan keamanan nasional harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Keamanan harus ditempatkan secara seimbang, antara keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia/individu (*human security*). Untuk itu, PK Sejahtera menggusung kebijakan: (1) mendorong pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan perubahan paradigma dalam menyelenggarakan keamanan nasional, yaitu perubahan pendekatan militeristik ke pendekatan civilian; (2) mendorong Kepolisian RI sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban nasional, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, menjadi elemen keamanan nasional yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan; (3) mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan keamanan nasional yang tangguh sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara; (4) mendorong kerjasama pengamanan nasional dengan negara-negara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional; (5) menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; (6) menghadapi bibit-bibit gangguan keamanan nasional dengan mengutamakan proses perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sebelum ditempuh tindakan keamanan yang bersifat represif.

6.6 ISU – ISU STRATEGIS SEKTORAL:

6.6.1. Politik Nasional

Memelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

Perubahan yang berkembang pasca reformasi telah mempengaruhi stabilitas politik domestik dan performa politik luar negeri. Praktek politik di kalangan elite memlihatkan carut-marut pertentangan dan perebutan kekuasaan. Namun, hal ini tidak mengurangi optimisme perubahan politik yang mendukung terciptanya model demokrasi yang lebih baik. Berbagai momentum demokrasi di masa transisi – Pemilu nasional yang berlangsung dua kali dan Pilkada di sejumlah daerah–, memberikan gambaran politik nasional yang penuh intrik, manipulasi, dan permainan para pemegang kekuasaan. Hal itu membuat stabilitas dalam negeri mengalami kegoncangan dan akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan gerakan penyadaran politik di kalangan elite, disamping terus menggenjatkan pendidikan bagi khalayak masyarakat.

Politik memang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan, namun tidak selamanya politik bermuatan kekuasaan. Sebab, politik juga bermakna perumusan kebijakan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Politik akan bermanfaat lebih luas dari sekadar permainan kekuasaan di kalangan elite, jika dikembangkan secara matang bagi pencapaian kemaslahatan bersama melalui rekayasa sosial dalam penguatan isu dan gerakan di masyarakat. Sebagai partai yang terus-menerus belajar memperbaiki kapasitasnya, PK Sejahtera tidak lagi melihat politik dalam arti sempit, sehingga kesempatan untuk 'bersiasat' dengan cerdas dalam menjalankan politik merupakan keniscayaan yang harus dijalani di berbagai sektor.

Arah dan perencanaan PK Sejahtera pada bidang politik adalah:

Pertama, permasalahan separatisme harus dilihat dalam konteks akar masalah. Secara sosioantropologis, separatisme merupakan efek dari hubungan antar pemerintah pusat dengan kekuatan lokal yang didukung sentimen kesukuan dan kedaerahan, sehingga dalam penyelesaiannya harus ditempuh jalan dialogis demi mencapai kedamaian yang lestari. Konflik sosial antar kelompok harus ditelaah akar masalahnya dan dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan psikologisosial. Nilai-nilai yang ada dalam konteks masyarakat tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kerangka budaya. Selain itu, kearifan lokal digali dan dipahami sebagai modal berharga untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi, mengontrol aparat keamanan, dan menguatkan operasi intelejen.

Kedua, dalam memelihara potensi kebaikan dalam masyarakat (*ri'ayah al mashalih al ijtimai'iyah*), masyarakat sipil, pemerintah, parpol, dan militer harus berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat melalui kerangka demokratisasi. Hal itu dapat dilakukan melalui penempatan polisi dan militer dalam fungsi pertahanan dan keamanan, dan tidak memasuki wilayah politik praktis.

Ketiga, perubahan secara total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan harus diawali dengan agenda reformasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengevaluasi jalannya reformasi.

Keempat, permasalahan sosiologis masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik akan sangat berpengaruh pada pilihan politik masyarakat ketika Pemilu dan penyaluran aspirasi terhadap parpol. Maka, reformasi sistem Pemilu yang jujur dan adil menjadi prioritas, dengan mencegah seoptimal mungkin kecurangan-kecurangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan jabatan. Begitu pula dengan kejelasan dana Pemilu dan parpol dapat disajikan secara transparan.

Kelima, militer adalah bagian dari potensi kebaikan masyarakat, sehingga hubungan antara sipil-militer harus berjalan sinergis. Profesionalitas militer adalah hal terpenting dalam relasi itu, sehingga kontrol sipil atas militer, badan intelejen, dan penempatan

posisi TNI dan Polri semakin jelas. Masalah bisnis militer dan pembenahan struktur komando di TNI dapat ditangani dengan prinsip profesionalisme.

Keenam, komunikasi politik untuk mengokohkan kembali nilai spiritual Islam dan ajaran agama sebagai orientasi serta pedoman kerja harus mengungkapkan ide-ide parktis dan keteladanan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, menjalin komunikasi dengan media massa sebagai alat penerangan dan penokohan adalah bagian untuk memelihara potensi kebaikan, bahkan bisa melakukan perubahan secara total dan radikal terhadap aspek kehidupan.

Ketujuh, masyarakat harus diubah secara mental agar mendapatkan kecerdasan dan kesadaran politik. Hal ini harus didasarkan pada psikososiologis masyarakat, sehingga tercipta kesadaran untuk berpartisipasi politik.

Kedelapan, mengawal proses legislasi berdasarkan pemahaman sosioantropologis masyarakat, sehingga produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks sosial. Fungsi kontrol dan pertimbangan kekuasaan (*check and balances*) akan terlaksana secara proporsional, bahkan dapat memelopori pembuatan peraturan perundang-undangan yang mendukung aspirasi rakyat.

Kesembilan, kontribusi dalam pemerintahan melalui kabinet akan berdampak pada terpeliharanya kebaikan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah terutama sektor strategis dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesempatan untuk berkoalisi harus bersifat konstruktif, agar dapat menghasilkan kemanfaatan untuk dakwah dan perkembangan politik partai.

6.6.2. Kepemimpinan Nasional

Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan

bernegara, karena sosok pemimpin mensyaratkan keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional).

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan politik nasional sebagai pengarah bagi tercapainya cita-cita bangsa. Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan gejala keterbelakangan kepemimpinan, baik karena faktor pribadi yang tidak konsisten maupun lingkungan yang tidak kondusif.

Pada masa awal revolusi kemerdekaan, Soekarno bersama Mohammad Hatta menjadi simbol kebangkitan bangsa, namun duet kepemimpinan itu akhirnya pecah akibat perbedaan sikap politik. Demikian pula Soeharto pada masa awal Orde Baru memperlihatkan benih kepemimpinan yang memunculkan harapan akan perubahan, tetapi pengaruh kekuasaan yang lama bercokol telah membentuk oligarki yang menekan kebebasan warga. Pada masa reformasi 1998, pasca lengsernya rezim Orde Baru, rakyat mengalami proses transformasi secara menyeluruh, termasuk kondisi kepemimpinan. Dalam rentang waktu yang pendek (1998-2004), Indonesia mengalami proses suksesi beberapa kali dengan konsekuensi krisis kepemimpinan yang dipercaya masyarakat luas.

Dalam sejarahnya, kekuasaan sepanjang Orde Lama memperlihatkan sikap yang otoriter di tengah kondisi sosial yang tercekam anarkisme sebagai akibat dari perlawanan total terhadap nilai-nilai warisan penjajah, sedang nilai-nilai baru keindonesiaan belum terformat dengan mantap. Perjalanan selanjutnya di masa Orde Baru menunjukkan watak kekuasaan yang menuntut keseragaman dan mematikan keragaman, sehingga semangat revolusioner dan kreativitas bangsa yang tumbuh subur sejak masa kemerdekaan terpusus habis. Rakyat dikuasai oleh ketaatan buta dan terjebak pembangkangan dalam diam.

Pada masa reformasi, sekali lagi terjadi tragedi karena para pemimpin pengganti mengalami kegagalan (*disability*) dalam proses belajar dari kepemimpinan sebelumnya. Gejala itu terlihat dalam karakter utama kepemimpinan nasional. Pertama, dalam pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999) memang ada upaya untuk

mengalihkan beban kesalahan kepada pemimpin terdahulu, namun tak juga menarik garis tegas (*clean break*) terhadap penyimpangan perilaku sebelumnya. *Kedua*, masa Abdurrahman Wahid (1999-2001). Sikap sederhana dan amat fleksibelnya membuat kedekatan antara pemimpin dengan rakyat, tapi tak mampu menolong proses pemecahan masalah bangsa yang sangat kompleks. Kondisi ini diperparah dengan watak pribadinya yang kontroversial, sehingga lebih tampil sebagai *trouble maker* ketimbang *problem solver*. *Ketiga*, masa pemerintahan Megawati Soekarnopuerti (2001-2004) dikenal oleh masyarakat dengan kapabilitas yang minimal, sehingga terlihat ketergantungan yang kuat pada lingkaran inti kekuasaan. Ia juga tak mampu mengelola benturan-benturan kepentingan dan sering salah persepsi terhadap umpan balik yang datang dari arus bawah masyarakat. Terakhir, *keempat*, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang). Kepercayaan baru yang cukup tinggi dari masyarakat baru dipandang sebagai modal popularitas, namun tidak dikapitalisasi untuk memantapkan legitimasi dengan kerja nyata dalam berbagai aspek. Perubahan fundamental citra masih dihargai lebih tinggi daripada kinerja.

Dalam situasi kekecewaan yang berulang-kali, masyarakat mendambakan tipe kepemimpinan baru. Agar tidak terjebak pada mitos "Ratu Adil" (*messianisme*) yang akan membuahkan kekecewaan lebih dalam, maka diperlukan proses terobosan penumbuhan kepemimpinan baru dari lapisan generasi muda. Ada tiga hal yang perlu dimiliki dalam karakter pemimpin. *Pertama* Perencana, sosok yang memiliki kapasitas intelektual memadai dan menguasai kondisi makro nasional dari berbagai aspeknya, sehingga dapat menjaga visi perubahan yang dicitakan bersama. *Kedua*, Pelayan, figur pekerja yang tekun dan taat pada proses perencanaan yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional, menguasai detail masalah kunci kebangsaan dan mampu melibatkan semua elemen yang kompeten dalam tim kerja yang solid. *Ketiga*, Pembina, tonggak pemikiran yang kokoh dan menjadi rujukan semua pihak dalam pemecahan masalah bangsa, yang setia dengan nilai-nilai dasar bangsa dan menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Untuk menumbuhkan tipe kepemimpinan nasional generasi baru, maka dibutuhkan proses belajar yang berkelanjutan. Hal ini dibuat dengan beberapa dimensi yaitu, *pertama* meliputi dimensi belajar untuk menginternalisasi dan mempraktekkan nilai-nilai baru yang sangat dibutuhkan bagi perubahan kondisi bangsa, sehingga membentuk karakter dan pola perilaku yang positif sebagai penggerak perubahan. *Kedua*, belajar untuk menyaring dan menolak nilai-nilai buruk yang diwarisi dari sejarah lama maupun yang datang dari dunia kontemporer, agar tetap terjaga karakter yang otentik dan perilaku yang genuin. *Ketiga*, belajar untuk menggali dan menemukan serta merevitalisasi nilai-nilai lama yang masih tetap relevan dengan tantangan masa kini, bahkan menjadi nilai dasar bagi pengembangan masa depan

Proses belajar kepemimpinan bukan merupakan uji coba (*trial and error*) yang beresiko tinggi, melainkan upaya pengembangan potensi dengan dihadapkan pada kenyataan aktual. *Pertama* krisis ekonomi-politik yang masih terus berlanjut menuntut tokoh yang kompeten di bidangnya dan memiliki visi yang jauh untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. *Kedua*, bencana alam dan sosial yang terjadi silih berganti menegaskan perlunya kehadiran tokoh yang peka dan cepat tanggap terhadap penderitaan rakyat, serta berempati dengan nasib mayoritas korban. *Ketiga*, tantangan lintas negara di era informasi membutuhkan urgensi kesadaran akan masalah-masalah dunia yang mempengaruhi kondisi nasional dan jaringan yang luas dalam pemanfaatan sumber daya. *Keempat*, guncangan dalam kehidupan pribadi dan sosial mensyarakatkan adanya kemantapan emosional dan spiritual dari setiap pemimpin dalam mengatasi problema diri, keluarga dan bangsanya.

Walaupun problema nasional membutuhkan tampilnya kepemimpinan nasional sebagai salah satu aspek penting, namun proses pengkaderan dan penumbuhan kepemimpinan generasi baru perlu digarap dari tingkat lokal dan regional. Selanjutnya kualitas kepemimpinan nasional diuji dalam kancah global, apabila Indonesia ingin memainkan peran yang lebih berarti dalam arena antar bangsa.

6.6.3. Ketatanegaraan

Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik

Konsekuensi dari konsep negara kesatuan dan sistem demokrasi turut mempengaruhi pilar-pilar lembaga negara yang terbentuk. Pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadikan dinamika politik yang tinggi pasca reformasi berlangsung. Berbagai peran dan fungsi lembaga negara di Indonesia menjadi salah satu aspek pendukung jalannya demokratisasi.

Secara obyektif peran dari lembaga negara adalah menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Di mana tugas masing-masing lembaga negara saling melengkapi dan saling melakukan koreksi, sehingga terjadinya harmonisasi. Sistem ketatanegaraan yang fungsional akan mewujudkan cita-cita reformasi menuju negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berdemokrasi.

Salah satu tujuan dari negara hukum seperti di Indonesia adalah terciptanya hubungan antar lembaga negara yang independen, tidak saling mempengaruhi dan mengintervensi. Fungsi dan wewenang secara umum, antara lain:

- a. Eksekutif, adalah pelaksana kebijakan negara yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Eksekutif dapat juga dikatakan sebagai lembaga negara yang melaksanakan roda pemerintahan;
- b. Legislatif; sebagai penyeimbang eksekutif dalam melaksanakan kebijakan yang telah diatur bersama. Anggota legislatif merupakan representasi dari masyarakat secara umum karena keberadaan mereka yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum, maka legislatif membuat kebijakan dalam bentuk peraturan yang menjadi dasar pijakan dalam kerja pemerintahan;

- c. Yudikatif, merupakan lembaga yang menjamin semua kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Apabila terjadi perbedaan pandangan atau sengketa dalam pelaksanaan kebijakan, maka yudikatif mengambil peran penengah dan penyelesaian masalah, Karena itu, suatu keharusan bagi yudikatif untuk bersifat mandiri dan terbebas dari tekanan manapun.

Selama ini penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga negara masih tumpang-tindih dalam hal kewenangan. Seringkali suatu kewenangan diperebutkan sebagai domain lembaga negara yang berbeda. Selain itu, terjadi intervensi antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, sehingga tidak jarang independensi suatu lembaga negara dalam mengeluarkan kebijakannya merupakan hasil kompromi para elit dalam lingkaran kekuasaan. Tantangan dan kendala lain dipengaruhi oleh peran para apatur negara, karena mentalitas birokrasi acap tak berubah, meskipun kepemimpinan politik telah berubah berulang-kali.

Kelemahan jalannya fungsi dan peranan lembaga negara saat ini terdapat pada: pemahaman hubungan antar lembaga negara yang masih lemah di kalangan para elit; tata laksana hukum yang masih tumpang tindih dan kurangnya koordinasi; alur birokrasi yang rumit, sulit dan berbelit-belit; serta integritas para aparatur negara. Pada prinsipnya hubungan antar lembaga negara yang harus dilakukan menurut asas umum penyelenggaraan negara meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Namun, saat ini sedikitnya terdapat 50 lembaga atau komisi negara yang bersifat independen di Indonesia. Kehadiran komisi khusus itu sama sekali tidak mengurangi masalah kebangsaan, sebab tugas dan fungsi lembaga negara yang ada malah cenderung tumpang-tindih, sehingga konflik antar lembaga negara pun tak terhindarkan. Padahal, keberadaan lembaga negara sangat membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan dipakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional lembaga. Bahkan, standar gaji dan tunjangan beberapa komisi berbeda-beda.

Institusi birokrasi lembaga negara yang rapih dan kredibel akan mendorong berjalannya perekonomian yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, efisien, dan ramping juga merupakan bentuk pemihakan yang paling berharga bagi rakyat miskin dan usaha kecil-mikro. Besarnya jumlah pegawai negeri membuat sistem penggajiannya menjadi sangat kompleks dan cenderung minimal, karena besarnya gaji yang diterima setiap pegawai hanya cukup untuk menopang hidup selama satu atau dua pekan. Lalu untuk menutupi kekurangan, dicarilah berbagai cara seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya. Praktik-praktik seperti itu membuka peluang terjadinya korupsi. Namun, besarnya pembiayaan untuk meningkatkan gaji pegawai negeri agar lebih layak ternyata masih jauh lebih kecil, bila dibandingkan dengan nilai uang negara yang menguap karena praktik korupsi. Keputusan berani harus ditempuh untuk menuntaskan reformasi birokrasi.

Ada empat belas karakteristik yang harus ditumbuhkan, bila kita ingin menerapkan wacana tatakelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Berwawasan ke depan (visi strategis);
2. Bersifat terbuka (transparan);
3. Mendorong partisipasi masyarakat;
4. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat (akuntabel);
5. Menjunjung supremasi hukum;
6. Berwatak demokratis dan berorientasi pada konsensus;
7. Berdasarkan profesionalitas dan kompetensi;
8. Bersikap cepat tanggap (responsif);
9. Menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif;
10. Kewenangan terdesentralisasi;
11. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat;
12. Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan;
13. Berkomitmen pada lingkungan hidup;
14. Berkomitmen pada pasar yang sehat dan terbuka.

PK Sejahtera memandang bahwa penyelenggaraan lembaga negara yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya menjadi suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik.

Pertama, lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkedudukan sejajar dan seimbang dengan pemisahan antar kekuasaan yang lebih tegas demi terjaminnya perimbangan kekuasaan. Lembaga-lembaga independen diperlukan dalam pelaksanaan kewenangan khusus dengan secara definitif dan tegas membatasi tingkat dan jenis independensinya.

Kedua, lembaga legislatif terdiri dari dua kamar demi tercapainya kualitas putusan yang lebih baik dan tertampungnya jenis perwakilan lain selain perwakilan politik. Dalam prioritas legislasi, PK Sejahtera memfokuskan pada terbentuknya peraturan perundang-undangan yang membuktikan solusi konkret Islam terhadap problematika masyarakat yang paling mendesak.

Ketiga, nilai-nilai universal Islam dan kepribadian islami harus menjiwai seluruh aspek kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi para aparatur negara yang beragama Muslim.

Keempat, kekuasaan kehakiman harus mandiri dan merdeka. Kekuasaan untuk melakukan *judicial review* menjadi bagian dari kewenangan kehakiman yang harus dijalankan secara terbatas dengan mendasari pertimbangannya bukan saja semata-mata pertimbangan yuridis belaka (*rechtmatigheid*) tetapi juga pertimbangan tujuan diciptakannya hukum (*doelmatigheid*).

Kelima, Presiden merupakan penanggung-jawab utama semua kebijakan negara (*single executive*). Lembaga kepresidenan harus mendapat kontrol dari rakyat dan lembaga perwakilan rakyat dengan cara pelibatan rakyat secara langsung ataupun lembaga perwakilan rakyat dalam setiap pengambilan putusan secara proporsional.

Keenam, model negara kesatuan menjadi pilihan hubungan antar pusat dan daerah dengan menekankan pada pelaksanaan kewenangan pusat yang lebih efektif dan peningkatan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah.

6.6.4. Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dengan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien

PK Sejahtera memandang bahwa kualitas institusi adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lestari. Namun institusi birokrasi negara tampaknya masih lemah, terutama dalam menjalankan prinsip *good governance* dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini tentu saja menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi agenda yang mendesak untuk dituntaskan. Reformasi birokrasi adalah pembenahan berbagai aspek kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen sebagaimana telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Institusi birokrasi yang profesional dan kredibel akan mendorong berjalannya perekonomian yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, efisien, dan ramping juga merupakan bentuk pemihakan yang paling signifikan bagi rakyat miskin dan usaha kecil-mikro. Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan untuk pemulihan ekonomi yang cepat dan berdimensi masa depan.

Pelayanan birokrasi sering dikampanyekan, tetapi hingga kini birokrasi negara belum pernah diaudit dari sisi efektifitas struktur organisasi. Betapa gemuknya organisasi pemerintahan terlihat dari jumlah pegawai negeri sipil yang mencapai 4 juta orang. Dengan rasio pegawai negeri yang tingi untuk setiap penduduk, maka Indonesia bisa disebut ‘negeri pegawai’ dan banyak potensi pegawai yang mubazir. Keinginan untuk menjadi pegawai negeri telah membentuk kultur kontraproduktif, karena menekan inisiatif berwirausaha. Akibatnya, sektor swasta mengalami keterbatasan tenaga yang berkompentensi tinggi dan tenaga asing menyerbu

sektor strategis.

Perbaikan birokrasi negara tidak bisa dijalankan secara parsial. Seringkali kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsinya justru disebabkan oleh faktor internal. Kurangnya integritas pimpinan berikut jajaran birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas birokrasi masih menjadi hambatan utama. Maraknya praktek KKN merupakan isu sentral yang menyebabkan rendahnya kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan. Bahkan, perbaikan hukum dan peradilan juga belum dapat diandalkan sebagai strategi pemulihan kepercayaan pihak luar untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia menemukan fakta bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat dari 2,0 pada 2005 menjadi 2,4 pada 2006. Peningkatan indeks itu menandai persepsi para pengusaha asing yang masih menganggap Indonesia sebagai surga korupsi. Bersenjatakan suap dan lobi-lobi khusus, para pengusaha dengan leluasa menggaet tender dari lembaga publik, standar pelayanan pun amat rendah. Survei itu juga menyimpulkan bahwa lembaga yang bersifat hirarkis dan mengurus penegakan hukum, yakni kepolisian dan peradilan, justru paling bermasalah dan menghambat pemberantasan korupsi.

Sistem penggajian pegawai negeri tidak berdasarkan standar obyektif, sehingga besarnya gaji yang diterima pegawai rendah hanya cukup untuk menyambung hidup satu atau dua pekan. Sebaliknya, pegawai berjabatan tinggi dan pejabat negara mendapat fasilitas melimpah disamping gaji tetap, sehingga amat memboroskan anggaran rutin negara. Rendahnya gaji pegawai menjadi alasan berbagai cara untuk menaikkan tunjangan jabatan dan praktik lain yang membuka peluang korupsi. Padahal, jika dikalkulasi, perbandingan biaya untuk meningkatkan gaji pegawai negeri ternyata masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai uang yang menguap karena praktik korupsi. Karena itu, diperlukan keberanian untuk menetapkan kebijakan reformis yang berdampak luas.

Pada tahun 2003, perkiraan rekapitulasi jumlah uang yang dikorupsi adalah Rp 215 triliun dari perpajakan; pencurian ikan, pasir dan kayu senilai Rp 76,5 triliun; subsidi bank rekapitalisasi yang tidak perlu Rp 14 triliun. Seluruhnya berjumlah Rp 305,5 triliun. Seandainya 30% dari dana itu dapat terselamatkan dengan pemberantasan korupsi, maka pemerintah sudah memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp 92 triliun. Itu dana yang besar untuk peningkatan kesejahteraan.

Dengan mengacu pada praktik-praktik korupsi yang terjadi di tataran birokrasi, maka, pemberantasan KKN dapat dibedakan dalam dua dimensi. *Pertama*, pemberantasan KKN kasus per kasus. Pemberantasan ini merupakan bentuk dari penegakan semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, penciptaan kondisi yang kondusif untuk pemberantasan KKN. Seringkali korupsi didorong oleh pendapatan yang kurang mencukupi, namun banyak juga korupsi yang didorong sifat keserakahan. KKN sudah menjelma menjadi perampokan besar-besaran dari kekayaan rakyat. Karena itu, sukses-tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi juga beriringan dengan keseriusan dalam penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi harus menyentuh perbaikan-perbaikan di institusi hukum, terutama lembaga peradilan.

Reformasi hukum adalah sarana untuk menegakkan supremasi hukum yang meliputi prinsip: (1) pemerintah dan warga terikat oleh hukum; (2) setiap orang di masyarakat diperlakukan sama di hadapan hukum; (3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi hukum; dan (4) keadilan terjangkau oleh semua. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diandalkan dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban, serta adanya pemerintah yang memiliki legitimasi dan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai partai reformis, PK Sejahtera berkomitmen untuk mengawal jalannya reformasi birokrasi dan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan dalam tiga agenda strategis:

Pertama, menuntaskan reformasi birokrasi. Untuk itu, PK Sejahtera akan menempuh berbagai langkah, yaitu (i) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui perbaikan sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan *merit-based system*, bukan hanya perbaikan renumerasi; (ii) menurunkan jumlah pegawai negeri melalui kebijakan *zero growth* dan memfokuskan mereka pada fungsi pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan medis; (iii) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar institusi seperti Menpan, BKN, Depkeu, dan Depdagri untuk reformasi birokrasi yang efektif.

Kedua, menghilangkan inefisiensi sektor publik. Inefisiensi sektor publik bersumber dari dua hal, yaitu pemborosan dana dan korupsi. Menghapus kedua penyebab inefisiensi ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya masalah manajemen personal dan anggaran, tetapi juga meliputi aspek moral dan spiritual. Kebijakan itu meliputi: (i) mengubah paradigma aparatur negara melalui pembinaan mental dan spiritual yang terus menerus dan sistematis; (ii) mengubah budaya organisasi melalui pengenalan budaya organisasi modern; (iii) penegakan peraturan dan sanksi yang tegas atas setiap penyalahgunaan jabatan publik.

Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Reformasi lembaga peradilan nasional menjadi titik krusial untuk kepastian hukum, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan efisiensi perekonomian. Kebijakan supremasi hukum meliputi: (i) kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk penegakan hukum nasional, baik di tingkat pemerintahan maupun lembaga peradilan; (ii) menghapus korupsi dan penyalahgunaan jabatan di institusi peradilan; (iii) peningkatan kompetensi aparat penegak hukum.

6.6.5. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, lalu menyempurnakan substansi hukum nasional dan membangun budaya hukum yang positif.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertera dalam penjelasan UUD 1945. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Kenyataannya, proses penegakan hukum dan perlindungan HAM masih mengalami berbagai tantangan. Secara umum, ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Pertama, tidak maksimalnya institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya. Kedua, lemahnya budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraan kelembagaan. Ketiga, belum terpenuhinya kelengkapan perangkat peraturan, baik yang mendukung kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

Sebagai garda terdepan dalam penegakan keadilan, aparat penegak hukum seyogyanya menjadi kunci penyebaran keadilan bagi masyarakat. Tapi praktek yang ada dilapangan, kinerja aparat justru kontraproduktif terhadap perannya. Penegakan hukum adalah proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara prinsip, ketika negara dapat menjamin perlindungan HAM terhadap warganya, maka penegakan hukum akan menjadi langkah pertama yang otomatis dilakukan oleh negara. Berkedudukan dan diperlakukan sama di mata hukum, menjadi indikator sederhana bahwa penegakan hukum berjalan secara sehat.

PK Sejahtera, bersama seluruh elemen bangsa bertekad keras untuk terus memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM ke arah lebih baik dengan tujuh solusi strategis sebagai berikut:

Pertama, strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum.

Kedua, mendorong penindakan hukum yang tegas, namun menghormati asas keadilan dan *due process of law* terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara dan moralitas, seperti pembalakan hutan, perpajakan, dan narkoba.

Ketiga, mendukung upaya pemberantasan (penindakan maupun pencegahan) korupsi. Pemberantasan korupsi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya pencegahan korupsi dan pengembalian kerugian negara menjadi prioritas. Dimensi ini dapat dilakukan dengan cara: i) berperan aktif dalam pembentukan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional maupun daerah; ii) berperan aktif dalam reformasi birokrasi, terutama di daerah-daerah dimana kader partai memiliki akses kuat kepada birokrasi.

Keempat, memastikan pemerintah memberikan jaminan perlindungan HAM berdasarkan muatan HAM dalam konstitusi yang diwujudkan dengan: i) membuat aturan pelaksanaan dalam upaya implementasi seluruh materi-materi HAM dalam konstitusi dan undang-undang menjadi aplikatif; ii) melakukan revisi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan materi HAM dalam konstitusi; iii) memperhitungkan perlindungan HAM dalam semua kebijakan pemerintah.

Kelima, mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak ekososbud –seperti hak atas pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pangan serta hak-hak pekerja dan lain sebagainya. Langkah ini hendaknya menjadi prioritas utama pemerintah terutama dalam rangka membuat kebijakan tentang pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengingat terbelenggalnya aspek keadilan sosial dan tingkat kemiskinan negara kita yang semakin mengkhawatirkan.

Keenam, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan posisi RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam

menciptakan perdamaian dunia, serta memastikan terjaminnya perlindungan HAM di tingkat internasional tanpa pandang bulu.

Ketujuh, memastikan pemerintah memberikan ruang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ini diberlakukan bukan saja sebagai hak asasi warga negara, tetapi juga harus diberlakukan sebagai kewajiban tiap warga negara. Dalam ajaran dan sejarah Islam, *hisbah* (kontrol publik berupa *amar ma'ruf dan nahi munkar*) merupakan bentuk kebebasan berekspresi telah terbukti menjadi alat kontrol yang efektif bagi para penguasa.

6.6.6. Pertahanan

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru.

Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diamandemen. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk memelihara kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan .

Mencermati dinamika domestik, regional maupun global, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Kemungkinan ancaman keamanan tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain diperkirakan kecil. Ancaman keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan NKRI. Ancaman yang berasal dari luar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang akan dihadapi Indonesia meliputi aksi terorisme,

gerakan separatisme, kejahatan lintas negara, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan bencana alam.

Dalam rangka pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Meskipun peran sebagai alat pertahanan negara yang utama tetap berada di pundak TNI. Tantangan utama dalam pengikutsertaan warga negara adalah rendahnya tingkat kesadaran untuk terlibat dalam upaya pertahanan negara. Secara internal, TNI juga menghadapi beberapa kendala. Kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) belum memenuhi standar. Kondisi ini terjadi karena minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBN. Untuk tahun 2006, hanya dianggarkan US\$ 2,8 miliar atau kurang dari 1% dari Produk Domestik Bruto, sedangkan anggaran pertahanan negara-negara lain berkisar 3% dari PDB, bahkan ada negara yang menetapkan 6-8 % dari APBN. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri pun belum dapat dirasakan.

Di sisi lain, tingkat kesejahteraan prajurit sebagai pengemban amanah pertahanan juga mengkhawatirkan. Hal itu merupakan salah satu sebab munculnya berbagai tindak penyelewengan yang dilakukan sejumlah oknum aparat, termasuk bisnis militer.

Segala usaha pertahanan negara harus berujung pada upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Landasan pokok pembangunan pertahanan difokuskan pada fungsi TNI sebagai faktor penggentar, penindak dan perehabilitasi. Secara umum, seluruh komponen harus terlibat dalam segala usaha pertahanan negara.

PK Sejahtera berpandangan, kesamaan langkah dan kesatuan gerak antara rakyat dan negara –termasuk TNI di dalamnya– akan memperkuat pertahanan negara. Untuk itu, PK Sejahtera merekomendasikan tujuh solusi strategis sebagai berikut:

Pertama, menjadikan TNI sebagai elemen pertahanan negara yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan personil. Selain itu, memperbaharui teknologi peralatan kerja termasuk persenjataan, meningkatkan proporsionalitas dengan jumlah penduduk, dan mengubah pengorganisasian tentara dari pendekatan teritorial ke pendekatan tempur TNI.

Kedua, mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan kekuatan nasional yang tangguh, terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan global yang berniat melemahkan Indonesia dengan politik penjajahan ekonomi, sosial, budaya maupun taktik intelejen.

Ketiga, pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri sehingga tumbuh kemandirian dalam bidang peralatan kemiliteran dan tidak tergantung pada produk peralatan militer luar negeri.

Keempat, peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, selain untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional, juga dalam rangka transfer teknologi pertahanan.

Kelima, menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara rakyat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta keterampilan pertahanan negara. Untuk itu rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru harus ditumbuhkan, seraya mengendalikan konflik horizontal yang tersisa.

Keenam, meminimalisasi bibit-bibit separatisme dengan mengutamakan proses dialog untuk perdamaian perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan bagi daerah tertindas dan terbelakang. Dengan demikian perlu transformasi paradigma penyelesaian konflik, dari aksi militer sporadik menjadi aksi politik dan diplomasi damai.

Ketujuh, penegakan disiplin keprajuritan harus dilandasi prinsip keadilan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban.

6.6.7. Keamanan

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan negara dengan menempatkan polisi selaku aparat pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pengayom dan pelindung, serta pelayan masyarakat. Menghadapi gejala masyarakat dengan metode dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.

Keamanan nasional pada masa kini tidak lagi dipandang secara konvensional, yaitu keamanan yang dicapai dengan memperkuat militer dan mengamankan perbatasan. Konsep keamanan negara dapat dicapai dengan memerangi kemiskinan, mengatasi kerusakan lingkungan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan. Sejatinya isu keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari isu penting lain, seperti HAM dan demokratisasi.

Amanat untuk mengemban tugas keamanan nasional ada di pundak Kepolisian Republik Indonesia. Polisi diamanahi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Namun, penyelenggaraan keamanan nasional sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Ancaman terhadap keamanan nasional berasal dari tiga jenis konflik, yakni: konflik antar negara, konflik dalam negeri, dan konflik lintas negara. Ancaman yang datangnya dari luar negara menjadi domain TNI, sementara keamanan dalam negeri dan terselenggaranya kepentingan umum menjadi bagian dan tugas Polri. Sedangkan bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia menjadi tugas dan kewajiban bersama TNI dan Polri.

Untuk menciptakan keamanan nasional, perlu perubahan paradigma dalam memandang konsep keamanan. Pendekatan yang digunakan tidak boleh dipahami hanya sebagai penggunaan

kekuatan militer. Mengubah paradigma pendekatan dan kultur militer dalam tubuh Polri menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Rendahnya perhatian pada kesejahteraan anggota Polri, dapat menjadi lahan subur berkembangnya KKN dan praktek pembekingan dalam melanggengkan kejahatan. Sehingga, tugas sebagai penegak hukum dilanggar.

Ketersediaan peralatan penunjang yang memadai akan meningkatkan kepercayaan diri aparat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Namun pemenuhan sarana dan prasarana ini terhambat karena minimnya anggaran yang tersedia. Kebijakan keamanan nasional tidak hanya didasarkan pada suatu persepsi tentang kebutuhan dan prioritas keamanan nasional, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, internal, tekanan tanggung jawab dan komitmen. Untuk itu kebijakan keamanan nasional harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Keamanan harus ditempatkan secara seimbang, antara keamanan negara (*state security*) dan keamanan warga (*human security*).

PK Sejahtera menetapkan sejumlah kebijakan yang akan memperkuat sistem keamanan negara, yaitu:

Pertama, mendorong pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan perubahan paradigma dalam menyelenggarakan keamanan nasional, dari pendekatan militeristik ke pendekatan sipilian.

Kedua, mendorong Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, menjadi elemen keamanan nasional yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan.

Ketiga, mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan keamanan nasional yang tangguh sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara.

Keempat, mendorong kerjasama pengamanan nasional dengan negara-negara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional.

Kelima, menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Keenam, menghadapi bibit-bibit gangguan keamanan nasional dengan mengutamakan proses perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sebelum ditempuh tindakan keamanan yang bersifat represif.

6.6.8. Kewilayahan

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia dulu disebut Nusantara (Kepulauan Antara), karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia, berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua, dan berbatasan dengan Timor Timur di pulau Timor.

Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi, termasuk dua Daerah Istimewa, yakni Nanggroe Aceh Darusalam dan Yogyakarta dan satu Daerah Khusus Ibukota, yakni Jakarta. Sebelum era reformasi, Indonesia hanya memiliki 27 propinsi, dan kemudian Timor Timur sebagai propinsi ke-27 memisahkan diri melalui referendum menjadi negara Timor Leste. Pisahnya Timor Timur dan pulau Sipadan Ligitan adalah salah satu contoh rawannya daerah Indonesia dari pemisahan diri. Tantangan lain adalah keterlibatan asing dalam proses pemisahan pulau-pulau dan daerah itu dari Indonesia. Sehingga harus terjadi penolakan kuat dari Indonesia terhadap disintegrasi dalam setiap konflik yang ada.

Indonesia terdiri dari 33 provinsi, 458 kabupaten/kota dengan tingkat kemakmuran yang berbeda-beda dan akan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah dan daerah. Kesejahteraan adalah pangkal dari setiap permasalahan kewilayahan Indonesia yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, dan sekitar 6000 di antaranya tidak berpenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dengan penduduk setengah populasi Indonesia. Ada lima pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra (473.606 km²), Kalimantan (539.460 km²), Sulawesi (189.216 km²), dan Papua (421.981 km²). Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang rawan gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami.

Negara kesatuan merupakan sikap final dari perjuangan PK Sejahtera, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi segenap wilayah. Segala bentuk ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang akan memecah kesatuan bangsa harus diselesaikan. Ancaman ini bisa dijawab dengan memberi otonomi daerah seluas-luasnya secara proporsional dan tetap memelihara nilai-nilai lokal masyarakat setempat yang didasarkan atas kesadaran moral. Dengan demikian akan terbentuk negara yang membagi rata kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Banyaknya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah sinyal bahwa Indonesia masih rawan terhadap gerakan separatis. Sehingga perlu untuk menyadarkan segenap komponen bangsa tentang urgensi negara kesatuan. Oleh karena itu, PK Sejahtera menawarkan konsep '*alal wihdah*' (di atas kesatuan). Konsep persatuan dengan ikatan kebangsaan yang saling membantu untuk menggalang pertumbuhan dan pengembangan serta saling melindungi dari kemungkinan terjadinya ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar. Kesatuan yang memunculkan nilai-nilai kesederajatan dan kemanusiaan, baik dari dimensi agama maupun sosial. PK Sejahtera juga menolak ketidakadilan perlakuan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas perbedaan suku, warna kulit, ras dan atau agama.

Untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, PK Sejahtera menetapkan tujuh langkah strategis:

Pertama, setia terhadap NKRI karena sebagai partai dakwah, PK Sejahtera memandang bumi Nusantara disatukan dalam “Bhineka Tunggal Ika” melalui ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas bangsa dan tercermin dalam “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Persatuan Indonesia”.

Kedua, akan selalu bekerjasama dengan seluruh pihak yang berusaha membangun dan memelihara seluruh kekayaan alam Nusantara.

Ketiga, mewujudkan soliditas dan kesatupaduan seluruh propinsi di Indonesia dengan memberikan pendidikan kesatuan bangsa di bawah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi serta terkendali yang berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Kelima, memandang perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan yang berwawasan Nusantara di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu, PK Sejahtera akan selalu melakukan pembinaan kewilayahan yang terpadu sesuai dengan nilai-nilai dakwah dan ideologi keadilan.

Keenam, memandang perlunya pemerataan pendidikan cinta bangsa yang berbasis nilai-nilai budaya, terutama keyakinan agama yang tumbuh dan berkembang di seluruh Nusantara.

Ketujuh, terus menerus menyadarkan seluruh wilayah dan daerah akan pentingnya kerjasama sosial, karena tidak meratanya

kemakmuran dan adanya beberapa daerah yang rawan bencana di Indonesia.

6.6.9. Politik Luar Negeri

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip tersebut dipahami sebagai sikap dasar RI yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara adidaya; menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Akan tetapi, RI tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di kancah internasional, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD.

Dinamika politik luar negeri membuat sikap dan pandangan negara di panggung internasional bisa berubah dari waktu ke waktu. Pada dasarnya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri; kemampuan ekonomi dan militer; serta lingkungan internasionalnya. Perubahan konteks dalam dan luar negeri telah menghasilkan perbedaan-perbedaan dalam sikap dan pandangan Indonesia terhadap kondisi internasional pada setiap periode pemerintahan.

Pada era Soekarno (1945-1965), politik internasional Indonesia lebih condong ke kiri (komunisme). Meskipun pada tahun 1948 Bung Hatta menyampaikan pidato berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" (1948), yang menjadi awal dari prinsip bebas aktif, kondisi dalam negeri telah mempengaruhi sikap pemerintah dalam hubungan internasional. Bangkitnya kekuatan PKI dan kelompok-kelompok kiri ketika itu, ditambah dengan upaya untuk

mempertahankan kemerdekaan, memang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia bergerak ke kanan (kapitalisme). Ketika itu kepentingan nasional Indonesia memang sangat menonjolkan pembangunan ekonomi. Aspek pembangunan ekonomi tersebut kemudian membuat RI harus berpaling ke Barat. Pada perkembangan selanjutnya, faktor keamanan juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri RI. Faktor ini terutama berkaitan dengan masalah Irian Jaya dan Timor Timur. Politik luar negeri RI semakin aktif pada tahun 1980-an, ketika kemajuan ekonomi dan stabilitas politik mulai terjamin, RI ingin mengambil peranan yang lebih penting di panggung internasional. Diawali di tingkat regional, RI lebih giat mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN, terutama dengan ikut mengupayakan terciptanya perdamaian di Kamboja. Lalu RI tampil menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (1992-1995), dan puncaknya menjadi tuan rumah pertemuan petinggi APEC di Bogor (November 1994).

Pada masa peralihan, ketika Habibie menggantikan Soeharto, terjadi perubahan penting dalam perpolitikan dalam dan luar negeri. Kebijakan luar negeri RI memang tidak banyak berubah, tetapi krisis multidimensi yang melanda RI membuat posisinya di panggung internasional mengalami kemunduran. Posisi RI di dunia internasional semakin sulit, tatkala Timtim lepas melalui proses jajak pendapat di bawah PBB, dan TNI dituduh terlibat dalam kekacauan di Timtim, beberapa saat setelah hasil jajak pendapat berakhir dengan penuh kekecewaan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya. Akan tetapi, dalam setiap kunjungannya tidak ada agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana

membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Wahid akhirnya diturunkan dari kursi Presiden, namun ternyata Megawati yang menggantikannya tidak memiliki agenda internasional yang fokus. Megawati juga banyak melakukan lawatan keluar negeri, namun, sekali lagi dengan agenda yang tidak kongkrit.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan membuat arahan hubungan internasional yang lebih jelas tertata. Setidaknya ada dua catatan penting dari upaya pemerintahan Yudhoyono dalam menjalankan politik internasional Indonesia. *Pertama*, aspek pembangunan ekonomi kembali menjadi landasan utama Indonesia dalam membangun hubungan luar negeri. Di awal pemerintahannya, presiden Yudhoyono beberapa kali melakukan lawatan ke luar negeri, termasuk ke AS bersama tim ekonominya. Tujuannya, tidak lain untuk mempromosikan Indonesia kepada calon-calon investor asing. Hanya saja, setelah kurang lebih dua tahun pemerintahan Yudhoyono berjalan, belum ada perkembangan yang nyata dalam kontribusi penanaman modal asing. *Kedua*, faktor keamanan juga masih menjadi isu sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Walau demikian, Indonesia juga berupaya mengambil peranan yang nyata dalam berkontribusi dalam membantu perdamaian di Timur Tengah.

Dari evaluasi singkat itu tampak bahwa semenjak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia masih belum berhasil membangun posisi tawar yang signifikan dalam panggung internasional. Kondisi ini diakibatkan oleh konsep hubungan internasional yang tidak terintegrasi dengan perkembangan di dalam negeri, terutama sektor ekonomi dan keamanan.

Politik luar negeri harus berangkat dari perkembangan pembangunan dalam negeri. Upaya membangun citra di luar negeri tidak akan berhasil bila dilakukan dengan diplomasi kosong. Bagaimana mungkin bisa meyakinkan investor asing, bila iklim investasi dalam negeri masih tidak pasti, karena ekonomi biaya tinggi dan citra buruk sebagai surga korupsi. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk kembali mengintegrasikan kebijakan luar negerinya dengan kondisi di dalam negeri. Apabila Indonesia ingin meningkatkan kepercayaan investor, maka iklim investasi yang

kondusif serta kepastian usaha di dalam negeri harus diupayakan. Bila Indonesia ingin mengembangkan citra yang positif, maka harus dimunculkan tokoh-tokoh penting dalam negeri yang bertaraf internasional.

Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya dalam hubungan internasional. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat ketergantungan terhadap bantuan negara-negara besar sulit dihindari. Pada awalnya Indonesia terikat dengan komitmen bantuan dari lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Yang didominasi kepentingan negara besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatannya dengan mempercepat kemandirian ekonomi. Segala bentuk ketergantungan terhadap kekuatan asing bisa berdampak buruk bagi penataan kehidupan nasional.

Indonesia harus menimba pelajaran dari negeri-negeri yang berhasil melakukan transisi menuju demokrasi secara mantap. Kesuksesan proses transisi akan menjadi dasar perjuangan untuk meraih kehidupan nasional yang stabil, maju, dan berkeadilan. Untuk itu, pengokohan strategi diplomasi sebagai ujung tombak dalam pertahanan negara perlu diterapkan dengan saksama. Pelbagai tekanan pihak-pihak yang akan memecah-belah dan menguasai Tanah Air Indonesia patut diwaspadai, walaupun harus dihindari munculnya sindroma *xenophobia* dan kemungkinan gejala *chauvinisme*.

Secara obyektif dapat diterapkan asas lingkaran konsentrik untuk menakar kedekatan geografis dan prioritas kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri. Perhatian lebih besar wajar diberikan bagi pengembangan hubungan regional di Asia Tenggara, serta Asia Timur dan Kawasan Pasifik. Selanjutnya jangkauan hubungan diperluas meliputi kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah, hingga menembus wilayah Eropa dan Amerika. Peran yang lebih bermakna perlu dilakukan dalam skala regional dan internasional, seperti di lembaga ASEAN dan APEC. Begitu pula partisipasi yang kongkrit dalam OKI dan PBB.

PK Sejahtera menegaskan kembali, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif agar tetap dipertahankan. Segenap aspek hubungan luar negeri diselenggarakan dengan prinsip: kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, saling menguntungkan, serta penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam koridor itu, PK Sejahtera meyakini, peran internasional bangsa Indonesia akan menjadi kontribusi yang positif bagi peradaban dunia. Sesuai dengan amanat UUD, Indonesia harus berpartisipasi dalam penciptaan stabilitas regional dan perdamaian dunia. Salah satu agendanya adalah menggalang solidaritas bagi bangsa-bangsa yang tertindas dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

6.6.10. Komunikasi dan Informasi

Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik dan ekonomi yang dominan.

Dunia menjadi satu dengan semakin mudahnya manusia berkomunikasi melalui perangkat teknologi canggih. Kendala jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam berhubungan antarmanusia. Setiap hari informasi masuk dan keluar melalui berbagai perantara baik lisan maupun tulisan, lewat media cetak atau elektronik. Derasnya arus informasi dan semakin intensifnya pola komunikasi antarmanusia di berbagai tempat memerlukan pola penataan informasi dan komunikasi.

Sejak era reformasi, perkembangan pers di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Di bidang media cetak; koran, majalah, dan tabloid baru terbit dengan semangat meraih pembaca dan iklan sebanyak-banyaknya. Di bidang media elektronik bermunculan stasiun televisi baru yang pada zaman sebelumnya hampir mustahil dapat mengudara. Perkembangan yang lebih dahsyat terjadi di media internet bersamaan dengan merebaknya teknologi komputer. Munculnya industri media baru sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Intervensi pemilik media ke ruang baca,

ruang dengar, dan ruang pandang khalayak praktis tak dapat dibendung. Oleh sebab itu diperlukan filter informasi yang dapat melindungi khalayak dari pengaruh negatif sajian media.

Salah satu tonggak demokrasi adalah kebebasan pers. Namun kebebasan pers seharusnya disikapi dengan arif. Gejala pornografi dan pornoaksi, informasi hedonistik, dan sajian kekerasan di media massa cenderung mendapat ruang gerak yang lebih besar. Perlu segera disahkan UU Anti Pornografi untuk melindungi publik dari pengaruh negatifnya, karena negara-negara maju sekalipun tetap menjaga informasi yang sehat bagi warganya. Sebaliknya, dalam hal kebebasan berpendapat dan penyampaian opini di media massa, kontrol pemerintah harus diminimalisir.

Monopoli kepemilikan media adalah tantangan utama bagi proses demokratisasi. Dominasi pemodal besar akan menutup akses publik untuk mendapatkan opini yang berbeda dan seimbang. Padahal, informasi adalah hak publik, sehingga diperlukan proses pendidikan bagi publik agar mampu menyerap informasi yang mencerahkan. Masyarakat harus diberi keleluasan untuk menembus akses informasi. Penting sekali menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan demokratis.

PK Sejahtera memandang kejujuran dan kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan semangat menegakkan etika profesi dan pemberlakuan sanksi hukum bagi yang melanggar. Pelaku komunikasi dan pekerja media dituntut untuk mengedepankan sikap profesional dan nilai etik. Sebagai upaya melakukan pemerataan informasi, penguatan terhadap pengembangan media komunitas adalah solusi yang strategis. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya, UU Kebebasan Informasi harus diprioritaskan sebagai koridor bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kontrol sosial.

Pemerintah sebagai fasilitator terhadap media publik (radio dan televisi) harus mengawasi proses restrukturisasi Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menjadi radio dan televisi publik. Kedua media itu merupakan aset negara dengan

infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah, selanjutnya harus didorong menjadi media publik yang kredibel dan profesional. Jangan sampai RRI dan TVRI dikuasai pemilik modal yang berkoalisi dengan kekuatan politik tertentu.

Pekerja di sektor media perlu difasilitasi dengan penguatan posisi dan jaminan keamanan dalam melakukan tugas dan profesinya. Tindakan premanisme dan kekerasan aparat negara adalah salah satu bentuk ancaman bagi kebebasan informasi, karenanya harus dilawan bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara itu peningkatan kesejahteraan praktisi media bisa dilakukan dalam bentuk standar gaji yang memadai, pengembangan serikat wartawan dan penyertaan modal dalam bisnis media bersangkutan. Kondisi wartawan yang mandiri dan sejahtera merupakan modal penting untuk pengembangan iklim informasi yang sehat dan terbuka.

BAB 7

PLATFORM PEREKONOMIAN

Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

BAB 7. PLATFORM BIDANG PEREKONOMIAN

FILOSOFI	Ekonomi Egaliter		
VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat		
MISI	Mengentaskan kemiskinan	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
STRATEGI	Pemerataan pendapatan	Pertumbuhan bernilai tambah tinggi	Pembangunan berkelanjutan
LANGKAH-LANGKAH UTAMA	Melipatgandakan pendapatan petani & nelayan	Meningkatkan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi	Membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge
LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG	Inovasi teknologi		
	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)		
	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)		
	Pembangunan infrastruktur		
	Pengelolaan finansial dan pembiayaan		
FUNDAMENTAL EKONOMI	Pemantapan iklim investasi		Stabilitas ekonomi makro

Kerangka Platform Perekonomian

7.1 PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada masa lalu pada satu sisi telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan perbaikan kualitas hidup mereka secara rata-rata, akan tetapi pada sisi lain telah mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat, dan angka kemiskinan masih tetap sangat tinggi.

Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memaksa Indonesia melakukan perubahan secara mendasar dalam politik, ekonomi, sosial dan hukum menuju suatu sistem yang baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan lebih menitik-beratkan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, proses transformasi tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah mengakibatkan berbagai permasalahan baru yang menuntut pemecahan yang lebih sistematis dan konsisten.

Permasalahan yang mendasar adalah bahwa proses transformasi dan reformasi nasional pasca-krisis 1997/1998 tidaklah mengarah pada konvergensi pemecahan permasalahan bangsa yang substansial, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, tetapi justru sebaliknya proses transformasi tersebut diarahkan menuju liberalisasi total dalam segala aspek kehidupan bangsa. Liberalisasi sektor energi dan migas, pengelolaan sumber daya alam, finansial, pasar uang dan modal, investasi asing, hingga sektor ritel, jasa, layanan kesehatan dan pendidikan yang telah digulirkan pemerintah selama 10 tahun terakhir menggambarkan bahwa negara ini sedang dalam proses menuju salah satu negara yang paling liberal di dunia. Meskipun liberalisasi adalah sisi lain dari globalisasi yang merupakan keniscayaan dunia saat ini, liberalisasi akan selalu memihak kepada kelompok kuat (pemilik modal) yang berakibat pada semakin termarjinalkannya kelompok lemah yang tidak mampu berkompetisi secara bebas seperti buruh, petani dan nelayan, yang selanjutnya hanya akan menambah ketidaksimetrisan dunia dan meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Liberalisasi tanpa desain (visi) dan

organisasi (misi) yang jelas keberpihakan dan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat pasti akan menghancurkan masa depan bangsa yang berpenduduk mendekati seperempat milyar jiwa ini.

Adalah sangat paradoksal manakala banyak pihak dengan gencar menyuarakan slogan “ekonomi kerakyatan” atau “pro-kemiskinan”, akan tetapi sistem pembangunan, perundangan, dan kebijakan ekonomi yang diperjuangkan secara total berkarakter liberal. Realisasi slogan ekonomi kerakyatan atau pro-rakyat yang disuarakan tidak lebih dari bentuk santunan sosial yang dikemas dalam bentuk program jaminan sosial yang tidak menyelesaikan masalah secara substansial. Sistem jaminan sosial seperti diterapkan di negara-negara maju berasas ekonomi liberal ini selamanya tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial. Karena sistem ini tidak bisa mendorong pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemampuannya yang berdampak pada perubahan secara struktural.

Sistem perekonomian yang mampu memberi lingkungan yang memadai bagi pemberdayaan rakyat kecil dan kaum lemah tidak selalu identik dengan faham anti pasar atau proteksionisme. Mekanisme pasar tetap menjadi moda yang paling teruji dan efisien untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi. Hanya saja menganggap bahwa pasar akan selalu mencapai titik kesetimbangan (*equilibrium*) yang menjamin hak-hak seluruh pelakunya seperti yang dipercayai oleh penganut ekonomi liberal adalah naïf, sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ekonomi kapitalis dunia George Soros¹. Mengingat pasar uang dan modal adalah sangat tidak stabil didorong oleh tindak spekulasi dari para pelaku pasar, maka “*New Economy*” yang merupakan istilah lain dari ekonomi global yang menjadi *trend* ekonomi dunia sejak akhir abad ke-20 sangat rentan akan gejolak pasar yang sangat fluktuatif². Krisis ekonomi yang melanda Asia, Amerika Latin dan Rusia pada akhir tahun 90-an yang dalam sekejap telah

¹ Pidato George Soros dalam *World Economic Forum* (2008), Davos, Swiss.

² Paul Krugman, *Phantasm of Capitalism*, 1998.

menghancurkan pilar-pilar ekonomi yang dibangun belasan tahun merupakan akibat langsung dari “petualangan” para pemilik modal yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkannya. Keganasan ekonomi global tidak memandang siapa yang akan menjadi korbannya. Dan arah anak panah ekonomi global itu saat ini sedang menuju jantung perekonomian dunia, Amerika Serikat. AS saat ini sedang berada pada titik rawan menuju resesi ekonomi yang sangat parah dengan hutang luar negeri yang mencapai jumlah tertinggi di sepanjang sejarah manusia hanya dalam waktu 5 tahun terakhir akibat sistem ekonomi yang hanya mengandalkan spekulasi.

Sudah menjadi karakter manusia yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan dengan cara dan modal sekecil-kecilnya. Sifat manusia yang demikian mendorong mereka melakukan tindakan spekulatif, perburuan rente ekonomi (*rent seeking*) dan berbagai macam bentuk *moral hazard* lain. Pemilik modal tidak peduli apakah uang yang mereka investasikan akan berefek sebesar-besarnya untuk menggerakkan roda perekonomian riil atau tidak. Kebijakan keuangan yang dibuat selonggar mungkin dengan dalih untuk mengharapkan masuknya modal asing ke dalam pasar domestik merupakan kesalahan yang fatal. Sebesar apa pun *boom* pasar uang dan modal, akan tetap tidak berpengaruh kepada kehidupan perekonomian masyarakat apabila tidak ada regulasi untuk mendorong agar modal bisa mampu menjadi motor penggerak sektor ekonomi riil. Karakter modal akan selalu mencari wilayah yang memberikan tingkat pengembalian (*return*) yang paling besar dengan resiko paling kecil. Oleh karena itu regulasi adalah mutlak terhadap tindakan spekulasi, monopoli, oligopoli dan bentuk-bentuk kriminal ekonomi lain yang didorong keinginan secara rakus untuk mendapatkan *return* yang secepat-cepatnya.

Adalah kenyataan bahwa kondisi stabilitas ekonomi makro pada tahun-tahun terakhir ternyata tidak serta merta berdampak pada kondisi ekonomi riil yang membaik. Tidak berjalannya investasi di sektor riil disebabkan antara lain karena terjadinya fenomena ‘decoupling’ antara sektor finansial dan sektor riil sebagai akibat oleh kecenderungan pemilik modal untuk melakukan tindakan

spekulatif di sektor keuangan dengan tujuan memburu keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung.

Proses liberalisasi ekonomi tanpa kontrol dan haluan yang jelas juga akan mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan alasan untuk mendorong efisiensi ekonomi dan rasionalisasi. Ini juga merupakan salah satu bentuk kerusakan moral manusia dalam tanggung-jawabnya terhadap alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Bencana alam yang bertubi-tubi dari sejak gempa bumi dan tsunami melanda NAD tahun 2004 hingga gempa lain, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi secara bertubi-tubi dimana-mana secara rela atau tidak rela telah menyadarkan kita akan pentingnya perhatian dan usaha konservasi sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Kecenderungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyatakan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor sebagai peristiwa alam merupakan sikap yang tidak bijaksana dan cenderung menghindari tanggung jawab. Berbagai bencana alam ditambah dengan isu dunia yaitu pemanasan global (*global warming*) telah meletakkan kita pada posisi yang tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan pembangunan perekonomian yang mampu menjaga konservasi sumber-sumber daya alam maupun manusia (*sustainable economic development*).

7.2 FILOSOFI EKONOMI EGALITER

Dengan latar belakang tersebut di atas PK Sejahtera akan melakukan upaya yang maksimal untuk membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha bagi terwujudnya

satu perekonomian yang disebut sebagai Ekonomi Egaliter³.

Prinsip ekonomi egaliter yang paling mendasar adalah prinsip kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara modal dan usaha, dan antara pemilik modal dan pengusaha/buruh. Valuasi yang setara adalah dalam bentuk distribusi resiko dan keuntungan (profit) yang sama bagi pemilik modal dan pengusaha. Dengan demikian penambahan modal (capital gain) hanya berasal dari usaha yang nyata, bukan melalui tindakan spekulatif/gambling atau riba di pasar modal/uang. Dengan adanya pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang berbasis pada tindakan spekulasi dan gambling di pasar uang dan modal, maka proses ekonomi riil (produksi, distribusi dan pemasaran) akan menjadi tulang punggung sistem perekonomian yang berlaku.

Kesetaraan bagi seluruh pelaku ekonomi ini harus dijamin oleh aturan undang-undang dan dibangun di atas nilai-nilai moral dan etika yang tumbuh di masyarakat dengan tetap menganut mekanisme pasar yang bebas tanpa distorsi kepentingan dengan penekanan pada batasan moral dan etika yang melarang tindak kezaliman, monopoli, oligopoli dan spekulatif serta kriminal ekonomi lain. Kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk untuk berusaha, melakukan akses terhadap pasar dan sumber daya alam yang ada harus dijamin secara hukum dan perundang-undangan. Sistem ekonomi kesetaraan ini juga akan mempermudah tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development) demi kelangsungan generasi dan konservasi lingkungan dan alam.

Karena itu sasaran yang hendak dicapai melalui pembangunan ekonomi egaliter adalah: 1) Tegaknya keadilan dalam proses perekonomian melalui mekanisme pasar yang adil dan bebas dari kezaliman ekonomi yang dilakukan oleh para penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain; 2) Terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang mendasar bagi seluruh rakyat; 3) Terwujudkannya pembangunan

³ Istilah Ekonomi Egaliter di sini mengacu pada rumusan dalam Falsafah Perjuangan PK Sejahtera.

ekonomi yang berkelanjutan dengan terjaganya konservasi sumber daya alam dan manusia melalui efisiensi proses pengelolaan dan perekonomian secara keseluruhan.

7.3 VISI, MISI, DAN STRATEGI

Dengan landasan filosofi Ekonomi Egaliter seperti diuraikan di atas PK Sejahtera mencita-citakan terwujudnya “perekonomian Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat” di masa yang akan datang. Dan guna mewujudkan cita-cita tersebut maka peran eksistensial (Misi) PK Sejahtera saat ini diarahkan untuk “Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.”

Dalam upaya mencapai Visi dan menjalankan Misi tersebut di atas strategi yang dikembangkan PK Sejahtera adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi yang mampu mencapai pemerataan pendapatan yang menjangkau masyarakat luas berbasis pada pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan lestari (berkelanjutan). Tiga kata kunci dalam strategi ini adalah Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyumbang terbesar angka kemiskinan adalah sektor pertanian di pedesaan dan sektor informal di perkotaan. Kenyataan ini merupakan paradok mengingat potensi yang sangat besar bagi Indonesia di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Oleh karena itu PK Sejahtera menetapkan strategi pengentasan kemiskinan melalui program melipatgandakan produktifitas penduduk tani, nelayan dan penduduk di sector informal di perkotaan. Ini merupakan cara terbaik meningkatkan pertumbuhan dengan penekanan pada aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Basis yang kuat pembangunan ekonomi sebuah bangsa ditandai oleh keterkaitan antar sektor yang kuat, di mana output sektor yang

satu menjadi input sektor yang lain dan seterusnya. Sektor industri yang menjadi motor utama penggerak ekonomi nasional yang telah dikembangkan adalah *footloose industries*, yaitu industri-industri yang tidak berpijakan kuat pada potensi input SDA lokal yang ada, sehingga penyerapan tenaga kerja dari sektor lain sangat rendah⁴. Untuk mencapai pemerataan pendapatan yang menjangkau masyarakat luas PK Sejahtera juga menetapkan strategi dengan menitikberatkan pada koordinasi lintas sektoral yang baik yang dilakukan dengan cara membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain secara integratif.

Rendahnya daya saing industri nasional disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan lemahnya penguasaan iptek sebagai motor penggerak utama proses globalisasi ekonomi. Pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui R&D adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Untuk itu PK Sejahtera menggariskan strategi peningkatan daya saing yang dilakukan sejalan dengan pembangunan faktor produksi yang berbasis pada penguasaan teknologi dan kemampuan SDM yang tinggi. Dengan kuatnya daya saing berbasis teknologi dan terintegrasinya koordinasi lintas sektoral (berarti juga kuatnya basis input lokal) diharapkan akan menciptakan pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan menjamin kesinambungannya.

7.4 LANGKAH UTAMA PERBAIKAN

Untuk merealisasi misi di atas, PK Sejahtera merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terdiri dari langkah utama dan langkah pendukung. Langkah utama adalah: 1) Melipatgandakan produktivitas petani dan nelayan; 2) Mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa; 3) Membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru.

⁴ Hanya 4% tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri selama tahun 20 tahun antara 1985—2005 (BPS).

PK Sejahtera memandang bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (*equity*) adalah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Dari kajian atas analisis permasalahan yang ada, maka kedua masalah ini sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu sektor ini menjadi prioritas utama platform pembangunan ekonomi PK Sejahtera dengan langkah utama pertama, yaitu melipatgandakan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Langkah ini dilaksanakan melalui program utama modernisasi sektor pertanian dan kelautan, serta relokasi hingga separoh penduduk tani ke sektor industri dan jasa berbasis agro.

Langkah kedua adalah untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan (*growth*) ekonomi nasional. Penekanan pada langkah ini adalah pembangunan ekonomi yang bernilai tambah tinggi serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dengan sasaran untuk meningkatkan efek pengganda sektor/wilayah yang kaya sumber daya alam, seperti pertambangan dan energi, dengan meningkatkan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri. Semuanya itu mengandalkan SDM yang berkualitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai.

Pemerataan (*equity*) dan pertumbuhan (*growth*) yang menjadi sasaran langkah pertama dan kedua sering dianggap sebagai dua hal yang bertentangan, yang tidak mungkin dicapai secara bersamaan. Mengingat potensi ekonomi Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia (pasar) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, maka PK Sejahtera memandang bahwa dua hal ini sangat mungkin dicapai secara bersamaan. Di samping itu mengingat sasaran masing-masing langkah berbeda, maka pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan secara bersamaan. Dengan koordinasi lintas sektoral dan wilayah yang baik diharapkan bisa tercapai pemerataan dan pertumbuhan secara bersamaan.

Langkah ketiga adalah membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru. Sebagai negara maritim dengan potensi laut yang tak terbatas dan wilayah darat yang luas dengan potensi

kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar, maka Indonesia mempunyai modal pembangunan utama yang selalu terbaharui. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan alam seperti migas dan bahan tambang yang bernilai tambah rendah dan tak terbaharui seperti selama ini. Kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah sektor-sektor yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk digali demi membangun industri berbasis sumber daya alam dengan nilai tambah dan daya saing tinggi.

Lebih jauh lagi di antara penduduk Indonesia yang demikian besar terdapat SDM berkualitas sangat tinggi dengan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang canggih dan mampu bersaing di bidang-bidang yang paling terdepan (*frontier*) di dunia. Mereka ini meski hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia adalah kelompok penduduk yang harus diberi perhatian oleh pemerintah untuk membangun sektor ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge*). Bidang-bidang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam kategori ini adalah sektor bioenergi, farmasi, bioteknologi, telematika, peralatan kedokteran dan instrumentasi. Untuk pengembangan bidang-bidang yang tergolong berteknologi tinggi (*hi-tech*) ini, PK Sejahtera memandang bahwa bukan masalah keperluan modal yang sangat besar dan pengembalian (*return*) yang rendah, tetapi yang lebih diperlukan adalah kebijakan pemerintah yang memberikan peluang yang memadai bagi bidang-bidang ini untuk tumbuh, terutama bantuan pada tahap awal untuk pengembangan produk menuju komersialisasi dan bantuan pendanaan yang bersifat modal ventura⁵. Diharapkan bidang-bidang ini akan bisa mengangkat martabat bangsa dan juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kunci keberhasilan ketiga langkah tersebut di atas terletak pada kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.

⁵ Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi sering dikritik oleh kebanyakan para ekonom karena dianggap terlalu memboroskan dana seperti yang terjadi pada pengembangan BUMNIS pada masa Orde Baru.

7.4.1 Melipatgandakan Pendapatan Petani dan Nelayan

Sasaran utama langkah ini adalah untuk meningkatkan produktivitas (pendapatan) para petani dan nelayan dengan golongan pendapatan menengah ke bawah atau petani pemilik lahan kurang dari 0.5 Ha per kapita yang jumlahnya mencapai 56.4% dari seluruh penduduk petani. Skema transformasi penduduk tani/nelayan dijelaskan seperti pada Gambar 7-1. Seperti yang terlihat pada gambar, langkah ini mempunyai dua program utama yaitu, *pertama*, relokasi separoh penduduk petani ke sektor non-pertanian industri dan jasa berbasis pertanian, dan, *kedua*, peningkatan rasio lahan per kapita petani dan modernisasi pertanian/perikanan.

Program pertama ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru terutama bagi wanita dan pemuda berumur 15-22 tahun, serta para petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sebagai komponen utama penduduk miskin di pedesaan. Relokasi penduduk tani ini menjadi program utama pengentasan kemiskinan di sektor pertanian. Realisasi program ini yang pertama adalah melalui program peningkatan kemampuan wirausahata tani untuk selanjutnya didorong agar mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan yang kedua melalui program peningkatan kemampuan SDM petani/nelayan dengan pembekalan ketrampilan khusus untuk menjadi pemasok tenaga kerja sektor industri manufaktur berbasis agro melalui sistem produksi *outsourcing* yang disebut '*bottom of pyramid*'.

Masalah utama pemberdayaan masyarakat petani dengan dorongan untuk mendirikan wirausaha tani atau UMKM berbasis agro antara lain adalah kapasitas produksi yang kecil, kualitas yang tidak konsisten serta akses kepada jaringan pemasaran yang terbatas atau dikuasai oleh para tengkulak. Disamping itu sistem pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini sering tidak konsisten dan tidak berkelanjutan, sehingga hanya sebagian kecil saja wirausaha tani atau UMKM berbasis agro yang mencapai keberhasilan, seraya menyisakan sebagian besar kelompok petani/nelayan yang merupakan bagian lapisan terbawah dalam kelompok pendapatan (*bottom of pyramid*) tetap tidak mengalami

transformasi baik secara pendapatan maupun status sosial. Kelompok ini biasanya memiliki latar-belakang pendidikan yang sangat terbatas⁶, sehingga kemampuan yang dimiliki sangat terbatas untuk mampu mendirikan usaha sendiri.

PK Sejahtera memprakarsai program penanganan kelompok paling lemah di struktur piramida ini dengan sistem produksi *outsourcing* bagi kelompok '*bottom of pyramid*'. Program ini mendorong dan memberi insentif bagi perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang telah mapan dan menguasai faktor-faktor produksi untuk melakukan *outsourcing* rantai produksi ke lapisan terbawah masyarakat (*bottom of pyramid*) melalui training ketrampilan produksi, pengawasan mutu hingga distribusi dan pemasarannya. Sistem produksi ini sangat mungkin terealisasi dengan menjadikan para penduduk lapisan terbawah sebagai pemasok tenaga kerja dan sekaligus menjadi target pemasaran. Dengan demikian, pendapatan agregat kelompok penduduk berpendapatan paling bawah ini secara serempak bisa dinaikkan. Program ini selain berlaku bagi subsektor pertanian maupun perikanan/kelautan juga berlaku untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin yang mendominasi sektor informal di perkotaan.

Program kedua untuk melipatgandakan pendapatan petani dan nelayan adalah melalui peningkatan faktor-faktor utama produksi (lahan, tenaga kerja dan teknologi) yang ditujukan bagi kelompok petani pemilik lahan lebih dari 0.5 Ha setelah peningkatan ratio lahan per kapita melalui program relokasi penduduk petani ke sektor industri dan jasa berbasis pertanian atau nelayan pemilik modal menengah atau besar. Prioritas utama program ini adalah:

- a. Modernisasi pertanian dan perikanan melalui mekanisasi pertanian atau perikanan dengan memakai peralatan modern;
- b. Pembangunan infrastruktur teknis seperti irigasi teknis untuk lahan-lahan kering, sawah tadah hujan, tanah-tanah

⁶ 76% dari seluruh penduduk tani di seluruh Indonesia adalah berpendidikan SD atau tidak sekolah (BPS).

- beririgasi sederhana⁷ atau infrastruktur perikanan modern (pelabuhan pelelangan dan pengolahan ikan);
- c. Penerapan teknologi pasca-panen dan pasca-tangkap untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian / perikanan;
 - d. Pembukaan lahan baru untuk pertanian berskala besar di luar Jawa⁸;
 - e. Penerapan sistem pertanian hortikultura untuk meningkatkan produktivitas produk-produk pertanian seperti buah-buahan, sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan dan lain-lain;
 - f. Pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian tanaman bahan baku bioenergi, pakan ternak, tanaman obat, dan lain-lain⁹.

Untuk mensukseskan langkah-langkah utama di atas PK Sejahtera mencanangkan langkah-langkah pendukung yang meliputi:

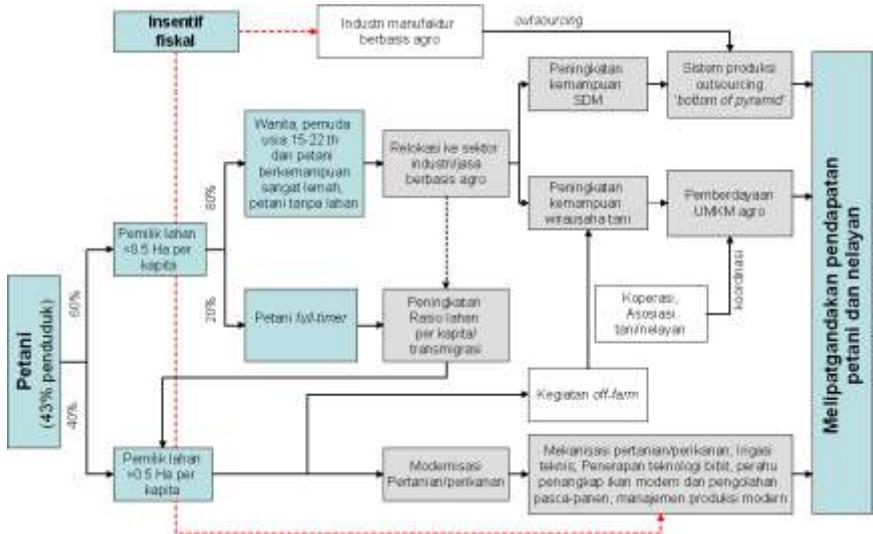
- a. **Inovasi teknologi:** Pengembangan teknologi tepat guna pasca-panen, pengolahan makanan dan minuman, pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kelautan yang tersedia dan mudah diakses oleh petani, pengembangan teknologi pemanfaatan lahan gambut dan rawa-rawa, pengembangan perahu modern untuk nelayan, pengembangan sistem navigasi perikanan, pengembangan teknologi pembibitan, hortikultura, pupuk organik;
- b. **Pengembangan SDM:** Pendirian sekolah-sekolah khusus pertanian modern, pusat-pusat pelatihan ketrampilan teknologi pasca-panen dan pengolahan hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kelautan, pusat-pusat penyuluhan pertanian dan pelatihan manajemen wirausaha tani;
- c. **Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup:** Reformasi agraria dan tanah untuk mengatur kepemilikan tanah dan

⁷ 46.8% total lahan pertanian keseluruhan adalah lahan-lahan kering/sawah tadah hujan atau lahan-lahan dengan irigasi sederhana, sementara ini tingkat irigasi teknis hanya kurang dari 15% (BPS).

⁸ Lahan potensi untuk pertanian adalah 50 jt Ha di seluruh Indonesia, sementara saat ini luas tanah pertanian hanya 7.5 jt Ha (BPS).

⁹ Jumlah lahan kosong di seluruh Indonesia ada sekitar 6 jt Ha.

- penggunaan tanah untuk pertanian, penanganan limbah, pencemaran lingkungan dan kerusakan SDA;
- d. **Pembangunan infrastruktur:** Pembangunan irigasi teknis secara besar-besaran, bantuan swadaya masyarakat untuk membangun infrastruktur pedesaan, pembangunan jalan-jalan lintas kabupaten dan propinsi, pembangunan pelabuhan-pelabuhan pelelangan dan pengolahan ikan.
 - e. **Pengembangan lembaga pembiayaan:** Pengembangan lembaga pembiayaan untuk menyediakan kredit mikro kepada wirausaha tani, penunjukkan khusus lembaga pembiayaan/bank yang memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan pendukung sistem produksi *outsourcing 'bottom of pyramid'* dan mekanisasi pertanian.
 - f. **Kebijakan (insentif) fiskal:** Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan manufaktur untuk melakukan sistem produksi *outsourcing 'bottom of pyramid'* dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa dan barang-barang modal untuk mekanisasi pertanian.



Gambar 7-1 Skema transformasi agraria untuk melipatgandakan pendapatan petani dan nelayan

7.4.2 Mendongkrak Daya Saing Industri Manufaktur Dan Jasa

Terpuruknya¹⁰ daya saing industri manufaktur Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik pada tataran makro maupun mikro. Pada tataran makro antara lain dapat dicatat 3 (tiga) faktor utama, yaitu: (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) buruknya kualitas kelembagaan publik sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktifitas. Sementara pada tataran mikro antara lain dapat dicatat terdapat 2 (dua) faktor utama, yaitu: (a) rendahnya efisiensi produksi; dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha.

Sedangkan rendahnya¹¹ kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu: (1) perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (2) efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk membangun iklim usaha kondusif, dan koordinasi institusi publik, (3) upaya-upaya mendorong peningkatan produksi dan inovasi yang tercermin dari tingkat produktifitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (4) infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Secara lebih mendasar PK Sejahtera mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya daya saing sektor industri nasional antara lain adalah:

- (1) Tingginya biaya overhead produk-produk industri manufaktur Indonesia karena proses ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh praktek KKN, monopoli/oligopoli

¹⁰ *World Economic Forum (WEF) (2004)*

¹¹ *World Competitive Reports (2004)*

- dan perburuan rente yang mengakar dalam layanan umum, administrasi perpajakan, bea cukai dan perizinan;
- (2) Kandungan impor sangat tinggi akibat lemahnya struktur industri untuk membangun industri-industri penunjang dan pemasok bahan baku/antara (intermediate) dari dalam negeri, serta tidak adanya koordinasi lintas sektoral yang baik;
 - (3) Lemahnya kualitas SDM dan penguasaan serta pengembangan teknologi penunjang industri 12. SDM dengan kualitas yang rendah akan sulit diharapkan menghasilkan peningkatan produktivitas melalui inovasi-inovasi teknologi.

Faktor pertama di atas merupakan faktor di luar ekonomi yang harus diselesaikan secara politis (Lihat platform bidang politik PK Sejahtera). Maka dalam platform perekonomian ini, PK Sejahtera menfokuskan upaya pemantapan daya saing industri manufaktur nasional pada dua faktor terakhir yaitu:

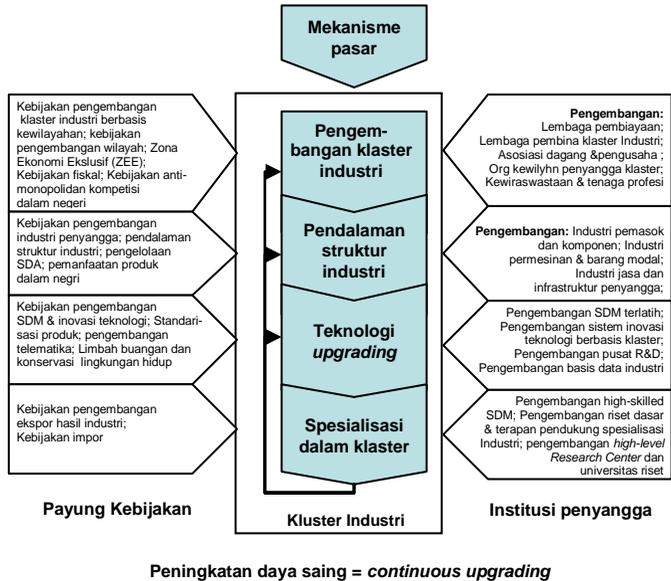
- (1) Pendalaman struktur industri, penguatan koordinasi lintas sektoral dan peningkatan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) berbasis kewilayahan melalui proses *continuous upgrading* (yaitu *clustering, deepening, technology upgrading, specialization*).
- (2) Pengembangan *high-skilled* SDM dan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi untuk menunjang proses *continuous upgrading*.

Oleh karena itu, PK Sejahtera mengambil langkah implementasi seperti yang tergambar pada Gambar 7-2 yang meliputi:

- a. Pengembangan klaster industri manufaktur yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal dengan industri penyangga dan institusi penunjang yang memberikan jasa layanan. Selanjutnya klaster ini didorong untuk melakukan pendalaman (*deepening*) secara struktural dan *upgrading* teknologi secara terus-menerus mengikuti mekanisme

¹² Dari hampir 4,2 juta orang tenaga kerja industri dalam 22.894 perusahaan pada tahun 1996, hanya 2 persen berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 persen berpendidikan master, dan 0,005 persen (hanya 225 orang) berpendidikan doktor (BPS).

pasar dan asas persaingan bebas dan adil. Tujuan utama peningkatan daya saing berbasis kluster adalah untuk pendalaman keterkaitan industri utama dengan industri dan jasa penunjang di dalam negeri dan secara bersama-sama bisa melakukan peningkatan daya saing. Dengan demikian peningkatan daya saing dilakukan sekaligus baik di sektor industri manufaktur maupun jasa.



Gambar 7-2. Skema peningkatan daya saing industri nasional

- b. Pengembangan industri penyangga sebagai pemasok bahan dasar dan barang-barang modal serta jasa engineering terhadap industri utama dalam kluster dan institusi penunjang yang menjadi sumber pembiayaan, lembaga-lembaga yang melakukan pembinaan, serta lembaga-lembaga penyedia SDM berkualitas dan pemberi layanan teknis dan pemasok teknologi dan informasi.
- c. Pengembangan aturan dan payung hukum yang melindungi dan menjamin terlaksananya peningkatan

daya saing melalui proses upgrading secara terus-menerus.

Langkah pertama (a) di atas terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- (1) **Tahap penumbuhan/pengembangan klaster:** Dalam tahap ini dilakukan pemilihan dan mulai dilakukan pengembangan klaster-klaster industri yang mempunyai daya saing baik keunggulan komparatif maupun kompetitif yang tinggi dengan basis kewilayahan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, serta *establishment* unsur-unsur utama penunjang klaster yang terdiri dari industri penyangga awal, lembaga pembiayaan dan institusi penunjang lain serta infrastruktur dasar untuk menunjang pertumbuhan klaster.
- (2) **Tahap pendalaman struktur industri:** Dalam tahap ini difokuskan pada pengembangan lebih lanjut industri penyangga sebagai pemasok bahan baku dan antara, komponen dan barang-barang modal dan permesinan, serta layanan jasa engineering, dan institusi penunjang pemberi jasa layanan umum yang meliputi pembiayaan, penyedia tenaga kerja, teknologi dan informasi serta infrastruktur secara lebih luas.
- (3) **Tahap upgrading teknologi:** Tahap ini difokuskan pada pengembangan inovasi teknologi baik di dalam masing-masing perusahaan atau secara kolektif di dalam pusat R&D (research and development) di dalam klaster yang ditujukan untuk melakukan improvisasi produk dan pengembangan produk-produk baru, serta pengembangan SDM terlatih untuk menopang proses upgrading.
- (4) **Tahap spesialisasi:** Yaitu tahapan untuk melakukan inovasi teknologi lebih lanjut dalam masing-masing unsur klaster (industri utama, industri penyangga, institusi penunjang) melalui pengembangan riset dasar maupun terapan untuk mengembangkan teknologi dan produk baru yang mempunyai daya saing tinggi secara global. Tahapan ini sangat didukung oleh pengembangan high-skilled SDM yang dihasilkan research university dan pengembangan high-level research center.

Klaster-klaster industri yang diprioritaskan sesuai dengan tahapan peningkatan daya saing adalah seperti yang terlihat pada **Tabel 7-1**. Setiap klaster mengikuti proses pentahapan yang sama seperti pada Gambar 7-2. Klaster-klaster yang dimuat pada **Tabel 7-1** pada tahapan kedua dan seterusnya adalah klaster-klaster baru yang dikembangkan untuk mendukung klaster-klaster yang sudah ada sebelumnya yang mulai masuk pada tingkat tahapan yang sama.

Tabel 7-1. Prioritas klaster industri sesuai dengan tahapan peningkatan daya saing

<p>1. Tahap penumbuhan klaster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri makanan dan minuman • Industri pengolahan kayu dan produk kayu • Industri pengolah hasil laut • Industri padat karya: TPT dan alas kaki • Industri peralatan listrik rumah-tangga • Industri pengolahan hasil perkebunan: kelapa sawit & karet • Industri kimia/biokimia hilir: petrokimia, farmasi, pulp dan kertas. • Industri strategis untuk pertahanan (alutsista): <i>surveillance systems, military transports, combat systems</i> • Aneka industri <p>2. Tahap pendalaman industri dan teknologi <i>upgrading</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan logam dan bahan-bahan tambang • Industri permesinan, barang modal, komponen dan elektronika • Industri kimia antara • Industri rancang-bangun dan rekayasa <p>3. Tahap spesialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri kimia dasar/biokimia/bioteknologi, farmasi • Industri TI, rekayasa desain dan komputasi • Industri alat-alat kedokteran, instrumentasi dan mesin-mesin presisi <p>4. Industri penunjang klaster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan migas, batubara & <i>renewable</i> energi • Industri peralatan transportasi: perkapalan, pesawat terbang dan kereta-api • Industri utilisasi: listrik, gas, dan air • Industri telekomunikasi: telepon, internet dan satelit

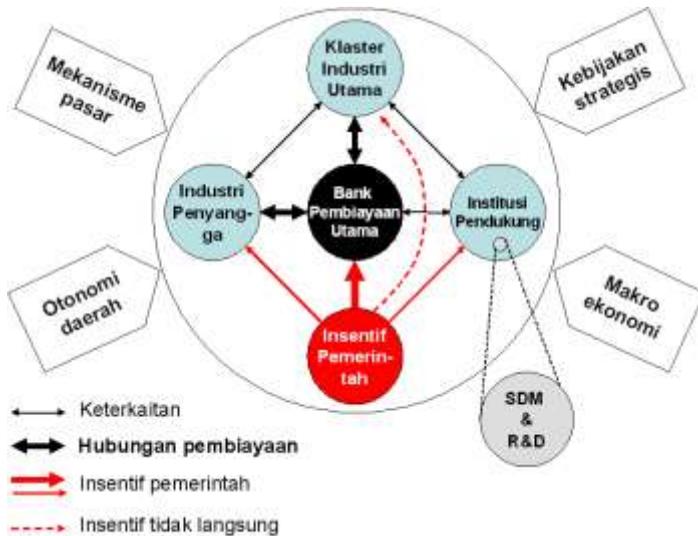
Prioritas pengembangan teknologi untuk menunjang upaya peningkatan daya saing industri nasional sesuai dengan pentahapan berbasis klaster adalah seperti yang dirangkum dalam **Tabel 7-2**.

Tabel 7-2 Prioritas penguasaan dan pengembangan teknologi nasional untuk mendorong peningkatan daya saing dan teknologi upgrading pada industri nasional

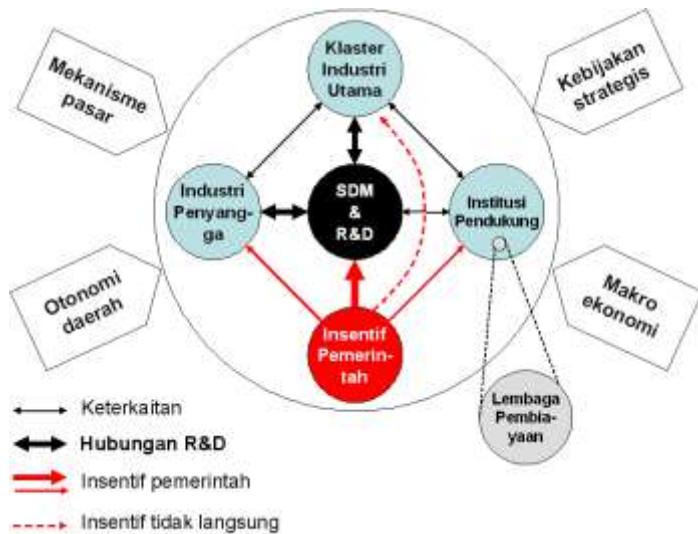
Tahapan dalam kluster industri	Prioritas pengembangan teknologi penunjang industri
Teknologi pendukung modernisasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi tepat guna pasca-panen, pengolahan makanan dan minuman, pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kelautan - Teknologi pemanfa'atan lahan gambut dan rawa-rawa - Teknologi pembuatan perahu kayu modern untuk nelayan - Teknologi sistem navigasi perikanan - Teknologi pembibitan, hortikultura, pakan ternak, pupuk organik. - Teknologi pembuatan mesin-mesin pertanian
Tahap penumbuhan dan pengembangan kluster industri	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi proses produksi, teknologi industri, rancang-bangun dan rekayasa sistem - Teknologi pemrosesan batu-bara bersih, pembangkit listrik, pengilangan minyak - Teknologi penanganan limbah dan polusi - Teknologi pengerjaan sipil, konstruksi, <i>lay-out</i> pabrik - Teknologi perakitan dan instalasi permesinan dan alat-alat listrik - Teknologi perkapalan, pembuatan pesawat dan alat-alat transportasi lain
Tahap pendalaman struktur industri dan upgrading teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi <i>reverse-engineering</i> dan pembuatan komponen otomotif dan alat-alat transpor lain - Teknologi permesinan dan pembuatan komponen listrik - Teknologi telematika umum dan komputer desain - Teknologi desain sirkuit listrik
Tahap spesialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pembuatan alat-alat medis, instrumentasi dan alat-alat presisi - Teknologi kimia dasar, biokimia, bioteknologi dan farmasi - Teknologi semikonduktor, teknologi nano, material khusus - Teknologi telematika <i>high-end</i>, komputasi, IC, micro-chip, <i>high-tech</i> sensor, <i>high-end</i> software

Untuk menjamin pertumbuhan kluster industri seperti dijelaskan di atas agar peningkatan daya saing terjadi secara optimal, maka *resource* (sumber daya) harus dialokasikan baik secara umum maupun khusus yang berupa kebijakan fiskal/suku bunga perkreditan yang menjadi instrumen utama pemerintah, alokasi SDA, serta prioritas utama pengembangan SDM dan teknologi. Mengingat pemberian insentif langsung (kebijakan fiskal, suku bunga, subsidi langsung maupun proteksi pasar) kepada industri utama dalam kategori sering berakibat pada praktek monopoli yang sering tumbuh menjadi oligopoli dan berpengaruh negatif terhadap peningkatan daya saing nasional dalam jangka panjang, maka insentif ini diberikan secara tidak langsung dengan tujuan untuk menumbuhkan daya saing kluster secara bersamaan.

BAB 7. PLATFORM BIDANG PEREKONOMIAN



(a) Tahap penumbuhan dan pendalaman kluster



(b) Tahap *upgrading* teknologi dan spesialisasi

Gambar 7-3. Pola pengembangan kluster industri

Untuk itu PK Sejahtera menjadikan bank/lembaga pembiayaan utama sebagai motor penggerak pertumbuhan dan peningkatan

daya saing kluster pada tahapan penumbuhan dan pendalaman, dan aktifitas pengembangan SDM dan R&D sebagai motor penggerak peningkatan daya saing pada tahapan upgrading teknologi dan spesialisasi. Insentif utama (kebijakan fiskal, suku bunga, subsidi langsung atau proteksi pasar) diberikan kepada motor penggerak ini pada masing-masing tahapan (Lihat Gambar 7-3 a dan b). Untuk menjamin pertumbuhan kluster secara optimal, maka insentif juga diberikan kepada industri penyangga dan insitusi pendukung yang menjadi kunci perekat dan *networking* kluster secara keseluruhan dan sering menjadi titik lemah dalam rantai keterkaitan lintas sektor pada struktur industri nasional.

Langkah utama untuk meningkatkan daya saing industri nasional seperti yang dijelaskan di atas hanya akan berhasil secara optimal apabila didukung oleh langkah-langkah pendukung sebagai berikut:

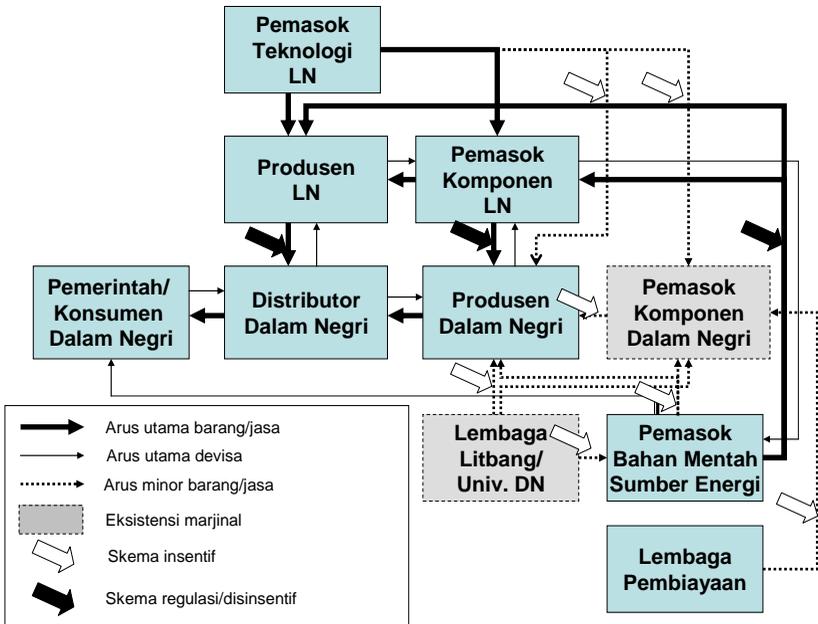
- a. **Kebijakan pengelolaan SDA dan energi nasional:** Penerapan kebijakan yang melarang ekspor kayu gelondongan, bahan-bahan mentah perkebunan dan kehutanan, serta barang-barang tambang yang tidak diolah; pelarangan ekspor bahan-bahan sumber energi (migas dan batu-bara) dan mengalokasikan penggunaannya sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menopang industri nasional.
- b. **Pembangunan infrastruktur yang *integrated, connected* dan *user friendly*:** Pembangunan infrastruktur yang integratif dan terkoneksi secara *networking* yang baik, meliputi jaringan infrastruktur enegi (pemipaan gas, moda transportasi dan pengilangan minyak serta pengolahan batu-bara, pembangkit listrik hingga distribusi listrik), jaringan logistik (moda transportasi darat, laut dan udara dan pelabuhan-pelabuhan utama dan transit, serta jalan-jalan dan perkereta-apian), jaringan telekomunikasi (telepon, internet dan satelit); prioritas utama ditujukan untuk pembuatan sistem infrastruktur yang terintegrasi, terkoneksi dan berorientasi pengguna (*integrated, connected and user friendly*).
- c. **Pengembangan industri strategis *backbone* industri nasional:** Untuk menopang pembangunan infrastruktur yang menjadi *backbone* (tulang punggung) perekonomian

nasional, maka perlu revitalisasi pengembangan industri strategis nasional yang meliputi industri eksplorasi dan pengolahan sumber energi (migas, batubara & energi terbarukan), industri pengolahan baja dan logam-logam utama lain, industri manufaktur peralatan transportasi (perkapalan, pesawat terbang dan kereta-api), industri utilisasi (listrik, gas, dan air) serta industri manufaktur perangkat keras dan lunak telekomunikasi (telepon, internet dan satelit). Pengembangan industri-industri strategis ini bisa dilakukan melalui BUMN yang dikelola secara efisien dengan tidak menutup kemungkinan akan peran swasta dan investasi asing, akan tetapi kendali sepenuhnya harus dipegang oleh pemerintah untuk menjamin pemanfaatan sepenuhnya sebagai tulang punggung (*backbone*) industri nasional. Oleh karena itu proses privatisasi industri-industri strategis harus dilakukan selaras dengan tingkat maturitas industri nasional menurut pentahapan peningkatan daya saing pada Gambar 7-2.

- d. **Kebijakan fiskal:** Pemberian insentif khusus kepada bank pembiayaan yang menjadi motor penggerak kluster industri pada masa penumbuhan kluster dan pengonsentrasian insentif pada masa peningkatan teknologi dan spesialisasi kepada aktifitas pengembangan SDM dan R&D untuk mendorong inovasi teknologi baik di dalam perusahaan maupun institusi khusus R&D dan universitas riset; persyaratan 30% biaya pembangunan APBN dan APBD untuk pengembangan SDM dan R&D sesuai dengan kebutuhan departemen/dinas terkait; persyaratan minimal 50% pada masa penumbuhan dan pendalaman dan 100% pada masa upgrading teknologi dan spesialisasi terhadap biaya pengadaan barang yang didanai oleh APBN dan APBD berasal dari produk dalam negeri. Skema insentif dan disinsentif untuk mendorong proses peningkatan daya saing industri dan jasa nasional adalah seperti digambarkan pada Gambar 7-4. Seperti yang terlihat pada Gambar 7-4 skema insentif/disinsentif diterapkan untuk merubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu tergantung pada luar menuju pada

pola rantai pemasok yang kuat di dalam negeri dengan mengoptimalkan peran pemasok komponen dan litbang/universitas dalam negeri. Insentif utama diberikan untuk mendorong terbangunnya industri pemasok komponen dalam negeri yang kuat dan peran lembaga litbang/universitas sebagai pemasok teknologi dalam negeri yang optimal. Disinsentif terutama diterapkan pada impor barang jadi dan barang setengah jadi terutama yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

- e. **Pemantapan iklim investasi:** Langkah utama pemantapan iklim investasi harus difokuskan pada upaya pengurangan biaya *overhead* serendah-rendahnya dengan pemantapan upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi untuk menghapuskan praktek perburuan rente yang mengakar dalam layanan jasa umum, administrasi perpajakan, beacukai dan perizinan.



Gambar 7-4 Rantai pemasok barang & jasa nasional dan skema insentif & disinsentif yang dikembangkan untuk mendorong daya saing industri

7.4.3 Membangun Sektor-Sektor Yang Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru

Langkah utama yang ketiga adalah mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mengandalkan potensi dalam negeri baik kekayaan sumber daya alam (SDA) maupun keunggulan sumber daya manusia (SDM). Prioritas dalam langkah ini adalah untuk perintisan (*start-up*) bisnis baru yang berkaitan dengan sektor-sektor yang meliputi:

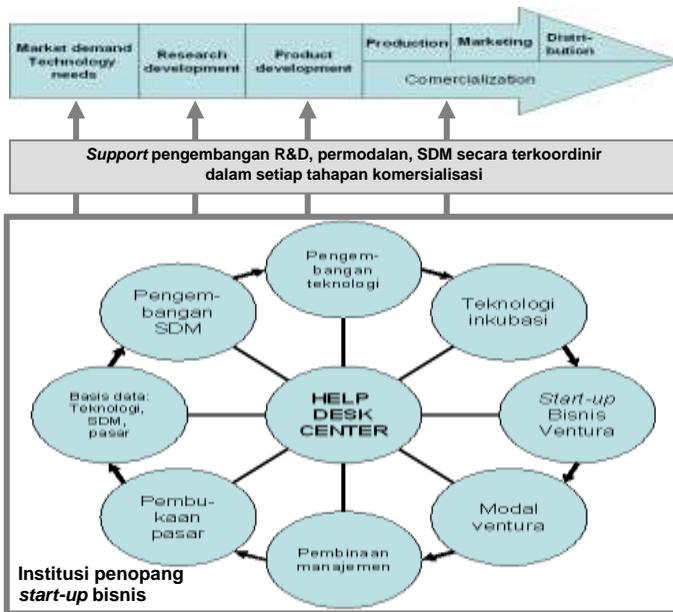
- a. **Sektor pertanian dan kelautan modern berskala besar:** antara lain perkebunan penghasil bahan-bahan sumber energi terbarukan, pertanian dan peternakan skala besar untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong serta perikanan laut yang dikelola secara modern. Penggalan sektor-sektor ini masih sangat minim meskipun potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar. Oleh karena itu dengan pengembangan bisnis baru berskala besar berbasis sumber-daya alam sektor ini berpotensi menjadi sektor unggulan utama (*core competence*) berdaya saing global yang akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
- b. **Sektor teknoprenur (manufaktur dan jasa modern berbasis teknologi tinggi skala UMKM):** Membangun sektor manufaktur berbasis teknologi dan berdaya saing global dalam skala besar adalah sangat sulit di Indonesia. Selain penumbuhannya yang memakan waktu lama dan kebijakan protektif yang mahal, tantangan globalisasi yang menuntut liberalisasi pasar domestik menjadi hambatan utama pengembangannya. Akan tetapi sisi lain globalisasi juga memberikan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan UMKM yang mengandalkan teknologi SDM berketerampilan tinggi (*high-skilled*) dan teknologi tinggi untuk melakukan akses dan bersaing di pasar global tanpa hambatan yang berarti dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai basis produksi, distribusi dan pemasarannya. Mengingat Indonesia memiliki SDM

berkualitas tinggi dalam taraf internasional terutama yang dihasilkan oleh program-program karya-siswa luar negeri pada tahun 1990-an dan juga universitas-universitas unggulan dalam negeri, maka pengembangan sektor baru berbasis teknologi tinggi ini mempunyai peluang besar, dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru mengacu pengalaman Bangalore, India, dan juga akan mengangkat martabat Indonesia di mata internasional. Sektor ini memerlukan tingkat spesialisasi teknologi yang tinggi meliputi pembuatan alat-alat medis, instrumentasi dan alat-alat presisi, bioteknologi dan farmasi, industri telematika *high-end*, komputasi, desain komputer, *high-tech* sensor, *high-end* software, dan sebagainya. Sektor ini bisa merupakan sektor industri yang telah mengalami tingkat spesialisasi pada tahapan peningkatkan daya saing pada langkah utama kedua di atas untuk skala UMKM atau sektor yang sama-sekali baru yang sejak awal telah mengandalkan spesialisasi teknologi yang tinggi.

Langkah pendukung untuk membangun sektor ini adalah bagaimana membuat sistem kelembagaan untuk membantu proses memulai (*start-up*) sektor bisnis baru ini. Untuk sektor pertama berbasis SDA berskala besar, prioritas utama adalah pemberian insentif awal kepada perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan (*established*) dan memiliki modal besar untuk melakukan investasi pada sektor baru ini. Instrumen perbankan dan lembaga pembiayaan lain yang ditunjuk khusus untuk memberikan kredit usaha di sektor baru ini bisa digunakan untuk menjadi motor penggerak.

Untuk sektor **teknoprenur** berbasis UMKM, kendala yang dihadapi adalah bagaimana mendorong komersialisasi hasil-hasil riset melalui *start-up* bisnis baru. Untuk itu perlu dibentuk institusi penunjang yang disebut *Help Desk Center* untuk menunjang *start-up* bisnis UMKM berbasis teknologi seperti yang digambarkan pada Gambar 7-5. Fungsi institusi ini adalah untuk memberikan *support* pengembangan R&D, permodalan, pengembangan SDM secara terkoordinir dengan baik dalam setiap tahapan komersialisasi yang

meliputi pengembangan riset, pengembangan produk (*prototype*) dan komersialisasi (produksi, pemasaran dan distribusi). Institusi *Help Desk Center* mempunyai peran yang meliputi bantuan pengembangan teknologi, inkubasi teknologi, *start-up* bisnis ventura, bantuan permodalan, pembinaan manajemen perusahaan, bantuan akses pasar, layanan informasi dan basis data teknologi, SDM dan pasar hingga bantuan pengembangan SDM (Lihat Gambar 7-5). Untuk menggerakkan program penumbuhan bisnis baru ini maka perlu pemberian insentif berupa *grant start-up* bisnis dan ditunjuk lembaga pemodal (*venture capital*) dengan skema kredit/pembiayaan khusus pada masa awal penumbuhan dalam kerangka klaster bisnis *high-tech* yang penumbuhannya bisa dilakukan dengan pola penumbuhan klaster industri pada langkah utama kedua di atas. Pada masa pematangan, insentif harus difokuskan pada bantuan pengembangan SDM dan *high-level research*.



Gambar 7-5. Pola pengembangan institusi penunjang *start-up* bisnis UMKM berbasis teknologi (*TEKNO-PRENUK*)

7.5 ISU-ISU KEBIJAKAN SEKTORAL

Disamping Langkah-langkah Utama dan Langkah-langkah pendukung seperti diuraikan di atas berikut ini adalah Isu-isu Kebijakan Sektorial yang diusung PK Sejahtera:

7.5.1. Menegakkan Reformasi Ekonomi

Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. Karenanya Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (*backtracking*) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi.

- a) Melakukan reformasi ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan hak-hak dasar ekonomi warga negara serta memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Kebijakan disini meliputi: (i) pembangunan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan iklim persaingan usaha yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; (ii) mewujudkan peranan pemerintah yang efektif sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan; (iii) perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi dari perekonomian

berbasis keunggulan komparatif SDA menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif.

- b) Mengelola dan mengembangkan berbagai aset strategis bangsa secara bertanggung jawab. Dalam konteks inilah kebijakan privatisasi bukanlah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan (*revenue maximization*) pemerintah jangka pendek, melainkan dimaksudkan sebagai rangkaian program reformasi ekonomi untuk membuka pasar, menghilangkan distorsi pasar dan nilai tukar, serta mendorong pembangunan sektor dunia usaha. Lebih jauh, privatisasi seharusnya ditujukan untuk mengeliminasi kekuatan monopoli sehingga kesejahteraan konsumen dan kepentingan publik dapat dilindungi. Karenanya BUMN yang strategis dan berkaitan dengan kepentingan umum dan berkinerja bagus, seharusnya tetap dipertahankan sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara di masa yang akan datang.
- c) Merevitalisasi kebijakan subsidi berbagai kebutuhan dasar rakyat sehingga tepat sasaran. Ini bermakna bahwa kebijakan subsidi bagi rakyat miskin sepatutnya menjadi *concern* utama pemerintah dengan menyiapkan program perlindungan sosial nasional dengan memperhatikan risiko dan kerentanan sosial rumah tangga miskin dan nyaris miskin. Program revitalisasi ini termasuk skema *cash-transfer* bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, subsidi pekerja sektor informal, sistem asuransi kesehatan, stabilisasi harga beras, dll.
- d) Berperan aktif dalam mewujudkan tata ekonomi dunia baru yang berlandaskan prinsip keadilan dan persamaan hak bagi umat manusia. Menyadari bahwa pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi ekonomi maka Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa Indonesia sepatutnya berperan aktif mewujudkan tata ekonomi dunia yang adil dengan memperjuangkan perdagangan internasional yang adil (*fair trade*) dan mendorong kebijakan liberalisasi ekonomi yang tidak merugikan perekonomian nasional dan kedaulatan bangsa.
- e) Mendorong pelaku ekonomi pribumi agar dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha dan jiwa wirausaha memainkan peran penting sebagai salah satu soko guru perekonomian bangsa,

karenanya kebijakan ekonomi nasional sepatutnya ditujukan untuk menumbuhkan wirausahawan yang tangguh dan dapat berkompetisi di tingkat global. Menyadari bahwa distorsi kebijakan ekonomi yang hanya mementingkan dan memberikan *previlage* sekelompok pengusaha telah melahirkan ketimpangan ekonomi dan dunia usaha Indonesia, maka diperlukan *political will* dan reorientasi kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk mendorong pelaku ekonomi pribumi agar dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dalam sebuah lingkungan bisnis yang sehat.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Melakukan reformasi ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.
- b) Mengelola dan mengembangkan berbagai aset strategis bangsa secara bertanggung jawab.
- c) Merevitalisasi kebijakan subsidi berbagai kebutuhan dasar rakyat sehingga tepat sasaran.
- d) Berperan aktif dalam mewujudkan tata ekonomi dunia baru yang berlandaskan prinsip keadilan dan persamaan hak bagi umat manusia.
- e) Mendorong pelaku ekonomi pribumi agar dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi. ***

7.5.2 Kerangka Ekonomi Makro

Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergerak-nya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen

kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

a. Stabilisasi nilai mata uang

Stabilitas rupiah adalah kondisi penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil masyarakat, menurunkan daya saing perekonomian, serta memukul kelompok miskin jauh lebih keras dibandingkan dengan kelompok kaya. Kebijakan disini meliputi: (i) mengendalikan pertumbuhan uang beredar; (ii) kebijakan suku bunga yang netral terhadap sektor riil; (iii) regulasi dan monitoring pasar valas untuk menjamin stabilitas nilai tukar.

b. Memperbaiki kelembagaan Bank Sentral

Bank sentral yang modern, efektif, dan efisien adalah krusial bagi kebijakan moneter dan finansial yang kredibel. Kebijakan disini meliputi: (i) meneruskan independensi BI namun dengan memperjelas hubungan kerja antara BI dan pemerintah dalam rangka koordinasi kebijakan yang lebih baik; (ii) memperkuat peran Badan Supervisi BI.

c. Stimulus fiskal yang memadai dan efektif untuk sektor riil

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mendorong dan mengarahkan sektor riil melalui kapasitasnya yang besar. Perbaikan dalam fokus kebijakan fiskal akan banyak menolong sektor riil dari stagnasi. Kebijakan disini meliputi: (i) fokus pada pembangunan infrastruktur publik yang tidak diminati swasta seperti infrastruktur pertanian, sanitasi, drainase, dan pengolahan sampah; (ii) menginisiasi dan memfasilitasi program prioritas secara serius sebagai *market signal* seperti program pembangunan perumahan rakyat, energi alternatif, dan listrik

d. Membuat *Pro-Poor Budgeting*

Pro-poor budgeting dicapai dengan menghapus pemborosan dan korupsi dalam anggaran negara. Kebijakan penghematan disini meliputi: (i) penciptaan mekanisme anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran-pengeluaran negara berada pada tingkat yang wajar; (ii) menghapus kegiatan-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat miskin seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; (iii) menghapus duplikasi kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi. Sementara itu, kebijakan penghapusan korupsi meliputi: (i) tindak lanjut yang tegas dan memadai atas hasil

audit BPK baik terhadap APBN-APBD ataupun BUMN-BUMD; (ii) penegakan hukum tanpa pandang bulu atas setiap penyalahgunaan dana publik.

e. Memperbaiki manajemen utang publik

Tujuan dalam manajemen utang publik adalah untuk menurunkan stok utang, bukan hanya sekedar *roll-over*, *refiling*, dan *refinancing*. Kebijakan disini meliputi: (i) menurunkan beban utang domestik pemerintah melalui penuntasan kasus kejahatan perbankan dan BLBI, serta rekayasa keuangan yang cerdas dan berani; (ii) mengkaji secara serius opsi keringanan atau penghapusan utang luar negeri (iii) mendorong secara serius dilakukannya *debt-swap* baik untuk program pengentasan kemiskinan, perlindungan alam, maupun pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil.
- b) Membangun kualitas dan kredibilitas otoritas moneter untuk pengawasan sistem keuangan dan perbankan yang efektif.
- c) Mengarahkan fokus kebijakan fiskal pada pemulihan ekonomi secepatnya.
- d) Membuat anggaran negara yang responsif dan berpihak pada kelompok masyarakat miskin (*pro-poor budgeting*).
- e) Manajemen utang negara yang ramah pasar dengan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak. ***

7.5.3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata. Karenanya pengentasan kemiskinan harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional

PK Sejahtera memandang bahwa kemiskinan bukan hanya sederetan angka, tetapi menyangkut amanat pemerintah dan

seluruh bangsa Indonesia terhadap nyawa jutaan rakyat miskin, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Sehingga masalah kemiskinan menyentuh langsung nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

Dimensi kemiskinan, tidak hanya dilihat dari indikator pemenuhan konsumsi dan kebutuhan dasar. Namun, juga dilihat dari pemenuhan terhadap jaminan masa depan, perlindungan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal, rendah tidaknya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, pelibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, jaminan berusaha untuk penyandang cacat fisik maupun mental, serta perlindungan terhadap rakyat yang memiliki ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Fakta yang terjadi di Indonesia, jumlah rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (dihitung dengan standard rata-rata pendapatan terendah untuk hidup atau PPP \$1,55/hari) saat ini terhitung tinggi. Meskipun tidak berada di bawah garis kemiskinan, namun kelompok masyarakat strata menengah juga rentan untuk jatuh dalam kemiskinan. Indikator kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah saat ini hanya didasarkan pada indikator pendapatan dan bukan indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga tidak menggambarkan keadaan kemiskinan yang sebenarnya. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini wilayah pedesaan dan masyarakat nelayan di wilayah pesisir adalah kelompok masyarakat yang paling miskin di Indonesia. Karenanya, disadari bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks bangsa yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Karena itu PK Sejahtera memandang bahwa pengentasan kemiskinan harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pengentasan kemiskinan seyogyanya dilihat dalam tiga level tanggung jawab yakni tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab individu. Oleh karena itu secara filosofis, Partai Keadilan Sejahtera meyakini **prinsip-prinsip dalam upaya pengentasan kemiskinan** didasari pemaknaan sebagai berikut: **Pertama**, Setiap individu dikaruniai Allah SWT potensi ruh dan akal yang menjadikannya sebagai makhluk istimewa. Tuntutan ketiga potensi itu harus dipenuhi secara adil dan seimbang. Pemenuhan kebutuhan itu merupakan tanggung jawab pribadi sebagai makhluk yang dianugerahi fitrah keadilan secara lahiriah maupun batiniah, kemerdekaan serta keseimbangan; sebuah potensi dasar manusia untuk menjadi makhluk yang bermoral. Moralitas semacam itulah yang digunakan untuk memerangi segala bentuk kemiskinan, termasuk menjauhi pola hidup hedonistik. **Kedua**, Pada level *masyarakat*, diperlukan penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan berbagai bentuk kezaliman secara sinergis. Kezaliman dalam Islam merupakan sumber pembentukan marjinalisasi terhadap kaum miskin. **Ketiga**, pada level pemerintah, diperlukan instrumen untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang membebaskan setiap individu dan masyarakat dari ketertindasan hak-hak asasi dan anugerah hidup yang telah diberikan Allah SWT serta menggantinya dengan keadilan dan keseimbangan dalam realisasi kesejahteraan secara luas dan berkelanjutan.

Tiga solusi umum pengentasan kemiskinan (*work for the poor*) di Indonesia:

- 1. Memfokuskan Kebermanfaatan Pertumbuhan Ekonomi bagi Rakyat Miskin.** Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. *Pertama*, menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan-baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. *Kedua*, karena kemiskinan di Indonesia cenderung untuk meningkat, maka prioritas pada komponen pembangunan yang dapat

meningkatkan pendapatan serta distribusinya, diharapkan akan dengan cepat mengurangi angka kemiskinan sekaligus meredam kerentanan masyarakat jatuh dalam kemiskinan yang lebih dalam.

2. **Mendorong Kebermanfaatan Pelayanan Sosial bagi Rakyat Miskin.** *Pertama*, pelayanan sosial merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan pelayanan, dan bahkan proses pemerintahan. *Kedua*, ciri keragaman antar daerah pada umumnya dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap pelayanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah.
3. **Mendukung Kebermanfaatan Pengeluaran Pemerintah bagi Rakyat Miskin.** *Pertama*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. *Kedua*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

Prioritas kebijakan menuju pembenahan masalah kemiskinan:

- a. *Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil:* Kekuatan dasar ekonomi seyogyanya dibangun dengan berbasis pada sektor riil. Fokus pembangunan pada sektor riil bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tujuan akhir penurunan jumlah penduduk miskin, sekaligus tingkat kerawannya. Kebijakan disini meliputi: (i) menekan inflasi dan sukubunga pada kisaran yang wajar; (ii) memberi prioritas pada sektor-sektor yang membuka lapangan kerja yang luas; (iii) mendorong pembangunan sektor riil melalui stimulus fiskal dan moneter yang memadai.

- b. *Membenahi kualitas administrasi publik*: Birokrasi yang bersih, efisien, dan murah, adalah bentuk keberpihakan yang paling nyata bagi rakyat miskin. Kebijakan disini meliputi: (i) pembuatan Pelayanan Satu Atap; (ii) menghapus KKN dalam birokrasi.
- c. *Memperbaiki kualitas sektor pendidikan sebagai katalisator perubahan sosial*: Perbaikan dalam pendidikan semestinya berfokus pada pemberian kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi rakyat miskin. Kebijakan disini meliputi: (i) perbaikan fasilitas pendidikan dasar; (ii) perbaikan kesejahteraan guru, peningkatan kualitas guru termasuk prioritas menjadi PNS bagi tenaga bantu; (iii) beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu. (iv) investasidalam buku pelajaran serta bahan mengajar di kelas untuk memperbaiki kualitas pengajaran. (v) investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah pertama dan pelatihan ketrampilan di kalangan masyarakat miskin, sembari terus memperbaiki mutu dan efisiensi sekolah dasar.
- d. *Memperbaiki kualitas sektor kesehatan sebagai faktor pendukung utama produktivitas*: Perbaikan sektor kesehatan akan menurunkan tingkat kesakitan dan menaikkan produktivitas masyarakat miskin. Kebijakan disini meliputi: (i) investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu fasilitas kesehatan dasar (pemerintah maupun swasta) dan akses terhadap pelayanan kesehatan pada tingkat yang lebih tinggi; (ii) perbaikan mutu layanan pusat-pusat kesehatan (Puskesmas) yang terfokus pada masalah sistematis dalam manajemen tenaga kesehatan, kesejahteraan tenaga media termasuk prioritas menjadi PNS bagi tenaga bantu; serta peninjauan kembali struktur insentif di dalam sektor kesehatan.(iii) melakukan investasi dalam pelatihan tenaga paramedik dan bidan swasta (maupun pemerintah) terutama mereka yang melayani wilayah terpencil. (iv) program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan memastikan PT Askes memiliki struktur insentif yang tepat untuk mensosialisasikan skema asuransi kesehatan baru dan untuk melayani masyarakat miskin.

- e. *Memperbaiki sistem pentargetan dari program perlindungan sosial*: Kebijakan pendataan masyarakat miskin meliputi: (i) perbaikan definisi kemiskinan dari BPS; (ii) sensus kemiskinan secara periodik; (iii) pengembangan sistem identifikasi orang miskin yang bersifat *community-based targeting* dan *self-targeting*. Untuk mencapai langkah tersebut hendaknya dilandasi pemahaman yang lengkap atas kemiskinan. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income poverty*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Mengarahkan seluruh kebijakan pemerintah pada pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional yang paling utama.
- b) Mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil.
- c) Membuka dan membantu akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi sebesar-besarnya.
- d) Membangun keberpihakan institusi keuangan dan kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sektor usaha kecil-mikro.
- e) Memberdayakan masyarakat miskin dengan membuka akses yang seluas-luasnya atas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- f) Mengarahkan seluruh kebijakan pemerintah untuk lebih

memprioritaskan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan dan masyarakat nelayan di pesisir, tanpa mengabaikan pengentasan kelompok-kelompok marjinal di perkotaan.

- g) Membangun sistem perlindungan sosial yang responsif, efektif serta *well targeted*.

7.5.4. Investasi dan Infrastruktur

Investasi dan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi tanpa mengabaikan strategi industrialisasi nasional untuk itu kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel harus dibangun.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa investasi dan infrastruktur adalah penting dan menjadi keniscayaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi tanpa mengabaikan strategi industrialisasi nasional.

- a. Membangun kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel
Terlepas dari peranannya yang sangat penting, secara menyedihkan, investasi tidak memiliki kelembagaan yang jelas. Kebijakan disini meliputi: (i) membentuk Dewan Investasi Nasional yang terdiri dari instansi lintas sektoral-bidang yang bertanggungjawab langsung ke Presiden; (ii) mendorong BKPM sebagai agen promosi investasi; (iii) membentuk *blue-print* investasi nasional yang memperhatikan *national interest*, strategi industrialisasi, dan pemerataan pendapatan antar wilayah.
- b. Reformasi regulasi dan kelembagaan untuk iklim investasi yang kondusif
Untuk menciptakan iklim investasi nasional yang lebih baik, dibutuhkan reformasi yang signifikan. Kebijakan disini meliputi: (i) pembuatan Pelayanan Satu Atap; (ii) reformasi Ditjen Pajak dan Bea Cukai; (iii) mendukung revisi UU Perpajakan, Bea-Cukai,

Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan *national interest*, strategi industrialisasi, dan pemerataan pendapatan antar wilayah.

- c. Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur
Peran swasta penting untuk mengakselerasi penyediaan infrastruktur mengingat keterbatasan pemerintah. Kebijakan disini meliputi: (i) memfasilitasi swasta terutama dalam penyediaan tanah dan meningkatkan dukungan perbankan untuk investasi infrastruktur; (ii) mendorong infrastruktur *mass-rapid transportation* di kota-kota besar, terutama Jawa-Bali, bukan jalan tol; (iii) mengatasi hambatan-hambatan di daerah.
- d. Memperbaiki efisiensi dan fokus penyediaan infrastruktur oleh pemerintah
Pemerintah harus berfokus pada pembangunan infrastruktur penting dimana swasta tidak berminat (*non-commercially viable*). Kebijakan disini meliputi: (i) pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan; (ii) pembangunan infrastruktur pesisir; (iii) pembangunan infrastruktur kesehatan-sosial seperti sanitasi dan pengolahan sampah.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Membangun kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel.
- b) Memberikan dukungan regulasi dan mendorong reformasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk iklim investasi yang kondusif
- c) Mendorong partisipasi swasta yang seluas-luasnya dalam penyediaan infrastruktur
- d) Memperbaiki efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik untuk infrastruktur.

7.5.5. Perbankan dan Finansial

Membangun sektor perbankan dan finansial agar memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional dengan tetap menegakkan aspek keadilan dan mengedepankan pendekatan hukum dalam

penyelesaian kasus-kasus kejahatan perbankan.

Hampir satu dasawarsa setelah krisis ekonomi, sektor keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan. Oleh sebab itu wajar bila perhatian utama dalam menstabilkan perekonomian nasional dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Namun, bukan berarti agenda reformasi sektor keuangan ditinggalkan karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Perbaikan sistem perbankan juga harus di dukung dengan sistem keuangan non perbankan melalui agenda reformasi sektor keuangan, dengan tiga konsentrasi utamanya, yaitu memperbaiki akses ke jasa keuangan, mengurangi biaya jasa keuangan, dan memperbaiki stabilitas sistem keuangan.

Restrukturisasi perbankan telah berjalan selama sembilan tahun semenjak tahun pertama Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kita tidak mengingkari bahwa program tersebut telah menampakkan hasil yang nyata. Hanya saja dalam tahap pelaksanaannya menyerap dana dan *social costs* (biaya sosial) yang sangat besar. Pasca berakhirnya kerjasama pemerintah dengan IMF, Indonesia telah memiliki pondasi perbankan yang lebih kuat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sistem perbankan dan finansial yang kokoh tidak akan banyak berarti bila tidak terintegrasi dengan sektor riil.

Kehidupan perbankan hanyalah cermin kehidupan sektor riil dan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, sektor riil yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan produktivitas nasional harusnya ikut bergairah pula bila sektor perbankan telah kembali stabil. Nyatanya, saat ini kehidupan perbankan ternyata tidak dapat dilepaskan dari semakin beratnya pemerintah membayar bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang merupakan bagian dari pengeluaran di dalam APBN.

Dalam dunia perbankan, sampai bulan November 2006 total aset perbankan meningkat menjadi Rp. 1.635T, tetapi kredit hanya mampu bertambah Rp 80,3 T (10,7%), sementara keseluruhan kredit perbankan mencapai Rp 808,4T. Peningkatan DPK sebesar Rp. 123 T (10,9%) secara kumulatif menjadi Rp 1.251T. CAR

mampu bertahan ke level yang cukup tinggi yaitu sebesar 20%. Tetapi di sisi yang lain SBI pada penutupan 2006 menjadi Rp 207,4T padahal pada tahun 2005 hanya Rp 72,2 T bahkan pada akhir 2007 kalau tidak ada kebijakan yang berubah akan menyentuh angka Rp 300T sehingga sangat membebani negara dalam hal bunga karena uang SBI ini menjadi uang yang menganggur.

Dalam negara kita, berdasar konstitusi pemain ekonomi di sektor riil kita adalah BUMN, Swasta dalam negeri/asing, UMKM dan Koperasi. Salah satu kebutuhan bagi sektor riil untuk bisa berkembang adalah dukungan pendanaan, terutama dalam jangka panjang. Permasalahannya, pada tahun 2005 hampir 80 persen aset keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan. Dan perbankan umumnya tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan keuangan sektor riil karena pertimbangan resiko. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan alternatif sumber keuangan lain, yaitu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kebijakan ekonomi kedepan harus mulai memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yaitu pasar modal, pasar obligasi, reksadana, dana pensiun, asuransi, sewa guna usaha dan modal ventura.

Partai Keadilan Sejahtera memandang sektor perbankan dan finansial memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional terutama dalam menciptakan stabilitas moneter (inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga perbankan). Karena itu Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk membangun sektor perbankan dan finansial agar memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis. Akan tetapi, perkembangan sektor perbankan juga harus mampu menggerakkan sektor riil. Untuk itu, PKS menawarkan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

Pertama, melanjutkan reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional. Kebijakan disini meliputi: (i) melakukan transformasi budaya operasi perbankan yang bertumpu pada maksimisasi profit kepada produktivitas masyarakat perbankan melalui pertumbuhan

perbankan nasional yang berkualitas dengan bertumpu pada pertumbuhan sektor riil dan mencegah ketimpangan struktur ekonomi; (ii) penciptaan sebuah struktur perbankan nasional yang terkonsolidasi namun bukan terkonsentrasi (*consolidated but not concentrated*) dengan tujuan utama untuk memberikan kebijakan yang adil (*fairly policies*) bagi seluruh *stakeholders* perbankan dan menghasilkan praktik perbankan yang sehat; (iii) mewujudkan peran entitas bank sebagai *the agent of development* dengan menolak penjualan saham mayoritas bank BUMN kepada kepemilikan tunggal swasta asing. (iv) mengembangkan sistem perbankan syariah serta sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan dan sistem keuangan nasional yang potensial.

Kedua, membangun sistem regulasi dan monitoring sektor perbankan dan finansial yang efektif. Kebijakan disini meliputi: (i) mewujudkan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung fungsi pengawasan dan otoritas Bank Indonesia yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun; (ii) mendorong penciptaan praktik bisnis perbankan yang *prudential* dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG), *benchmark* atas standar internasional untuk sistem akuntansi dan auditing perbankan, syarat-syarat akuntabilitas, transparansi dan *disclosure* yang ketat, dan pelarangan praktik-praktik finansial tercela seperti pemberian kredit kepada kroni, *insider trading*, dan *money laundering*; (iii) penyediaan perangkat hukum, regulasi dan pengawasan yang memadai atas institusi keuangan mikro dan institusi keuangan non-perbankan dengan meratifikasi dan menerapkan UU Keuangan Mikro.

Ketiga, membangun jaring pengaman sistem keuangan dan mengakselerasi perkembangan institusi keuangan non-perbankan. Kebijakan disini meliputi: (i) memperkuat kerangka regulasi dan perundangan *early warning system* jaring pengaman sistem keuangan nasional guna mengantisipasi krisis keuangan; (ii) memperkuat payung hukum dan penataan institusi keuangan non-perbankan (LKNB) untuk berkontribusi optimal dalam struktur perekonomian nasional; (iii) mengukuhkan peran utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana-dana masyarakat dalam pendanaan sektor produktif.

7.5.6. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah harus mendapat peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh sebagai bagian integral dari sistem fiskal nasional.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Ekonomi Syariah mampu memberikan kontribusi yang strategis dalam memberikan solusi permasalahan ekonomi nasional. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Ekonomi Syariah harus mendapat peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

- a. Membangun sistem dan institusi *zakat dan wakaf* yang kokoh
 Perlu sebuah terobosan dalam mengatasi terbatasnya sumber – sumber keuangan negara yang diperoleh secara konvensional, dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Zakat dan Wakaf merupakan solusi dari mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu, membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh adalah sebuah keharusan. Kebijakan disini meliputi: (i) Memperkuat peraturan dan perundang-undangan mengenai Zakat dan Wakaf agar keberadaan Zakat dan Wakaf menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional ; (ii) Menjadikan Zakat dan Wakaf sebagai salah satu sistem fiskal dan keuangan negara yang utama, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi ketentuannya ; (iii) Memperkokoh institusi Zakat dan Wakaf yang profesional, transparan, mandiri dan integratif dengan sistem keuangan lainnya.
- b. Mengembangkan sistem dan institusi finansial syariah yang stabil
 Peran dari sistem dan institusi keuangan syariah akan memainkan peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional kedepan. Kebijakan disini meliputi: (i) Merealisasikan payung hukum bagi sistem dan institusi keuangan syariah yang komprehensif ; (ii) Membangun infrastruktur sistem keuangan syariah yang kuat dan mandiri;

- (iii) Memperbesar *market share* institusi keuangan syariah secara nasional.
- c. Merintis usaha pembentukan Blok Perdagangan Negara-Negara Islam
 Kurangnya kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan antar sesama negara islam selama ini, mengakibatkan lemahnya nilai tawar negara islam dimata internasional. Indonesia harus menjadi pionir dalam merintis usaha pembentukan blok perdagangan negara-negara Islam. Kebijakan disini meliputi: (i) Memainkan peran aktif dalam organisasi negara-negara Islam (OKI, IDB, dll) ; (ii) Mengalihkan aktifitas ekspor dan impor untuk beberapa komoditas tertentu kepada negara-negara Islam; (iii) Menggunakan mata uang tunggal (*single currency*), dinar emas (*gold dinar*) dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, dengan negara - negara islam.
- d. Mengembangkan pembiayaan luar negeri berbasis skim syariah
 Pembiayaan luar negeri berbasis skim syariah, adalah salah satu solusi dalam mengatasi ketergantungan terhadap skim konvensional yang berbasis kapitalis selama ini. Kebijakan disini meliputi: (i) Mengalihkan sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan (hutang luar negeri) kepada lembaga-lembaga donor Islam dan negara - negara Islam; (ii) Merintis skim syariah dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri terutama dari negara-negara Timur Tengah; (iii) Mengurangi penggunaan pembiayaan pembangunan, yang selama ini berasal dari lembaga dan negara donor yang menggunakan skim berbasis bunga.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Membangun sistem dan institusi *zakat* dan *wakaf* yang kokoh sebagai bagian integral dari sistem fiskal nasional.
- b) Mengembangkan sistem dan institusi finansial syariah yang stabil dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.
- c) Memberi dukungan kebijakan dan kelembagaan untuk tumbuh kembangnya ekonomi dan bisnis syariah.
- d) Merintis usaha pembentukan Blok Perdagangan Negara-Negara Islam dan penggunaan mata uang dinar emas untuk transaksi

komersial internasional untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dan meminimalisir resiko nilai tukar.

- e) Mengembangkan pembiayaan luar negeri berbasis skim syariah diversifikasi dan sekaligus meminimalisir resiko utang luar negeri.***

7.5.7. Industri, Iptek, BUMN, dan Perdagangan

Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa melalui visi industri berbasis SDA, kebijakan transfer teknologi, dan pengembangan riset.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa lemahnya daya saing ekonomi nasional tidak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan oleh strategi sektor industri, pengelolaan BUMN dan kebijakan perdagangan. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa serangkaian kebijakan dan pembenahan di sektor ini sepatutnya mendapat prioritas, al.:

- a. Membangun daya saing industri nasional
Salah satu usaha yang harus dilakukan untuk mampu bersaing secara global adalah membangun daya saing industri nasional. Kebijakan disini meliputi: (i) Memangkas setiap peraturan dan kebijakan yang akan menghambat terciptanya daya saing industri nasional; (ii) Memprioritaskan pengembangan kepada sektor-sektor industri yang terkait erat dengan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, dsb.), maupun sumber daya manusia; (iii) Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengembangan industri nasional yang memiliki daya saing tinggi.
- b. Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern
Diperlukan langkah strategis untuk menyiapkan industri nasional sebagai basis bagi perekonomian nasional. Salah satunya dengan membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern. Kebijakan disini meliputi: (i) merumuskan *blue print* rencana pembangunan industri jangka

pendek, menengah dan panjang yang terintegrasi satu dengan yang lainnya secara komprehensif; (ii) menyusun strategi pembangunan nasional yang mengarah kepada pembangunan industri jangka panjang yang kokoh dan modern; (iii) melibatkan seluruh masyarakat terutama masyarakat industri untuk mendukung visi industri jangka panjang yang kokoh dan modern.

- c. Menghilangkan monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak

Salah satu bentuk kebijakan yang akan menghambat terbentuknya kekuatan industri, perdagangan dan BUMN adalah praktek monopoli dan oligopoli yang merugikan masyarakat. Kebijakan disini meliputi: (i) memperkuat keberadaan lembaga pengawasan persaingan usaha; (ii) menegakkan supermasi hukum dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi; (iii) membangun infrastruktur usaha yang sehat dan dinamis agar tercipta iklim yang kondusif.

- d. Menjadikan BUMN-BUMD strategis sebagai agen pembangunan
- Keberadaan BUMN-BUMD yang selama ini menjadi sapi perahan telah menjadikan BUMN-BUMD sebagai beban pembangunan. Untuk itu diperlukan strategi untuk menjadikan BUMN - BUMD sebagai agen pembangunan yang strategis. Kebijakan disini meliputi: (i) membuat blue print pengembangan BUMN-BUMD strategis; (ii) menyetatkan BUMN/BUMD terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum dan strategis; (iii) menghilangkan praktek-praktek penyimpangan yang akan menghambat pengembangan BUMN-BUMD menjadi aset pembangunan yang strategis.

- e. Mendorong perdagangan internasional yang adil dan perdagangan domestik yang bebas

Persaingan global yang semakin kompetitif telah menjadikan semua negara harus berbenah untuk mampu bersaing, baik secara global maupun domestik. Diperlukan sebuah usaha untuk mendorong perdagangan internasional yang adil dan perdagangan domestik yang bebas. Kebijakan disini meliputi: (i) berperan aktif dalam setiap forum dan lembaga internasional untuk menyuarakan agar kesepakatan perdagangan bebas internasional berlangsung secara adil dan proporsional bagi negara berkembang ; (ii) mempersiapkan diri dengan

serangkaian kebijakan yang akan mendorong perdagangan domestik tumbuh dengan sehat dan mampu bersaing; (iii) memberlakukan insentif untuk melindungi perdagangan domestik secara proporsional.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Membangun daya saing industri nasional dengan menghilangkan inefisiensi sektor publik, peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan kebijakan perburuhan yang kondusif, serta kebijakan harga energi dan telekomunikasi yang kompetitif.
- b) Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa melalui visi industri berbasis SDA, kebijakan transfer teknologi, dan pengembangan riset di LPND Ristek maupun swasta.
- c) Pengokohan struktur industri melalui pengembangan kluster industri dan perbaikan sistem inovasi nasional dan daerah.
- d) Menyusun visi dan *blue print* Indonesia *Incorporated* dimana pemerintah dan dunia usaha seiring-sejalan dan bahu-membahu membangun perekonomian nasional yang tangguh dengan dunia usaha sebagai pilar utama.
- e) Mendorong pertumbuhan industri pertahanan melalui optimalisasi pemanfaatan Iptek.
- f) Mengembangkan kemitraan (*partnership*) usaha.
- g) Menghilangkan monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak
- h) Menjadikan BUMN-BUMD strategis sebagai agen pembangunan yang profesional dan kuat dengan merubah budaya organisasi, menghapus KKN dan mengakhiri salah urus dalam pengelolaan BUMN-BUMD.
- i) Mendorong perdagangan internasional yang adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan kepentingan nasional yang lebih luas.
- j) Mendorong perdagangan domestik yang bebas dalam bingkai negara kesatuan untuk peningkatan efisiensi dan kesejahteraan nasional.***

7.5.8. Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri merupakan sektor ekonomi fundamental yang menjadi tulang punggung bangsa untuk menopang pembangunan di berbagai sektor yang lain.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri merupakan sektor ekonomi fundamental yang menjadi tulang punggung bangsa untuk menopang pembangunan di berbagai sektor yang lain. Dengan demikian komitmen dan keberpihakan untuk membangun sektor tersebut menjadi prioritas penting. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri harus mendapatkan prioritas kebijakan dan program pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional.

a) Memantapkan ketahanan, keamanan dan kemandirian pangan.

Ketahanan, keamanan dan kemandirian pangan merupakan pilar utama bagi kemandirian bangsa. Fokus dari kebijakan ini adalah untuk mencapai kecukupan pangan nasional dan kemampuan mencukupi dari produksi bangsa sendiri. Kebijakan ini meliputi: (i) mempertahankan dan meningkatkan produksi beras dalam negeri untuk mencapai target ketersediaan 100 persen dari kebutuhan domestik; (ii) meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan melalui pengembangan peternakan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM; (iii) melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras; (iv) revitalisasi fungsi bulog sebagai badan penyangga kecukupan pangan dan departemen pertanian sebagai akselerator.

b) Revitalisasi kelembagaan sosial ekonomi di tingkat petani dan nelayan untuk mengembangkan usaha berbasis kolektif.

Untuk mendorong pembangunan pertanian dan kelautan, revitalisasi kelembagaan sosial ekonomi di tingkat petani dan nelayan menjadi suatu keniscayaan. Fokus dari kebijakan ini

adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha berbasis kolektif di tingkat petani dan nelayan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Kebijakan ini meliputi: (i) melindungi dan mendukung asosiasi-asosiasi dan LSM petani dan nelayan dengan pemberian bantuan teknis dan kerjasama program; (ii) peningkatan akses petani dan nelayan kepada sumber-sumber modal mikro; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/USP petani dan nelayan; (iv) mendorong pertumbuhan klaster-klaster agroindustri yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis.

- c) Mengembangkan sistem usaha agroindustri terpadu hulu-hilir dan mengembangkan kemitraan (*partnership*) usaha dalam agrobisnis.

Sistem usaha terpadu hulu-hilir dan kemitraan usaha menjadi pilar penting untuk terjadinya modernisasi dan industrialisasi di sektor pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri. Fokus kebijakan ini adalah untuk mengokohkan fundamental ekonomi bangsa sekaligus meningkatkan produktivitas nasional. Kebijakan ini meliputi: (i) pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah; (ii) peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan; (iii) pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani, serta infrastruktur perdesaan lainnya; (iv) peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan; (v) pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil; (vi) peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan (vii) pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan

mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha

- d) Penegakan reforma-agraria untuk petani gurem dan buruh tani serta reforma-aset untuk nelayan.

Reforma-agraria untuk petani gurem dan buruh tani serta reforma-aset untuk nelayan sangat penting untuk mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani nelayan. Kebijakan disini meliputi: (i) sertifikasi aset petani dan nelayan yang belum legal; (ii) mendorong pembagian tanah-tanah negara yang potensial dan mungkin di optimalkan; dan (iii) memberikan aset produktif untuk petani dan nelayan.

- e) Perlindungan terhadap perdagangan internasional produk pertanian dan perikanan melalui kebijakan promosi dan proteksi.

Kebijakan disini meliputi: (i) peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial; (ii) fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan seperti dumping, subsidi dan safeguard; dan (iii) peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional, bilateral dan pendekatan komoditi.

- f) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan, terutama petani dan nelayan skala kecil dan mikro.

Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan, sangat penting untuk mendukung ketahanan, keamanan dan kemandirian pangan nasional. Fokus dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan disini meliputi: (i) revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan; (ii) menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif; (iii) membangun *delivery system* dukungan pemerintah untuk sektor pertanian dan kelautan; (iv) meningkatkan skala perusahaan yang dapat

meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan; dan (v) peningkatan kemampuan/kualitas SDM.

- g) Meningkatkan keunggulan komparatif Indonesia pada komoditas-komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan unggulan.

Kebijakan disini meliputi: (i) pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pendekatan kewilayahan terpadu, sehingga akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, serta lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah; (ii) peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan; (iii) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (vi) fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan, dan industri yang berpotensi ekspor; dan (v) Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

- h) Mengembangkan pembangunan industri berbasis pertanian dan kelautan, termasuk *home industry*, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Pembangunan industri berbasis pertanian dan kelautan sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya. Kebijakan disini meliputi: (i) penataan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (ii) penataan industri pertanian, perikanan, dan kehutanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar; (iii) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (vi) fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan, dan industri yang berpotensi ekspor; dan (v) perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai

instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Memantapkan ketahanan, keamanan dan kemandirian pangan.
- b) Mengembangkan kemitraan (*partnership*) usaha dalam agrobisnis.
- c) Revitalisasi kelembagaan sosial ekonomi di tingkat petani dan nelayan untuk mengembangkan usaha berbasis kolektif.
- d) Mengembangkan sistem usaha agroindustri terpadu hulu-hilir.
- e) Penegakan reforma-agraria untuk petani gurem dan buruh tani serta reforma-aset untuk nelayan.
- f) Perlindungan terhadap perdagangan internasional produk pertanian dan perikanan melalui kebijakan promosi dan proteksi.
- g) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan, terutama petani dan nelayan skala kecil dan mikro.
- h) Meningkatkan keunggulan komparatif Indonesia pada komoditas-komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan unggulan.
- i) Mengembangkan pembangunan industri berbasis pertanian dan kelautan, termasuk *home industry*, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- j) Reorientasi pembangunan kelautan sebagai strategi kewilayahan untuk pemersatu bangsa kepulauan dan penopang ekonomi nasional.

7.5.9. Energi, Pertambangan, dan Pengelolaam SDA

Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan penggunaan sumber daya energi, intensifikasi pengelolaan sumber daya energi, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa potensi sektor energi, pertambangan dan SDA yang dimiliki Indonesia masih sangat strategis bagi pembangunan ekonomi. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa kebijakan pengelolaan dan

pengembangan sektor energi, pertambangan dan pengelolaan SDA harus selaras dengan kepentingan pembangunan nasional.

a. Mendorong ketahanan energi nasional

Setiap kebijakan terhadap sektor energi harus mendorong terbentuknya ketahanan energi nasional. Kebijakan disini meliputi: (i) Memperkuat aturan hukum dan perundang-undangan, untuk menjaga kondisi ketahanan energi nasional yang permanen; (ii) Mendorong penguasaan terhadap sektor energi berada ditangan pemerintah dengan melibatkan institusi domestik dalam pengelolaanya; (iii) Merumuskan strategi penggunaan dan pengelolaan energi alternatif sebagai kebijakan jangka panjang.

b. Menghapus krisis listrik

Lemahnya kebijakan pengelolaan energi listrik telah menjadikan indonesia rawan terhadap krisis listrik. Oleh sebab itu, diperlukan serangkaian kebijakan untuk menghapus krisis listrik dimasa yang akan datang. Kebijakan disini meliputi: (i) melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap perusahaan listrik negara; (ii) mencari bahan bakar alternatif bagi pembangkit listrik; (iii) melakukan sosialisasi terhadap penggunaan tenaga listrik, yang hemat, efektif dan efisien.

c. Revisi terhadap regulasi dan kelembagaan sektor pertambangan yang merugikan

Salah satu yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor pertambangan bagi pembangunan nasional adalah persoalan regulasi yang merugikan masyarakat dan kelembagaan sektor pertambangan yang belum mampu bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan secara komprehensif untuk merevisinya. Kebijakan disini meliputi: (i) merivisi setiap regulasi sektor pertambangan yang selama ini merugikan kepentingan ekonomi nasional; (ii) merumuskan aturan hukum dan regulasi sektor pertambangan yang lebih adil dan proporsional bagi pembangunan ekonomi nasional; (iii) menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur bagi pengembangan kelembagaan sektor pertambangan yang profesional dan mampu bersaing secara global.

d. Negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan

Salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan adalah alokasi pengelolaan sektor pertambangan yang selama ini dikuasai asing. Oleh sebab itu perlu kebijakan negoisasi ulang terhadap kontrak – kontrak pertambangan yang merugikan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan disini meliputi: (i) Melakukan kajian yang mendalam terhadap kontrak – kontrak pertambangan yang selama ini dilakukan; (ii) melakukan negoisasi ulang terhadap kontrak – kontrak pertambangan yang merugikan kepentingan ekonomi nasional; (iii) merumuskan strategi baru, dengan melibatkan kepentingan nasional dalam setiap sektor pertambangan yang startegis.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan penggunaan sumber daya energi, intensifikasi pengelolaan sumber daya energi, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan., seperti energi nuklir, bio-fuel, dlsb.
- b) Menjamin ketersediaan listrik melalui perbaikan sistem tarif, perbaikan infrastruktur listrik nasional dan mendorong usaha pengembangan sumber listrik alternatif yang murah, terbarukan, dan ramah lingkungan.
- c) Revisi terhadap regulasi dan kelembagaan sektor sumber daya alam yang merugikan negara dan masyarakat luas.
- d) Negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan negara dan masyarakat luas.***

7.5.10. Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi

Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi sebagai wujud perhatian dan perlakuan yang adil bagi mereka

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa keberadaan UKMK adalah cermin nyata kehidupan sebagian besar rakyat negeri ini yang memiliki kontribusi besar dalam nilai tambah perekonomian,

penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa UKMK harus mendapat perhatian dan perlakuan yang adil dalam rangka mendorong daya saing dan kemajuan mereka.

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sehat bagi seluruh pelaku ekonomi
Perlakuan yang sama dan memudahkan dunia usaha adalah penting bagi tumbuh kembang-nya UKMK. Birokrasi yang ramping, efisien dan bersih dari KKN adalah keberpihakan yang paling berharga bagi UKMK. Kebijakan disini meliputi: (i) pembuatan Unit Pelayanan Terpadu untuk kemudahan perizinan dan pendaftaran usaha; (ii) pajak yang ringan dengan prosedur yang sederhana; (iii) kejelasan tata ruang dan wilayah; (iv) hukum persaingan usaha yang jelas; (v) kemudahan prosedur dan pembiayaan ekspor; (vi) menghapus korupsi dan pungutan-pungutan liar yang merugikan UKMK.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK
Keterbatasan modal, skala produksi, dan teknologi seringkali membuat UKMK sulit bersaing dengan usaha besar. Dibutuhkan intervensi berbasis mekanisme pasar untuk mendorong kemajuan UKMK. Kebijakan disini meliputi: (i) membangun pasar kredit bagi UKMK yang fleksibel dan murah, meliputi pembuatan Bank UKM, skema penjaminan pembiayaan mikro, dan memberi kepastian hukum bagi keuangan mikro melalui UU Keuangan Mikro; (ii) asistensi pada pembentukan sentra produksi, jaringan pemasaran, kemitraan, dan peningkatan teknologi produksi
- c. Membangun sistem untuk menumbuhkan wirausahawan baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Keahlian dan semangat wirausaha harus ditumbuhkan untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru. Kebijakan disini meliputi: (i) pendirian pusat-pusat pelatihan; (ii) mendorong kemitraan yang mencerminkan kepentingan bisnis pelaku UKM dan berbasis pada mekanisme pasar; (iii) mengembangkan pendidikan kewirausahawan baik melalui jalur formal maupun informal.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sehat bagi seluruh pelaku ekonomi yang memungkinkan setiap orang dapat bekerja dengan baik tanpa khawatir akan terjadi keberpihakan yang membuat satu pihak dapat mengambil jalan pintas atau melakukan praktek-praktek bisnis tercela diatas kerugian pihak lain.
- b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi.
- c) Membangun sistem untuk menumbuhkan wirausahawan baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberi kesempatan yang sama pada semua pihak dalam mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan dalam mengembangkan usaha yang mencakup informasi pasar, teknologi produksi, pembiayaan, dan akses pasar. ***

7.5.11. Ketenagakerjaan, SDM, dan Penciptaan lapangan kerja

Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi buruh dan bukan hanya dengan mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa ketenagakerjaan, SDM, dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting yang akan menjadi penentu pembangunan ekonomi bangsa dan bahkan menjadi pilar penting bagi kekuatan sebuah bangsa. Sistem ketenagakerjaan yang mampu memberikan insentif setiap anak bangsa untuk berkarya mutlak dibutuhkan, juga sistem pengembangan SDM nasional yang akan mengoptimalkan potensi nasional. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya juga dibutuhkan ditengah tingginya angka pengangguran yang telah membunuh potensi rakyat.

Masyarakat Indonesia harus memiliki daya saing tinggi, produktif

dan berkompetisi dengan masyarakat Asia dan dunia pada umumnya. Indonesia saat ini memasuki era AFTA (ASEAN Free Trade Area), sehingga dituntut untuk lebih bekerja keras dalam hal meningkatkan daya saing individu-individu yang ada. AFTA yang pada 2020 akan kita hadapi menuntut tanggung jawab lebih dari semua pihak. Kemudahan pihak luar untuk masuk dalam pasar tenaga kerja Indonesia akan menyulitkan penduduk Indonesia sendiri jika kita memang tidak siap menghadapinya. Daya saing harus diikuti oleh ketangguhan mental. Jiwa kewirausahaan harus ada dalam setiap diri individu. Mampu menciptakan lapangan kerja, tidak hanya mengharap adanya lapangan kerja, adalah suatu sikap yang harus dibangun. Di satu sisi, regulasi pun haruslah berpihak pada rakyat. Lapangan pekerjaan harus diciptakan pula oleh regulator.

Kondisi Indonesia saat ini dalam hal kualitas tenaga kerja masih harus ditingkatkan. Sebagaimana laporan world economic news tahun 2005, saat ini tenaga kerja Indonesia masih menyandang gelar tingkat kualitas dan produktivitas pada urutan ke-59 dari 60 negara yang disurvei. Beberapa hal yang terjadi di Indonesia adalah :

1. Demo buruh sebagai indikator ketidakpuasan, ketidakamanan maupun ketidaknyamanan dalam bekerja. Pada tahun 2005, jumlah jam kerja yang hilang karena pemogokan adalah 766.463 jam. Dan di tahun 2006 meningkat sekitar 7x lipat yaitu menjadi 4.665.685 jam.
2. Upah yang minim sebagai kurangnya apresiasi terhadap kerja tenaga kerja Indonesia. Yang banyak terjadi di Indonesia adalah perusahaan memberikan renumerasi / upah di bawah UMR dan bahkan terkadang tidak dibayarkan. Jika gaji saja yang menjadi haknya masih sangat sulit untuk didapatkan, apalagi hak-hak lain yang sifatnya tambahan.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum terstandarisasi. Isu K3 sudah menjadi isu yang hangat di luar negeri dan masih menjadi hembusan di dalam negeri.
4. Perhatian pada buruh migran yang belum optimal. Mereka yang oleh pemerintah dikatakan sebagai pahlawan devisa. Mereka seakan berangkat dengan semangat membara mengejar sejumlah rupiah namun pulang dengan sejuta luka,

bahkan terkadang hanya tinggal nama. Belum lagi pungutan liar berjenjang di dalam negeri yang menimpa mereka yang baru pulang ke Indonesia. Birokrasi yang rumit, tidak efisien dan efektif menjadi kendala utama dalam dunia usaha.

Sekarang sudah saatnya tenaga kerja dan sumber daya manusia di Indonesia di anggap sebagai elemen dari Investasi dan bukan elemen biaya. Karena keseriusan dalam hal menangani tenaga kerja dan sumber daya di Indonesia saat ini kelak akan berbuah manis ke depan.

Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa sistem ketenagakerjaan, sistem pengembangan potensi SDM nasional, serta penciptaan lapangan kerja harus mendapat prioritas kebijakan dan program dalam pembangunan ekonomi nasional.

- a) Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel.

Kebijakan ini di fokuskan dengan memperkuat keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia dan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja pada buruh, bukan dengan mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh. Kebijakan ini meliputi : (i) membentuk balai latihan kerja dengan pembinaan mental terintegrasi yang menyentuh masyarakat Indonesia; (ii) menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya, dimana lapangan kerja formal yang diciptakan didorong kearah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor; (iii) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, sistem *reward* dan *punishment*, keselamatan dan kesehatan kerja, PHK, serta memperbaiki aturan main lainnya; (iv) menciptakan kesempatan kerja melalui investasi sektor riil.

- b) Memberi perlindungan optimal untuk buruh migran dan informasi bagi calon buruh migran dengan dukungan regulasi dan kelembagaan yang kredibel.

Buruh migran telah memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional, untuk itu keberpihakan bagi mereka sangat penting. Sehingga diharapkan hak-hak, keamanan dan kenyamanan aktivitas mereka akan terjaga dan mendapat dukungan dari negara. Kebijakan ini meliputi : (i) menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja; (ii) regulasi yang ketat dan mengikat bagi badan penyalur tenaga kerja agar tercipta kredibilitas dan tanggung jawab yang penuh; (iii) mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa; (iv) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia buruh migran yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan; dan (v) mendorong perjuangan internasional untuk perlindungan buruh-buruh migran.

- c) Penciptaan skema jaminan bekerja untuk penciptaan lapangan kerja yang luas dan tersedia setiap saat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Ketersediaan lapangan kerja yang luas menjadi sangat penting ditengah angka pengangguran yang demikian tinggi. Hak bekerja harus dipandang kembali sebagai hak asasi bagi setiap anak bangsa. Kebijakan ini meliputi : (i) memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah; (ii) mendorong program pekerjaan yang dapat dilakukan secara umum atau padat karya; (iii) mendukung skema kredit mikro untuk pengembangan UKM baru; (iv) mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja yang luas.

- d) Meningkatkan kualitas SDM.

SDM merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu perencanaan dan pembenahan sistem pengembangan kualitas SDM nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan sasaran pembangunan bangsa. Kebijakan ini meliputi : (i) perbaikan sistem pendidikan nasional; (ii) meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi; (iii)

mengembangkan dan mendorong inovasi dalam berwirausaha; (iii) mendorong pengembangan riset; dan (iv) kolaborasi universitas-industri-pemerintah yang diiringi dengan sistem apresiasi.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan kenyamanan bekerja bagi buruh dan bukan hanya dengan mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh.
- b) Memberi perlindungan optimal untuk buruh migran dan informasi pasar bagi calon buruh migran dengan dukungan regulasi dan kelembagaan yang kredibel.
- c) Penciptaan skema jaminan bekerja untuk penciptaan lapangan kerja yang luas dan tersedia setiap saat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
- d) Meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan sistem pendidikan nasional, adopsi inovasi, pengembangan riset, dan kolaborasi universitas-industri-pemerintah yang diiringi dengan sistem apresiasi.

7.5.12. Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, dan Pembangunan Regional

Desain otonomi dan pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dengan membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan antar daerah.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa kesenjangan antar daerah di Indonesia adalah besar. Hal ini dapat diperbaiki melalui reformasi sistem desentralisasi fiskal dan perubahan fokus pembangunan regional. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa desain otonomi dan pembangunan daerah

harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

- a. Membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berkeadilan
Kesenjangan fiskal antar pemerintah lokal di Indonesia adalah besar. Dan sistem desentralisasi fiskal yang sekarang gagal mengatasi hal ini. Kebijakan disini meliputi: (i) mendistribusikan DAU secara lebih adil; (ii) mendorong prioritas nasional di daerah dengan memperbesar peranan DAK; (iii) memperjelas fungsi dan mekanisme alokasi dana dekonsentrasi.
- b. Mendorong daerah untuk membuat APBD yang transparan dan partisipatif
APBD seringkali dibuat tanpa debat publik yang memadai dan cenderung manipulatif. Kebijakan disini meliputi: (i) pembuatan mekanisme penyusunan anggaran partisipatif; (ii) mekanisme monitoring dan pelaporan APBD; (iii) mendorong *pro-poor budgeting* di tingkat lokal.
- c. Mereformasi sistem pembuatan regulasi di tingkat lokal
Pasca era otonomi daerah, perda-perda seringkali dibuat dengan mengabaikan dampaknya terhadap daerah itu sendiri maupun terhadap daerah lain. Kebijakan disini meliputi: (i) reformasi sistem pembuatan regulasi di tingkat lokal; (ii) membatasi pajak dan retribusi daerah yang membebani UKM dan rakyat miskin
- d. Mendorong kompetisi antar daerah untuk menarik investasi
Investasi di daerah cenderung menurun pasca otonomi daerah. Daerah harus dituntut memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menarik investasi. Kebijakan disini meliputi: (i) membuat mekanisme *reward-punishment* untuk menarik investasi; (ii) reformasi regulasi dan kelembagaan untuk peran daerah yang lebih besar dalam investasi.
- e. Menurunkan kesenjangan antar daerah dan memperkuat integrasi nasional
Kesenjangan antar daerah dapat ditekan dengan merubah fokus kebijakan pembangunan regional. Kebijakan disini meliputi: (i) mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar; (ii) akselerasi pembangunan daerah tertinggal, daerah terisolir, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui

pembangunan infrastruktur pedesaan dan pesisir, pembangunan SPBU untuk nelayan di daerah pesisir, dan pengembangan ekonomi lokal yang partisipatif.

Untuk itu, maka PK Sejahtera:

- a) Membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan antar daerah
- b) Mendorong daerah untuk membuat APBD yang transparan dan partisipatif demi terjaminnya keberpihakan anggaran pada kepentingan rakyat banyak
- c) Membuat mekanisme yang efektif untuk mendorong daerah membuat regulasi-regulasi secara bertanggungjawab dengan memperhatikan dampak regulasi pada perekonomian secara keseluruhan
- d) Mendorong kompetisi antar daerah untuk menarik investasi.
- e) Menurunkan kesenjangan antar daerah dan memperkuat integrasi nasional melalui akselerasi pembangunan daerah tertinggal, daerah terisolir, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. ***

7.5.13. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pementapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

Suramnya kondisi ekonomi nasional memerlukan penyelesaian tuntas. Harus ada langkah dan agenda yang kongkret. Rakyat tidak bisa terus ditelikung dengan problem ekonomi yang bertumpuk. Penumbuhan unit-unit usaha mandiri; pembelaan terhadap buruh, nelayan, petani, dan pedagang kecil; pembentukan balai-balai

latihan kerja; penumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah; dan pendayagunaan sumber daya alam yang menganggur merupakan agenda penting yang ditawarkan PK Sejahtera.

Negeri ini semakin sesak oleh para pengangguran, yang bersifat terbuka mencapai 9,13 juta orang dan yang setengah menganggur sekitar 28,9 juta. Mereka berada di kota dan desa. Jika tidak disalurkan, suatu saat akan meledak jadi bom waktu kerusuhan sosial. Maka, jalur usaha informal mesti difasilitasi sebagai suatu solusi, bukan malah ditekan. Walau dibenturkan dengan perkembangan investasi yang minus, tetapi menumbuhkan unit-unit usaha yang mandiri dapat memberikan peluang kerja bagi para penganggur.

Solusi parsial tidak cukup. Setiap anggota masyarakat, terlebih para pemuka bisnis, perlu memiliki wawasan ekonomi yang jernih; mengembangkan keahlian yang kompetitif; menumbuhkan etos kewirausahaan; membesarkan basis ekonomi keluarga; dan mengembangkan jaringan pengusaha yang solid. Hal itu didukung dengan persaingan yang sehat, infraskuktur keuangan yang memadai, dan penyederhanaan birokrasi. Pemerintah harus memberikan bantuan pemasaran, pembiayaan, informasi, manajemen dan teknologi serta ketersediaan bahan baku.

Setiap bangsa selalu menyisakan kaum marjinal. Dan di negara kita, buruh, nelayan, petani, dan pedagang kecil masuk strata ini. Mereka adalah penghasil produk subsisten. Ketiadaan posisi tawar membuat mereka harus mendapatkan manfaat ekonomis yang sangat rendah dari produk yang mereka hasilkan. Kondisi mereka di luar batas kebutuhan manusia normal. PK Sejahtera sudah jauh-jauh hari menjadi sahabat pendamping kaum marjinal, melakukan advokasi atas masalah yang mereka hadapi.

PK Sejahtera juga memberi perhatian besar soal peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Balai-balai latihan kerja adalah proyek yang turut didukung, agar para pekerja memiliki ketrampilan dan keahlian yang memadai, sehingga mereka diperlakukan secara sewajarnya – terutama ketika bekerja di negeri asing.

Indonesia negeri kaya, tetapi lahan perkebunan, hutan, tambang dan kelautan negeri ini masih banyak yang menganggur. Jika dioptimalkan, maka kesejahteraan masyarakat bisa ditopang dari salah satu potensi itu. Maka, pembatasan kepemilikan lahan, pencabutan perizinan atas lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan harus dilakukan, supaya kekayaan alam tidak dikuasai oleh segelintir perorangan.

Selanjutnya lembaga keuangan syariah harus dikembangkan. Dunia sudah menyaksikan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang berbasiskan riba terbukti gagal. Sebagian besar masyarakat sengsara. Saat ini Indonesia yang tidak jelas sistem ekonominya membuat sektor keuangan telah menjadi industri tersendiri. Nilai transaksi keuangan pada lingkup internasional jauh melebihi transaksi perdagangan sektor rielnya. Kondisi ini merupakan gambaran ekonomi yang artifisial (*buble economy*). Jika balon ekonomi meledak, krisis-krisis baru pun muncul beruntun.

Untuk membesarkan pangsa pasar lembaga keuangan syariah, PK Sejahtera bertekad di garis depan dalam menghidupkannya. Semestinya pemerintah harus peka terhadap tuntutan masyarakat yang sangat berharap pada institusi keuangan syariah seperti pengelolaan zakat dan waqaf, atau lembaga yang berorientasi profit seperti perbankan syariah, investasi syariah, dana reksa syariah, takaful syariah, dan bursa saham syariah.***

7.5.14. Perjuangan Petani

Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas. Memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.

Sebagai negeri agraris, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya pertanian, yakni lahan produktif yang luas (12 juta hektare/tahun) sebenarnya mampu mendukung swasembada pangan. Sumber daya petani amat besar, terdiri dari 20 juta keluarga tani, tenaga penyuluh, dan himpunan kerukunan tani.

Namun, kenyataannya Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia (2 juta ton/tahun), termasuk pengimpor kedelai (0,8 juta ton/tahun), jagung (1 juta ton/tahun), gandum (4,5 juta ton/tahun), dan gula (1,6 juta ton/tahun). Nilai tukar produk pertanian rendah, sedang pasar domestik dikuasai produsen asing, sehingga masyarakat petani terpinggirkan. Dengan lahan sempit, modal minim, teknologi tertinggal, dan akses pasar terbatas, maka posisi tawar kaum tani amat lemah. Lembaga tani yang mandul tak dapat mengakses kebijakan pemerintah.

Lemahnya kondisi petani Indonesia merupakan konsekuensi kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha besar dan membiarkan manuver tengkulak. Dalam diri petani sendiri terjangkit rendahnya profesionalisme dan semangat berjejaring. Lingkungan eksternal berpengaruh lewat gebyar hidup perkotaan, sehingga memancing arus urbanisasi dan gaya hidup konsumtivisme. Selain itu, permainan harga yang mengurangi pendapatan rutin setiap panen. Demikian pula faktor internasional menekan dengan suasana pasar bebas, politik dumping, dan pemberlakuan hak paten. Bila semua itu tak diantisipasi dengan arif mungkin terjadi kepunahan kaum tani domestik.

Sumber daya lahan dan populasi petani yang besar mungkin ditinggalkan, atau diserahkan kepada kekuatan kapitalis global. Jika itu terjadi, dampak kerusakan lingkungan dan keresahan sosial akan merebak. Pangan dan pertanian merupakan kebutuhan asasi manusia. Jika proses pengadaan pangan tidak diserahkan kepada petani domestik, maka kita akan bergantung kepada petani mancanegara.

Padahal petani sebagai penyedia pangan nasional berposisi sejajar dengan prajurit TNI/Polri, guru, dan pegawai negeri. Fungsi ketahanan pangan sama pentingnya dengan ketahanan sosial-politik lainnya, karena itu petani patut mendapat “gaji” (pendapatan) dan penghargaan memadai. Arah pembangunan pertanian mestinya berdasarkan kesejahteraan petani dan keadilan sistem pertanian, dengan perangkat undang-undang dan fasilitas kebijakan yang propetani.

Karena itulah, PK Sejahtera memelopori strategi perjuangan baru dalam rangka pemberdayaan petani, melalui konsolidasi sistem dan suprastruktur pertanian. Pembelaan pemerintah kepada petani dilakukan dengan **Pembaharuan Kebijakan Pertanian dan Pertanian (*land and agrarian policy reform*)** berupa: jaminan penguasaan lahan produktif, subsidi langsung, pembatasan impor pangan, kemudahan akses modal, dan jaminan keamanan resiko. Disamping itu juga dilakukan revitalisasi lembaga petani, pembenahan tata niaga yang berkeadilan, dan stabilitas harga berdasarkan kekuatan lumbung desa. Peran dan posisi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penjamin ketersediaan bahan pangan dan stabilisator harga pangan harus diawasi publik.

Pemosisian petani sebagai aktor pembangunan menghajatkan penumbuhan jiwa profesionalisme, dengan penguatan orientasi pasar dan peningkatan mutu produk. Selain itu, faktor strategis berupa kepastian pemilikan tanah dan hak permodalan harus dipenuhi dengan dukungan teknologi tepat guna dan jaringan distribusi. Kaum petani gurem mesti bersatu dengan membentuk syarikat pertanian yang kuat dan mandiri (*corporate farming*), sehingga mampu menembus kendala permodalan dan pemasaran.

Dalam mewujudkan cita-cita besar itu, PK Sejahtera telah melakukan program pembinaan komunitas petani secara langsung dengan prinsip keterpaduan, produktivitas, efektivitas, kemandirian, dan kelangsungan sumber daya daerah. Dukungan tak langsung diberikan dalam bentuk kemitraan usaha dengan mengelola jaringan koperasi konsumen (Nusa Sejahtera) yang membeli gabah petani, agar terangkat harganya. Program pendampingan dan advokasi kaum tani yang terlangggar haknya juga diprioritaskan.

7.5.15. Perjuangan Buruh

Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasar, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.

Kaum buruh yang berjumlah formal sekitar 12 juta orang selama ini menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan. Akses mereka terhadap kebijakan pemerintah amat lemah, posisi tawarnya di hadapan pengusaha juga rendah, bahkan sering hanya dijadikan komoditas politik belaka.

Secara sosial-ekonomi, buruh Indonesia dipandang berproduktivitas rendah, meskipun mereka telah memeras habis keringatnya. Sementara peluang kerja yang terbatas dan budaya industri yang belum tuntas membuat kegamangan massal di kalangan angkatan kerja baru (berjumlah 2 juta orang/tahun).

Kondisi buruh migran (4 juta orang jumlahnya) lebih memprihatinkan. Mayoritas mereka merupakan *non skilled labour*, yang bertugas pekerja kasar dan pembantu rumah tangga. Tidak ada aturan jelas yang melindungi hak mereka. Masalah sosial pun muncul di daerah pemasok buruh migran akibat keutuhan keluarga yang terganggu, dan kemungkinan kegoncangan sosial lebih luas.

Penyebab utama lemahnya posisi buruh tak lain kebijakan pemerintah yang pro-investor dengan mempropagandakan idiom tenaga kerja murah sebagai keunggulan tak proporsional. Pemerintah cenderung berpihak kepada para pengusaha dan pemilik modal yang kuat, terlihat misalnya dalam pendekatan keamanan terhadap upaya penyelesaian kasus perselisihan perburuhan.

Panjangnya meja birokrasi menjadi faktor utama terjadinya biaya siluman (*illegal bureaucratic cost*), baik secara langsung (berupa pungutan liar) maupun tak langsung (beking preman), yang pada gilirannya mengurangi jatah kesejahteraan buruh. Anggaran perusahaan yang terkuras oleh biaya siluman mencapai 40% lebih, sedang anggaran untuk kesejahteraan karyawan/buruh hanya kurang dari 8%. Ditambah lagi, kecurigaan berlebihan terhadap menguatnya eksistensi serikat buruh/pekerja dengan berbagai cap memojokkan: “komunis”, “radikal”, atau cap baru “teroris”.

Buruh kasar (*blue collar labour*) dan pekerja berdasi (*white collar labour*) sama saja nasibnya menjadi permainan para pengusaha dan pemilik modal, seperti dialami karyawan bank yang dilikuidasi atau BUMN yang didivestasi dan distop subsidiya. Karena itu tak ada jalan lain, PK Sejahtera mendorong solidaritas kaum buruh/pekerja dari berbagai lapisan sosial. Mari bergandeng tangan untuk memperjuangkan hak normatif dan menjamin masa depan yang lebih baik. Hubungan industrial antara buruh dan pengusaha harus ditata lebih seimbang dan berkeadilan.

Para pengusaha dan pemilik modal tak perlu takut, apabila buruh berdaya dan sejahtera. Karena keberdayaan dan kesejahteraan buruh berarti kelangsungan hidup perusahaan lebih pasti. Jangan memandang perusahaan sebagai entitas mati yang terdiri dari mesin dan robot belaka, melainkan perusahaan sebagai *living organization* yang terdiri dari manusia-manusia penggerak mesin dan pengolah bahan baku.

Kebijakan dasar PK Sejahtera mengawasi pemerintah dalam merancang sistem perburuhan yang lebih adil dan manusiawi, semuanya dilakukan secara partisipatif. Setumpuk peraturan harus dibenahi dengan perspektif baru dalam perburuhan, terutama UU Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk pula peraturan baru yang harus diintrodusir seperti RUU Penanaman Modal, RUU Pekerja Migran, dan RUU Pengupahan Nasional.

Sejak lama kader-kader PK Sejahtera menjadi pendamping setia buruh, baik dari kalangan bawah maupun menengah ke atas. Mendukung perjuangan mereka untuk memperoleh hak normatif dan jaminan kerja yang lebih manusiawi. Ikut aktif dalam advokasi berupa mediasi maupun upaya litigasi bagi berbagai kasus perselisihan perburuhan. Membina sosok buruh yang seimbang aktivitas kerja dan ibadah, membangun kemitraan dengan pengusaha, meningkatkan kualitas gerakan buruh, dan mendorong *prosperity non salary* (berupa zakat perusahaan atau koperasi karyawan). ***

7.5.16. Perjuangan Nelayan

Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.

Indonesia merupakan negara maritim besar, dimana tiga per empat wilayahnya berupa lautan, yakni 5,8 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Bentang kawasan dari ujung barat (Sabang) sampai timur (Merauke) setara dengan kawasan London (Inggris) hingga Baghdad (Irak). Bentang ujung utara (Kepulauan Satal) sampai selatan (Pulau Rote) setara dengan jarak dari negara Jerman (di benua Eropa) ke Aljazair (Afrika).

Lautan Indonesia mengandung potensi ekonomi yang amat kaya dan beragam. Kontribusinya terhadap *Gross National Product* (GDP) senilai US\$ 28 milyar atau 20% APBN pada tahun 1998. Angka itu lebih rendah dibandingkan Korea Selatan dengan panjang pantai hanya 2713 kilometer persegi dan memberikan kontribusi US\$ 147 milyar atau 37% anggaran negaranya. Nilai ekspor perikanan Indonesia US\$ 1,76 milyar (1998) dengan nilai ekspor rumput laut US\$ 45 juta. Sekali lagi, angka itu lebih rendah dibandingkan ekspor perikanan Thailand sebesar US\$ 4,2 milyar, walau panjang pantainya hanya 2600 kilometer persegi.

Sumber kelautan sebagian besar *renewable resources* berupa ikan demersal, pelagis, *sea weed* dan biota lainnya. Potensi lestari sumberdaya perikanan Indonesia ialah 6,18 juta ton per tahun, termasuk ikan demersal 1,78 juta ton, ikan karang konsumsi 75.000 ton, udang penaid 74.000 ton, lobster 4.800 ton, dan cumi-cumi 28.250 ton.

Pada saat ini, setidaknya terdapat 2 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan. Dengan asumsi, tiap keluarga nelayan beranggotakan 6 orang, maka terhitung 12 juta jiwa keluarga besar kaum nelayan. Kondisi mereka amat

memilukan. Pada tahun 2002, partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk tingkat SLTP baru mencapai 60% dan tingkat SLTA 30%. Kesehatan mereka juga buruk, banyak mengalami kekurangan gizi, infeksi saluran pernapasan, dan wabah diare akibat sanitasi buruk dan air bersih yang langka.

Ciri khusus warga nelayan memanfaatkan wilayah pantai dan pesisir sebagai faktor produksi dan bersosialisasi (*common property*). Padahal saat ini banyak kawasan pantai dan pesisir yang tercemari limbah. Jam kerja nelayan juga mengikuti siklus cuaca, rata-rata hanya bekerja 20 hari dalam sebulan. Selebihnya menganggur. Pekerjaan menangkap ikan di laut tentu penuh resiko, apalagi dalam cuaca buruk, sementara mereka tak punya jaminan sosial sama sekali. Sehingga kelangsungan hidup keluarga selalu terancam bahaya.

Kemiskinan nelayan disebabkan kurangnya akses modal, teknologi yang tertinggal, apalagi melawan nelayan asing yang serba modern. Peluang pasar yang terbatas karena produk tak berkualitas, disamping rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Populasi ikan tangkapan, terutama di Laut Jawa, semakin menurun. Sehingga daerah tangkapan (*fishing ground*) semakin jauh dari pantai, menyebabkan biaya operasional dan resiko lebih tinggi, sedang hasil tak memadai.

Kebijakan pemerintah menekan subsidi bahan bakar dan menaikkan harga jual solar membuat banyak kapal nelayan tak bisa melaut. Kalau terpaksa berlayar, maka biaya operasionalnya tak sebanding dengan hasil tangkapan. Pengaturan izin kepemilikan kapal terlalu longgar, sehingga kapal asing berbendera Indonesia dengan mudah beroperasi. Mereka menggunakan teknologi penangkapan ikan yang canggih, termasuk teknologi pasca panen yang lebih baik.

Untuk mengangkat derajat hidup nelayan, PK Sejahtera mendorong pembentukan serikat nelayan yang kuat dan berdaya. Serikat nelayan harus mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak-hak nelayan yang tersingkirkan. Akses modal, pemasaran, dan teknologi penangkapan serta pemrosesan ikan

diperjuangkan bersama. Pendidikan berbasis kelautan dan perikanan juga harus digencarkan, agar anak-anak nelayan dapat meningkatkan kualitas diri dan lingkungannya, serta menjadi pemacu masyarakatnya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Pekerjaan alternatif disamping menangkap ikan dapat dikembangkan. Pengolahan hasil laut menjadi bahan pangan dan kebutuhan praktis lain yang beraneka ragam, seperti kerupuk, minyak ikan, rumput laut yang berkhasiat medis, alat kecantikan dan sebagainya. Pengembangan produksi itu akan menghidupkan *home industry*, dan selanjutnya meningkatkan pendapat keluarga nelayan.

Dalam proses pendampingan, kader PK Sejahtera turut mengembangkan budaya nelayan yang bertanggung-jawab terhadap lingkungannya. Kebiasaan hidup boros dan malas harus disingkirkan, berganti dengan hidup hemat dan penuh disiplin, serta semangat kerja tinggi. Kita perlu menumbuhkan kebanggaan sebagai kaum nelayan, pelestari lingkungan laut dan penjaga wilayah perbatasan negara kepulauan.

Secara historik-kultural, kebijakan kembali ke laut (*back to the sea*) berarti reinvensi kejayaan bangsa. Masa emas Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak atau Banten yang berjaya di lautan dapat diwujudkan kembali. Tradisi perjuangan nenek moyang kita sebagai pelaut, yang berlayar sampai ke Pulau Madagaskar dan Tanjung Harapan di Afrika, jangan sampai pupus.

7.5.17. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional. Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.

Alam sering “murka” dengan bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 1997 hingga awal 2002 telah terjadi hampir 83 kasus banjir. Air bah menerjang beberapa kawasan pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Banjir bukan hanya mencabut tak sedikit nyawa anak bangsa., tetapi juga menyapu rumah, sekolah, jembatan, dan jalan yang dibangun pemerintah dengan biaya besar. Belum lagi hasil sawah, ladang, dan tambak hilang dibawa arus.

Bahkan, banjir menampar wajah negeri ini di hadapan dunia internasional. Jakarta, ibukota Indonesia, seperti berada di kubangan kerbau setiap musim hujan turun. Sementara, di musim kemarau, penduduknya berteriak kesulitan air. Kekeringan adalah ekspresi kemarahan alam yang lain atas bangsa ini.

Dua fenomena itu adalah bagian kecil dari masalah lingkungan di negeri ini yang akut. Hutan gundul, langit asap, sungai-sungai hitam tercemar, terumbu karang hancur. Semua itu terjadi karena keserakahan manusia mengeksploitasi alam dan melakukan pembangunan tak terencana, dengan nafsu dan arogansi sektoral. Padahal, pelestarian alam dan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan lainnya. Tidak mungkin dilakukan terpisah, apalagi dengan sistem tambal sulam.

Karena itu, mengintegrasikan pembangunan lingkungan hidup dengan pembangunan sektor lain menjadi suatu keharusan dalam tatapan PK Sejahtera. Ini adalah cara pandang yang universal. Cara pandang ini mencakup kepentingan lintas generasi, lintas teritorial, dan lintas kehidupan. Karena bumi itu satu, dan hingga kini bumi adalah satu-satunya tempat kita berdiri melangsungkan kehidupan, sehingga harus dilestarikan. Pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan bagi kesejahteraan umum, terutama masyarakat sekitar lokasi industri, bukan hanya dikuasai segelintir pemodal. Hak publik atas tanah untuk produksi dan tempat tinggal, air dan udara bersih, serta sumber kehidupan lainnya harus dipenuhi oleh pemerintah secara adil dan bertanggung-jawab.

PK Sejahtera menegaskan bahwa pada hakikatnya pembangunan lingkungan hidup ditujukan untuk memberi ruang yang lebih luas kepada rakyat mencapai hidup sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan dalam upaya merajut kebahagiaan beribadah kepada Sang Pencipta dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Karenanya PK Sejahtera berkeyakinan bahwa komitmen politik pemerintah, koordinasi antar komponen terkait, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum bagi segala pelanggaran lingkungan adalah kata kunci bagi pelaksanaan upaya pembangunan lingkungan hidup.

PK Sejahtera melihat bahwa masalah utama lingkungan hidup di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum oleh aparaturnegara, tidak adanya koordinasi antara sektor pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat, negara, dan dunia internasional. Pihak mancanegara seringkali mengancam kerusakan lingkungan di Indonesia, tetapi terus menikmati – sambil mendukung diam-diam – pencurian kayu ilegal, pencurian ikan dan penghancuran terumbu karang, serta eksploitasi pertambangan yang mencemari lingkungan sekitar dan merusak hutan lindung.

Prioritas masalah ditujukan bagi penyediaan air bersih untuk seluruh penduduk di segenap pelosok desa dan kota. Kebijakan privatisasi sumber air tak boleh mengorbankan kepentingan publik yang paling asasi. Selanjutnya, pemeliharaan hutan dan daerah resapan air sebagai sumber kehidupan. Kebersihan sungai, pantai dan laut juga mesti dijaga, antara lain dengan mekanisme pengelolaan limbah terintegrasi. Pada akhirnya, keanekaragaman hayati (spesies) di daratan dan lautan merupakan aset nasional yang tak ternilai harganya.

Karenanya, PK Sejahtera memberi solusi bahwa lingkungan hidup akan lestari, jika pembangunan dilakukan secara integral dan berkelanjutan, serta didukung oleh partisipasi total seluruh masyarakat dan tanggung-jawab internasional. Dengan begitu, alam akan kembali bersahabat dengan bangsa ini. Penuh berkah. Tongkat ditanam pun jadi tanaman.

BAB 8

PLATFORM BIDANG SOSIAL-BUDAYA

Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewedahi dan membantu proses pembangunan yang kontinyu.

FILOSOFI	Kesederajatan Sosial dan Kemajemukan Budaya				
VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat				
MISI	Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa				
STRATEGI	Meningkatkan Kualitas Hidup Warga dan Mewujudkan Harmoni Sosial dalam Lingkungan Budaya yang Maju				
LANGKAH-LANGKAH UTAMA	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu	Pelayanan Kesehatan Paripurna	Penanaman Nilai Kemandirian dan Kesetiakawanan Sosial	Perumusan Gerakan Kebudayaan yang Maju
LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG	Pembinaan Keluarga Sakinah dan Produktif				
	Pengembangan Kemitraan antar Jenis				
	Pengembangan Kepeloporan Pemuda				
	Pengembangan Kreativitas Seni dan Budaya yang Populis dan Relijius				
	Pengembangan Da'wah yang Toleran dan Moderat				
Fundamental Sosbud	Kepribadian Yang Tangguh		Kultur Masyarakat yang Berdisiplin	Social Trust yang Memadai	Relijiusitas dan SPpiritualitas yang Tinggi

Kerangka Platform Sosial-Budaya

8.1 PENDAHULUAN

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi seperti yang selama ini cenderung dominan dalam wacana pengambilan kebijakan. Seakan-akan berbagai persoalan itu akan sirna, apabila pembangunan ekonomi berlangsung sukses dan pertumbuhan terus meningkat. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tak diiringi dengan pemerataan akan menimbulkan dampak buruk berupa potensi konflik antara daerah yang makmur dan terbelakang, atau antara golongan masyarakat berkecukupan dan mereka yang tersingkirkan. Perkembangan ekonomi yang tidak diikuti dengan penguatan institusi politik dan budaya juga akan menyebabkan kegoncangan sosial tersendiri.

Persoalan bangsa juga tak dapat didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka, dengan bayangan stabilitas politik dan keamanan akan memperlancar seluruh agenda pembangunan lainnya. Karena penekanan yang berlebihan pada aspek politik-keamanan seringkali mengorbankan kebebasan warga dan daya kreasi publik, sehingga stabilitas politik yang muncul hanya bersifat semu dan artifisial, sedangkan ketidakpuasan serta semangat perlawanan bergejolak di bawah permukaan. Hal itu menjadi ancaman jangka panjang yang lebih serius, dan dapat menghancurkan capaian pembangunan saat ini.

Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama. Manusia secara individual dan kolektif menjadi penggerak pembangunan, karena itu mereka harus menemukan permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan keluar bagi setiap persoalan itu. Lingkungan yang kondusif tak banyak gunanya, apabila warga masyarakat yang menghuninya tak mampu memanfaatkan perubahan yang terjadi di sekitarnya untuk mengangkat derajat mereka. Kebijakan dan program yang digencarkan oleh pemerintah juga tak banyak bermanfaat, apabila masyarakat tak berinisiatif untuk mengentaskan keadaan mereka yang terpuruk.

Pembangunan manusia dari segala aspeknya – fisik, intelektual, dan spiritual – menjadi kata kunci, agar perubahan sosial dalam berbagai dimensi – ekonomi, politik, dan sosial-budaya – dapat terpenuhi. Karena ini, kebijakan dalam bidang sosial-budaya harus mendapat perhatian serius sebagai sarana membentuk manusia dan masyarakat yang berdaya.

Visi pembangunan PK Sejahtera ialah terwujudnya masyarakat madani di Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat. Keadilan menyangkut aspek politik dan hukum, agar terpenuhi semua hak warga. Kesejahteraan menyangkut aspek ekonomi, disamping juga bermakna keamanan fisik dan ketenteraman psikologis masyarakat. Sementara kehidupan yang bermartabat berhubungan dengan pergaulan sosial di peringkat individu, masyarakat dan negara-bangsa.

Platform kebijakan bidang sosial-budaya menjabarkan misi dan langkah-langkah yang harus diambil demi terwujudnya manusia Indonesia berkarakter dan berkemampuan tinggi demi mengatasi permasalahan yang mengitari diri dan lingkungannya. Platform ini juga memaparkan fundamental sosial-budaya yang harus dibangun dan dipupuk, agar kehidupan masyarakat Indonesia benar-benar mantap dan tahan terhadap goncangan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Platform ini pada akhirnya pula menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Falsafah Dasar Partai, dengan menegaskan kesederajatan sosial dan kemajemukan budaya sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Dengan demikian, platform ini ingin menjawab sejumlah permasalahan yang terhampar dalam kondisi nasional kontemporer sekaligus mengantisipasi tantangan yang akan terjadi di masa datang.

8.2 MISI DAN STRATEGI

Misi yang diemban PK Sejarah dalam bidang sosial-budaya adalah “Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat Martabat Bangsa”. Misi itu hanya bisa dijalankan dengan memperkuat faktor keteladanan di berbagai bidang. Dalam bahasa yang lebih heroik, misi tersebut dapat diterjemahkan sebagai “Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya”, sebab kita memandang kebodohan (rendahnya kualitas pendidikan), kekerasan (hilangnya kesantunan dan kedamaian dalam menyelesaikan segala bentuk konflik), serta keterbelakangan (kemandegan dan kejumudan) sebagai musuh sosial seluruh bangsa.

Membangun kecerdasan bukan hanya dari sisi intelektual/rasional (IQ), namun juga mencakup sisi emosional (EQ) dan spiritual (SQ), agar sempurnalah sosok manusia yang akan terbina (*insan kamil*). Sisi emosional dan spiritual selama ini kurang disentuh, karena itu akan dijadikan perhatian utama dalam proses pembinaan di masa datang. Manusia yang cerdas paripurna itu akan mampu menanggung beban dan menghadapi segenap cobaan hidup

(*adversity quotient/AQ*). Sebuah kualitas yang amat diperlukan dalam situasi sosial yang sedang dirundung bencana.

Manusia baru yang dilahirkan lewat proses pembinaan dan pengkaderan itu sangat menyadari posisi dirinya dan tujuan yang akan dicapainya. Mereka tak mengalami krisis identitas sebagaimana terlihat pada sebagian warga di sekelilingnya, sehingga mereka dapat berperan sebagai unsur pengubah lingkungan dan pengarah masyarakat untuk menuju cita-cita bersama yang telah dicanangkan. Generasi baru ini juga menyadari betul agenda reformasi yang harus mereka perjuangkan, dan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diproklamsikan sejak lama. Mereka tak goyah dan larut dalam perubahan zaman, bahkan menjadi pilar penjaga nilai-nilai perjuangan dan membuat arus baru yang akan menyelamatkan masyarakat dari kebobrokan dan kehancuran sosial.

Manusia yang cerdas tidak hanya memikirkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan dan keselamatan masyarakat umum. Mereka melawan egoisme dan individualisme, lalu bersungguh-sungguh menumbuhkan semangat kolektif dan solidaritas sosial tanpa pamrih. Bagi manusia baru yang akan dibentuk, kesalehan bukan hanya semata bermakna ketaatan menjalankan ritual agama dan ketentuan hukum, melainkan juga mengobarkan spirit agama yang membebaskan dan substansi hukum yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Kesalehan (*ascetism*) berpangkal dari iman (*faith*) dan taqwa (*pious*), yang akhirnya melahirkan tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang banyak.

Sebaik-baiknya manusia yang akan dibina ialah mereka yang paling besar kontribusinya kepada masyarakat dan mereka yang mengimplementasikan ketaatannya kepada Sang Khalik dengan berbuat kebajikan serta melayani semua makhluk. Kesalehan pribadi yang berakumulasi menjadi kesalehan publik akan membentuk lingkungan yang positif untuk berkembangnya seluruh potensi kemanusiaan (*humanity*) dan kewargaan (*citizenry*). Hal itu tercermin dari meningkatnya etos kerja, sikap terbuka akan kreasi dan inovasi baru, serta menguatnya solidaritas sosial.

Dengan dukungan manusia generasi baru, maka krisis identitas dan modalitas bangsa dapat ditanggulangi. Mereka yang akan mengubah kondisi keterbelakangan menjadi kemajuan budaya. Kemajuan personal tidak hanya bersifat fisik, namun mengembangkan nilai-nilai universal kemanusiaan, sehingga tiap warga menyadari fungsi dan peran hidupnya sebagai seorang hamba, pemimpin, dan pembangun peradaban baru. Kemajuan kolektif juga tak hanya bersifat fisik dan material, melainkan tumbuh suburnya nilai dan pranata kebaikan, serta semakin menipisnya nilai dan pranata keburukan dan kemungkarannya. Kemajuan budaya bagi suatu bangsa berarti bangsa ini menyadari kembali jati dirinya yang telah lama tererosi.

Jati diri itu antara lain sebagai bangsa pejuang yang membenci segala bentuk penindasan, bangsa yang mandiri dan menolak segala format ketergantungan, serta bangsa yang terbuka terhadap perubahan dan menolak eksklusifisme atau fanatisme sempit. Bangsa yang maju tak selalu meninggalkan nilai-nilai tradisional dan lokal, sepanjang itu masih mencerminkan substansi kebaikan dan kebenaran universal, tetapi bangsa yang mampu memadukan nilai-nilai modern yang lebih baik dengan warisan tradisional yang sesuai tuntutan zaman.

Segala misi perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat tak akan terpenuhi tanpa hadirnya seseorang atau sekelompok orang yang menyebarkan model keteladanan (*role model*). Teladan dalam lingkup pribadi (watak konsisten dan tahan uji), keluarga (rukun dan produktif), masyarakat (harmonis dan inovatif), dan bangsa (beretos tinggi dan berbudi luhur). Keteladanan di sektor publik (pemerintahan) menampilkan semangat pengorbanan dan pelayanan total, sebab setiap pejabat publik pada hakekatnya mendapat mandat dari rakyat. Keteladanan di sektor swasta (bisnis) memperlihatkan tanggung-jawab sosial untuk menebarkan manfaat dan keuntungan (*social benefit*) kepada semua kelompok dan lapisan masyarakat yang kurang beruntung (*powerless and marginalized people*). Keteladanan di sektor kemasyarakatan (*civil society*) membuktikan bahwa masyarakat bisa mengurus dan

menyelesaikan persoalannya sendiri, apabila diberi kesempatan dan disediakan fasilitas yang memadai.

Masyarakat yang mandiri dan berdaya ini akan memiliki posisi sejajar dengan aparat pemerintah atau kelompok bisnis. Bahkan, semua komponen bangsa itu bersatu-padu untuk mencapai cita-cita yang diimpikan bersama. Tampilnya generasi baru yang memiliki kompetensi di berbagai bidang kehidupan akan mengatasi krisis kebijakan yang tak menyentuh persoalan kongkrit masyarakat dan menyudahi krisis keteladanan di kalangan pejabat formal.

Misi yang berat itu akan dicapai dengan strategi yang solid dan jitu, yakni “Meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan harmoni sosial dalam lingkungan budaya yang maju dan terbuka”. Kualitas hidup warga dipandang secara komprehensif, meliputi kecukupan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan), sekunder (rasa aman, kesempatan berusaha dan kebebasan sipil), dan tersier (kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkreasi). Disamping itu, meningkatnya kualitas hidup vertikal/transendental (iman kepada Yang Mahakuasa) dan horizontal/sosietal (hubungan dengan sesama manusia) akan menciptakan harmoni sosial yang dibutuhkan oleh semua warga, agar hak dan kewajibannya dapat terlaksana dengan sempurna.

Peningkatan kualitas hidup dan perwujudan harmoni berada dalam kerangka budaya yang maju (berorientasi pada masa depan yang lebih baik) dan terbuka (belajar dari lingkungan lokal, nasional maupun global). Strategi yang akan ditempuh ini menggariskan pentingnya penyemaian nilai-nilai baru (kultural), pembinaan pelaku-pelaku baru di berbagai sektor kehidupan (personal), serta perubahan struktur sosial, politik dan ekonomi yang diinginkan (struktural). Strategi ini dijalankan secara simultan, tidak melebihkan atau mengesampingkan satu faktor di atas/bawah faktor lain, namun pencapaian targetnya disesuaikan dengan perkembangan aktual masyarakat.

8.3 LANGKAH UTAMA

Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan, maka disusun langkah-langkah utama dan pendukung. Langkah-langkah ini merupakan penjabaran lebih rinci dan kongkrit dari misi yang telah digariskan. Semua langkah ini terkait satu sama lain dan bersifat saling melengkapi. Dari langkah manapun kita memulai upaya pemecahan masalah yang ada, maka pada akhirnya akan bertemu dan membutuhkan dukungan dari sisi yang lain.

Langkah Utama adalah:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*basic need*)
2. Peningkatan Partisipasi Pendidikan yang Bermutu
3. Pelayanan Kesehatan Paripurna
4. Penanaman Nilai Kemandirian dan Kesetiakawanan Sosial
5. Gerakan Kebudayaan yang Progresif

Kebutuhan dasar yang utama ialah pangan, karena itu PK Sejahtera sangat memperhatikan masalah ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Kebijakan di Departemen Pertanian dirumuskan dan dikawal agar benar-benar menjamin kecukupan pangan bagi semua warga, tak ada lagi gejala kelaparan yang akut atau kekurangan gizi yang bisa menyebabkan hilangnya suatu generasi manusia. Meskipun harus diingat seringkali kebijakan di satu sektor seperti peningkatan produksi pangan (Departemen Pertanian) terkendala oleh distribusi produk pangan yang menjadi otoritas instansi lain (Departemen Perdagangan dan Badan Urusan Logistik). Justru di sektor itulah acap terbongkar adanya mafia dan spekulasi barang yang mengontrol harga di pasar. Kami menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulasi yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulasi.

Kebutuhan dasar lain adalah sektor perumahan yang juga menjadi perhatian utama PK Sejahtera dengan mendukung sepenuhnya program pembangunan rumah susun sederhana untuk kalangan masyarakat bawah (buruh, pedagang, guru dan karyawan rendahan) yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Akses

golongan ekonomi lemah harus dibuka lebar untuk memiliki rumah dengan membuka skema kredit lunak. Program perumahan yang vital ini juga terkendala dengan kebijakan di sektor lain, seperti tersedianya lahan yang memadai (Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah), pembiayaan yang mencukupi (otoritas Perbankan Nasional), serta kesiapan infrastruktur publik (Departemen Pekerjaan Umum dan instansi yang menangani kebutuhan air, listrik, telepon dan sarana penting lain). Warga tidak cuma butuh rumah yang baik dan sehat, namun juga lingkungan dan pemukiman yang aman dan nyaman. Karena itu, membangun perumahan yang baik berarti menata pemukiman warga agar sejalan dengan rencana pembangunan strategis. Warga bisa memperoleh hak dasarnya, dan program pembangunan berjalan sesuai relnya.

Kebutuhan dasar lain, yakni sandang, akan terpenuhi apabila industri tekstil berjalan dengan baik. Sudah saatnya kita membangkitkan kembali sektor industri tekstil yang saat ini menghadapi tekanan dari industri asing, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan para pelaku industri domestik dapat bertahan serta berkembang lebih pesat. Dari sini terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sesungguhnya membawa efek ekonomi yang luas, karena dapat menghidupkan industri yang memiliki pangsa luas, bila dikelola dengan efektif dan efisien.

Faktor lain yang selama ini belum menjadi kebutuhan dasar ialah kendaraan dan simpanan/tabungan masyarakat. Kendaraan berfungsi sentral karena dapat mendorong mobilitas sosial antar daerah. Manakala kebutuhan kendaraan pribadi belum terjangkau mayoritas masyarakat, maka sarana transportasi publik harus menjadi prioritas program pemerintah, karena transportasi itu ibarat aliran darah yang menunjukkan sehat-tidaknya suatu tubuh manusia bekerja. Bila transportasi publik tak tersedia dan tak terkelola dengan baik, maka akan terjadi kemacetan, bahkan dapat mengundang kerusuhan serta ledakan sosial yang parah, seperti terjadinya penyumbatan saluran darah yang menyebabkan *stroke*/kelumpuhan pada tubuh manusia.

Sementara itu, faktor tabungan atau simpanan yang dilakukan seorang warga menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya, sehingga dapat menyisakan sebagian penghasilan untuk keperluan jangka panjang. Kebiasaan menabung ditentukan pula oleh pola perilaku dan kultur masyarakat dimana warga berada, yang perlu terus ditumbuhkan.

Kebutuhan akan pendidikan jelas bersifat mendasar, karena dengan proses peningkatan pengetahuan dan pencerdasan, setiap warga membuka peluang untuk memperbaiki kondisi yang dijalaninya. Mereka yang terjebak kemiskinan biasanya menghadapi kesulitan dalam akses pendidikan. Untuk itu, PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan sebisa mungkin digratiskan untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9 - 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja. Sebenarnya ada lima aspek yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan, yaitu *hardware* (fasilitas fisik), *software* (kurikulum dan sistem pembelajaran), *brainware* (guru, murid dan orangtua), *netware* (jaringan kerjasama), dan *dataware* (data murid/guru/lulusan). Sejak dini perlu ditanamkan semangat untuk berwirausaha, sehingga pengetahuan yang dipelajari di sekolah dapat dipraktekkan bagi pengembangan teknologi dan fasilitas hidup. Untuk itu, setiap siswa/mahasiswa telah dibekali dengan keterampilan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), sehingga dapat meringankan beban keluarga dan masyarakat yang telah sarat

Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara paripurna, mencakup aspek fisik, emosi dan kejiwaan. Kesehatan fisik dijaga dan ditingkatkan dengan menjamin pasokan gizi yang cukup, terutama

pada kelompok bayi dan anak-anak, sebab merekalah yang akan menjadi penerus generasi masa datang. Kesehatan emosi dilakukan dengan menciptakan kondisi keluarga yang tenteram dan lingkungan yang damai, serta pergaulan yang positif terutama di kalangan anak-anak dan remaja karena pada masa inilah karakter seorang manusia akan terbentuk. Sementara itu jiwa yang sehat diupayakan dengan mempromosikan nilai-nilai keagamaan/transendental dan lingkungan budaya/kultural yang progresif, sehingga setiap orang/warga dapat mengendalikan tekanan hidup yang semakin berat, dengan menyalurkan energi kreatif/produktifnya pada target yang tepat. Pembenahan sektor kesehatan ditujukan pada perbaikan infrastruktur (rumah sakit/puskesmas), peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan sarana obat dan alat kesehatan yang terjangkau masyarakat.

Penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial merupakan dua sisi pembentukan karakter (*character building*) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (*mental model*) tak sejalan dengan perubahan zaman. Mereka yang bersikap jumud dan selalu menggantungkan nasibnya pada kebaikan hati orang lain, termasuk intervensi kebijakan pemerintah. Karena itu perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu instruksi atau intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditebar. Kemandirian individu dibangun di atas dasar kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan. Masalah seberat apapun akan dapat ditanggulangi, apabila bangsa ini membangun solidaritas nasional baru yang mempersatukan semua kelompok masyarakat.

Sudah cukup kita berbicara tentang kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik, sekarang saatnya untuk memobilisasi

gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern. Kita tak bisa lagi menjadi bangsa yang menutup diri atau bersikap rendah diri, karena kita bercita-cita untuk menjadi kontributor penting bagi peradaban dunia.

8.4 LANGKAH PENDUKUNG

Untuk memperkuat dan melengkapi Langkah Utama, maka kita menetapkan sejumlah Langkah Pendukung yang terdiri dari:

1. Pembinaan Keluarga Sakinah dan Produktif
2. Pengembangan Kemitraan antar Jenis
3. Pengembangan Kepeloporan Pemuda
4. Pengembangan Kreativitas Seni dan Budaya Populis dan Relijius
5. Pengembangan Dakwah yang Moderat dan Toleran
6. Penataan Saluran Informasi dan Komunikasi

Pembinaan keluarga merupakan langkah penting yang akan menentukan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Akselerasi sosial yang terjadi akibat modernisasi dan urbanisasi memang menantang nilai-nilai keluarga (*family values*), karena manusia kini telah dikotak-kotakkan sebagai satu unit kecil dari sebuah mesin raksasa produksi. Sebagian warga telah mengalami keterasingan dan hidup dalam bingkai sosial yang retak, mereka hanya dihargai keringat dan keterampilannya belaka, sedang kebutuhan batin dan sosialnya terabaikan sama sekali. Bila kondisi alienasi itu dibiarkan terus berlanjut, maka akan memunculkan gejolak tersendiri, sekurang-kurangnya akan memperbesar penyimpangan dan kerawanan sosial. Untuk mencegah dan meredam problema sosial itu, maka kondisi keluarga harus dimantapkan dalam iklim *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Keluarga turut berperan sebagai jaring pengaman

sosial dengan memacu dan melesatkan aspek kreatif/produktifnya, agar penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran bisa dimulai dari institusi terkecil. Keluarga yang mandiri dan berdaya benar-benar menjadi tumpuan harapan masyarakat, bukan semata beban yang harus ditanggung negara.

Isu gender acap ditampilkan dalam suasana kontradiktif. Padahal, posisi perempuan dan lelaki tak semestinya dipertentangkan, karena kedua komponen sosial itu memainkan peran yang sama pentingnya. Bahkan, energi sosial akan mencapai puncaknya bila terjadi sinergi di antara kedua jenis itu. Untuk itu, wacana kesetaraan dan kemitraan yang dinamis antar jenis harus lebih kerap dimunculkan sebagai bagian dari solusi masalah sosial yang akut. Kemitraan antar jenis perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga antar suami-isteri dan anak lelaki-perempuan, sehingga keluarga menjadi miniatur dari sistem sosial yang menghargai perbedaan peran. Dalam lingkup lebih luas, kemitraan itu juga digalang di sektor publik melalui pembagian peran yang adil dan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Afirmasi kebijakan yang memberi peluang lebih besar kepada jenis perempuan patut diapresiasi, namun tetap dalam koridor pemenuhan tugas secara profesional dan proporsional. Jangan sampai afirmasi yang berlebihan justru menghasilkan masalah baru berupa ketegangan sosial yang mengancam keutuhan keluarga atau harmoni warga.

Sebagaimana kelompok strategis lain dalam masyarakat, maka kaum muda menempati posisi vital yang menentukan arah perubahan bangsa. Sejak zaman penjajahan dan kemerdekaan, peran pemuda cukup sentral sebagai inisiator dan penggerak revolusi sosial. Di era reformasi dan pemulihan kondisi bangsa dewasa ini peran itu harus dipertegas dan semakin ditingkatkan, sehingga kaum muda tidak mengalami disorientasi dalam menyikapi pergeseran zaman. Penyebaran spirit kepeloporan pemuda menjadi salah satu andalan PK Sejahtera melalui program yang dirancang dan diperjuangkan Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga. Kepeloporan kaum muda dalam aspek sosial (sebagai perekat antar elemen masyarakat plural), ekonomi (pembangkit jiwa wirausaha untuk menekan angka pengangguran), politik (pendobrak sistem feodalistik dan otoriterian menuju

demokrasi yang terkonsolidasi), pertahanan (penjaga kedaulatan bangsa), dan keamanan (pendukung ketertiban sosial). Peran multiaspek itu harus dikelola dengan sistematis melalui pengkaderan di segenap bidang. Energi kaum muda sangat besar, sehingga perlu disalurkan dan dioptimalkan dalam pencapaian prestasi di bidang seni, olahraga, sains dan teknologi. Sudah saatnya dibina secara serius potensi kaum muda yang berpeluang besar di tingkat global dengan sistem kompetisi yang amat ketat. Semua itu bertujuan agar bangsa ini benar-benar diakui kebesarannya, tak hanya dari sisi geografis dan demografis secara kuantitatif, melainkan karena kualitas SDM yang unggul.

Masalah seni-budaya selama ini hanya disentuh dalam tataran konsep atau slogan, bahkan seringkali dijadikan obyek pameran atau promosi wisata semata, dengan mengabaikan fungsi penting budaya sebagai manifestasi cipta, rasa dan karsa manusia. Untuk itu perlu dirintis dan dimantapkan gerakan kebudayaan yang mengakar dalam kesadaran diri warga (populis) dan sekaligus menyentuh nilai fundamental dalam kehidupan manusia (religius). Gerakan kebudayaan yang populis akan menempatkan proses kreatif bersentuhan langsung dengan problem kongkrit masyarakat, bukan lagi “seni semata-mata untuk seni” (solistik) dan bukan pula seni yang bersifat massal dan komersial (*mass culture*), serta memiliki harga yang semakin mahal. Seni-budaya yang membebaskan masyarakat dari penindasan dan keterbelakangan, sekaligus seni-budaya yang mencerahkan agar manusia kembali ke fitrah universalnya.

Dakwah moderat dihajatkan untuk mencegah kerusakan akibat berkembangnya sikap ekstrem, baik dari kalangan yang menggampangkan dan akhirnya mengabaikan koridor agama (liberal), maupun kelompok yang terlalu sempit dalam memahami dan menafsirkan kaidah agama dalam kehidupan sosial (radikal). Kedua titik ekstrem itu mengandung bahaya tersendiri, karena itu perlu dilakukan keseimbangan proses pemahaman dengan tetap merujuk pada sumber utama (nilai Al Qur’an dan Sunnah) serta sumber pendukung (akal budi dan intuisi kemanusiaan). Sikap moderat dilengkapi dengan prinsip toleran terhadap segala perbedaan di kalangan pemeluk agama, tanpa tendensi untuk

memusnahkan perbedaan itu – suatu hal yang mustahil dilakukan – dan memaksakan keseragaman (monolitisme) atau justru mengambangkan semua prinsip kebenaran (relativisme). Kemantapan hubungan antara pemeluk agama yang berbeda akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya bangsa yang religius dan berperadaban luhur.

Salah satu aspek yang tidak bisa diremehkan di era globalisasi saat ini ialah pengelolaan informasi yang positif dan terbuka, serta komunikasi yang sejajar dan mencerahkan. Bahkan, harus diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat merupakan ciri utama dari peradaban dunia di masa kini dan mendatang. Sejauh ini kita menjadi bangsa konsumen terhadap produk informasi dan serbuan komunikasi dari negara lain. Padahal, keutuhan dan kedaulatan bangsa ini yang terdiri dari ribuan pulau dan disatukan dengan ratusan selat dan laut, sangat membutuhkan jaringan infokom yang solid. Bila kita secara nasional telah memastikan informasi mana yang berguna untuk mengangkat martabat bangsa, maka kita dapat membangun infrastruktur infokom yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Penataan saluran publik melalui media cetak, elektronik (radio dan televisi) serta media online (internet) menjadi fokus program, tak hanya yang berskala nasional dan global, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat lokal dan komunitas tertentu.

8.5 FUNDAMENTAL SOSIAL-BUDAYA

Penetapan visi dan misi pembangunan harus sejalan dengan penjabaran program utama dan pendukung. Semuanya mengarah pada pembangunan dan penguatan kembali fundamental sosial-budaya yang selama ini telah hancur berkeping-keping akibat penyalahgunaan kekuasaan selama beberapa dekade. Perhatian kita lebih tersita pada upaya pembangunan fundamental ekonomi (makro dan mikro) atau fundamental politik (trias politika dan kebebasan sipil), tapi masih terlalu sedikit tercurah untuk pembangunan fundamental sosial-budaya. Padahal, tak pernah ada kisah pembangunan ekonomi dan politik yang berhasil, di tengah lingkungan sosial-budaya yang mengalami kebobrokan.

PK Sejahtera memandang fundamental sosial-budaya yang harus dibangun kembali sebagai berikut:

1. Kepribadian manusia Indonesia yang tangguh menghadapi beragam tantangan;
2. Kultur masyarakat yang berdisiplin dan beretos kerja tinggi;
3. Rasa saling percaya antar warga yang berbeda latar belakang;
4. Relijiusitas dan spiritualitas yang tinggi.

Keempat aspek fundamental itu dibangun melalui program *character building* (disiplin personal), *nation building* (kultur bangsa), *social-trust building* (kohesivitas sosial), dan *spiritual purification and enrichment* (*tazkiyat an nafs*/pengayaan jiwa). Fundamental sosial-budaya yang kokoh pada akhirnya sejalan dengan nilai-nilai utama yang termaktub dalam Falsafah Dasar PK Sejahtera, yang pada intinya menekankan: kesederajatan sosial (*social egalitarianism*) dan kemajemukan budaya (*cultural plurality*) sebagai modal kemajuan bangsa (*national development*).

8.6 ISU-ISU STRATEGIS SEKTORAL

Disamping Langkah-langkah Utama dan Langkah-langkah pendukung seperti diuraikan di atas berikut ini adalah Isu-isu Kebijakan Sektoral yang diusung PK Sejahtera:

8.6 .1 . Pendidikan Nasional

Menuju pendidikanberkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak belajar dengan biaya terjangkau. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu dalam lingkungan belajar yang inklusif untuk melahirkan peserta didik yang berkembang optimal, mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam pembangunan bangsa. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan. Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan nasionalnya. Hal itu dilakukan dengan upaya mendukung, mengawal, dan terus memperbaiki sistem pendidikan bagi rakyatnya. Oleh karena itu pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan mutu yang dihasilkan terlihat masih sangat jauh dari harapan. Filosofi perencanaan strategis pendidikan nasional belum sepenuhnya konsisten menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia. Akibatnya pendidikan belum mampu menumbuhkan budaya belajar dan mengajar dari mayoritas rakyat Indonesia. Fokus kerja pemerintah masih bertumpu pada sektor pendidikan formal dan belum memberikan perhatian yang memadai pada sektor pendidikan nonformal dan informal. Industri informasi seperti media massa cetak dan elektronik yang sesungguhnya memiliki potensi serta kesempatan yang besar untuk ikut andil dalam mendidik anak bangsa justru bersifat kontraproduktif dengan lebih banyak menyajikan program yang merusak tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Pendidikan berbasis keluarga (*homeschooling*) belum mendapatkan perhatiannya yang memadai. Kebijakan pembiayaan sektor pendidikan pun masih jauh dari tuntutan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, sehingga mengakibatkan munculnya sederet permasalahan seperti: ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, kompetensi dan kualifikasi guru yang rendah dan inovasi atau riset di bidang pendidikan yang mandeg.

Berdasarkan laporan UNDP (*United Nations Development Programs*) dalam "Human Development Report 2006" tentang Kualitas Pembangunan Manusia. dari 177 negara yang diurutkan

berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-108. Sebagai perbandingan, Singapura sudah mencapai peringkat ke-25, Brunei Darussalam ke-34, Malaysia ke-61, Thailand ke-74, dan Filipina ke-84. Negara tetangga dekat lainnya, Australia, bahkan sudah berada pada peringkat ke-3; negara ini bersaing ketat dengan Swedia (ke-4), Islandia (ke-2), dan Norwegia (ke-1). Secara nasional, tingkat pendidikan anak-anak Indonesia yang telah berusia 15 tahun ke atas hanyalah sampai kelas 2 SMP. Kemampuan membaca, matematika dan sains (IPA) rata-rata siswa usia 15 tahun (SLTP dan SLTA) Indonesia masih sangat rendah. Hasil penelitian Tim *Program of International Student Assessment* (PISA) Indonesia menunjukkan, sekitar 37,6% anak usia 15 tahun hanya bisa membaca tanpa mampu menangkap maknanya. Selain itu, 28,4% hanya bisa mengaitkan teks yang dibacanya dengan satu informasi pengetahuan. Dibanding siswa dari negara lain yang mengikuti program PISA, kemampuan membaca siswa Indonesia menduduki urutan ke-39, kemampuan matematika urutan ke-39, kemampuan sains urutan ke-38 dari 41 negara. Bahkan menurut data BPS tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota, menunjukkan bahwa tamatan SMA ke atas menunjukkan prosentase menganggur lebih besar dibanding tamatan SMP ke bawah. Artinya, sistem pendidikan nasional belum berhasil menghantarkan generasi bangsa dengan status pendidikannya untuk memiliki semangat kemandirian atau kewirausahaan dalam kehidupannya.

Pada aspek moralitas, pendidikan nasional belum berhasil menanamkan kepada peserta didik nilai moral yang luhur. Pijakan nilai-nilai agama yang sudah digariskan pada UUD 1945 dan UU Sisdiknas belum diimplementasikan dengan maksimal oleh penentu kebijakan pendidikan, terutama dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah. Lebih jauh lagi, belum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pendidikan berjalan tanpa bingkai moral yang tegas, sehingga kehilangan arah dan hakikat yang paling asasi, yaitu untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kasus tawuran massal di kalangan pelajar dan mahasiswa bermunculan hampir setiap tahun di beberapa kota besar. Sementara itu, jumlah pemakai narkoba di Indonesia

menunjukkan peningkatan yang luar biasa, terutama di kalangan kaum muda. Dalam riset yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia (2004) mencapai Rp.23,6 triliun. Tahun 2006, jumlah pemakai narkoba berkisar 2 hingga 4 juta orang. Tak kurang dari 78% korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. Pola kehidupan seksual yang bebas dan gaya hidup yang amoral juga semakin mewarnai perilaku pelajar dan mahasiswa di kota-kota besar. Kerawanan sosial muncul, salah satunya akibat kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter yang mantap.

Pembangunan sistem pendidikan nasional mengharuskan upaya perbaikan yang lebih mendasar dan strategis. Reformasi pendidikan harus memadukan peran wahyu dan ilmu sebagai teras utama aktivitas pendidikan. Pendidikan nasional harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan; penanaman nilai; pembentukan sikap dan karakter; pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan; menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan nasional harus mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka menyiapkan mereka merealisasikan fungsi dan risalah kemanusiaannya di hadapan Allah SWT, yaitu mengabdikan sepenuhnya kepada Sang Khalik dan menjalankan fungsi kepeloporan di muka bumi sebagai makhluk yang memakmurkan kehidupan dalam tatanan hidup bersama dengan aman, damai dan sejahtera.

Seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah harus bersatu-padu dan bersungguh-sungguh meningkatkan komitmen untuk merumuskan dan merealisasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, sebab pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang benar dan efektif merupakan amanat konstitusi.

PK Sejahtera bersama seluruh elemen bangsa bertekad keras untuk terus memperjuangkan perbaikan dan pembangunan

pendidikan nasional ke arah yang lebih baik dengan dua belas langkah solusi strategis, sebagai berikut:

Pertama, mendukung pembangunan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang komprehensif, integratif dan aplikatif. Dengan sistem yang komprehensif diharapkan proses dan praktek pendidikan mengalami perbaikan berkelanjutan pada semua aspek dan perangkatnya. Pendidikan yang integratif menekankan pentingnya ikatan dan pertautan dengan nilai-nilai luhur agama pada seluruh aspek pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan, sistem yang aplikatif akan mampu mendorong proses pendidikan bermutu demi peningkatan daya saing bangsa.

Kedua, mendorong efektivitas program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkannya menjadi Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan menyediakan segala fasilitas demi terpenuhinya kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia dan memenuhi sekurang-kurangnya standar minimal nasional yang ditetapkan. Juga perlu diselenggarakan sistem pendidikan yang murah dan berkualitas.

Ketiga, melakukan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa. Posisi guru, tanpa membedakan status kepegawaiannya, harus dihargai setara dengan profesi lainnya dengan melakukan usaha yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik hingga mencapai taraf kompetensi yang ditentukan undang-undang.

Keempat, melaksanakan amanat Pasal 31 ayat 4 Amendemen IV UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN secara efektif dan efisien dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dan menghindari duplikasi pembinaan dan pembiayaan. Bersama masyarakat, PK Sejahtera turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, agar tidak mengalami penyimpangan dan kebocoran.

Kelima, bersama seluruh komponen bangsa melakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap berbagai aspek konsepsional dan operasional SPN pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Keenam, mengefektifkan proses pendidikan yang menanamkan jiwa kebebasan dan kemandirian dengan menanamkan jiwa kewirausahaan untuk eksistensi peserta didik di masa datang melalui peningkatan keterampilan hidup (*life skills*) dan daya juang (*adversity quotient*). Kurikulum diarahkan kepada upaya pengembangan pengalaman belajar yang seimbang dari aspek intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ) dan dilaksanakan dalam lingkungan belajar yang inklusif dan terbebas dari sikap diskriminatif. Pendidikan perlu membentuk karakter pembelajar bagi peserta didik yang memungkinkan peserta didik dapat belajar sepanjang hayat.

Ketujuh, mendukung upaya perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan menuju manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, sehingga mencerminkan kebijakan penyelenggaraan negara yang mengembangkan kemampuan dan potensi daerah. Partisipasi masyarakat luas pada gilirannya akan memunculkan rasa tanggung-jawab terhadap hasil dan dampak pendidikan bagi pencapaian masa depan Indonesia yang lebih bermakna.

Kedelapan, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar yang berbasis pada kondisi setempat berdasarkan analisis kebutuhan sekolah melalui peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, seminar, workshop, studi banding dan pembentukan pusat-pusat belajar (*training/learning center*) di berbagai wilayah.

Kesembilan, mewujudkan pendidikan yang murah, bermutu dan berwawasan global untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional di percaturan global. Pendidikan murah dan bermutu terutama bagi rakyat yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan permasalahan sosial dan

geografis seperti masyarakat di daerah rawan konflik dan rawan musibah.

Kesepuluh, memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan peserta didik yang berkebutuhan khusus baik karena jenis kecacatan maupun karena kecerdasan dan bakat istimewa (*gifted – talented*) yang dimiliki sebagai aset bangsa yang dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan bangsa sekaligus mengangkat citra Indonesia di mata dunia internasional.

Kesebelas, mengembangkan pendidikan formal sebagai kawah candradimuka kaderisasi kepemimpinan nasional masa depan dengan mengembangkan pengajaran untuk belajar dan pembelajaran bermakna di sekolah untuk menghasilkan calon pemimpin masa depan, dan menjadikan wajib militer sebagai salah satu instrumen pendidikan kepemudaan sehingga menumbuhkan jiwa nasionalisme kebangsaan.

Keduabelas, membangun kesadaran pendidikan masyarakat sehingga terbentuk ketahanan keluarga dengan mengembalikan tanggung jawab utama pendidikan kepada orang tua dan memunculkan komunitas-komunitas pendidikan informal di masyarakat.

Ketiga belas, mendayagunakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi (televisi, radio, internet dan media cetak) bagi peningkatan mutu pendidikan, baik di sektor formal, nonformal maupun informal, dan sekaligus meminimalisasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

8.6.2. Pembangunan Kesehatan Nasional

Menuju sehat paripurna untuk semua dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara, dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

Hakekat penciptaan manusia di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah adalah menjalankan aktivitas yang diperintahkan Allah, termasuk di dalamnya membangun bangsa dan negara dengan niat ikhlas. Salah satu modal untuk melaksanakan tugas itu adalah sumberdaya manusia yang sehat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu parameter keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus menjadi prioritas utama.

Saat ini pembangunan kesehatan belum menjadi prioritas utama bagi negara. Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang belum efektif dan efisien mengakibatkan status kesehatan masyarakat masih rendah. Sumber pembiayaan kesehatan yang tidak mencukupi – (hanya berkisar 2,5% dari dana APBN setiap tahun) masih diiringi alokasi yang tidak tepat dan kebocoran anggaran. Semua itu menyebabkan daya jangkau pelayanan kesehatan masih terbatas, termasuk tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan yang profesional. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2005 sekitar 47,28% masyarakat, bila sakit, masih mengobati sendiri. Fasilitas asuransi kesehatan juga cuma dinikmati 14% penduduk.

Penyakit yang diderita masyarakat masih didominasi penyakit infeksi. Jumlah penderita TBC di Indonesia menduduki peringkat ke-3 terbesar di dunia. Kematian karena penyakit flu burung malah tertinggi di dunia. Wabah demam berdarah selalu berulang setiap tahun. Belum lagi tingginya angka kekurangan gizi. Lebih kurang 1,7 juta anak balita mengalami kurang gizi, dan 10%-nya mengalami kurang gizi berat. Tingginya angka kematian balita (mencapai 32 anak per 1000 kelahiran pada tahun 2005) bersaing dengan angka kematian ibu (mencapai 262 ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005). Di sisi lain, kondisi lingkungan kesehatan masih belum memadai. Seperti kondisi rumah yang sesuai dengan standar kesehatan baru mencapai 63% pada tahun 2005. Negeri ini juga menjadi tempat yang subur bagi penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan menjadi salah satu pintu masuk penyebaran virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrom*).

PK Sejahtera mencita-citakan terwujudnya “kesehatan untuk semua” dimulai dengan sehat individu, sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. PK Sejahtera bersama seluruh elemen bangsa bertekad keras untuk memperjuangkan harapan tersebut dengan tigabelas solusi yang strategis sebagai berikut:

Pertama: Mendukung terlaksananya SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang komprehensif dan integratif, serta dilakukan perbaikan dan pembenahan terus-menerus dengan indikator turunnya angka kematian ibu dan turunnya angka kematian bayi lahir;

Kedua: Mendorong peningkatan jumlah sumberdaya manusia kesehatan profesional yang berakhlakul karimah: jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif; dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan kesehatan yang memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan;

Ketiga: Memperjuangkan kenaikan anggaran untuk bidang kesehatan yang memadai dan tepat alokasi, berkeadilan serta berpihak pada masyarakat miskin;

Keempat: Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat secara adil, merata dan bersumber dari anggaran negara dan masyarakat yang bermampuan;

Kelima: Mendorong terlaksananya pembangunan sarana kesehatan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diakses dengan mudah;

Keenam: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan cara revitalisasi lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah kesehatan;

Ketujuh: Memperbaiki sistem manajemen kesehatan yang meliputi manajemen informasi kesehatan, keuangan, SDM, dan peraturan perundang-undangan serta administrasi kesehatan;

Kedelapan: Menjamin tersedianya obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau (murah) dengan cara mengembangkan penelitian obat asli Indonesia dan industri farmasi dalam negeri;

Kesembilan: Mendorong terwujudnya kemandirian individu dan masyarakat untuk hidup sehat dengan cara pengembangan sistem pendidikan kesehatan pada masyarakat;

Kesepuluh: Mendorong terwujudnya farmasi kesehatan yang terprogram dan memperbaiki peraturan dan perundangan hukum kesehatan dan farmasi;

Kesebelas: Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

Keduabelas: Mewujudkan sistem pembiayaan nasional sehingga efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan dapat terjaga.

8.6.3. Seni, Budaya dan Pariwisata

Mengembangkan kebudayaan yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovas, dan berkeaktivitas tinggi.

Kebudayaan merupakan sistem adaptif dari keyakinan dan perilaku yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta lingkungannya. Budaya secara empiris merupakan hasil implementasi dan transformasi dari nilai-nilai ideologis, keyakinan, dan cita-cita perjuangan suatu bangsa. Nilai-nilai budaya suatu bangsa ataupun masyarakat tidak ada yang sifatnya lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Realita masyarakat Indonesia yang multikultur akan berkonsekuensi pada keanekaragaman budaya yang dimiliki.

Kebudayaan menyangkut tujuh unsur di dalamnya: bahasa, kekerabatan, religi, kesenian, struktur sosial, perekonomian, dan teknologi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi bagi pengembangan kebudayaan yang besar, unik, dan dapat bersaing dengan bangsa lain.

Konsep kebudayaan sesungguhnya tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki tugas besar dalam mengembangkannya. Kebudayaan merupakan aset penting bagi kemajuan karakter bangsa, bahkan dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui pariwisata, pertunjukkan seni dan penjualan barang-barang kerajinan.

Namun, dewasa ini justru lebih banyak terlihat gejala budaya masyarakat Indonesia yang bergeser pada budaya asing seperti hedonisme, konsumtivism, dan permisivisme. Begitu pula masih adanya warisan budaya animisme dan dinamisme yang direfleksikan melalui tayangan takhayul dan kemusyrikan. Padahal budaya tersebut merupakan cerminan keterbelakangan masa lampau.

Di tengah arus globalisasi, bangsa Indonesia seperti kehilangan arah dan tidak memiliki identitas kebudayaan sendiri. Padahal sekali lagi, Indonesia memiliki kemajemukan etnik dan kebudayaan dari Sabang hingga Merauke. Dekadensi budaya lokal dan pengetahuan lokal banyak disebabkan terpaan informasi global yang menyodorkan produk budaya asing. Seluruh elemen bangsa harus memiliki komitmen kuat untuk menentukan format seni dan budaya yang diinginkan. Kemunduran budaya disebabkan proses komersialisasi dan massifikasi produk hiburan lewat sajian media yang berlebihan, tidak lagi mengindahkan nilai-nilai universal dan religius bangsa. Kondisi ini menjadikan kebudayaan sebagai komoditas kapitalis.

Proses pembentukan kebudayaan bangsa selalu berhadapan dengan pluralitas alamiah. Pluralitas kebudayaan dipahami sebagai kemajemukan nilai yang memiliki keunikan dalam kerangka kesatuan. Setiap kebudayaan memiliki tingkatan yang di dalamnya terdapat kualitas berkaitan dengan mazhab, kecenderungan

berpikir, nasionalisme bahasa, dan negara. Setiap individu dalam kerangka pluralitas mempunyai perbedaan dalam kekhasan dan keunikan masing-masing. Islam membentuk suatu kebudayaan berdasarkan norma dan nilai universal karena perannya sebagai rahmat bagi semesta alam.

PK Sejahtera mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kokoh (*strong nation*). Bangsa yang mampu berdiri di atas nilai-nilai keimanan dan ketundukan pada Sang Pencipta. Bangsa yang memiliki disiplin kuat, etos kerja dan daya inovasi serta kreatifitas tinggi. Untuk itu prioritas pembangunan kebudayaan perlu diarahkan untuk mengembangkan gerakan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai luhur dengan kebijakan:

Pertama, sedini mungkin melakukan pelurusan dan penjernihan kebudayaan yang bernuansa hedonisme dan kemusyrikan, diantaranya dengan mengajak tokoh budayawan, pegiat kesenian dan para artis penghibur untuk kembali kepada nilai luhur religius. Agar produk seni budaya yang mereka hasilkan dapat membawa rahmat bagi masyarakat dan lingkungan. Produk seni budaya yang berkualitas dan bersifat religius terbukti sangat digemari masyarakat. Dewasa ini berkembang sinetron dan film alternatif, cerita pendek dan novel bernilai sastra, serta produk kesenian religius.

Kedua, khazanah budaya bukanlah artefak kuno yang menjadi target kunjungan wisata belaka. Dunia pariwisata justru harus dikembangkan sebagai ruang pameran bagi dinamika budaya bangsa yang majemuk dan wahana pertemuan budaya domestik dengan asing.

Ketiga, mendorong khalayak seniman dan budayawan untuk tidak berhenti berkarya dengan menjaga kualitas dan misi yang agung, walaupun masyarakat mungkin belum tertarik menikmatinya. Kreatifitas seniman dan budayawan justru tertantang untuk menumbuhkan pasar peminat baru dan mendidik perilaku masyarakat. Pembangkitan minat baca dan kreativitas di kalangan anak-anak dan remaja merupakan tantangan lain yang berdampak strategis.

Keempat, pengembangan budaya tradisional maupun kontemporer tidak boleh menjadikan bangsa ini terpecah dalam kotak-kotak sempit, sebab dinamika budaya akan mempercepat bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya yang hakiki, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kelima, produk budaya baik yang merupakan peninggalan maupun terusan, yang diikuti oleh upaya-upaya eksploratif-kreatifnya, harus mendapat area khusus diranah publik, sehingga upaya-upaya apresiasinya tidak lagi dianggap sebagai gerakan enkulturasi (jalan sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi) yang anti kemajuan. Produk budaya harus mendapatkan dinamika kiwarinya (*up to date*), sehingga proses apresiasi massa atas khazanah budaya juga menjadi proses alih generasi yang terencana dan terukur. Pada titik inilah kita memerlukan mekanisme yang menjadi ciri pendefenisasi baru bagi identitas kebudayaan, yaitu kebudayaan sebagai sebuah gerakan.

Keenam, melakukan advokasi terhadap perlindungan daerah wisata, situs wisata dan budaya sehingga tercipta keseimbangan antara kapitalisasi untuk kepentingan ekonomi dan pelestarian demi kepentingan masyarakat dan generasi penerus

Ketujuh, menciptakan daerah-daerah kantong-kantong (*enclave*) yang berperan sebagai sel-sel budaya yang secara aktif mentransformasikan nilai-nilai kearifan lokal di jagat kebhinekaan Nusantara. Di belakang mesin gerakan ini, berdiri para seniman dan budayawan yang memahami betul peta situasi dan telah menyiapkan perangkat-perangkat gerakan yang berdinamika dan bervisi jauh ke depan.

Kedelapan, perlu diupayakan berkembangnya nilai kedisiplinan, dan budaya hidup etis serta religius di kalangan masyarakat. Selain itu juga dijamin kebebasan berekspresi dan berkarya. PK Sejahtera memandang keserasian sosial, keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dalam bingkai kemajemukan. Prinsip persatuan dalam kebhinekaan itulah

yang menjadi basis bagi keutuhan bangsa, sejak dahulu hingga masa yang akan datang.***

Mengembangkan pariwisata yang bersifat etis, religius, dan inovatif. Pariwisata menjadi salah satu aktivitas dan sumber devisa alternatif. Manusia yang berwisata berarti masih dapat menunaikan hak raganya untuk dapat merasakan nikmatnya istirahat dan berinteraksi dengan keindahan alam dan Sang Pencipta.

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah. Dengan berbagai sumber daya alam yang tersedia, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang berpeluang besar mendapatkan pemasukan devisa di sektor ini. Berbagai provinsi di Indonesia memiliki kekayaan melimpah yang dapat dikembangkan menjadi suatu obyek pariwisata yang potensial. Produk kebudayaan seperti kesenian, kerajinan, seni pertunjukan, berbagai cerita legenda, serta kearifan budaya lokal tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan menghargai kebhinnekaan, pariwisata Indonesia diselenggarakan demi mewujudkan jati diri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antarbangsa.

Proses globalisasi dimotori kemajuan di bidang *Tourism, Telecommunication and Transportation (Triple T)* telah mendorong berbagai negara mengembangkan ketahanan budaya agar dapat mempertahankan jati dirinya dari terpaan globalisasi di tengah mengembangkan pariwisata sebagai usaha memajukan ekonomi bangsanya. Strategi itu juga dilakukan Indonesia dalam upaya mengembangkan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu andalan pemerintah untuk memulihkan kondisi krisis bangsa. Arah dan ideologi pariwisata Indonesia adalah kepentingan nasional, cinta Tanah Air, dan berwawasan kebangsaan. Pariwisata memiliki nilai dan keuntungan yang signifikan bagi kemajuan ekonomi lokal dan global. Karena itu, sektor pariwisata digolongkan sebagai industri terbesar di dunia dan merupakan sektor ekonomi yang

memiliki pertumbuhan sangat cepat dan penyedia lapangan pekerjaan yang paling luas. Sumber ekonomi dan lapangan pekerjaan ini terdiri dari biro perjalanan, akomodasi, rumah makan, benda seni dan kerajinan, dan berbagai jenis usaha kecil penunjang.

Selain itu, perjalanan wisata di dalam negeri juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Pada tahun 2004 tercatat 103 juta wisatawan Nusantara yang melakukan 195 juta rute perjalanan wisata. Dengan melihat potensi yang ada, diperkirakan jumlah wisatawan Nusantara di akhir tahun 2009 akan menembus angka 218 juta orang dengan jumlah perjalanan wisata lebih dari 300 juta rute. Perkiraan tersebut memberi harapan terhadap peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi kegiatan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Usaha untuk menggerakkan semua itu ternyata tidak mudah, jika dihadapkan dengan kondisi riil di lapangan. Pengembangan pariwisata domestik memerlukan banyak aktivitas penunjang demi terpenuhinya tujuan makro ekonomi negara. Tak lama setelah *The World Travel and Tourism Council* (WTTC, 1991) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah industri penting dan terbesar di dunia, semua negara sibuk menempatkan pariwisata sebagai prioritas penting pada industri dalam negerinya. Kemasan pariwisata modern menimbulkan pengaruh kenaikan lapangan kerja sebesar 5,3% (jauh di atas jasa lain yang hanya tumbuh 2,7%, atau manufaktur yang hanya naik 0,5%). Berdasarkan laporan WTTC (1999), secara global di tahun awal tahun 2000 pariwisata menghasilkan pendapatan sebanyak US\$ 3,5 triliun dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sedikitnya 200 juta orang. Laporan WTTC juga menambahkan di kebanyakan negara, wisata pesisir merupakan industri wisata terbesar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB (sekitar 25 % dari total PDB). Di Pulau Bali, sebagai contoh, sumbangan kumulatif sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 70 % (1999), walaupun pasca tragedi WTC dan Bom Bali terdapat penurunan pendapatan sebesar 60 % (2001) dan 47% tahun 2002. Data tersebut menunjukkan pariwisata mempunyai peran besar dalam perekonomian.

Kenyataannya, pengembangan pariwisata Indonesia terbengkalai karena perhatian pemerintah yang kurang terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Padahal pengembangan pariwisata sangat signifikan sebagai sarana mendapatkan pemasukan devisa negara, pembangkitan ekonomi masyarakat lokal, mengangkat citra dan identitas bangsa, serta pelestarian kawasan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Saat ini kontribusi devisa dari sektor pariwisata menurun hingga US\$ 4,4 miliar. Oleh karena itu, seharusnya sektor pariwisata tetap diperhatikan, terlebih lagi menjelang masuknya Indonesia pada ekonomi global seperti rencana AFTA tahun 2020 mendatang.

PK Sejahtera mencanangkan agenda-agenda strategis bagi keberlangsungan pariwisata Nusantara:

Pertama, mewujudkan pariwisata Nusantara yang dapat mendorong cinta Tanah Air. Bangsa Indonesia diharapkan secara umum dapat menjadi insan pariwisata yang secara sadar akan kekayaan budaya dan memiliki jiwa untuk mempromosikan wisata dalam negeri di mana saja berada.

Kedua, meningkatkan pemerataan dan keseimbangan dalam pengembangan tujuan pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Pelestarian dan kearifan terhadap keberadaan *local knowledge* dan masyarakatnya turut memperkaya tujuan wisata dalam negeri. Selain itu, semangat otonomi daerah dapat mendukung pengembangan pariwisata yang memiliki kekhasan dan keanekaragaman budaya setempat dengan pengelolaan ekonomi yang mandiri.

Ketiga, meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional. Devisa negara yang masih kurang memadai dapat meningkat dengan tambahan devisa dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Kondisi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat pada sektor riil.

Keempat, meningkatkan produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif. Ekspresi kebudayaan yang dituangkan

dalam hasil kerajinan Nusantara, berbagai pagelaran kesenian, pertunjukan upacara adat, maupun keanekaragaman cita rasa kuliner turut menjadi daftar obyek wisata yang dicari banyak orang. *Kelima*, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pengembangan pariwisata adalah keberadaan masyarakat lokal sebagai ‘pemilik’ lingkungan dan kebudayaan. Jangan sampai lingkungan hidup yang ada tercemar polusi oleh wisatawan yang datang. Begitu pula dengan kondisi masyarakat lokal yang pada akhirnya terlupakan oleh pemilik kapital. Padahal, masyarakat merupakan salah satu agen pembangun dan pendukung terciptanya tujuan wisata.

8.6.4. Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera dengan standar kehidupan yang layak dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai indikator tingginya Kualitas Pembangunan Manusia. Strategi pemberdayaan masyarakat yang terpadu diperlukan demi proses pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan, menurut pandangan kaum ekonom ortodoks, dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya menggunakan pendapatan domestik bruto (PDB) sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Data statistik tidak bermakna apa-apa bagi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan,. Pada beberapa kasus negara berkembang, pertumbuhan PDB tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara meluas.

Gejala kemiskinan di Indonesia masih sulit ditangani. Dari tahun ke tahun angka kemiskinan tetap tinggi, walaupun kinerja ekonomi makro makin membaik. Karena itulah, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia jadi rendah, berada pada urutan 110 dari 177 negara (2005). Kemiskinan alami dan pemiskinan secara struktural melahirkan dampak yang sangat luas dan membahayakan stabilitas dan integritas bangsa. Kondisi rentan akan menjadi lahan subur berkembangnya masalah sosial, antara lain merebaknya fenomena anak jalanan, tidak terjangkaunya layanan kesehatan dan pemenuhan kesejahteraan, dan meningkatnya tuna wisma. Jumlah

masyarakat yang harus dipelihara negara semakin meningkat, sedang kapasitas yang ada terbatas.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia dikarenakan mahalannya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga banyak anak usia sekolah yang tak tertampung. Jika terselenggara pendidikan murah, penyelenggara pendidikan hanya memperhatikan hal yang bersifat teoretik standar, tanpa memperhatikan ilmu-ilmu terapan yang bermanfaat menunjang keterampilan.

Kebijakan pemerintah belum maksimal berpihak pada sektor mikro ekonomi, akibatnya angka pengangguran semakin meningkat, jumlah orang yang disubsidi pendapatannya semakin banyak. Tingkat penyerapan tenaga kerja amat minim karena pertumbuhan sektor riil yang sangat lambat dan investasi baru tak kunjung mengalir. Negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar warganya agar bebas dari kemelaratan harus berinisiatif mendorong setiap warga mencari jalan menuju sejahtera. Kebijakan pembangunan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek pembangunan sosial. Kesejahteraan masyarakat ini dapat dicapai dengan usaha bersama pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh dengan jalan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar individu, kelompok ataupun komunitas berusaha menata kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Cita-cita luhur PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan membedakannya dengan entitas dengan ciri khas menebarkan kebajikan kepada semua kelompok masyarakat, antara lain melalui: *Pertama*, mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia yang signifikan sebagai bentuk indikator kesejahteraan, dengan memunculkan peluang kerja bagi masyarakat berusia produktif. Terbukanya peluang usaha menengah kecil berbentuk plasma-plasma usaha, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan

munculnya sistem serta sarana pendidikan yang mendukung bidang kewirausahaan berskala besar.

Kedua, melahirkan SDM yang berkualitas baik dari sisi moral, mental dan spiritual dengan mengedepankan etika serta nilai-nilai agama sebagai aturan hidup. Hal ini dapat dicapai melalui terbentuknya sarana dan prasarana pendidikan murah dan berkualitas, pembangunan semangat berwirausaha; dengan memadukan asas profesionalitas, amanah, berakhlak mulia dan berdedikasi terhadap masalah-masalah pemberdayaan.

Ketiga, mewujudkan kebijakan mikro ekonomi yang mendukung tumbuh-kembangnya dunia usaha dengan memperbaiki regulasi mikro dan makro ekonomi secara komprehensif. Pemberian modal usaha melalui pinjaman yang lebih berpihak dengan mengedepankan prinsip keadilan. Hal itu dapat diperkuat dengan pengembangan potensi lokal sebagai bentuk pemberdayaan riil di setiap daerah, karena potensi dan kekayaan yang beragam memenuhi bumi Nusantara.

Keempat, mendorong terbentuknya kelompok pemberdayaan masyarakat (KPM) yang menjalankan fungsi utama peningkatan kesejahteraan seperti di bidang kesehatan melalui penanganan kesehatan secara preventif dan sarana kesehatan yang unggul dari sisi kuratif. KPM ini harus terorganisir rapi, efektif, terukur dan menghasilkan kemajuan diawasi setiap berkala oleh para penentu kebijakan dan pemegang kepentingan. KPM yang telah terbentuk memerlukan pendampingan yang dari segi organisasi, keuangan, pengayaan program dan kualitas program, serta pemuasan layanan kepada masyarakat. KPM yang telah teruji akan berperan dalam penyaluran bantuan permodalan baik yang berasal dari APBN, tanggung-jawab sosial perusahaan, filantropi dan kesertaan dana masyarakat.

Kelima, penataan wilayah dengan pembinaan komunitas secara terpadu hingga setiap wilayah menjalankan jasa yang bersifat multisektoral dan disertai dengan penyamaan persepsi terhadap tanggung jawab bersama. Pemahaman sosial diimbangi dengan pemahaman keagamaan yang mencukupi, sehingga melahirkan skema pemberdayaan terpadu.

8.6.5. Kepeloporan Pemuda

Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, menjadikannya bersikap mandiri dan berdaya guna, serta mempersiapkan kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam sejarah bangsa, pemuda senantiasa mengambil peran menentukan. Pada masa penjajahan, kaum muda dari berbagai daerah di Nusantara menyemai bibit persatuan dan kesatuan dalam bingkai "Sumpah Pemuda" (1928), lalu di masa kemerdekaan kaum muda tampil sebagai generasi pembebas, sehingga revolusi 1945 dikenal sebagai "Revolusi Pemuda". Pada tahun 1966, kaum muda memelopori peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Namun, penyimpangan kekuasaan pada masa itu, mendorong pemuda kembali bergerak meluruskan bangsa lewat "Gerakan Reformasi 1998".

Fakta di atas, menunjukkan bahwa generasi muda dalam masyarakat menempati posisi sentral dan strategis. Semua bangsa di dunia mengakui semangat pemuda sebagai sumber daya bangsa yang mampu mengerjakan hal-hal luar biasa termasuk sebagai faktor perubahan yang fundamental. Maka, investasi terbesar yang harus dilakukan suatu bangsa demi kemajuan dan kejayaan di masa mendatang adalah pemberdayaan pemuda.

Sahabat Nabi, Umar ra pernah berucap, "*Barangsiapa ingin menggegam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya*". Siapa yang memiliki pemuda akan menguasai masa depan, sehingga jargon "pemuda adalah harapan bangsa" bukan hanya mitos atau retorika, melainkan sebuah keniscayaan sejarah. Sesungguhnya di tangan pemuda terletak nasib umat dan dalam keberaniannya terletak hidup bangsa.

Akan tetapi, dewasa ini banyak pemuda kehilangan jati diri, tidak punya identitas dan hanyut dalam arus globalisasi tanpa keinginan atau kemampuan untuk menyaring mana yang baik dan mana yang

buruk. Pemuda cenderung larut dalam pragmatisme dan hedonisme, jauh dari produktifitas dan kapasitas sesungguhnya sebagai penopang bangsa.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa ini sejak awal reformasi berdampak pada tingginya tingkat pengangguran kalangan muda, termasuk pemuda berpendidikan tinggi. Masalah sosial di kalangan pemuda pun meningkat, seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan NAPZA, penyebaran HIV/AIDS, dan kejahatan prostitusi. Dampak globalisasi yang mengusung ragam teknologi dan informasi dengan akses mudah, cepat dan murah menjadi isu utama penyebab meningkatnya kenakalan pemuda (*juvenile delinquency*) dan degradasi moral.

Negeri ini perlu melahirkan kebijakan nasional bagi pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan. Kebijakan itu bertumpu dalam bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi. Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terpuruknya moral pemuda, PK Sejahtera menetapkan sejumlah upaya:

Pertama, penanggulangan masalah sosial dan moral generasi muda dengan melakukan beragam aktivitas sosial dan mengembangkan inovasi dalam kegiatan dakwah.

Kedua, pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat dengan membentuk keterampilan mandiri dalam berwirausaha dan memimpin komunitas, serta membina kreasi dan prestasi para pemuda.

Ketiga, persiapan kader-kader pemuda untuk memimpin bangsa Indonesia dengan melakukan berbagai pelatihan kepemimpinan dan mendorong para pemuda dalam interaksi konstruktif antar lembaga-lembaga kepemudaan Indonesia.

Sudah saatnya negara memberikan perhatian khusus kepada kelompok pemuda untuk menghadapi berbagai tantangan di masa datang. Bangsa yang melalaikan potensi kepemudaannya akan segera menjemput kehancurannya. Cukupilah sejarah peradaban

dunia menjadi saksi, betapa bangsa-bangsa besar akhirnya runtuh akibat rendahnya kualitas generasi muda mereka, karena sudah menjadi aksioma sejarah, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.

8.6.6. Olah Raga

Membangun manusia Indonesia yang sehat dan kuat jasmani serta memiliki karakter kepemimpinan, pekerja keras, berdisiplin, suka bekerjasama dan sportif melalui aktivitas olahraga. Menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Mendukung upaya memajukan olahraga prestasi sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di pentas regional maupun internasional.

Unsur fisik dalam diri manusia merupakan aspek duniawi dan bersifat sementara, akan tetapi keberadaannya sangat menentukan perjalanan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Perjalanan hidup manusia sangat ditentukan dari tingkat keimanan, sementara aktualisasi nilai-nilai keimanan berada pada wilayah jasadi. Sehingga, ketidakseimbangan dalam memberi perhatian pada aspek fisik dan ruhani akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan. Kekuatan suatu bangsa dalam pengertian yang menyeluruh tidak datang begitu saja, melainkan didapatkan dengan susah payah melalui pembinaan fisik dan mental secara terus menerus dengan kaidah-kaidah ilmiah dan praktis. Untuk menjadi bangsa yang kuat, maka olahraga berperan sebagai sarana pembinaan fisik dan harus menjadi bagian dari aktivitas bangsa Indonesia sejak usia dini hingga usia lanjut.

Pemenuhan tugas itu bukan hanya tanggungjawab pribadi, melainkan menjadi tanggung jawab institusi negara untuk mengarahkan, memfasilitasi dan mengevaluasinya. Pembinaan jasmani didasarkan pada anugerah kemerdekaan, keadilan, dan keseimbangan yang menjadi potensi dasar manusia sebagai makhluk bermoral. Untuk itu setiap individu harus mampu

mencegah dirinya dikalahkan oleh godaan-godaan duniawi yang bersifat materialistik-individualistik. Sebaliknya, setiap individu dilarang menempuh jalan pertapaan yang melepaskan keduniawian atau menyiksa diri sendiri. Rasulullah Saw berpesan, *“Sebaik-baik kalian adalah orang yang tidak meninggalkan urusan akhiratnya demi kepentingan dunianya, dan tidak pula meninggalkan urusan dunianya dalam kepentingan akhiratnya, serta tidak menjadi beban bagi orang lain.”*

PK Sejahtera bersama elemen bangsa lainnya berupaya mewujudkan bangsa yang sehat dan berprestasi di tingkat domestik, regional, maupun internasional dengan tujuh langkah strategis:

Pertama, mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan merombak secara mendasar pola pembinaan atlit yang selama ini ada. Prestasi atlit Indonesia dalam pentas olahraga di tingkat regional apalagi internasional sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun makin terpuruk, bahkan di tingkat Asia Tenggara saja kita tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Karena itu, harus dilakukan terobosan untuk mendongkrak prestasi kolektif melalui pemusatan latihan yang terpadu.

Kedua, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan menata ulang manajemen dan sistem kompetisi. Pola-pola koruptif dalam pengelolaan kegiatan olahraga harus segera dihilangkan. Semangat mengikuti kompetisi hanya untuk mengejar target perolehan medali saja harus segera diubah, karena akan memunculkan pembajakan atlit dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kompetisi tidak meningkatkan prestasi, tapi hanya pertukaran medali dari satu daerah ke daerah lain.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para atlit dengan memberikan jaminan masa depan mereka (semisal beasiswa, bantuan perumahan, dana pensiun, dan lapangan kerja), sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dalam berlatih, tanpa rasa takut terhadap masa depan mereka selepas mereka pensiun.

Keempat, mendorong pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembinaan olah raga. Keterlibatan sektor swasta dapat dipicu dengan memberikan penghargaan berupa kepastian regulasi dari sisi pajak atas sumbangan yang telah diberikan sebagai biaya yang dibebankan (*deductible expense*). Besarnya tuntutan atas pengembangan olahraga di tanah air tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.

Kelima, mendorong olahraga menjadi sarana untuk pemulihan atau pembebasan ketegangan (*stress relief*) setelah kita merasa penat bekerja terus-menerus. Melalui kegiatan olahraga dan rekreasi, kita dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap olahraga, serta dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan akibat bekerja keras, sehingga selalu segar untuk terus membangun bangsa dalam berbagai profesi.

Keenam, mendorong olahraga menjadi sarana membentuk jiwa sportivitas, berdisiplin, suka bekerjasama, dan berjiwa kepemimpinan. Kegiatan olahraga permainan bila dikemas secara menarik dan atraktif akan menumbuhkan karakter positif.

Ketujuh, mendorong pemerintah untuk menyadarkan masyarakat untuk melakukan olahraga sejak dini, serta membangun sarana dan prasarana olahraga agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pembinaan fisik.

8.6.7. Perempuan Indonesia

Dengan bingkai takwa mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui upaya mengefektifkan kerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan perlu diperhatikan sebelum membicarakan kesetaraan perempuan dengan kaum lelaki dari sisi sebagai keadilan dan kesamaan dalam berkarya. Dalam pandangan PK Sejahtera, kaum perempuan

memiliki peran dan tanggung jawab yang terbingkai dalam pemikiran berikut:

1. Kaum perempuan merupakan mitra hidup kaum laki-laki yang harus bekerja sama secara harmonis dan saling mengokohkan;
2. Kerjasama antar jenis harus ditujukan dalam kerangka menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam arti yang seluas-luasnya;
3. Kerjasama itu harus berada di atas landasan ketakwaan yang diindikasikan dengan penunaian hak ubudiyah kepada Allah SWT, maupun hak muamalah kepada manusia.

Berangkat dari filosofi tersebut, maka menjadi sebuah konsekuensi logis bagi PK Sejahtera untuk memperjuangkan kaum perempuan Indonesia agar dapat memiliki semua kualifikasi untuk mengoptimalkan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara. Kualifikasi yang dimaksudkan adalah: *bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya*.

Permasalahan kaum perempuan Indonesia saat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari krisis multidimensi yang berakar dari akumulasi krisis moralitas. Krisis ini telah memporakporandakan tatanan kemasyarakatan yang ada dan melahirkan berbagai penyakit sosial yang rumit jalan keluarnya. Pada saat yang sama, krisis tersebut bertemu dengan perhatian dunia terhadap kondisi kaum perempuan di negara-negara ketiga. Maka secara serentak mengemuka berbagai isu terkait dengan ketidakberdayaan perempuan, seperti isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, keterbatasan akses ekonomi, kendala dalam pengambilan kebijakan publik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, serta isu lain.

Beberapa indikator permasalahan kaum perempuan mendesak untuk dicari jalan keluarnya. Masalah kemiskinan dan kesehatan terlihat dari angka kematian ibu dan balita yang masih tinggi. Di sektor pendidikan, angka buta huruf kalangan perempuan masih lebih banyak dari pria. Media televisi yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat belum menunjukkan komitmennya

sebagai sarana pendidikan yang efektif, tetapi lebih berperan sekadar mesin bisnis hiburan yang acap melecehkan martabat perempuan.

Masalah lain yang mendesak adalah kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, dan perkosaan yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan serius lain adalah terjadinya kekerasan di berbagai wilayah konflik seperti di Aceh, Poso, Maluku, Sampit dan wilayah lain. Konflik komunal menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak.

PK Sejahtera berkomitmen untuk terlibat aktif dalam penyelesaian masalah perempuan, apalagi lebih dari 54% pemilih adalah kalangan perempuan. PK Sejahtera memiliki jumlah kader, simpatisan maupun pengurus perempuan yang cukup signifikan. Untuk itu PK Sejahtera berupaya mengefektifkan sistem yang ada pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar bekerja lebih baik dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan. Disamping itu, digalang kebersamaan partai politik, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam memperjuangkan isu penting tersebut.

Langkah strategis yang ditempuh PK Sejahtera dalam menuntaskan permasalahan perempuan Indonesia adalah:

Pertama, mewujudkan perempuan Indonesia yang **bertaqwa**. Ketakwaan harus menjadi ruh dalam diri perempuan Indonesia karena merupakan jaminan bagi kebahagiaan lahir-bathin. Oleh karenanya harus ada gerakan bersama untuk menjadikan *nilai-nilai ketakwaan sebagai ciri kebanggaan perempuan Indonesia*. Upaya yang dilakukan: a) memperjuangkan hak perempuan Indonesia untuk dapat menjalankan syariat sesuai dengan agamanya; b) memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat pendidikan dan bimbingan beragama; c) tersedianya dukungan dan alokasi dana kegiatan keagamaan dan bimbingan beragama bagi perempuan Indonesia.

Kedua, mewujudkan kehidupan yang **sejahtera** bagi perempuan Indonesia. PK Sejahtera meyakini bahwa tanpa jaminan

kesejahteraan bagi warganya, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM akan menemui hambatan. Untuk itu PK Sejahtera memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia untuk dapat hidup lebih sejahtera melalui: a) peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin, khususnya bagi keluarga janda; b) pemenuhan gizi ibu hamil/menyusui melalui program tunjangan ibu hamil dan menyusui; c) jaminan sosial bagi ibu melahirkan mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi; d) upah kerja yang adil bagi perempuan sesuai standar profesionalisme; e) mengupayakan jam kerja yang ramah bagi pekerja perempuan; f) mengupayakan fasilitas umum yang ramah perempuan; g) mengupayakan jaminan hukum yang tegas atas pelanggaran harkat dan martabat perempuan; g) jaminan sosial bagi ibu dan anak korban kekerasan oleh negara.

Ketiga, mewujudkan perempuan Indonesia yang **cerdas**. Untuk itu PK Sejahtera akan memperluas akses perempuan dalam: a) meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan intelektualnya baik formal maupun informal; b) memperoleh bantuan dana pendidikan bagi perempuan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas dan atau yang sederajat; c) pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan fitrah perempuan; d) membangun dan membudayakan jiwa wirausaha perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.

Keempat, mewujudkan perempuan Indonesia yang **berdaya**. Partisipasi konstruktif perempuan di wilayah publik secara proporsional sangat dinantikan oleh masyarakat. Untuk itu PK sejahtera akan mendorong perempuan Indonesia agar: a) mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi melalui gagasan dan karya yang positif bagi kemajuan bangsa; b) mampu bersikap kritis pada kebijakan publik yang merugikan dan mengancam kehidupan berbangsa; c) meningkatkan peran perempuan di lembaga pengambil kebijakan dan memberikan jaminan bagi penyaluran aspirasi/kepentingan perempuan dan keluarga; d) memiliki kemampuan mengangkat harkat dan martabat perempuan serta melakukan pembelaan atas pelanggaran yang ada; e) mampu

melakukan penolakan atas upaya-upaya eksploitasi perempuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Kelima, mewujudkan perempuan Indonesia yang **berbudaya**. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tumbuh dengan kultur yang sarat dengan nilai-nilai religi. Nilai ini yang menjadi kebanggaan kita secara turun temurun. Untuk itu PK Sejahtera akan mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mempertahankan ciri budaya Indonesia melalui: a) meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan ciri budaya Indonesia sebagai bangsa yang religius; dan b) mengembangkan atmosfer budaya yang memuliakan dan mengangkat harkat/martabat perempuan.

PK-Sejahtera meyakini bahwa hanya melalui upaya peningkatan kualitas SDM suatu bangsa akan tegak sebagai bangsa yang jaya dan terhormat. Perempuan adalah setengah dari sumber daya manusia tersebut, maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya: lahir dan batin, dunia dan akhirat.

8.6.8. Pembinaan Keluarga

Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.

Keluarga adalah unit terkecil dan terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama pembentukan generasi yang akan menentukan corak peradaban bangsa. Namun kenyataannya, transformasi sosial-budaya yang demikian cepat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam komunitas terkecil itu. Masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang kuat. Namun, nilai-nilai tersebut kini semakin melemah, karena tidak terbangunnya sistem ketahanan keluarga yang solid.

PK Sejahtera memandang bahwa lingkungan sosial terkecil yang egaliter menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai keadilan. Namun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga Indonesia demi memenuhi tugas itu. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan akibat lemahnya akses keluarga terhadap berbagai fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka. Beragam permasalahan muncul hingga mencapai tingkat mengkhawatirkan. Situasi ini menggambarkan kondisi keluarga di tengah masyarakat yang sakit, karena tiadanya tata nilai yang menjadi landasan bersama.

Selain itu banyak masalah yang merusak kelangsungan keluarga, antara lain: kekerasan di rumah terhadap anggota keluarga, kehilangan keteladanan orang tua, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, serta maraknya pelacuran anak dan remaja. Buat sebagian kalangan, perilaku hidup bersama (seks bebas) tanpa ikatan pernikahan dianggap bukan penyimpangan, sehingga angka aborsi meningkat tajam. Fenomena lain adalah melemahnya nilai-nilai persaudaraan dan ikatan keluarga. Hal itu ditandai dengan perpecahan (perceraian) keluarga, hilangnya rasa aman dan keringnya kasih sayang, kekerasan terhadap sesama anggota keluarga, serta eksploitasi anak menjadi pencari nafkah.

PK Sejahtera memandang terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera ditentukan oleh terbangunnya keluarga-keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah berarti keluarga yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, baik yang

bersifat lahiriah maupun batiniah, dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Kebutuhan lahiriah antara lain meliputi: pangan, sandang, kesehatan, dan perumahan. Sedangkan kebutuhan batiniah berupa: pendidikan, rasa aman, kasih sayang, dan bekal spiritual keagamaan.

Dalam Islam keluarga merupakan salah satu infrastruktur bagi masyarakat manusia dan tatanan moral dalam mewujudkan tujuan konsep-konsep kekhilafahan di muka bumi. Hal yang terpenting dalam keluarga adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini menjadi asas interaksi suami dan isteri, anak dan orang tua, kakek-nenek dan cucu-cicit, serta para anggota keluarga lainnya dalam lingkup keluarga yang lebih besar. Oleh sebab itu, dasar membangun keluarga adalah kehendak Ilahi untuk mengabdikan pada-Nya dan memperjuangkan nilai Islam dengan satu kesadaran bahwa semua manusia akan kembali kepada-Nya.

Sebagai partai yang peduli dengan keutuhan dan kelangsungan keluarga, PK Sejahtera menjalankan konsep “Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya” .

Pertama, sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga, baik secara lahir maupun batin.

Kedua, berkualitas, yakni memiliki ciri-ciri keluarga yang kuat dan kokoh dari sisi keimanan dan ketakwaan, moralitas serta intelektual, sehingga mampu melahirkan generasi yang sanggup memberikan pencerahan pada masyarakat.

Ketiga, berdaya, artinya mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan, serta dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitarnya.

8.6.9. Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama

Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hambadan khalifah Allah dengan metoda keteladanan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

Kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di masa lalu merupakan kondisi semu yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang berkuasa. Kenyataannya, di masa transisi terjadi konflik horizontal maupun vertikal muncul di berbagai daerah. Jika dirunut, konflik-konflik tersebut dilatar-belakangi oleh sentimen suku, ras dan agama; disamping ketimpangan ekonomi dan provokasi politik.

Fakta-fakta kekerasan dan konflik yang mengandung sentimen agama terlihat dalam tragedi Maluku dan Poso. Konflik tersebut tidak mendapat penyelesaian tuntas sampai ke akarnya, akibatnya setelah reda, maka konflik dengan akar yang sama masih mungkin terjadi. Pada beberapa kelompok gerakan, ditemukan nuansa arogansi mayoritas dalam aktivitasnya. Kelompok semacam ini menggunakan pendekatan represif dalam memerangi sesuatu yang dianggap salah dalam standar mereka. Perang terhadap “sesuatu yang salah” yang diusung memang tercapai, namun tidak melalui cara-cara yang bijak dan menafikan peran hukum dan aparatnya. Konsep arogansi mayoritas semacam ini tidak ada dalam Islam, karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Tetapi, Islam juga mengajarkan tidak boleh mendiamkan suatu kezaliman, meskipun hanya bersifat kecil, karena itu harus dilawan dan dicegah.

Konflik bermuatan SARA semakin membara di tengah maraknya terorisme global, yang melahirkan pola interaksi antara tekanan internasional dan gejolak domestik Indonesia. Secara langsung atau tidak, larangan berkunjung (*travel warning*) oleh sejumlah negara untuk warganya agar tidak datang ke Indonesia menandakan bahwa

negara kita dinilai tidak aman (*high risk security*). Kita harus mengakhiri situasi yang menekan itu dengan cara menciptakan kedamaian atas inisiatif bersama dan berkomunikasi efektif dengan dunia luar.

Masalah yang membelit bangsa ini begitu kompleks, dan jika ditelaah lebih jauh, penyebabnya tak lain adalah keringnya ruhani dari petunjuk Ilahi. Agama buat sebagian orang tak lebih dari sekadar status atau ritual. Tingkat kesadaran pemeluk agama untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan masih rendah, sehingga perilaku dalam bermasyarakat, bekerja, bahkan bernegara seolah tak berhubungan dengan nilai-nilai religius.

Melihat realita di atas, perlu dimunculkan sebuah gerakan penyadaran dalam menyebarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam Islam, kegiatan tersebut disebut *dakwah*, yakni upaya aktif, terencana dan menyeluruh agar umat manusia kembali menemukan jati dirinya (fitrah) sebagai hamba Allah yang saleh dan peduli dengan sesama. Dari produk dakwah seperti itu akan lahir generasi pengusung beban bangsa menuju *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang adil makmur serta diridloi Allah).

Terjadinya friksi, konflik dan ketidaksamaan pandangan antara para penganut agama-agama selama ini dikarenakan perbedaan latar belakang. Sebagai “agama damai” (*Din as Salam*), Islam memiliki karakter anti-kekerasan dan anti-kerusakan di muka bumi. Penerapan ajaran Islam yang benar tidak akan menimbulkan diskriminasi bagi pemeluk agama lain, karena sebagai sesama warga negara semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal itu juga tercantum dalam “Piagam Madinah” yang dirumuskan Nabi Muhammad Saw dan dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, yang menjamin penuh kebebasan untuk menjalankan syariat masing-masing agama.

Sentuhan dakwah yang paripurna sangat dinanti bangsa ini, karena permasalahan mendasar yang menjadi benang kusut bangsa terletak pada moralitas warga, terutama moralitas para elite pemimpinnya. Di sektor mana pun – birokrasi, legislatif, penegak

hukum, pelaku ekonomi, hingga komponen bangsa yang terkecil – terlihat gejala runtuhnya moral.

Sisi baik dan buruk, memang secara fitrah ada pada diri manusia. Saat manusia pertama, Adam, hidup di muka bumi, benih-benih kebaikan dan kejahatan telah ada dalam diri manusia. Potensi positif dan negatif inilah yang membentuk peradaban manusia. Dalam kisah kehidupan manusia, tampil peradaban yang disinari oleh agama-agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Disamping itu muncul pula peradaban-peradaban agama non-wahyu, seperti Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dan sejenisnya. Memang dalam perkembangannya, agama-agama besar akan selalu tampil dengan kecenderungan kuat membentuk sebuah entitas tersendiri yang melahirkan praktik keagamaan yang begitu sentral dalam kehidupan individu dan sosial para pengikutnya. Namun perbedaan cara pandang dalam kehidupan, antara agama satu dengan yang lain adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu mestinya yang terbingkai dalam persamaan nilai-nilai kebajikan universal.

Gerakan penyadaran atas perbedaan ini, dibingkai oleh PK Sejahtera dengan berlandaskan pada toleransi antar umat beragama, sesuai dengan pangamalan sila pertama Pancasila. Sifat-sifat kebajikan universal digunakan sebagai alat pemererat kerukunan antar umat beragama. Karena itulah, PK Sejahtera menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam proses menyadarkan, mencontohkan, menyeru, dan membentuk warga bangsa ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat dan taat kepada Tuhannya, dan juga berguna bagi masyarakat sekelilingnya.

Setidaknya ada empat prinsip dalam melaksanakan kerja pembinaan – menyadarkan, mencontohkan, menyeru, dan membentuk kepribadian – sebagai pola dakwah yang patut terus dikembangkan. Seruan Islam ditujukan bagi kalangan yang mulai menjauh dari nilai-nilai *ilahiyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan) yang suci. Seruan itu mengungkapkan subyek dan obyek dakwah berlaku bagi semua kelompok. Bagi mereka yang telah memahami pesan utama Islam, maka pelaksanaan ibadah dan penegakan syariah merupakan perkara yang lazim.

PK Sejahtera memandang kebebasan beragama dan berserikat berserikat tidak hanya sebagai hak, melainkan juga kewajiban untuk saling melindungi antar individu beragama bagian dari tonggak utama pembangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang dianut. Atas dasar itulah PK Sejahtera bertekad mampu memberi bekal atas hak-hak beragama agar dapat mengarahkan perilaku yang menentukan hubungan antar manusia atas dasar keadilan.

Langkah strategis PK Sejahtera:

Pertama, menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam menyadarkan, mencontohkan, menyeru, dan membentuk warga bangsa ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat dan taat kepada Tuhannya.

Kedua, mengembangkan suasana saling memahami, saling menghargai, dan tolong menolong dalam kebajikan sebagai dasar utama pembinaan hubungan antar umat beragama. Setiap pemeluk agama wajib melaksanakan keyakinan masing-masing tanpa saling melecehkan.

Ketiga, dengan upaya yang terus-menerus tanpa mengenal lelah, memberikan kontribusi terbaik buat umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Agar seluruh komponen bangsa tampil sebagai manusia-manusia yang amanah, baik kepada Tuhannya maupun masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam AD/ART, adalah *“Terwujudnya Masyarakat Madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Pengertian genuin dari Masyarakat Madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI.

Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera, merupakan penjabaran dari *Falsafah Dasar Perjuangan*, adalah dokumen yang merefleksikan visi, misi, strategi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan Indonesia, dalam upaya *memperjuangkan Masyarakat Madani*. Dengan demikian, platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan akan menjadikan semua aset dakwah PK Sejahtera di semua sektor kehidupan, dapat diberdayakan dan didaya gunakan (*istighlallil amtsal* aset dakwah), bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik menjadi efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen partai, dan masyarakat.